

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

**(RPJPD)**

KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN 2025-2045





BUPATI TANA TORAJA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
dan  
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Toraja
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tana Toraja.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang nasional.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur pola ruang Kabupaten Tana Toraja.

#### Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW.

### Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
  - d. visi dan misi Daerah;
  - e. arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
  - f. penutup.
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

### Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 8 November 2024

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 8 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



RUDHI ANDILOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.05.106.24.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025 - 2045

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberi arah dan tujuan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan Peraturan daerah tentang RPJPD ini, Pemerintah Daerah berpedoman pada Landasan Idiil yaitu Pancasila, Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Landasan Operasional yang meliputi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tana Toraja serta mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.

RPJPD Kabupaten Tana Toraja memuat Visi yaitu *"Tana Toraja Produktif, Maju dan Berkelanjutan"*, dengan harapan dapat mewujudkan keinginan masyarakat Tana Toraja dengan tetap mengacu pada pencapaian Tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja setiap lima tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024  
NOMOR 38





## KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dokumen RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 memuat rumusan visi dan misi Kabupaten Tana Toraja dua puluh tahun ke depan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah.

RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 ini disusun berdasarkan kajian akademis serta jaring aspirasi (FGD) dengan pemerintah daerah. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gagasan strategis Kabupaten Tana Toraja 2045 yang Produktif, Maju dan Berkelanjutan. Dokumen ini terdiri atas enam bab yang terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, Visi Misi Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah serta Penutup.

Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tana Toraja dan mendorong partisipasi seluruh pihak untuk turut aktif mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang. Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Dokumen RPJPD ini.

**Kepala BAPPELITBANGDA  
Kabupaten Tana Toraja**



**FRANSINETTY RESTU, SH. M.Si.  
Nip. 19730417 199803 2 006**



## Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>I - 1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I - 7
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I - 10
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I - 12
1.5. Sistematika Dokumen.....	I - 13
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>II - 1</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 1
2.1.1 Aspek Geografi.....	II - 1
2.1.2 Aspek Demografi .....	II - 24
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II - 32
2.2.1 Aspek Kesejahteraan Ekonomi .....	II - 32
2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II - 42
2.3. Aspek Daya Saing Daerah .....	II - 61
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II - 61
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia .....	II - 72
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	II - 83
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi .....	II - 86
2.4. Aspek Pelayanan Umum .....	II - 90
2.4.1 Indeks Reformasi Hukum .....	II - 91
2.4.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .....	II - 92
2.4.3 Survei Kepuasan Masyarakat .....	II - 92
2.4.4 Survei Penilaian Integritas (SPI).....	II - 93
2.4.5 Indeks Maturitas SPIP .....	II - 95
2.4.6 MCP KPK .....	II - 96
2.4.7 Persentase Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Dan Bersih Melayani (WBBM) Pemerintah Kabupaten .....	II - 97
2.4.8 Indeks Reformasi Birokrasi .....	II - 97
2.4.9 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah .....	II - 98



2.4.10	Indeks Inovasi Daerah .....	II - 99
2.5.	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2010 – 2030 .....	II - 100
2.5.1	Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2010-2030 .....	II - 100
2.5.2	Rekomendasi terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 .....	II - 102
2.6.	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik .....	II - 108
2.6.1	Proyeksi Demografi Kabupaten Tana Toraja .....	II - 108
2.6.2	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Publik ...	II - 120
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah .....	II - 152
2.7.1	Kawasan Peruntukan Lindung .....	II - 153
2.7.2	Kawasan Konservasi .....	II - 159
2.7.3	Kawasan Cagar Budaya .....	II - 159
2.7.4	Kawasan Peruntukan Budidaya .....	II - 160
2.7.5	Kawasan Pertambangan dan Energi .....	II - 167
2.7.6	Kawasan Pariwisata .....	II - 167
2.7.7	Kawasan Permukiman .....	II - 170
2.7.8	Kawasan Transportasi .....	II - 172
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>III - 1</b>
3.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah .....	III - 1
3.2.	Isu Strategis .....	III - 6
<b>BAB IV</b>	<b>VISI DAN MISI DAERAH .....</b>	<b>IV - 1</b>
4.1.	Visi .....	IV - 1
4.2.	Sasaran Visi .....	IV - 3
4.3.	Misi .....	IV - 4
<b>BAB V</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH .....</b>	<b>V - 1</b>
5.1.	Arah Kebijakan .....	V - 1
5.2.	Sasaran Pokok Pembangunan Daerah .....	V - 12
5.2.1	Sasaran Pokok .....	V - 12
5.2.2	Arah Pembangunan Daerah .....	V - 17
5.2.3	Arah Kebijakan Transformasi .....	V - 21
5.2.4	Indikator Utama Pembangunan Daerah .....	V - 36
5.3.	Arah Pembangunan Kewilayahan.....	V - 50
5.3.1	Kawasan Strategi Kabupaten .....	V - 50
5.3.2	Pengembangan Struktur Ruang .....	V - 54
<b>BAB VI</b>	<b>P E N U T U P .....</b>	<b>VI - 1</b>



## Daftar Tabel

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023.....	II - 3
Tabel 2.2	Luasan Sebaran Topografi di Kabupaten Tana Toraja.....	II - 4
Tabel 2.3	Luas Sebaran Kemiringan Lereng di Kab. Tana Toraja .....	II - 5
Tabel 2.4	Sebaran Luas DAS di Kabupaten Tana Toraja.....	II - 7
Tabel 2.5	Curah Hujan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2023...	II - 9
Tabel 2.6	Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2023.....	II - 9
Tabel 2.7	Luas Persebaran Curah Hujan menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja.....	II - 10
Tabel 2.8	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak di Kab. Tana Toraja, Kabupaten Sekitar, Prov. Sulsel Dan Nasional Tahun 2015 – 2023.....	II - 14
Tabel 2.9	Lokasi Potensi Relokasi Bencana Kabupaten Tana Toraja.....	II - 21
Tabel 2.10	Perkembangan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 – 2023....	II - 28
Tabel 2.11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2023.....	II - 54
Tabel 2.12	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitasi di Kab. Tana Toraja Tahun 2014 – 2023...	II - 56
Tabel 2.13	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 – 2023 .....	II - 65
Tabel 2.14	Indeks Desa Membangun Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 – 2023.....	II - 72
Tabel 2.15	Capaian Literasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2023...	II - 75
Tabel 2.16	Capaian Numerasi Kab. Tana Toraja Tahun 2022-2023.....	II - 77
Tabel 2.17	Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2023.....	II - 86
Tabel 2.18	Angka Kriminalitas Kab. Tana Toraja Tahun 2020 – 2023.....	II - 87
Tabel 2.19	Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 – 2023.....	II - 90
Tabel 2.20	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 - 2023.....	II - 93
Tabel 2.21	Rangkaian Ketercapaian Misi Pembangunan RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030.....	II - 103



Tabel 2.22	Usulan Tindak Lanjut Proses Perencanaan Untuk Misi 1 RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030 .....	II - 105
Tabel 2.23	Usulan Tindak Lanjut Proses Perencanaan Untuk Misi 2 RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030 .....	II - 105
Tabel 2.24	Usulan Tindak Lanjut Proses Perencanaan Untuk Misi 3 RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030 .....	II - 106
Tabel 2.25	Usulan Tindak Lanjut Proses Perencanaan Untuk Misi 4 RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030 .....	II - 107
Tabel 2.26	Usulan Tindak Lanjut Proses Perencanaan Untuk Misi 5 RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030 .....	II - 107
Tabel 2.27	Asumsi Proyeksi Demografi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 110
Tabel 2.28	Proyeksi Penduduk Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2025 dan 2045 (Jiwa).....	II - 118
Tabel 2.29	Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 121
Tabel 2.30	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 122
Tabel 2.31	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 124
Tabel 2.32	Standar Nasional Penyediaan Prasarana Persampahan.....	II - 125
Tabel 2.33	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2045 .....	II - 126
Tabel 2.34	Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan .....	II - 127
Tabel 2.35	Proyeksi Kebutuhan Posyandu di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 128
Tabel 2.36	Proyeksi Kebutuhan Balai Pengobatan Warga di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 129
Tabel 2.37	Proyeksi Kebutuhan BKIA / Klinik Bersalin di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 130
Tabel 2.38	Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 131
Tabel 2.39	Proyeksi Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 132
Tabel 2.40	Proyeksi Kebutuhan Tempat Praktek Dokter di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 133
Tabel 2.41	Proyeksi Kebutuhan Apotek /Rumah Obat di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 134



Tabel 2.42	Proyeksi Jumlah Rombongan Belajar, Jumlah Kelas, dan Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan PAUD Usia Di Atas 4 Tahun Sampai 6 Tahun di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 135
Tabel 2.43	Proyeksi Jumlah Rombongan Belajar, Jumlah Kelas, dan Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan SD Sederajat di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 138
Tabel 2.44	Proyeksi Jumlah Rombongan Belajar, Jumlah Kelas, dan Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan SMP Sederajat di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 141
Tabel 2.45	Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 143
Tabel 2.46	Rencana Pembangunan Ruas Jalan Lokal Primer di Kab. Tana Toraja Tahun 2024-2043 .....	II - 146
Tabel 2.47	Rencana Pembangunan Infrastruktur Jalan Lokal Sekunder di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024-2043 .....	II - 151
Tabel 2.48	Rencana Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkungan Primer di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024-2043 .....	II - 151
Tabel 2.49	Persebaran Hutan Lindung di Kabupaten Tana Toraja .....	II - 155
Tabel 2.50	Persebaran Kawasan Perlindungan Setempat di Kabupaten Tana Toraja .....	II - 156
Tabel 2.51	Persebaran Kawasan Hutan Produksi di Kab. Tana Toraja .....	II - 161
Tabel 2.52	Persebaran Kawasan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Tana Toraja .....	II - 162
Tabel 2.53	Persebaran Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Tana Toraja .....	II - 163
Tabel 2.54	Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Tana Toraja .....	II - 164
Tabel 2.55	Rencana Kawasan Pertanian Hortikultura di Kab. Tana Toraja ..	II - 165
Tabel 2.56	Luas dan Persebaran Kawasan Perkebunan di Kabupaten Tana Toraja .....	II - 166
Tabel 2.57	Luas dan Persebaran Kawasan Peternakan di Kabupaten Tana Toraja .....	II - 167
Tabel 2.58	Persebaran Kawasan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja.....	II - 168
Tabel 4.1	Keselarasn Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2045.....	IV - 2
Tabel 4.2	Keselarasn Sasaran Visi RPJPD Prov. Sulawesi Selatan dan RPJPD Kab. Tana Toraja 2025-2045 .....	IV - 3
Tabel 4.3	Sasaran Visi, Indikator dan Target setiap Tahapan RPJPD Kab. Tana Toraja 2025 - 2045 .....	IV - 4



Tabel 4.4	Keselarasan Misi RPJMN, RPJPD Prov. Sulawesi Selatan dan RPJPD Kab. Tana Toraja 2025 - 2045 .....	IV - 7
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Lima Tahunan Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	V - 8
Tabel 5.2	Keselarasan Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, RPJPD Prov. Sulawesi Selatan dan RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045.....	V - 18
Tabel 5.3	Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	V - 19
Tabel 5.4	Keterkaitan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan dengan Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045.....	V - 22
Tabel 5.5	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 dan Penyelarasannya dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Arah Pembangunan .....	V - 37
Tabel 5.6	Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Berdasarkan Tahapan Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045.....	V - 44



## Daftar Grafik

Grafik 2.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab. Tana Toraja Tahun 2018 – 2023 .....	II - 11
Grafik 2.2	Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak Kabupaten Kab. Tana Toraja, Prov. Sulsel dan Nasional Tahun 2018 - 2022.....	II - 15
Grafik 2.3	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Nasional, Prov. Sulsel dan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 – 2023 .....	II - 16
Grafik 2.4	Persentase Sampah yang Berkurangnya Melalui 3R di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 – 2023 .....	II - 17
Grafik 2.5	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah Kab. Tana Toraja Tahun 2018 - 2023.....	II - 18
Grafik 2.6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kab. Tana Toraja Tahun 2021 – 2023....	II - 19
Grafik 2.7	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015 – 2023.....	II - 20
Grafik 2.8	Prevalence of Undernourishment (PoU) Kab. Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2022.....	II - 22
Grafik 2.9	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kab. Tana Toraja Tahun 2018-2022.....	II - 23
Grafik 2.10	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kab. Tana Toraja Tahun 2017-2023.....	II - 24
Grafik 2.11	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013-2023 .....	II - 25
Grafik 2.12	Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013-2023 .....	II - 25
Grafik 2.13	Struktur Penduduk dan Rasio Ketergantungan Kab. Tana Toraja Tahun 2013-2023 .....	II - 26
Grafik 2.14	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab. Tana Toraja Tahun 2013-2023 .....	II - 27
Grafik 2.15	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umum Kab. Tana Toraja Tahun 2023 .....	II - 28
Grafik 2.16	Perbandingan Migrasi Penduduk Usia 15 – 29 Tahun menurut Jenis Kelamin di Kab. Tana Toraja Tahun 2018-2023.....	II - 30
Grafik 2.17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 .....	II - 33



Grafik 2.18	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tana Toraja Dan Kabupaten Sekitar Tahun 2013-2023 .....	II - 34
Grafik 2.19	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2014 – 2023 .....	II - 35
Grafik 2.20	Perbandingan PDRB per Kapita ADHB Nasional, Prov. Sulsel dan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 – 2023 .....	II - 37
Grafik 2.21	Perbandingan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2013 – 2023 .....	II - 37
Grafik 2.22	Ekspor Barang dan Jasa (juta Rupiah) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013-2023 .....	II - 38
Grafik 2.23	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 .....	II - 39
Grafik 2.24	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Toraja dan Kab./Kota Sekitar Tahun 2013 – 2023 .....	II - 39
Grafik 2.25	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2023 .....	II - 40
Grafik 2.26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 – 2023 .....	II - 41
Grafik 2.27	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2023 .....	II - 42
Grafik 2.28	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 – 2023 .....	II - 43
Grafik 2.29	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kab. Tana Toraja Tahun 2019 – 2023 .....	II - 45
Grafik 2.30	Prevalensi Stunting di Kab. Tana Toraja Tahun 2013 – 2023 .....	II - 46
Grafik 2.31	Insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 – 2023 .....	II - 47
Grafik 2.32	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 – 2023 .....	II - 47
Grafik 2.33	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kab. Tana Toraja Tahun 2013 – 2023 .....	II - 48
Grafik 2.34	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 – 2023 .....	II - 49
Grafik 2.35	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 .....	II - 49
Grafik 2.36	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2013-2023 .....	II - 50



Grafik 2.37	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kab Tana Toraja 2013-2023 .....	II - 51
Grafik 2.38	Perbandingan Gini Ratio Kab. Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014 -2023 .....	II - 52
Grafik 2.39	Perbandingan Gini Ratio Kab. Tana Toraja dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2018-2023 .....	II - 52
Grafik 2.40	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja pada Sektor Formal di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 – 2023.....	II - 53
Grafik 2.41	Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kab. Tana Toraja, Prov. Sulsel dan Nasional Tahun 2018 – 2022 .....	II - 55
Grafik 2.42	Indeks Kualitas Keluarga Kab. Tana Toraja Tahun 2019 – 2023 ...	II - 57
Grafik 2.43	Persentase Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 - 2023 .....	II - 58
Grafik 2.44	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	II - 59
Grafik 2.45	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2023 .....	II - 60
Grafik 2.46	IPG dan IDG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 – 2023 .....	II - 61
Grafik 2.47	PDRB ADHB dan ADHK (Menurut Lapangan Usaha) Kab. Tana Toraja Tahun 2013-2023 .....	II - 62
Grafik 2.48	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kab. Tana Toraja dan Prov. Sulsel Tahun 2013 – 2023 .....	II - 63
Grafik 2.49	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum Kab. Tana Toraja dan Prov. Sulsel Tahun 2013 – 2023 .....	II - 64
Grafik 2.50	Persentase Koperasi Sehat di Kab. Tana Toraja Tahun 2013-2023 .....	II - 66
Grafik 2.51	Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kab. Tana Toraja Tahun 2018-2023 .....	II - 67
Grafik 2.52	Indeks Kualitas Air (IKA) di Kab. Tana Toraja Tahun 2018-2023 ...	II - 68
Grafik 2.53	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kab. Tana Toraja Tahun 2018-2023 .....	II - 68
Grafik 2.54	Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kab. Tana Toraja Tahun 2013 – 2023 .....	II - 69
Grafik 2.55	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional serta Zona Sekitar Tahun 2014 – 2023 .....	II - 71
Grafik 2.56	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 .....	II - 73
Grafik 2.57	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tana Toraja dan Kab./Kota Sekitar Tahun 2013 – 2023 .....	II - 74



Grafik 2.58	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2023 .....	II - 78
Grafik 2.59	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2023 .....	II - 79
Grafik 2.60	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 – 2023....	II - 80
Grafik 2.61	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja menurut Keahliannya di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 – 2023 ....	II - 81
Grafik 2.62	Indeks Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 - 2023 .....	II - 82
Grafik 2.63	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kab. Tana Toraja Tahun 2021 - 2023 .....	II - 83
Grafik 2.64	Akses Rumah Layak Huni Nasional, Prov. Sulsel dan Kab. Tana Toraja Tahun 2016 – 2022 .....	II - 84
Grafik 2.65	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2023 .....	II - 85
Grafik 2.66	Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 - 2023 .....	II - 89
Grafik 2.67	Perbandingan Indeks Reformasi Hukum Kab. Tana Toraja dan Prov. Sulsel Tahun 2023 .....	II - 91
Grafik 2.68	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kab. Tana Toraja Tahun 2019-2023 .....	II - 92
Grafik 2.69	Survei Penilaian Integritas (SPI) Kab. Tana Toraja Tahun 2021-2023 .....	II - 94
Grafik 2.70	Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2023 ....	II - 95
Grafik 2.71	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kab. Tana Toraja Tahun 2021-2023 .....	II - 96
Grafik 2.72	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2023 .....	II - 98
Grafik 2.73	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2023 .....	II - 99
Grafik 2.74	Indeks Inovasi Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2021-2023.....	II - 100
Grafik 2.75	Proyeksi TFR Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 114
Grafik 2.76	Proyeksi Usia Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 115
Grafik 2.77	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 115



Grafik 2.78	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 116
Grafik 2.79	Proyeksi Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 117
Grafik 2.80	Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 117
Grafik 2.81	Piramida Penduduk Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dan Tahun 2045 .....	II - 118
Grafik 2.82	Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 .....	II - 120



## Daftar Gambar

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan.....	I - 12
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Tana Toraja.....	II - 2
Gambar 2.2	Peta Sebaran Topografi Kabupaten Tana Toraja.....	II - 4
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tana Toraja .....	II - 6
Gambar 2.4	Peta Daerah Aliran Sungai dan Jaringan Sungai di Kab. Tana Toraja .....	II - 8
Gambar 2.5	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tana Toraja .....	II - 153
Gambar 5.1	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Tana Toraja .....	V - 54
Gambar 5.2	Peta Rencana Sebaran Kota Baru di Kabupaten Tana Toraja .....	V - 58



**Buntu Burake** merupakan salah satu potensi wisata yang sangat menarik. Buntu Burake terletak di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Buntu Burake menjadi tempat wisata yang memiliki pemandangan alam indah sekaligus menjadi tempat wisata religius.





LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH TAHUN 2025-2045

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara



Bottom-Up dengan Top-Down Planning. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan **holistik-tematik**, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu **integratif**, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan **spasial**, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sudah selayaknya disusun dengan memperhatikan potensi dan capaian pembangunan Kabupaten Tana Toraja 20 tahun lalu. Pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru agar lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transformasi pembangunan menjadi paradigma baru pembangunan yang dijabarkan dalam RPJPD 2025-2045 Kabupaten Tana Toraja. Transformasi ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang merupakan 3 (tiga) misi pembangunan pertama.

Transformasi dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas daerah yang meliputi supremasi hukum, keamanan dan ketertiban, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah yang kondusif, serta diplomasi daerah yang tangguh untuk memperkuat peran di kancah nasional dan internasional. Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Supremasi hukum,



keamanan dan ketertiban, demokrasi substansial, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan 2(dua) misi yang tercakup sebagai landasan transformasi.

Transformasi Tana Toraja memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung oleh sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Meningkatkan pembangunan wilayah, menyediakan sarana dan prasarana, serta menjaga kesinambungan pembangunan merupakan 3 misi kerangka implementasi transformasi.

Pembangunan di Kabupaten Tana Toraja harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan pelibatan segenap komponen yang ada dalam rangka membentuk suatu perubahan sosial dari seluruh masyarakat guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya serta lingkungan hidup dalam kerangka NKRI. Salah satu modal dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah khususnya sektor kepariwisataan di Kabupaten Tana Toraja adalah bahwa Kabupaten Tana Toraja merupakan daerah Kawasan Strategis Nasional untuk kepentingan Sosial Budaya serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPPN) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Toraja- Lorelindu dan sekitarnya.

Pembangunan pada tatanan kabupaten diwujudkan dalam bentuk penciptaan peluang kepada setiap kelompok masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keberadaannya menurut karakteristik budaya dan kearifan lokal. Pengembangan budaya dan kearifan lokal dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses reaktualisasi dan revitalisasi budaya dan kearifan lokal agar senantiasa terkait dengan perubahan yang dibawa oleh spirit jaman, sehingga dapat memelihara keterkaitan (interkoneksi) dengan lingkungan strategisnya. Pada saat yang sama pembangunan senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai religius yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang religius. Dengan demikian, pembangunan bukan hanya sekadar penyaluran aspirasi dari tatanan internal, namun juga melakukan memfasilitasi terhadap setiap



tatanan internal untuk mewujudkan aspirasi masing-masing dengan cara yang dipilihnya secara mandiri.

Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017, sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RPJPD
  - a. Pembentukan tim penyusun RPJPD
  - b. Orientasi mengenai RPJPD
  - c. Penyusunan agenda kerja
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
  - a. Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Bappelitbangda dan kepala Perangkat Daerah dan menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD
  - b. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD dan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD.
  - c. Pelaksanaan Konsultasi Rancangan Awal RPJPD kepada Gubernur yang dikoordinasikan oleh Bappelitbangda Provinsi untuk memperoleh masukan dalam bentuk Surat Kepala Bappelitbangda Provinsi.
3. Penyusunan Rancangan RPJPD
  - a. Bupati menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan dari Bappelitbangda provinsi.
  - b. Bappelitbangda Kabupaten mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.



#### 4. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

- a. Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- b. Bappelitbangda melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- c. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJPD.

#### 5. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

- a. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD merupakan proses perumusan Rancangan RPJPD menjadi Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD.
- b. Bappelitbangda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- c. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bappelitbangda untuk menyampaikan dan memaparkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Kepala Daerah sebelum diserahkan ke DPRD.
- d. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan Rancangan Akhir RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- e. Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.



## 6. Penetapan RPJPD

- a. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- b. RPJPD yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Indonesia Emas Tahun 2045 yang tertuang dalam rancangan akhir RPJPN Tahun 2025-2045, perlu didukung dengan kontribusi pembangunan tingkat kabupaten secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Dalam usaha perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045, maka sinergitas perencanaan mulai dari nasional, provinsi dan kabupaten menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 memiliki arti yang penting selain untuk menjamin sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah juga menjadi dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah dan akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD periode 5 (lima) tahunan. Penyusunannya RPJPD Kabupaten Tana Toraja berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Kabupaten Tana Toraja serta mempertimbangkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Tana Toraja.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2045 telah mempertimbangkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini dibuktikan dengan mengintegrasikan hasil KLHS berupa skenario capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJPD, serta mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Semua ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya



tampung lingkungan, sehingga pembangunan yang direncanakan dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1059 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional agar



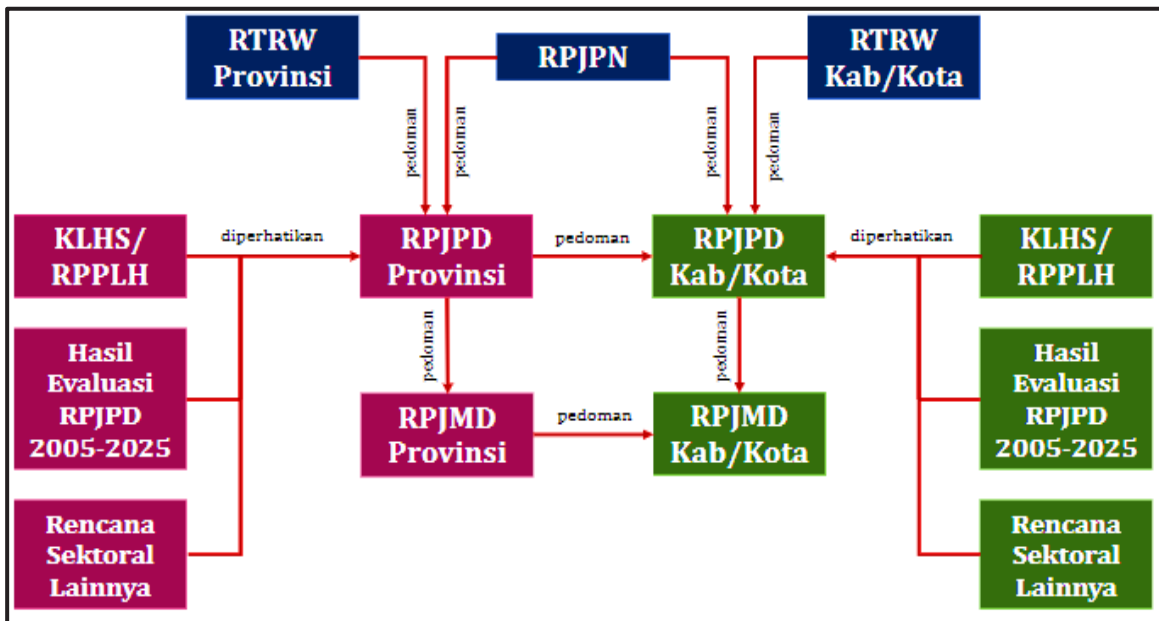
menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu sehingga memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional.

RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman kepada : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan dan indikator kinerja utama pembangunan, dan 2) RTRW Kabupaten, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis daerah. Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Tana Toraja juga memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tana Toraja, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010–2030 terutama pada tingkat ketercapaian dan rekomendasi, dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana sektoral lainnya. Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.



**Gambar 1.1**

Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dalam  
Sistem Perencanaan Pembangunan



Sumber : Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 merupakan perencanaan yang bersifat makro dan memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. RPJPD Kabupaten Tana Toraja selanjutnya akan dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja setiap 5 tahun.

## 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.4.1 MAKSUD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.



## 1.4.2 TUJUAN

Tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2045 adalah :

1. Merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045;
2. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tana Toraja;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat;
4. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya Kabupaten Tana Toraja secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja untuk setiap jangka waktu lima tahun;
6. Menjadi Pedoman dalam penyusunan Visi, Misi dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Dokumen RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 disajikan sebagai berikut :

**Bab I. Pendahuluan**, memuat latar belakang penyusunan RPJPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen dengan RPJPD, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen RPJPD.

**Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah**, memuat secara ringkas gambaran mengenai kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi



hasil RPJPD tahun 2010-2030, trend demografi, kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

**Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis**, menjelaskan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang disimpulkan dari kesenjangan antara kondisi riil/capaian dengan apa yang ingin dicapai di masa datang serta isu strategis daerah yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampak yang signifikan bagi daerah.

**Bab IV. Visi dan Misi Daerah**, memuat Visi dan Sasaran Visi yang akan dicapai serta Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045.

**Bab V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok**, memuat arah kebijakan pembangunan berdasarkan tahapan lima tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, sasaran pokok RPJPD tahun 2025-2045, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, indikator utama pembangunan, dan arah pembangunan kewilayahan.

**Bab VI. Penutup**, memuat tentang kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045.



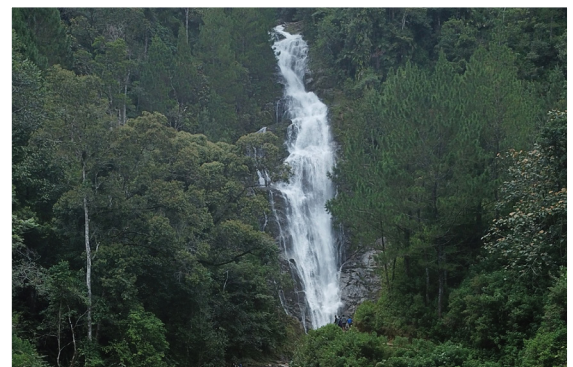
**Pango-Pango** Kawasan Agro Wisata yang berada di perbatasan antara kelurahan To'sapan dan Pasang yang terletak sekitar 7 km dari kecamatan Makele Selatan kota Makele. Suasana di sekitar kawasan Pango-Pango cukup asri dan sejuk belum ditambah dengan adanya berbagai tanaman hutan dan kabut yang terlihat di pagi hari. Di kawasan ini anda bisa melihat panorama yang indah dengan latar belakang pegunungan yang diselimuti kabut dan pemandangan kota Makale yang ada di lembah.





#### **Air Terjun Talondo Tallu Pakkara**

merupakan air terjun yang cukup unik karena sumber airnya berasal dari dua anak sungai yang berbeda yang membentuk tiga pancuran air terjun. Sungai yang sebelah kanan adalah Sungai Pekalian sedangkan sisi sebelah kiri adalah Sungai Rabung yang kemudian bergabung membentuk sungai yang disebut Salu Talondo.



#### **Air Terjun Sarambu Assing**

merupakan kawasan objek wisata yang terkenal dengan hutan yang masih asri dan air terjun yang berasal dari pegunungan. Tempat wisata ini sangat cocok jika digunakan untuk mendaki gunung, bersepeda, tracking

ataupun berkemah karena tempat wisata ini memiliki hutan yang alami dan udara yang sangat sejuk.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah perencanaan pembangunan yang memiliki masa periode selama 20 tahun dan merupakan bagian tertinggi dari hierarki dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu memahami karakteristik daerah serta adanya analisis yang mendalam terkait penyusunan kebijakan pembangunan daerah sehingga perumusan perencanaan pembangunan daerah akan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah tersebut serta dapat menjawab segala kebutuhan masyarakat. Analisis kondisi daerah dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang dicantumkan pada gambaran umum berisikan gambaran kondisi daerah dari berbagai aspek serta menyajikan data capaian pembangunan beberapa tahun terakhir yang akan memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tana Toraja.

#### **2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

##### **2.1.1 ASPEK GEOGRAFI**

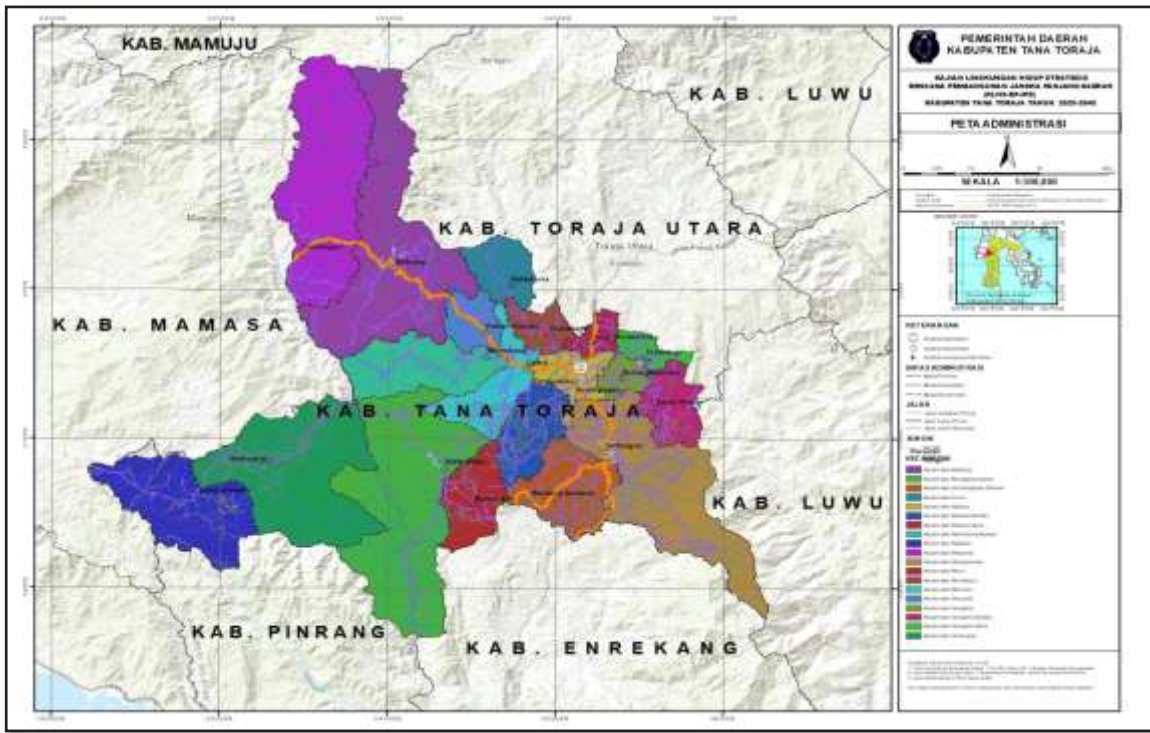
Kabupaten Tana Toraja memiliki luas wilayah sebesar 2.054,30 km<sup>2</sup> yang berjarak sekitar 223 km dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan berbatasan langsung dengan beberapa daerah. Wilayah Kabupaten Tana Toraja di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.

Secara geografis, Kabupaten Tana Toraja dengan ibukota di Kecamatan Makale terletak diantara 2<sup>o</sup> 44' 20,6"- 3<sup>o</sup> 23' 22,2" Lintang Selatan dan 119<sup>o</sup> 22' 12,7"- 120<sup>o</sup> 2' 42,1" Bujur Timur dengan tinggi wilayah sekitar 125 – 3.075 meter di atas permukaan laut (mdpl).



**Gambar 2.1**

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tana Toraja



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Wilayah administrasi Kabupaten Tana Toraja terbagi ke dalam 19 Kecamatan, dimana Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan dua kecamatan terluas dengan luas masing-masing adalah 211,47 Km<sup>2</sup> atau mencakup 10,29 persen dari total luas wilayah dan 206,76 Km<sup>2</sup> atau setara 10,06 persen sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Makale Utara dan Kecamatan Sangalla Utara dengan luas masing-masing 26,08 Km<sup>2</sup> atau setara 1,27 persen dari total luas wilayah dan 27,96 Km<sup>2</sup> atau setara 1,36 persen. Kecamatan Makale yang merupakan ibu kota kabupaten luas wilayahnya hanya 39,75 Km<sup>2</sup> atau sekitar 1,93 persen dari luas Kabupaten Tana Toraja. Dari 19 kecamatan, terbagi menjadi 159 lembang/kelurahan yang terdiri dari 112 lembang dan 47 kelurahan. Berikut rincian data administrasi wilayah Kabupaten Tana Toraja.



**Tabel 2.1**  
Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		(Km <sup>2</sup> )	(%)	Kel.	Lemb.	
1	Bonggakaradeng	206,76	10,06	1	5	6.986
2	Simbuang	194,82	9,48	1	5	6.639
3	Rano	89,43	4,35	-	5	6.605
4	Mappak	166,02	8,08	1	5	5.842
5	Mengkendek	196,74	9,58	4	13	33.499
6	Gandangbatu Sillanan	108,63	5,29	3	9	21.185
7	Sanggalla	36,24	1,76	2	3	7.513
8	Sanggalla Selatan	47,80	2,33	1	4	8.662
9	Sanggalla Utara	27,96	1,36	2	4	8.368
10	Makale	39,75	1,93	14	1	36.305
11	Makale Selatan	61,70	3,00	4	4	15.491
12	Makale Utara	26,08	1,27	5	-	13.346
13	Saluputti	87,54	4,26	1	8	9.393
14	Bittuang	163,27	7,95	1	14	17.447
15	Rembon	134,47	6,55	2	11	22.654
16	Masanda	134,77	6,56	-	8	7.948
17	Malimbong Balepe	211,47	10,29	1	5	9.605
18	Rantetayo	60,35	2,94	3	3	13.377
19	Kurra	60,50	2,95	1	5	7.036
<b>Kabupaten Tana Toraja</b>		<b>2.054,30</b>	<b>100,00</b>	<b>47</b>	<b>112</b>	<b>257.901</b>

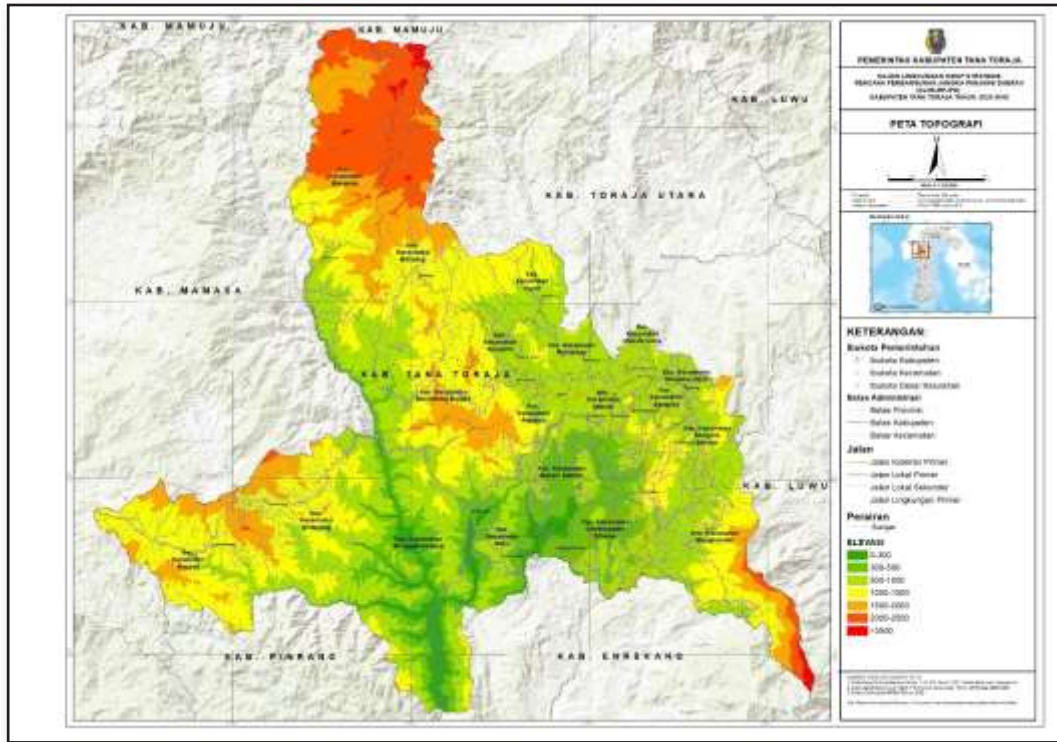
Sumber : BPS Tana Toraja, 2024

Topografi di Kabupaten Tana Toraja relatif bervariasi, mulai dari dataran (flat), bergelombang (rolling), berbukit (hilly) hingga bergunung (mountainous). Kondisi topografi Kabupaten Tana Toraja didominasi oleh topografi bergelombang dengan ketinggian 300-1000 mdpl seluas 96.975,60 Ha (47,4 persen) dan berbukit dengan ketinggian 1000-2000 mdpl seluas 83.961,02 Ha (41,0 persen). Topografi bergunung dengan ketinggian di atas 2000 mdpl seluas 17.308,06 Ha (8,5 persen) yang terdapat di Kecamatan Bittuang seluas 578,07 Ha, Kecamatan Mengkendek seluas 322,07 Ha dan Kecamatan Masanda seluas 98,58 Ha. Sementara topografi datar relatif sedikit hanya 6.414,99 Ha (3,1 persen) yang terdapat di Kecamatan Bonggakaradeng seluas 4172 Ha, Kecamatan Rano 890,4 Ha, Kecamatan Makale Selatan 585 Ha dan Kecamatan Gandangbatu Sillanan seluas 495,39 Ha.



**Gambar 2.2**

Peta Sebaran Topografi Wilayah Kabupaten Tana Toraja



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

**Tabel 2.2**

Luasan Sebaran Topografi di Kabupaten Tana Toraja

Kecamatan	Luas Elevasi (Mdpl)						
	0-300	300-500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-2500	>2500
Bittuang	-	363,24	5.102,92	10.845,82	4.249,63	6.348,05	578,07
Bonggakaradeng	4.172,00	7.841,94	11.741,69	4.042,49	492,75	-	-
Gandangbatu Sillanan	495,39	4.589,67	3.832,76	33,87	-	-	-
Kurra	-	-	2.403,23	2.494,78	-	-	-
Makale	-	312,81	3.713,26	219,80	0,84	-	-
Makale Selatan	585,00	3.490,41	2.287,61	15,98	-	-	-
Makale Utara	-	-	2.071,74	59,33	-	-	-
Malimbong Balepe	-	501,24	2.924,42	4.632,41	1.990,93	-	-
Mappak	-	-	1.259,07	10.533,94	2.772,88	15,95	-
Masanda	-	69,14	2.294,69	5.248,19	6.607,64	8.738,84	98,58
Mengkendek	-	1.552,69	8.811,42	7.800,79	2.306,91	1.057,39	322,07
Rano	890,40	2.930,87	2.549,31	0,14	-	-	-
Rantetayo	-	-	3.029,60	158,67	-	-	-
Rembon	-	1,09	3.339,46	2.427,81	1.139,50	-	-
Saluputti	-	-	2.704,09	984,82	70,02	-	-



Kecamatan	Luas Elevasi (Mdpl)						
	0-300	300-500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-2500	>2500
Sangalla	-	-	2.028,42	225,99	-	-	-
Sangalla Selatan	-	-	3.988,52	1.298,66	0,93	-	-
Sangalla Utara	-	-	1.755,97	190,63	129,69	0,09	-
Simbuang	272,19	1.874,45	7.609,87	9.356,40	3.628,77	149,02	-
<b>Grand Total</b>	<b>6.405,70</b>	<b>23.527,55</b>	<b>73.448,07</b>	<b>30.570,53</b>	<b>23.390,49</b>	<b>16.309,34</b>	<b>998,72</b>

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Kabupaten Tana Toraja memiliki kemiringan lereng yang variatif dan menyebar di seluruh wilayah. Kemiringan lereng di Kabupaten Tana Toraja dominan berada pada kemiringan 15-30 persen tersebar di seluruh kecamatan dengan luasan 87.997,08 Ha atau 43 persen dari luas total Kabupaten Tana Toraja. Kemiringan lereng di bawah 2 persen tersebar dengan luasan 3.680,97 Ha atau 1,8 persen dari luas total Kabupaten Tana Toraja. Kemiringan lereng di atas 40 persen tersebar dengan luasan 38.794,72 Ha atau 19 persen dari luas total Kabupaten Tana Toraja.

**Tabel 2.3**

Luas Sebaran Kemiringan Lereng di Kabupaten Tana Toraja

Kecamatan	Luas Sebaran Kemiringan Lereng (Ha)					
	0 – 2 %	2 – 5 %	5 – 15 %	15 – 30 %	30 – 40 %	> 40 %
Bittuang	650,5	884,8	8.629,7	13.803,3	2.267,2	1.252,3
Bonggakaradeng	-	39,9	2.457,5	11.200,9	3.717,9	10.874,7
Gandangbatu Sillanan	52,5	228,3	3.954,0	4.252,7	162,2	302,1
Kurra	534,1	195,0	3.616,6	539,5	12,9	-
Makale	48,7	438,5	2.297,7	1.411,5	50,3	-
Makale Selatan	-	14,6	221,2	3.801,5	1.253,9	1.087,9
Makale Utara	133,5	358,7	1.439,4	87,8	53,1	58,6
Malimbong Balepe	12,5	68,5	1.657,2	5.941,5	1.348,7	1.020,6
Mappak	-	-	1.724,4	8.220,9	2.049,6	2.587,0
Masanda	121,8	275,2	2.625,0	13.199,0	3.227,6	3.608,5
Mengkendek	227,1	1.240,4	9.065,3	6.401,4	523,6	4.393,5
Rano	-	-	625,5	1.923,9	466,9	3.354,5
Rantetayo	319,8	415,4	1.939,8	400,4	96,0	16,8
Rembon	51,2	206,4	1.620,0	2.888,8	1.135,3	1.006,2
Saluputi	269,8	150,2	1.589,9	970,0	430,3	348,8

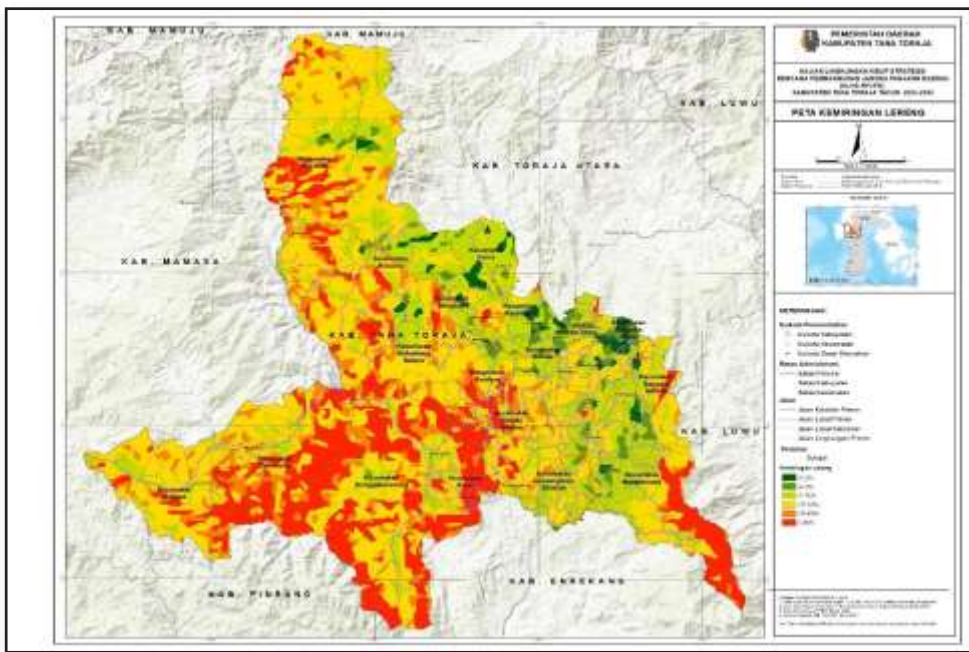


Kecamatan	Luas Sebaran Kemiringan Lereng (Ha)					
	0 – 2 %	2 – 5 %	5 – 15 %	15 – 30 %	30 – 40 %	> 40 %
Sanggalla	410,1	239,4	669,0	935,9	-	-
Sanggalla Selatan	318,2	317,0	2.062,9	2.066,4	269,2	254,4
Sanggalla Utara	531,2	523,1	488,7	514,8	18,6	-
Simbuang	-	-	1.170,7	9.436,8	3.654,2	8.628,9
<b>Grand Total</b>	<b>3.681,0</b>	<b>5.595,3</b>	<b>47.854,2</b>	<b>87.997,1</b>	<b>20.737,4</b>	<b>38.794,7</b>

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

**Gambar 2.3**

Peta Kemiringan Lereng di Kabupaten Tana Toraja



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Faktor-faktor penting yang mempengaruhi aliran air permukaan pada suatu wilayah adalah curah hujan, bentuk wilayah, tekstur tanah, dan penutup lahan. Kabupaten Tana Toraja merupakan daerah hulu dari suatu sistem daerah tangkapan hujan Sungai Saddang dan Sungai Paremang, maka hujan yang jatuh langsung di atas permukaan tanah merupakan sumber pengisian sungai Saddang dan Sungai Paremang.

Terdapat dua DAS sungai yang mengalir di Kabupaten Tana Toraja yaitu DAS Saddang dan DAS Paremang, Kedua sungai tersebut merupakan sungai yang selalu dialiri air sepanjang tahun. Sungai Saddang merupakan wilayah sungai lintas provinsi yaitu provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Sungai Saddang



mengalir dari Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja menuju ke arah selatan melewati Kabupaten Enrekang dan bermuara ke Selat Makassar di Kabupaten Pinrang. Sungai Paremang terletak di sebelah timur yang mengalir dari Kabupaten Tana Toraja dan bermuara ke laut di Kabupaten Luwu.

Luas DAS Sungai Saddang yang terdapat di Kabupaten Tana Toraja sekitar 200.947,46 Ha atau 98,18 persen dari luas Kabupaten Tana Toraja, sedangkan luas DAS Pareman sekitar 3.712,22 Ha atau 1,82 persen. Tingkat kerapatan aliran Sungai Saddang masuk dalam kelas sedang dengan panjang sungai yang terdapat di Kabupaten Tana Toraja sekitar 2.428,61 km. Karena geomorfologi daerah tangkapan hujan yang seperti ini, maka Sungai Saddang mempunyai aliran air yang relatif besar dan dengan debit air yang cukup besar sepanjang tahun baik pada musim kemarau terlebih pada musim hujan.

**Tabel 2.4**

Sebaran Luas DAS di Kabupaten Tana Toraja

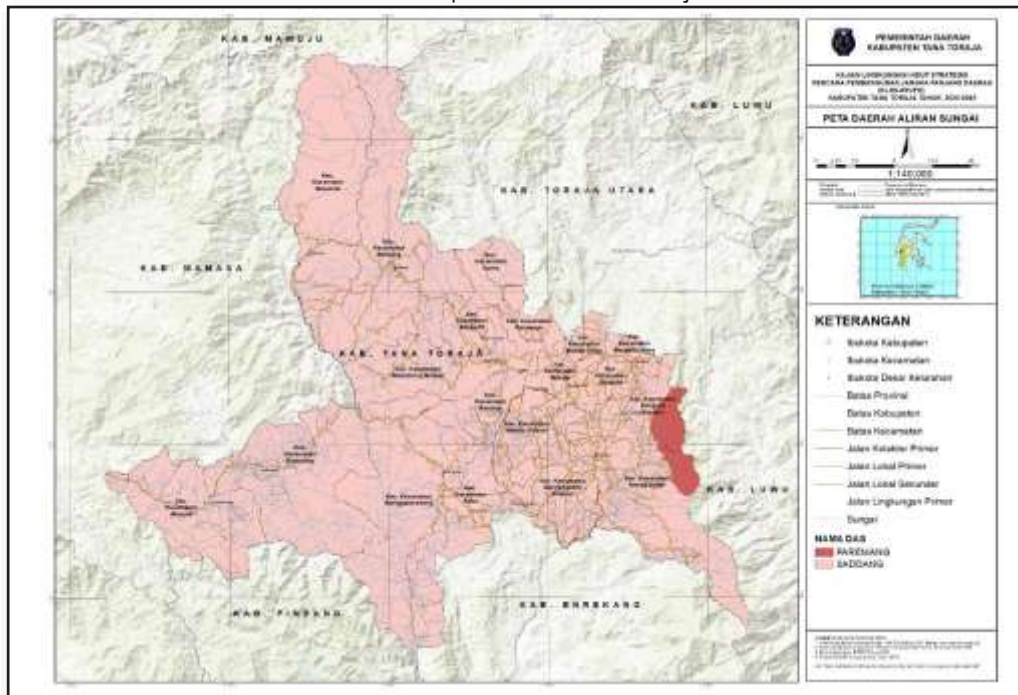
Kecamatan	Luas DAS (Ha)	
	Sungai Paremang	Sungai Saddang
Bittuang	-	27.487,73
Bonggakaradeng	-	28.290,87
Gandangbatu Sillanan	-	8.951,70
Kurra	-	4.898,01
Makale	-	4.246,71
Makale Selatan	-	6.379,00
Makale Utara	-	2.131,07
Malimbong Balepe	-	10.049,00
Mappak	-	14.581,84
Masanda	-	23.057,08
Mengkendek	1.500,49	20.350,79
Rano	-	6.370,72
Rantetayo	-	3.188,27
Rembon	-	6.907,87
Saluputi	-	3.758,92
Sangalla	-	2.254,41
Sangalla Selatan	2.211,74	3.076,37
Sangalla Utara	-	2.076,38
Simbuang	-	22.890,71
<b>Grand Total</b>	<b>3.712,23</b>	<b>200.947,46</b>

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045



**Gambar 2.4**

Peta Daerah Aliran Sungai dan Jaringan Sungai  
di Kabupaten Tana Toraja



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Secara umum, karakteristik curah hujan di Kabupaten Tana Toraja dibagi atas dua bagian. Pertama, musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli sampai September pada saat dipengaruhi oleh sistem monsun tenggara. Kedua, musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai Juni pada saat dipengaruhi oleh sistem monsun barat laut. Dari data curah hujan yang diperoleh menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja umumnya lebih besar dari 200 mm, kecuali pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober. Besar curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 79,29 – 380,49 mm dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan September dan tertinggi pada bulan April. Jumlah hari hujan berkisar antara 14 – 25 hari dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret serta April dan terendah pada bulan September. Berdasarkan data curah hujan, menurut klasifikasi tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson, maka tipe iklim di Kabupaten Tana Toraja termasuk dalam tipe iklim A dengan nilai Q sebesar 0,113. Secara spasial, curah hujan tahunan 3600-3800 mm terjadi pada wilayah terluas disusul curah hujan 3800 – 400 mm, dimana curah hujan tertinggi tersebut dominan terjadi pada tiga wilayah kecamatan meliputi



Kecamatan Bonggakaradeng, Bittuang, dan Mengkendek. Sebaran spasial curah hujan di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.5**

Curah Hujan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2023

Bulan	Curah Hujan (mm)								Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Januari	139.1	140.2	189,5	180,5	319,8	404,5	206.0	148.6	216.03
Februari	59.7	233.9	241,8	310,3	482,3	235.0	254.6	121.8	242.43
Maret	298.5	321.1	316,9	310,1	462,7	502,8	273.3	414.8	262.53
April	383.4	317.5	253,4	398,2	669,9	262,1	394.5	364.9	380.49
Mei	364.6	172.3	168.0	132.0	370,4	248.0	281.1	213.3	243.71
Juni	90.8	345.2	312,8	230,3	220,3	73,5	158.5	154.3	198.21
Juli	125.5	156.8	86,7	15,7	161,5	146,3	165.2	75.9	116.70
Agustus	51.4	137.6	123.0	17,2	106,3	162,5	248.4	41.3	110.96
September	19.5	121.1	22.0	9,3	125,1	215,1	103.8	18.4	79.29
Oktober	168.1	282.3	40.0	54,6	456,9	202,5	230.6	36.9	183.99
November	146.0	482.3	233,8	128,5	226,1	628,9	343.2	137.7	290.81
Desember	31.0	138.2	346,4	214,5	134,3	108,8	352.4	307.3	204.11

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2024

**Tabel 2.6**

Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2023

Kecamatan	Curah Hujan (mm)								Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Januari	18	21	17	23	24	26	19	16	21
Februari	17	18	17	26	25	20	19	15	20
Maret	25	23	22	26	26	27	21	29	25
April	28	24	24	27	27	19	24	24	25
Mei	28	25	23	22	26	21	21	22	24
Juni	16	28	23	24	25	19	20	21	22
Juli	15	21	14	13	28	23	20	12	19
Agustus	13	17	10	10	22	26	19	9	16
September	3	17	10	5	22	25	16	12	14
Oktober	13	23	7	16	18	18	27	9	17
November	17	25	22	14	19	29	24	22	22
Desember	27	20	20	20	15	19	19	28	21

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2024



**Tabel 2.7**

Luas Persebaran Curah Hujan menurut Kecamatan  
di Kabupaten Tana Toraja

Kecamatan	Luas Wilayah Persebaran Curah Hujan (Ha)				
	3100-3400 mm	3400-3600 mm	3600-3800 mm	3800-4000 mm	4000-4200 mm
Bittuang	-	33,80	11.015,80	12.593,70	3.844,50
Bonggakaradeng	-	589,30	18.657,70	9.043,90	-
Gandangbatu Sillanan	-	710,30	8.187,90	53,50	-
Kurra	-	-	-	3.441,00	1.457,00
Makale	-	-	52,00	2.616,40	1.578,30
Makale Selatan	-	275,70	4.069,60	2.033,70	-
Makale Utara	-	-	-	-	2.131,10
Malimbong Balepe	-	-	165,30	9.063,70	820,00
Mappak	1.595,60	11.713,90	1.272,40	-	-
Masanda	-	13.290,70	8.642,00	1.124,40	-
Mengkendek	228,60	5.348,40	11.322,70	4.951,60	-
Rano	-	1.633,90	4.672,30	64,50	-
Rantetayo	-	-	-	-	3.188,30
Rembon	-	-	1.431,60	3.830,30	1.645,90
Saluputi	-	-	-	12,60	3.746,30
Sangalla	-	-	-	1.509,00	745,50
Sangalla Selatan	-	-	251,90	4.781,10	255,10
Sangalla Utara	-	-	-	188,60	1.887,80
Simbuang	485,20	10.805,50	10.068,20	1.531,70	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.309,40</b>	<b>44.401,50</b>	<b>79.809,40</b>	<b>56.839,60</b>	<b>21.299,80</b>

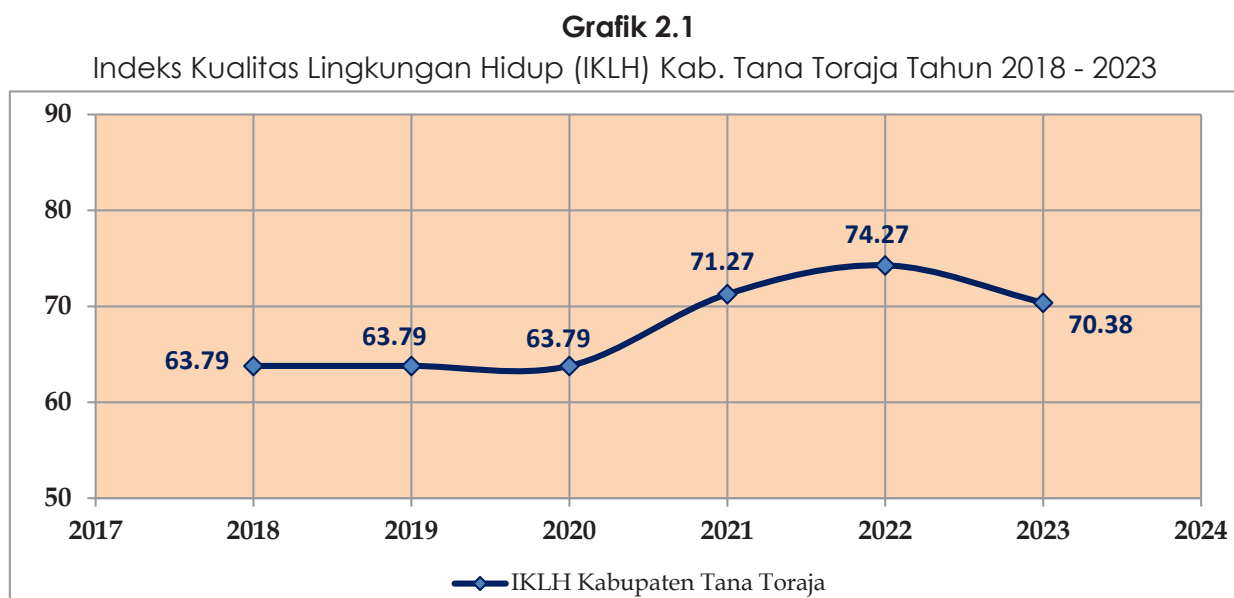
Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

### 2.1.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Selain itu, IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2023 mengalami tren peningkatan dimana nilai indeks tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2022 sebesar 74,27, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 70,38 atau sebesar 3,89 poin yang dipengaruhi oleh penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dimana tahun 2022, Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 70,00



kemudian turun menjadi 58,89 pada tahun 2023. Sebelum tahun 2018, belum dilakukan pengukuran terhadap IKLH Kabupaten Tana Toraja sehingga data yang disajikan dimulai dari tahun 2018. Adapun perkembangan IKLH Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, 2024

### 2.1.1.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan.

Daya dukung lingkungan hidup merupakan batas kondisi kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan hidup dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.



## **A. Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan**

Perhitungan daya dukung penyediaan pangan dilakukan berdasarkan Pedoman Teknis Pemodelan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan (Arsad, F., 2022). Data yang digunakan untuk perhitungan ketersediaan pangan adalah indeks jasa lingkungan dalam sistem grid dan data produksi bahan pangan tiap kabupaten. Pendekatan penghitungan ketersediaan jasa lingkungan penyedia pangan Kabupaten adalah diasumsikan sama dengan total ketersediaan beras di wilayah tersebut.

Hasil analisis daya dukung ketersediaan pangan Kabupaten Tana Toraja diperoleh bahwa nilai ambang batas penduduk tahun 2025 di semua kecamatan berkisar 47.406 - 320.932 jiwa dan nilai ambang batas penduduk tahun 2045 berkisar 43.024 - 297.511 jiwa. Nilai tersebut masih berada di bawah nilai ambang penduduk ketersediaan pangan, baik pada tahun 2025 maupun pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Tana Toraja memiliki kemampuan penyediaan pangan yang belum terlampaui. Semua wilayah kecamatan berada pada daerah kemampuan penyediaan pangan yang belum terlampaui.

## **B. Daya Dukung Penyediaan Air Bersih**

Perhitungan daya dukung air di suatu wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah tersebut. Dengan cara ini, dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah belum terlampaui atau sudah terlampaui. Jika belum terlampaui menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan sudah terlampaui menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan air yang semakin besar pada masa datang, seperti perbaikan infrastruktur, penggunaan teknologi efisien air, pengelolaan tata air yang baik, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghematan air. Jika ketersediaan



air dari sumber utama mengalami kekurangan, dapat dipertimbangkan untuk mencari sumber air alternatif seperti pengumpulan air hujan, atau pengolahan air limbah yang lebih baik untuk menghasilkan air yang dapat digunakan. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan tata air yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian daerah aliran sungai sangat penting. Hal ini meliputi perlindungan dan rehabilitasi sumber daya air, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan air. Sektor pertanian dan industri menjadi penyumbang terbesar terhadap konsumsi air perlu diperkenalkan teknik irigasi yang efisien dan teknologi produksi yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya air.

Hasil perhitungan potensi ketersediaan air di Kabupaten Tana Toraja sebesar 4.506.136.293,33 m<sup>3</sup>/tahun, dimana ketersediaan air bersih yang tinggi terdapat di kecamatan Bonggakaradeng, Mengkendek dan Simbuang. Kebutuhan air bersih yang dihitung terdiri atas kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan. Hasil perhitungan kebutuhan air domestik dan kebutuhan air lahan untuk tahun 2025 dan tahun 2045 menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih yang terdapat di wilayah Kecamatan Makale, Mengkendek dan Rembon. Hasil analisis daya dukung ketersediaan air bersih di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan bahwa nilai ambang batas ketersediaan air bersih tahun 2025 pada semua kecamatan berkisar 94.051 - 1.062.258 jiwa dan nilai ambang batas ketersediaan air bersih tahun 2045 berkisar 98.284 - 1.066.374 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Tana Toraja memiliki kemampuan penyediaan air bersih yang belum terlampaui. Semua wilayah kecamatan berada pada daerah kemampuan penyediaan air bersih yang belum terlampaui.

### **2.1.1.3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak**

Menurut Badan Pusat Statistik, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga yang dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah



fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Indikator ini digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik di perkotaan maupun perdesaan. Angka yang tercatat dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Kabupaten Tana Toraja menunjukkan perkembangan yang baik dalam hal pemenuhan akses sanitasi layak bagi rumah tangga, dimana pada tahun 2015 tercatat hanya 50,77 persen dan mengalami peningkatan menjadi 86,03 persen pada tahun 2023. Meskipun angka tersebut masih di atas rata-rata nasional yakni 82,36 persen namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian dari kabupaten sekitar dan capaian provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 2.8**

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak di Kab. Tana Toraja, Kabupaten Sekitar, Prov. Sulsel Dan Nasional Tahun 2015 – 2023

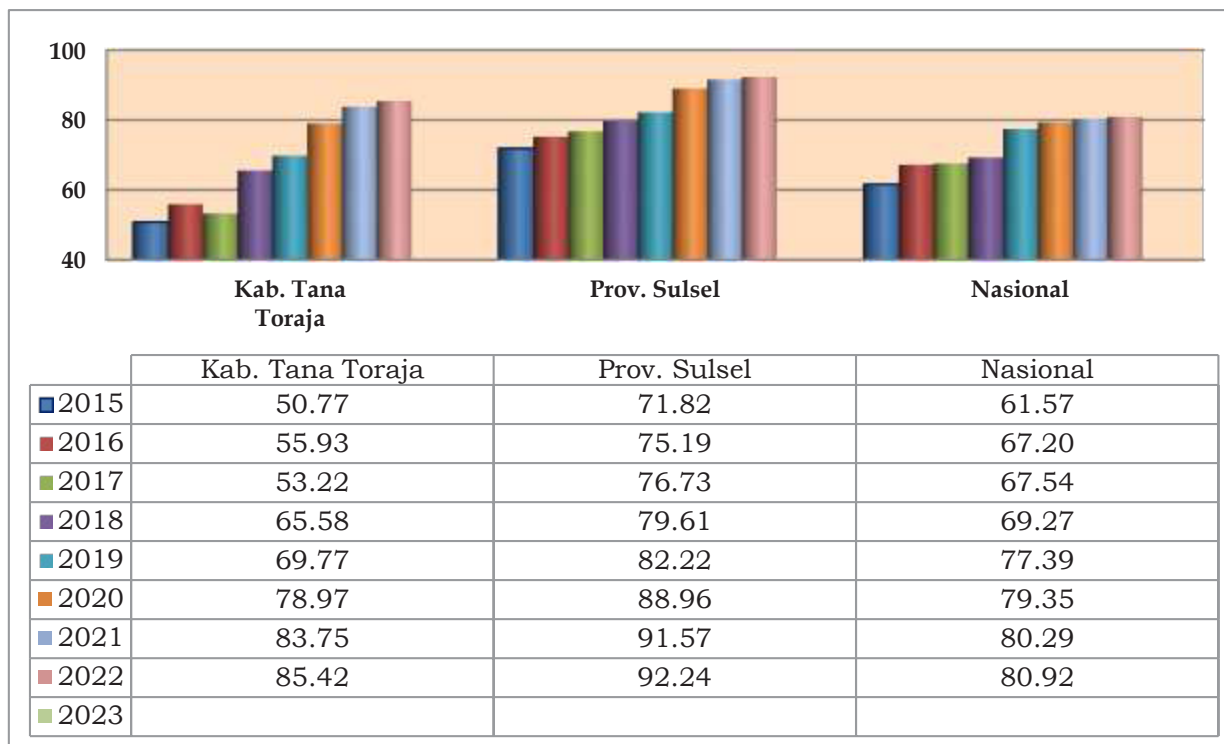
No.	Kab./Kota/Prov.	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kab. Pinrang	88.28	86.68	83.33	85.51	91.80	90.56	94.72	92.06	94.64
2.	Kab. Enrekang	81.58	84.21	74.81	80.17	87.87	89.66	89.11	94.76	97.29
3.	Kab. Luwu	60.66	64.92	64.98	75.78	75.21	85.17	88.55	89.02	94.72
<b>4.</b>	<b>Kab. Tana Toraja</b>	<b>50.77</b>	<b>55.93</b>	<b>53.22</b>	<b>65.58</b>	<b>69.77</b>	<b>78.97</b>	<b>83.75</b>	<b>85.42</b>	<b>86.03</b>
5.	Kab. Toraja Utara	59.27	72.13	78.75	66.20	72.19	83.50	87.62	89.81	91.83
6.	Prov. Sulawesi Selatan	71.82	75.19	76.73	79.61	82.22	88.96	91.57	92.24	93.69
7.	Nasional	61.57	67.20	67.54	69.27	77.39	79.53	80.29	80.92	82.36

Sumber ; BPS Prov. Sulawesi Selatan, 2023



**Grafik 2.2**

Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak Kabupaten Kab. Tana Toraja, Prov. Sulsel dan Nasional Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan, 2023

#### 2.1.1.4 Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak

Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia yang dipakai sehari-hari untuk keperluan mencuci, mandi, memasak dan dapat diminum setelah dimasak. Rumah dianggap layak huni apabila memiliki sumber air minum yang layak. Kelayakan sumber air minum tersebut diukur dari jenis sumber air minum utama dan sumber air untuk kegiatan domestik lain. Rumah dianggap memiliki akses air minum layak jika sumber air minum utamanya termasuk dalam 9 jenis sumber air terlindungi, yaitu: (1) ledeng meteran, (2) ledeng eceran, (3) keran umum, (4) hidran umum, (5) terminal air, (6) penampungan air hujan, (7) sumur bor/pompa, (8) sumur terlindungi, dan (9) mata air terlindungi.

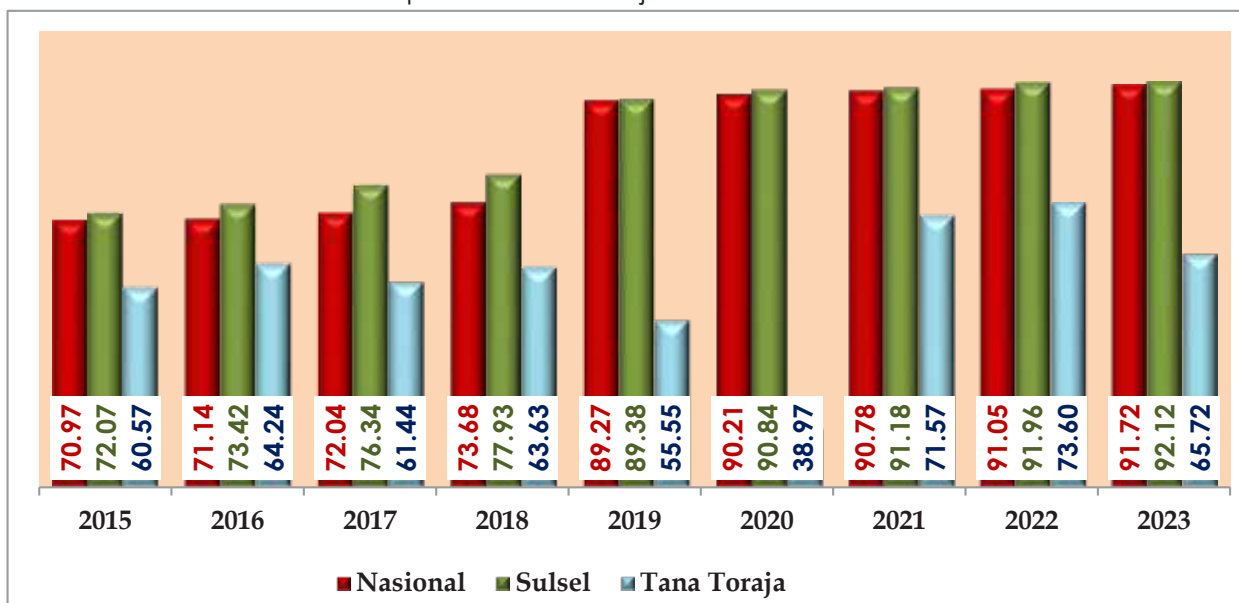
Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2022, perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak di Tana Toraja mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dimana pada tahun 2015 tercatat hanya 60.57 persen Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak



kemudian meningkat menjadi 73,60 persen namun terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi 65,72 persen. Meskipun mengalami peningkatan namun nilai tersebut masih jauh di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Hal ini menandakan bahwa masalah penyediaan air minum layak harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam menyusun strategi dan kebijakan daerah yang jelas dan terukur dan dapat diimplementasikan dalam program dan kegiatan untuk penyediaan akses air minum yang layak bagi Masyarakat karena Persoalan air minum bukan hanya mengenai ketersediaan air saja, tapi lebih lanjut akan berpengaruh kepada kualitas kesehatan Masyarakat dan kualitas hidup Masyarakat yang selanjutnya akan berpengaruh kepada pengurangan angka kemiskinan.

**Grafik 2.3**

Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Nasional, Prov. Sulsel dan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 - 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

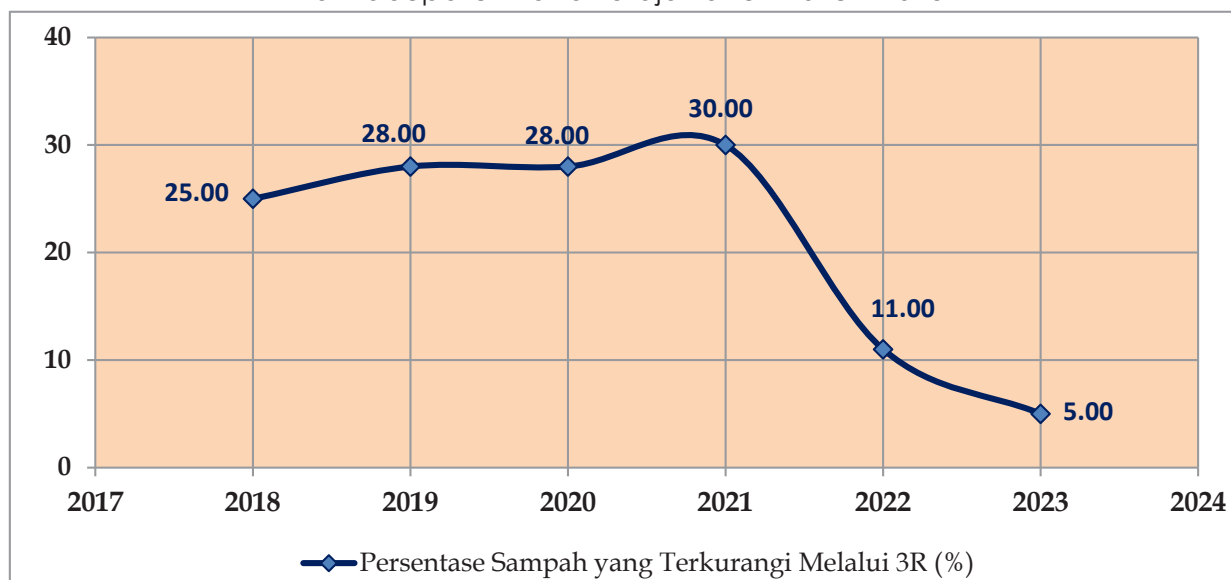
### 2.1.1.5 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2018 sampai dengan 2021 dimana pada tahun 2018 sebanyak 25 persen jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R kemudian meningkat menjadi 30 persen pada



tahun 2021, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 11 persen, kemudian pada tahun 2023 kembali turun menjadi hanya 5 persen jumlah sampah yang berkurang melalui 3R. Hal ini disebabkan selain karena banyaknya sarana pengangkut sampah yang kurang memadai serta hanya ada 1 (satu) TPS 3R yang berfungsi dengan baik di Kabupaten Tana Toraja yang berlokasi di Kecamatan Rantetayo. Oleh karena itu Optimalisasi dan penambahan jumlah TPS 3R diperlukan dalam rangka peningkatan akses pengurangan sampah rumah tangga.

**Grafik 2.4**  
Persentase Sampah yang Berkurang Melalui 3R  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 – 2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, 2024

#### 2.1.1.6 Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Jumlah timbunan sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga mengakibatkan beban TPA semakin tinggi apabila sampah yang dihasilkan rumah tangga tidak didaur ulang. Sistem pemrosesan TPA di Kabupaten Tana Toraja masih menggunakan sistem open dumping disebabkan karena kapasitas TPA yang telah overload sehingga tidak dapat dilakukan proses penutupan tanah atau dengan metode controlled dan sanitary landfill. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sarana pengelolaan sampah di TPA seperti Excavator dan Bulldozer

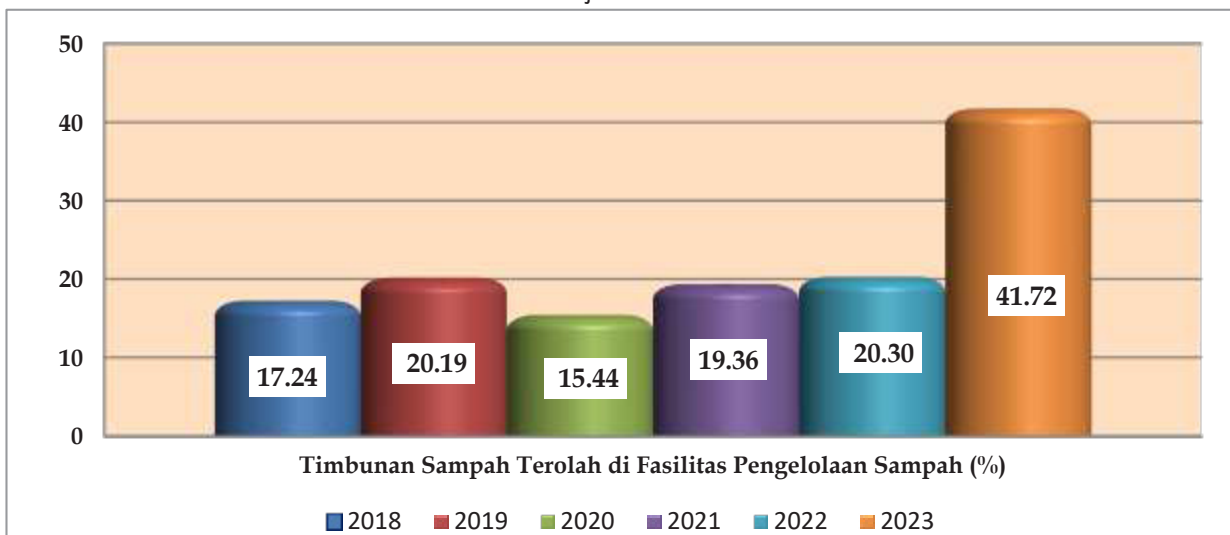


yang tidak berfungsi optimal. Perluasan lahan dan pembangunan TPA baru menjadi isu utama dalam pengelolaan sampah.

Jumlah timbunan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah dari tahun 2018 hingga 2023 mengalami tren fluktuasi dimana hal ini disebabkan karena kontribusi upaya pengurangan sampah dari sumbernya masih sangat kecil, sehingga penanganan sampah di Tana Toraja masih pada pendekatan angkut dan buang ke TPA sehingga belum terdapat upaya yang signifikan pada pengurangan sampah dari sumbernya.

**Grafik 2.5**

Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah  
Kab. Tana Toraja Tahun 2018 - 2023



Sumber : DLH Kab. Tana Toraja, 2024

Meskipun mengalami sedikit peningkatan namun proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah masih sangat minim. Hal ini disebabkan karena pelayanan pengangkutan sampah baru melayani 6 (enam) kecamatan, itu pun hanya pada wilayah perkotaan ditambah dengan kondisi armada pengangkut sampah yang kurang optimal.



**Grafik 2.6**

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah  
Kab. Tana Toraja Tahun 2021 - 2023



Sumber : DLH Kab. Tana Toraja, 2024

#### 2.1.1.7 Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Tana Toraja dominan berada pada morfologi pegunungan dengan kemiringan lereng yang cukup curam. Kondisi morfologi tersebut ditambah dengan perubahan iklim menyebabkan wilayah ini sering dilanda bencana, terutama bencana tanah longsor. Selain itu bencana jenis lain juga pernah terjadi sesuai data BPBD Kabupaten Tana Toraja, seperti bencana angin puting beliung, bencana kebakaran, bencana banjir dan banjir bandang namun kejadian tersebut tidak setiap tahun. Kejadian bencana terutama tanah longsor memperlihatkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat alih fungsi lahan yang diperparah dengan perubahan iklim. Disisi lain, pengelolaan kebencanaan di Tana Toraja selama satu decade terakhir diperhadapkan pada beberapa hambatan dan tantangan diantaranya : 1) Informasi kajian risiko ancaman bencana belum tersedia, 2) Pengarusutamaan penanggulangan bencana yang responsif, inklusif, dan menyinergikan peran seluruh stakeholder belum terakomodasi dalam kerangka visi dan implementasi penanggulangan bencana daerah, penanganan dampak dan pengelolaan potensi perubahan iklim, 3) Kapasitas kelembagaan, sumber daya kebencanaan, dan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana masih perlu terus dioptimalkan, dan 4) Belum ada rencana kontigensi dan sistem terpadu untuk bencana non Alam khususnya



penyakit. Selain itu perlu menjadi perhatian khusus dampak bencana yang mengganggu layanan sosial yang penting bagi anak-anak, termasuk pendidikan, kesehatan dan air, sanitasi dan kebersihan. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2015 hingga 2023, nilai indeks Kabupaten Tana Toraja mengalami stagnasi di angka 150,00 dan termasuk dalam kelas risiko tinggi terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas bencana. Jika di bandingkan dengan indeks Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 144.47, nilai indeks risiko bencana Kabupaten Tana Toraja masih sedikit lebih tinggi, demikian juga jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional sebesar 132,36.

**Grafik 2.7**

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tana Toraja,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2023



Sumber : InaRISK BNPB, 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana dilakukan untuk memacu kembali perkembangan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan jalur evakuasi bencana pada struktur ruang wilayah dan kawasan rawan bencana pada pola ruang wilayah.



Berdasarkan arahan peruntukan kawasan permukiman tersebut, maka lokasi potensi relokasi pasca bencana pada di Kabupaten Tana Toraja diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.9**  
Lokasi Potensi Relokasi Bencana Kabupaten Tana Toraja

Kabupaten	Risiko Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
Kabupaten Tana Toraja	Tanah Longsor	Kec. Makale Utara; Kec. Malimbong Belepe;
	Banjir	Kec. Mappak; Kec. Mengkendek; Kec. Rano;
	Cuaca Ekstrem	Kec. Rantetayo
	Kebakaran	

Sumber : Analisis RPJPD Prov. Sulsel Tahun 2025-2045

### 2.1.1.8 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Tahun 2017 hingga 2020 prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (PoU) mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,67 poin kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 6,60 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan pola ketidacukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi dapat disebabkan oleh fluktuasi harga pangan serta beberapa tantangan diantaranya: a) Perubahan iklim yang berdampak pada pergeseran musim tanam, pola tanam, produktivitas, serangan hama dan penyakit serta kebutuhan air; b) Akses terhadap pangan yang masih belum merata akibat faktor ekonomi dan kondisi fisik; dan c) Jumlah penduduk yang terus bertambah yang membutuhkan kecukupan konsumsi pangan. Dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan dan penyelenggaraan pangan serta regulasi yang mendukung pembangunan ketahanan pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Tana Toraja.

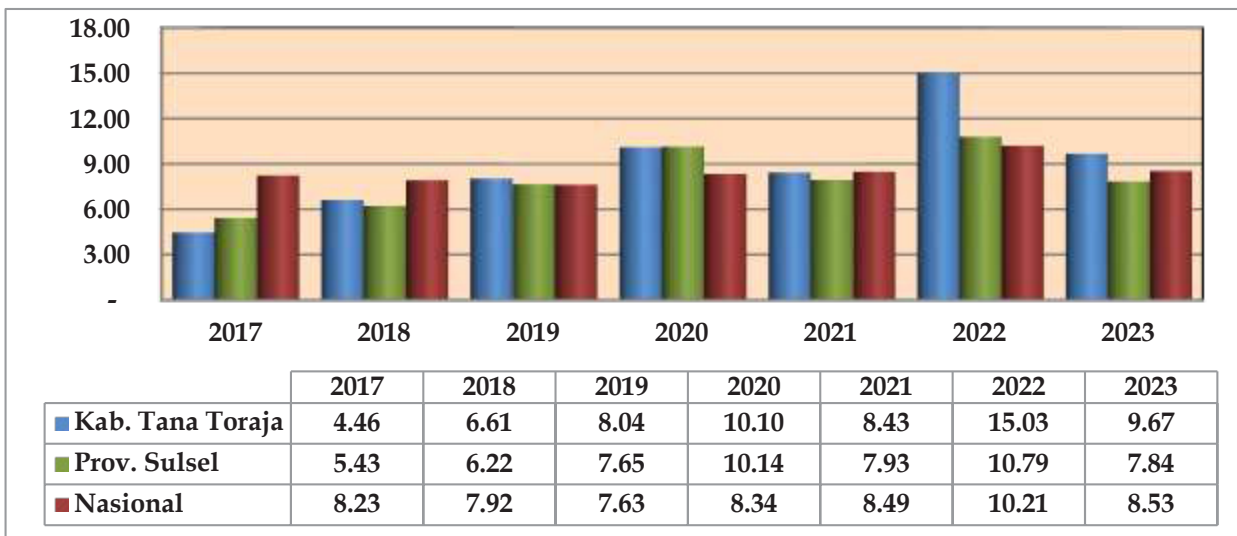
Tahun 2023 prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan mencapai 9,67 persen persen mengalami penurunan dari tahun 2022 yakni sebesar 15,03 persen.



Hal ini mengindikasikan capaian ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Tana Toraja mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan status Kabupaten Tana Toraja yang masuk dalam kategori Tahan Pangan Tinggi.

**Grafik 2.8**

Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tana Toraja, 2023

### 2.1.1.9 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota/provinsi. Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah : 1) Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih; 2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; 3) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran; 4) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik; 5) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; 6) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; 7) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk; 8) Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting); 9) Angka harapan hidup pada saat lahir.

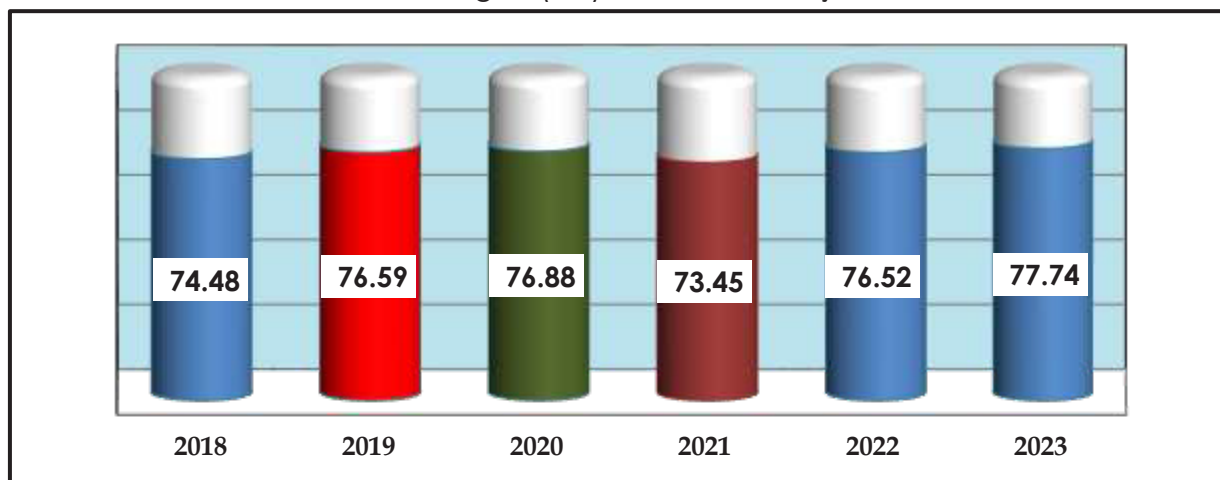
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 sebesar 77,74 atau masuk dalam kategori Tahan Pangan Tinggi (>75,68). Dalam



kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tana Toraja mengalami tren fluktuatif dimana peningkatan IKP tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 77,74 dan terendah tercatat pada tahun 2021 sebesar 73,45.

**Grafik 2.9**

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kab. Tana Toraja Tahun 2018-2022



Sumber : Pusdatin Setjen Kementerian Pertanian, 2023

Meskipun Kabupaten Tana Toraja memiliki ketahanan pangan yang cukup baik namun terdapat beberapa hambatan dan tantangan ke depan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tana Toraja antara lain : a) perubahan iklim yang berdampak pada pergeseran musim tanam, pola tanam, produktivitas, serangan hama dan penyakit serta kebutuhan air; b) meningkatnya fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan monokultur, terutama di daerah hulu dan LP2B; c) minat pemuda di bidang pertanian rendah, dan d) simpul dan jaringan distribusi logistik pangan yang perlu dikembangkan.

#### **2.1.1.10 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern merupakan susunan keragaman pangan berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan pangan serta konsumsi pangan. Skor PPH dapat digunakan sebagai instrumen dalam menilai situasi konsumsi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah yang membantu penyusunan rencana

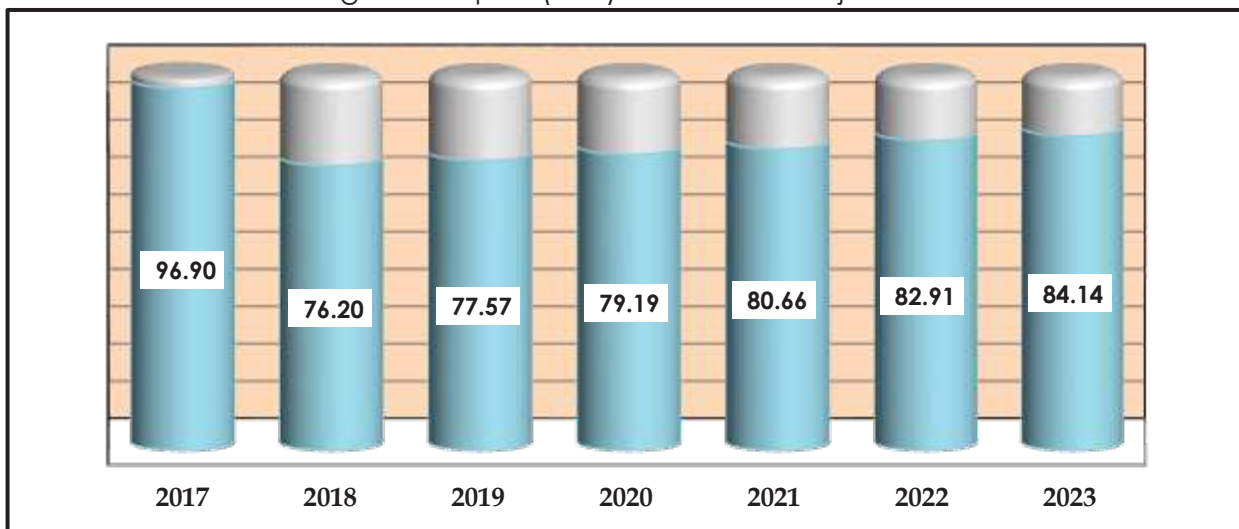


kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan pertimbangan aspek sosial, ekonomi, budaya serta preferensi konsumsi pangan oleh masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat menjadi acuan dalam menentukan sasaran perencanaan dan evaluasi penyediaan, khususnya produksi pangan.

Selama kurun waktu 7 tahun terakhir, skor pola pangan harapan di Kabupaten Tana Toraja memiliki dinamika yang fluktuatif. Di tahun 2018, skor PPH mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya, dari 96,9 persen menjadi 76,2 persen pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Tana Toraja masih tinggi dalam konsumsi karbohidrat terutama tingkat konsumsi beras, dan masih rendah dalam konsumsi umbi-umbian, protein hewani, sayur-sayuran serta buah-buahan. Namun setelah itu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menjadi 84,14 pada tahun 2023.

**Grafik 2.10**

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kab. Tana Toraja Tahun 2017-2023



Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tana Toraja, 2024

## 2.1.2 ASPEK DEMOGRAFI

### 2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

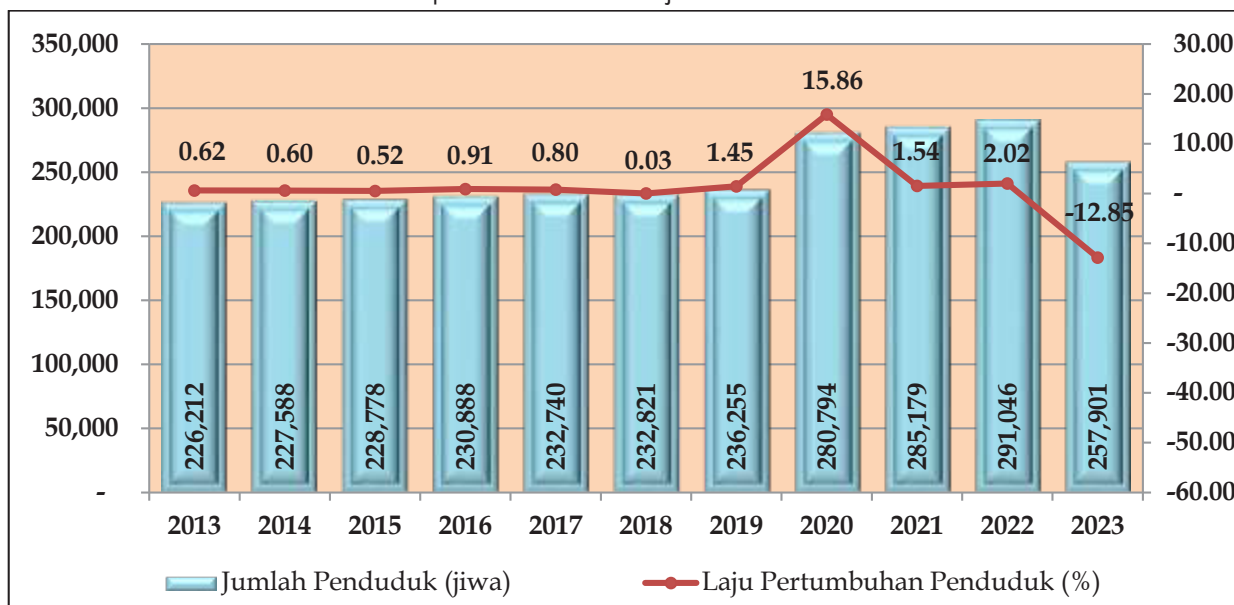
Jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 mencapai 257.901 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 sebesar -12,85 persen. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Makale mencapai 36.310 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 918 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada kecamatan Mappak



mencapai 5.840 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 35 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Grafik 2.11**

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013-2023

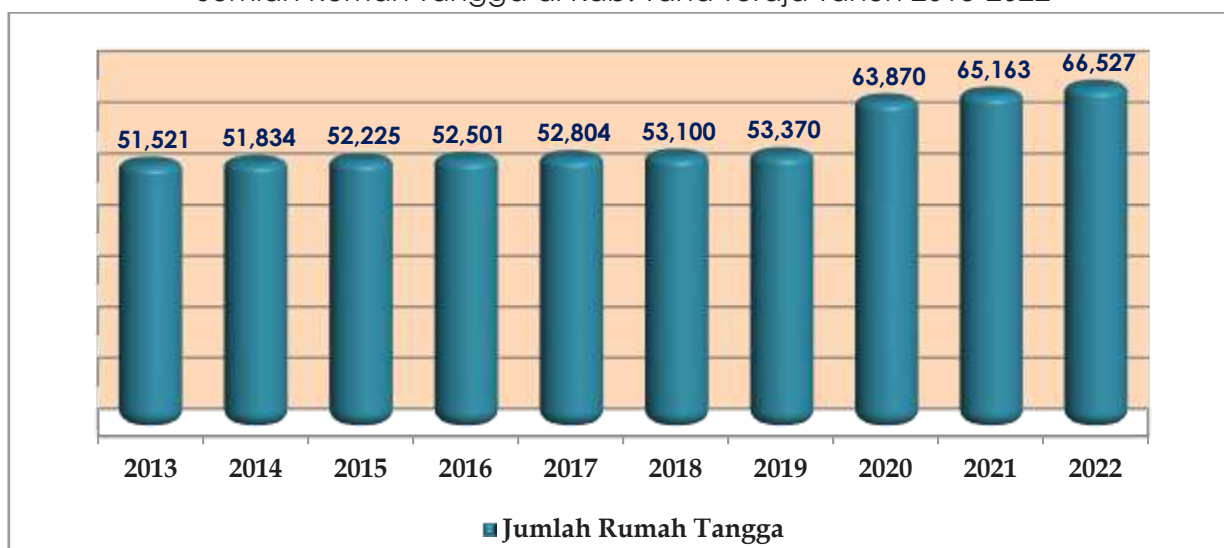


Sumber : BPS Kab. Tana Toraja, 2024

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, jumlah rumah tangga di Kabupaten Tana Toraja juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, jumlah rumah tangga sebanyak 51.521 keluarga kemudian meningkat menjadi 66.527 keluarga pada tahun 2022.

**Grafik 2.12**

Jumlah Rumah Tangga di Kab. Tana Toraja Tahun 2013-2022



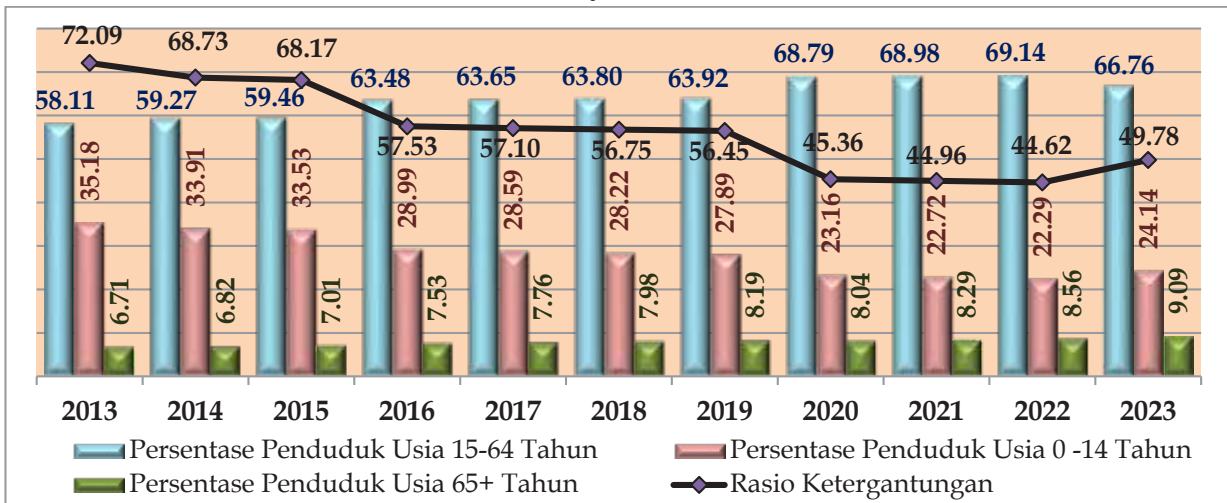
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023



### 2.1.2.2 Rasio Ketergantungan

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi rasio ketergantungan di Kabupaten Tana Toraja. Pada tahun 2013, rasio ketergantungan di Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 72,09 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung 73 penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia di atas 65 tahun kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2023 menjadi 49,78 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung 50 penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia di atas 65 tahun.

**Grafik 2.13**  
Struktur Penduduk dan Rasio Ketergantungan  
Kab. Tana Toraja Tahun 2013-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

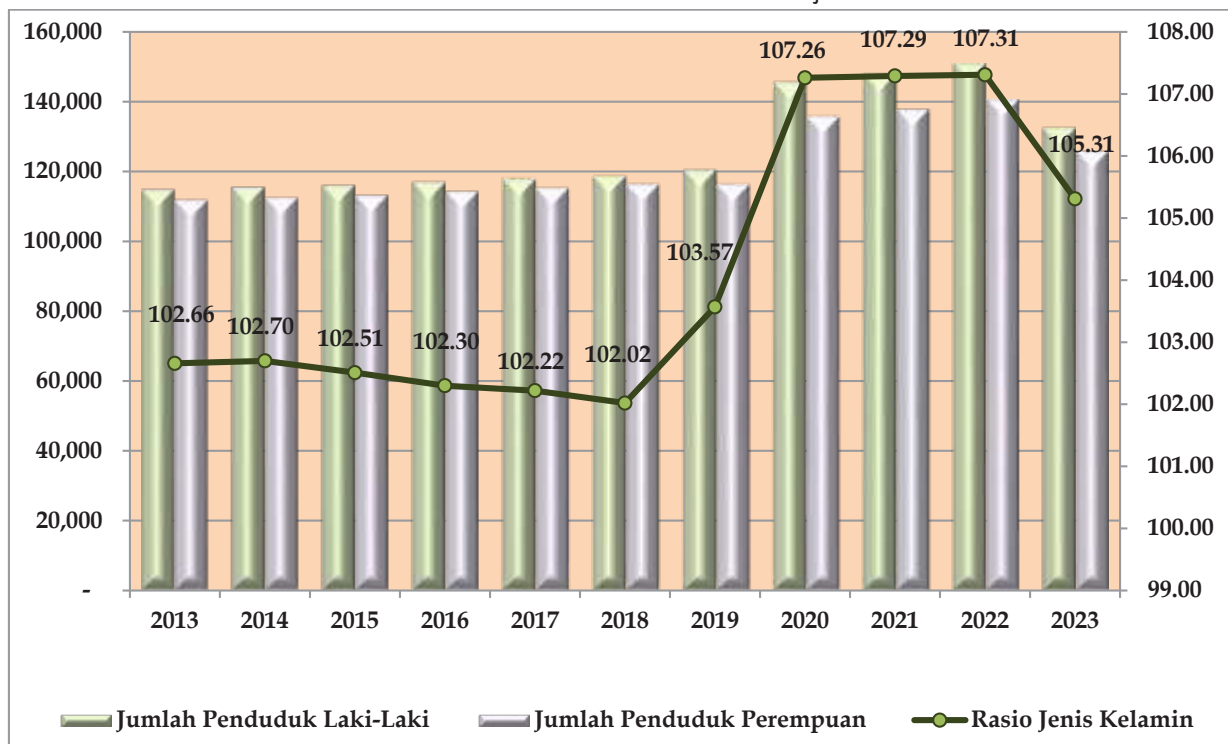
### 2.1.2.3 Komposisi Penduduk

Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 105,31 yang menggambarkan bahwa terdapat 105 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 132.284 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 125.617 jiwa. Perbandingan rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2013 sampai dengan 2023 mengalami tren fluktuasi dimana nilai tertinggi tercatat sebesar 107,31 pada tahun 2022.



**Grafik 2.14**

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab. Tana Toraja Tahun 2013-2023



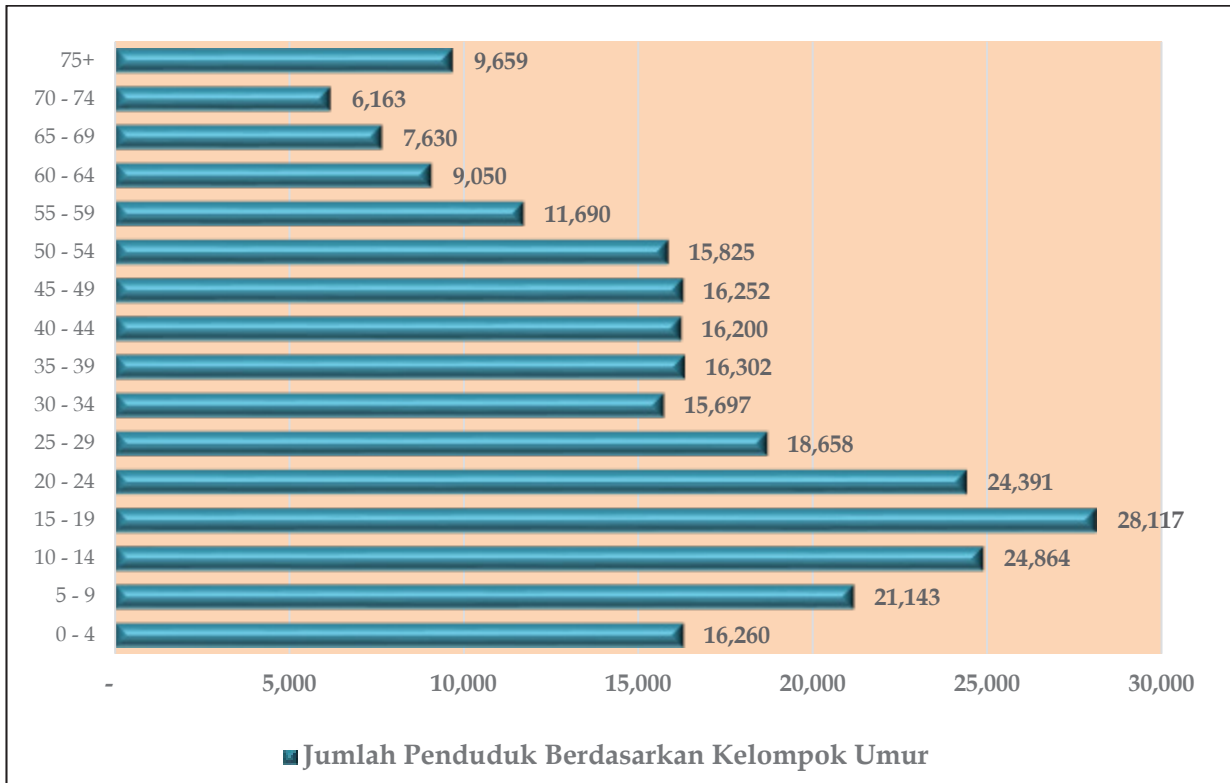
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 berada pada kelompok umur 15 – 19 tahun dengan jumlah 28.117 jiwa disusul kelompok umur 10 - 14 tahun sejumlah 24.864 jiwa. Hal ini menggambarkan jumlah penduduk usia produktif pada kelompok usia 15-29 merupakan bonus demografi dimana jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut lebih besar daripada jumlah penduduk pada kelompok usia non produktif. Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah dengan peningkatan kualitas SDM, maka kondisi ini akan menjadi modal penting untuk pembangunan menuju Indonesia Emas tahun 2045.



**Grafik 2.15**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umum Kab. Tana Toraja Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2024

#### 2.1.2.4 Kepadatan Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk akibat luas wilayah yang bersifat tetap. Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja saat ini sebesar 2.054,30 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 291.046 jiwa sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten Tana Toraja sebesar 146 jiwa/km<sup>2</sup>. Perkembangan kepadatan penduduk di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.10**

Perkembangan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 - 2023

Kecamatan	Luas Wilayah	2021		2022		2023	
		Jml. Pddk.	Kepadatan	Jml. Pddk.	Kepadatan	Jml. Pddk.	Kepadatan
Bonggakaradeng	206,76	8.080	39	8.239	40	6.990	34
Simbuang	194,82	8.107	42	8.276	42	6.640	34
Rano	89,43	7.766	87	7.926	89	6.610	74
Mappak	166,02	7.120	43	7.266	44	5.840	35



Kecamatan	Luas Wilayah	2021		2022		2023	
		Jml. Pddk.	Kepadatan	Jml. Pddk.	Kepadatan	Jml. Pddk.	Kepadatan
Mengkendek	196,74	37.092	189	37.868	192	33.500	171
Gandangbatu Sillanan	108,63	23.276	214	23.742	219	21.190	196
Sangalla	36,24	8.041	222	8.202	226	7.510	208
Sangalla Selatan	47,80	9.727	203	9.929	208	8.660	182
Sangalla Utara	27,96	9.157	328	9.343	334	8.370	301
Makale	39,75	39.040	982	39.805	1001	36.310	918
Makale Selatan	61,70	16.956	275	17.314	281	15.480	252
Makale Utara	26,08	14.796	567	15.097	579	13.350	514
Saluputti	87,54	9.922	113	10.129	116	9.390	108
Bittuang	163,27	19.012	116	19.406	119	17.440	107
Rembon	134,47	25.220	188	25.756	192	22.650	169
Masanda	134,77	8.695	65	8.881	66	7.950	59
Malimbong Balepe	211,47	10.603	50	10.813	51	9.610	46
Rantetayo	60,35	14.957	248	15.276	253	13.370	223
Kurra	60,50	7.612	126	7.778	129	7.041	117
<b>TOTAL</b>	<b>2.054,30</b>	<b>285.179</b>	<b>139</b>	<b>291.046</b>	<b>142</b>	<b>257.901</b>	<b>126</b>

Sumber : BPS Tana Toraja, 2024

### 2.1.2.5 Migrasi Penduduk

Migrasi penduduk merupakan salah satu mobilitas atau perpindahan penduduk yang terjadi secara permanen atau sifatnya menetap. Berdasarkan sifatnya yang permanen tersebut, maka migrasi penduduk tersebut termasuk faktor yang memengaruhi adanya perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Migrasi yang dilakukan oleh penduduk umumnya bertujuan untuk mencari kesejahteraan, keamanan, ataupun peruntungan hidup yang lebih baik di wilayah yang baru. Peralpnya aktivitas migrasi tersebut bisa dipengaruhi oleh banyaknya faktor, seperti masalah ekonomi, sosial budaya, atau bahkan didorong oleh pandangan politik tertentu.

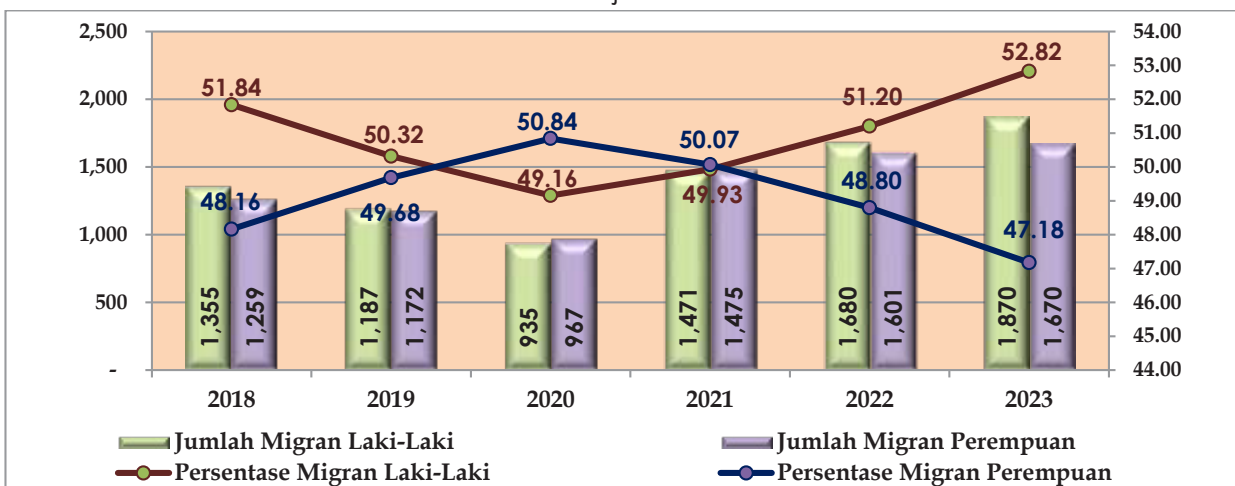
Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2023, jumlah migrasi penduduk usia 15 sampai 29 tahun di Kabupaten Tana Toraja bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2018 tercatat ada 2.614 penduduk kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 2.359 penduduk. Tahun 2022 ada 3.281 penduduk dan meningkat menjadi 3.540 penduduk pada tahun 2023. Jika dilihat dari jenis kelamin, pada periode yang sama persentase migrasi penduduk masih



didominasi oleh laki-laki kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2021, persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yakni sebesar 50,84 persen pada tahun 2020 dan 50,07 pada tahun 2021. Budaya perempuan melakukan migrasi pada era modern sekarang ini sudah dianggap hal yang biasa. Perempuan masa kini tidak hanya mengurus urusan dalam rumah tangga saja, akan tetapi sudah banyak terlibat kegiatan di luar rumah, bahkan tidak sedikit perempuan melakukan migrasi dengan alasan mencari pekerjaan maupun pendidikan. Pernikahan atau keluarga juga menjadi salah satu alasan migrasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki dimana ketika seorang perempuan telah menikah akan memilih ikut tinggal bersama suaminya.

**Grafik 2.16**

Perbandingan Migrasi Penduduk Usia 15 – 29 Tahun menurut Jenis Kelamin di Kab. Tana Toraja Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

### 2.1.2.6 Komunitas Masyarakat Adat

Komunitas Masyarakat Adat memiliki peran penting sebagai garda terdepan menjaga dan melestarikan budaya yang diwariskan nenek moyang di tengah pesatnya perkembangan zaman. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam di setiap komunitas dan wilayah adat dengan menjunjung tinggi nilai sosial warisan leluhur. Masyarakat Adat sejak dulu mengatur kebiasaan hidup mereka dengan hukum dan kelembagaan adat. Toraja memang dikenal sebagai salah daerah di Indonesia yang memiliki adat istiadat dan budaya



yang unik. Falsafah hidup Masyarakat Adat Toraja "Misa' Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate" yang artinya "Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh".

Segala kebudayaan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Toraja tak bisa dipisahkan dengan wilayah adat. Lestarnya kebudayaan tersebut menjadi satu kesatuan dengan lestarnya wilayah adat. Toraja memiliki total 32 wilayah adat, 12 di Toraja Utara dan 21 di Tana Toraja. Namun jika dijumlahkan menjadi ganjil karena khusus untuk wilayah adat Madandan masuk dalam kedua wilayah administrasi kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja. Wilayah Adat di Tana Toraja meliputi Balepe, Ulusalu, Rano, Balla, Bittuang, Simbuang, Malimbong, Palesan, Makale, Banga, Bau, Se'seng, Talion, Kurra, Madandan, Sangalla, Mengkendek, Pali, Tapparan, Mappa' dan Buakayu. Sedangkan Wilayah Adat di Toraja Utara meliputi: Dende, Piongan, Sa'dan, Rantebua, Pangala', Buntao, Kesu, Tondon, Nanggala, Balusu, Tikala dan Madandan.

Masyarakat suku Toraja memiliki anggapan bahwa alam merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal tersebut juga sebagai suatu bentuk penghormatan kepada arwah para leluhur mereka yang dahulu telah menjaga alamnya dengan baik. Toraja juga dikenal memiliki banyak kebudayaan di dalamnya. Kebudayaan tersebut tercipta sejak dahulu oleh para leluhur hingga saat ini dan menjadi kebudayaan turun-temurun yang masih dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat suku Toraja. Bentuk kebudayaan yang terkenal di Toraja salah satunya adalah tradisi upacara adat. Masyarakat Tana Toraja memiliki pandangan bahwa kematian sebagai berpindahnya jiwa seseorang yang telah meninggal dunia menuju ke tempat yang lebih baik yaitu alam roh. Alam roh yang dimaksud adalah kembali pada keabadian bersama para leluhur mereka di sebuah tempat peristirahatan yang bernama Puya. Upacara adat pemakaman Rambu Solo' dapat dikatakan sebagai kegiatan pelaksanaan ritual yang sangat penting dan berbiaya tinggi. Karena dengan adanya aturan pelaksanaan upacara yang disesuaikan dengan strata sosial, maka dapat memberikan ciri yang khas pada pelaksanaan upacara adat pemakaman Rambu Solo'.

Rambu solo' merupakan upacara adat kematian orang Toraja yang bertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah orang yang meninggal



menuju alam roh atau biasa disebut masyarakat Toraja 'Puya'. Ritual pemakaman mencerminkan betapa pentingnya hubungan antar sanak keluarga bagi masyarakat Toraja, terlebih bagi anggota keluarga yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Bagi Masyarakat Adat di Toraja, 'Rambu solo' menunjukkan hubungan antar keluarga yang kekal dan tak terputus walaupun telah dipisahkan oleh kematian. Ritual ini dapat dijumpai di semua wilayah adat yang ada di Tana Toraja. 'Rambu Solo' menjadi momentum bagi keluarga untuk mempererat kembali hubungan kekeluargaan.

Ma'badong merupakan salah satu bagian dari acara rambu solo'. Ma'badong sendiri adalah sebuah bentuk tradisional yang hanya boleh ditarikan dalam ritual pemakaman. Tarian ini berupa tarian tanpa musik yang di dalamnya berisi syair-syair pujian yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Tak sekadar pelantunan saja mengenai orang yang meninggal, namun lebih dari itu, Ma'badong juga menggambarkan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Gambaran mengenai kebudayaan orang Toraja tergambar dalam ritual ini, antara lain nilai spiritual, nilai sosial hingga hubungan antar kelompok dalam Masyarakat Adat Toraja.

Dalam upacara adat Rambu Solo salah satu hewan yang dikorban yaitu Tedong. Tedong merupakan bahasa Toraja untuk kerbau. Kerbau merupakan hewan yang penting bagi masyarakat Toraja selain babi karena selain nilai ekonomisnya yang relatif tinggi, juga merupakan hewan yang digunakan dalam proses penyelenggaraan upacara adat.

## **2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **2.2.1 ASPEK KESEJAHTERAAN EKONOMI**

#### **2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

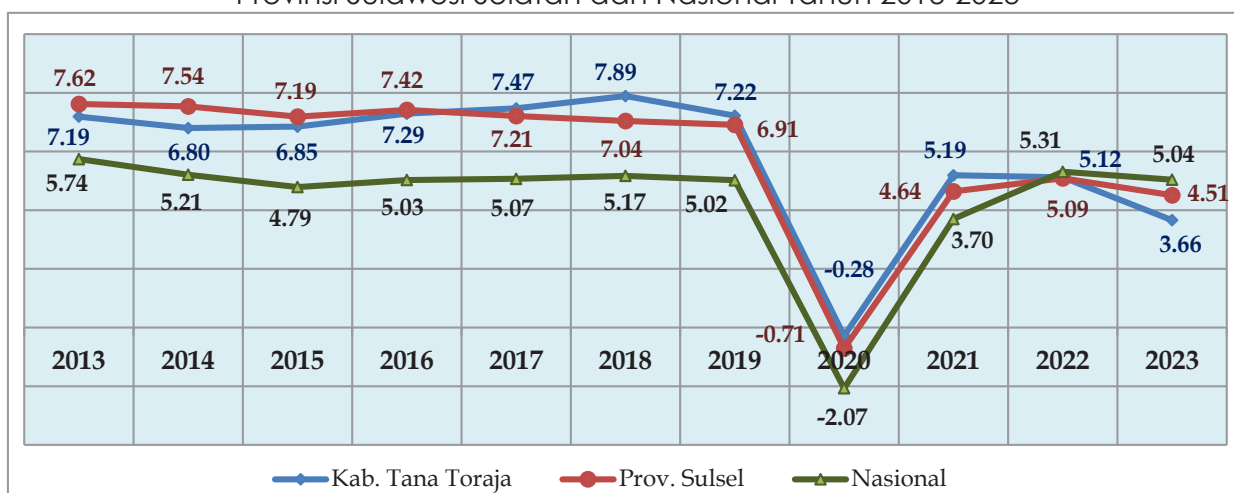
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2013 hingga 2023 mengalami tren fluktuatif dimana dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni tercatat sebesar 7,89 persen. Setelah tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga tahun 2020 yaitu sebesar minus 0,28 persen. Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang



terendah bagi Kabupaten Tana Toraja. Pandemi Covid-19 yang melanda sejak akhir 2019 menjadi pemicu utama melambatnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Perekonomian Tana Toraja tumbuh sebesar 5,19 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan mulai terjadinya pemulihan ekonomi secara signifikan pasca pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan menjadi 5,12 persen, kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 3,66 persen. Capaian tersebut masih di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dengan nilai masing-masing sebesar 4,51 persen dan 5,04 persen. Gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.17**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023



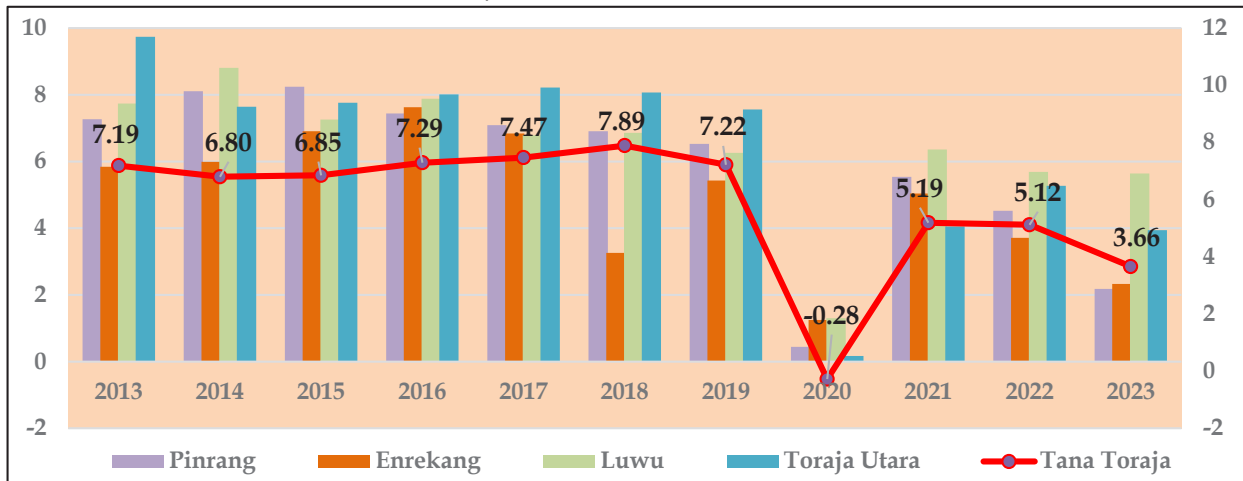
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menempati urutan kedua di bawah Kabupaten Toraja Utara, Namun akibat Pandemi Covid 19, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja menjadi yang terendah jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar yakni tercatat minus 0,28 persen. Seiring perbaikan kondisi perekonomian pasca Pandemi Covid 19, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja semakin membaik namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dan berada di bawah Kabupaten Luwu dan Kabupaten Toraja Utara.



**Grafik 2.18**

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tana Toraja  
Dan Kabupaten Sekitar Tahun 2013-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

### 2.2.1.2 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Struktur perekonomian suatu wilayah yang relatif maju ditandai oleh semakin besarnya peran sektor industri pengolahan dan perdagangan dalam menopang perekonomian wilayah tersebut. Sektor ini telah menggantikan peran sektor tradisional seperti sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan wilayah. Sektor industri pengolahan diyakini sebagai salah satu sektor yang mampu mengakselerasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengembangkan peranan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Tana Toraja, pemerintah membutuhkan informasi yang lebih detail mengenai seberapa besar peran sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Tana Toraja. Berkembangnya sektor industri pengolahan akan mendorong berkembangnya sektor-sektor perekonomian lainnya termasuk sektor industri pengolahan itu sendiri.

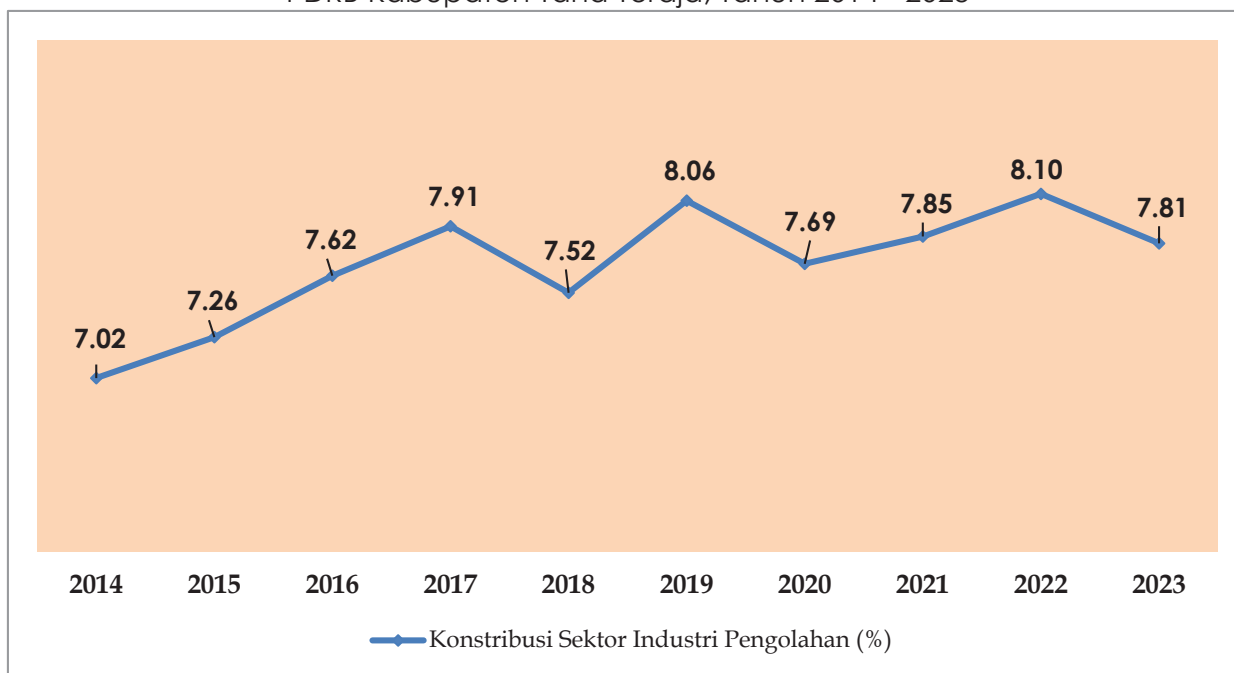
Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan dimana tahun 2014, kontribusi sektor industri pengolahan tercatat sebesar 7,02 persen dan merupakan capaian terendah dalam kurun waktu tersebut kemudian pada tahun 2023 tercatat meningkat menjadi 7,81 persen. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022



dengan nilai kontribusi sebesar 8,10 persen. Perkembangan sektor industri kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.19**

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap  
PDRB Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2014 - 2023



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024

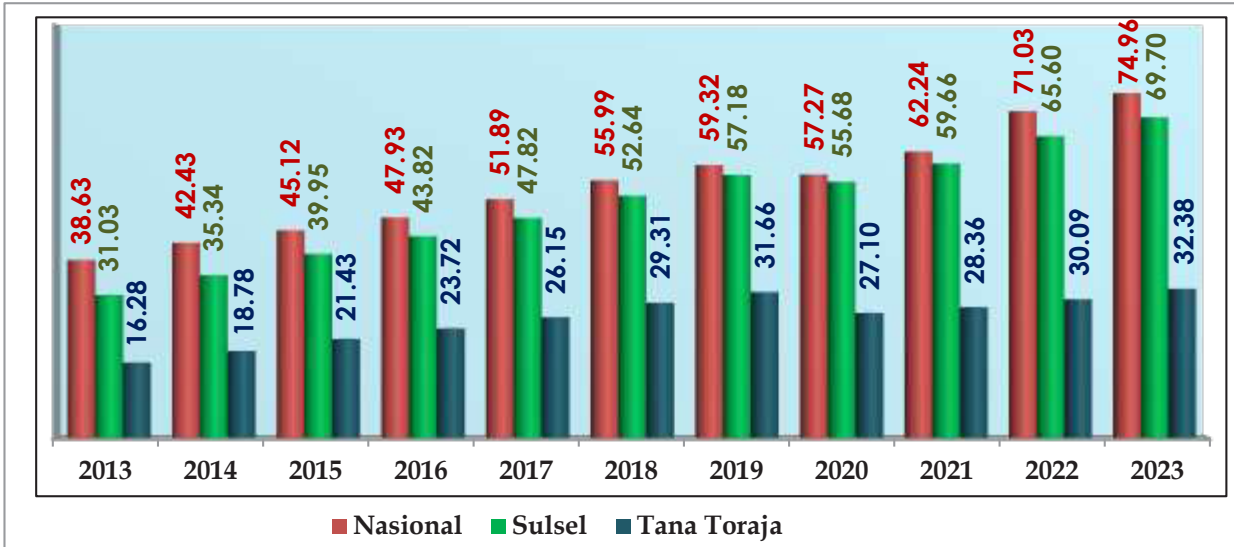
### 2.2.1.3 Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi penduduk ditahun tertentu. Perekonomian Kabupaten Tana Toraja tahun 2013 hingga 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami tren peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 4,56 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang merupakan dampak dari Pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2023 kembali mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 32,38 juta. Kondisi ini seiring dengan mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi yang telah mengalami penyesuaian terhadap kondisi Covid-19 yang berlangsung hingga tahun 2021. Perbandingan PDRB Per kapita Kabupaten Tana Toraja dengan PDRB Per kapita Sulawesi Selatan dan PDB Per kapita Nasional tahun 2013 hingga 2023 selengkapnya disajikan pada grafik berikut.



**Grafik 2.20**

Perbandingan PDRB per Kapita ADHB Nasional, Prov. Sulsel dan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 - 2023 (juta rupiah)

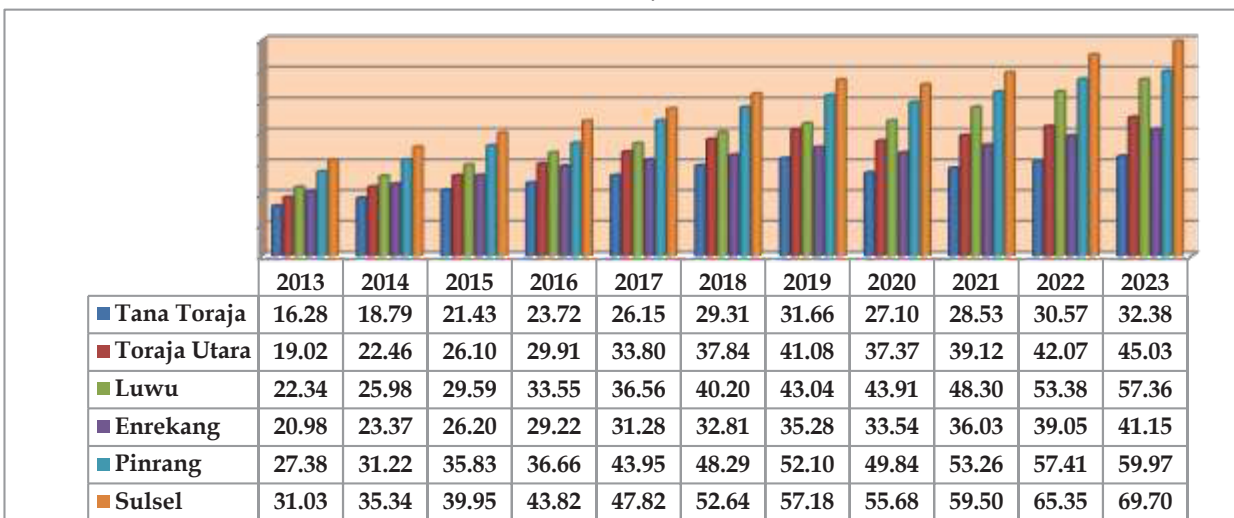


Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, nilai PDRB per kapita penduduk Kabupaten Tana Toraja lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Toraja Utara yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Untuk mengetahui gambaran pencapaian PDRB Per kapita Kabupaten Tana Toraja dibandingkan dengan kabupaten sekitar dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.21**

Perbandingan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan serta Kabupaten Sekitar Tahun 2013 – 2023



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024



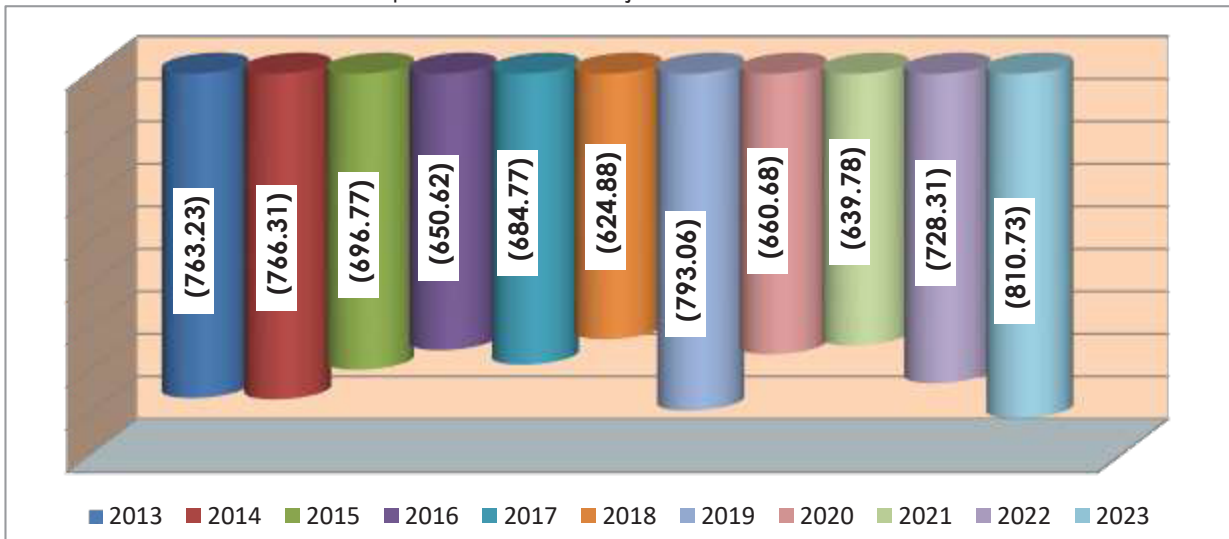
#### 2.2.1.4 Volume Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, net ekspor dipengaruhi oleh transaksi ekspor dan transaksi impor. Ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Tana Toraja, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (Supply) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (direct purchase) oleh penduduk (resident) Kabupaten Tana Toraja di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Tana Toraja terhadap ekonomi atau produk wilayah lain.

Berdasarkan data BPS Tana Toraja, Nilai Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan bernilai negatif yang artinya nilai impor antar daerah masih lebih besar daripada nilai ekspor antar daerah. Pada tahun 2013, nilai ekspor barang dan jasa di Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar minus 763,23 miliar rupiah kemudian menjadi minus 810,73 miliar rupiah pada tahun 2023. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa di Kabupaten Tana Toraja perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan Sumber daya manusia pelaku ekspor UMKM, Pengembangan Produk Unggulan dan Potensial Ekspor, peningkatan fasilitasi aksesibilitas angkutan ekspor barang dan jasa, mengembangkan konektivitas akses pasar serta kerja sama perdagangan yang berbagai pihak.

**Grafik 2.22**

Ekspor Barang dan Jasa (miliar Rupiah)  
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2024

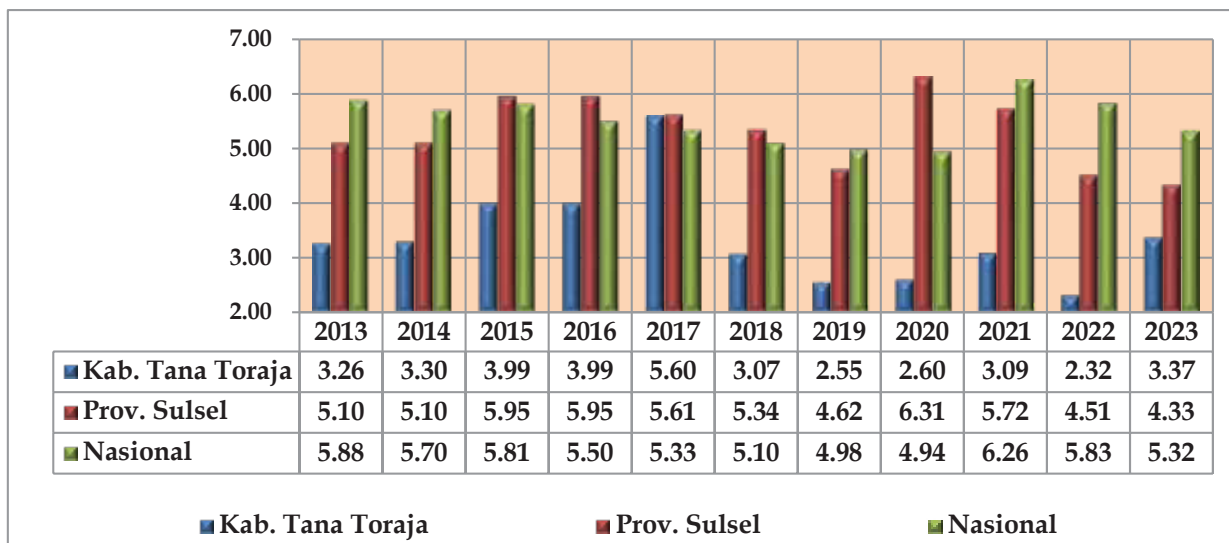
#### 2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Naik turunnya TPT dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Secara umum, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2013 sebesar 3,26 persen kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 3,37 persen pada tahun 2023 yang artinya dari 100 orang angkatan kerja ada terdapat empat orang penganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi dalam kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,60 persen sedangkan nilai terendah pada tahun 2019 sebesar 2,55 persen. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 masih lebih baik jika dibandingkan capaian Provinsi sebesar 4,33 persen dan Nasional sebesar 5,32 persen.



**Grafik 2.23**

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023



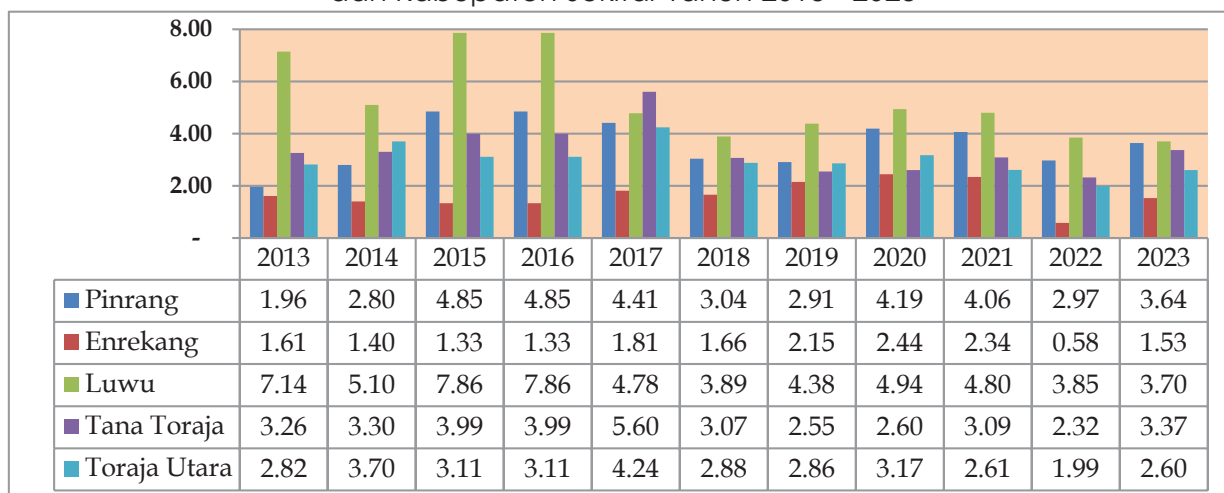
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2023

\* Tahun 2016 tidak dilaksanakan survei, menggunakan data tahun 2015

Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Toraja menempati urutan ke sebelas terendah dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, capaian Kabupaten Tana Toraja lebih baik dibandingkan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Luwu namun masih di bawah Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Enrekang.

**Grafik 2.24**

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Sekitar Tahun 2013 - 2023



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024

\* Tahun 2016 tidak dilaksanakan survei, menggunakan data tahun 2015



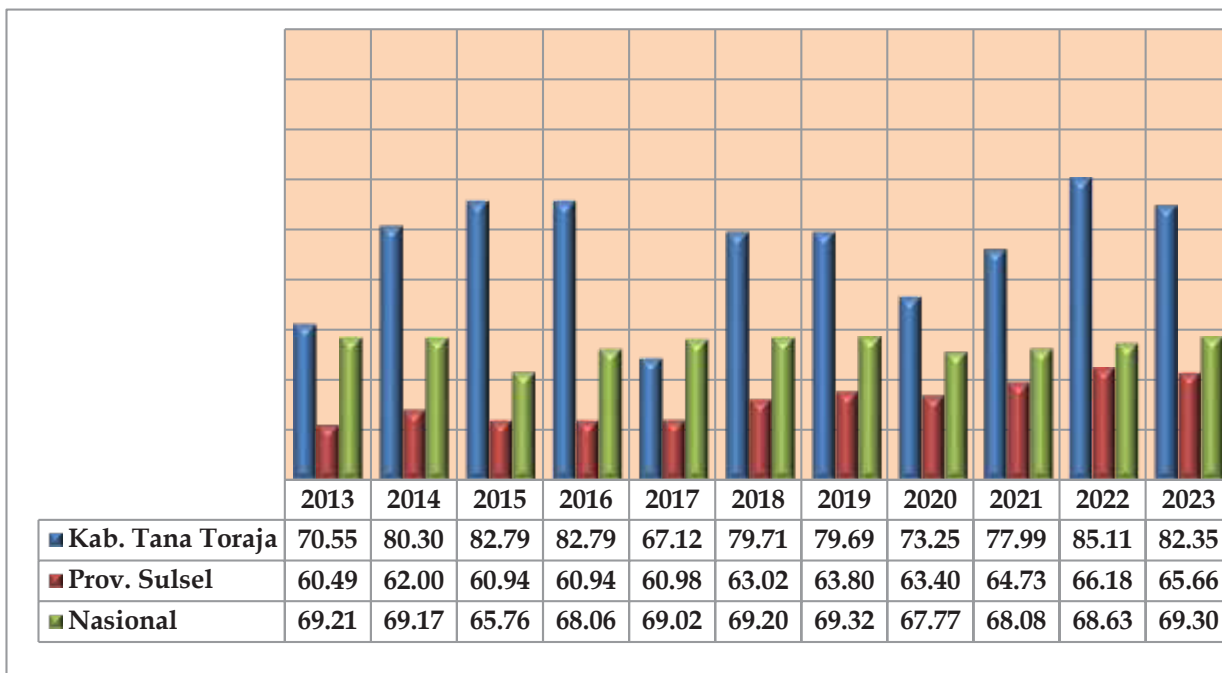
### 2.2.1.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja serta merupakan Indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan penduduk usia produktif terhadap kegiatan produksi barang dan jasa pada suatu wilayah. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/daerah. Semakin tinggi TPAK, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di daerah tersebut ingin terlibat dalam kegiatan produksi, sehingga produktivitas daerah dapat didorong, namun jika yang terjadi sebaliknya, maka bonus demografi Kabupaten Tana Toraja akan menjadi bencana demografi.

Pada Tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 82,35 persen atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 85,11 persen seiring dengan meningkatnya jumlah TPT dari 2,32 persen pada tahun 2023 menjadi 3,77 persen pada tahun 2023. Nilai TPAK Kabupaten Tana Toraja masih jauh di atas capaian provinsi sebesar 65,66 persen dan masih capaian Nasional sebesar 69,30 persen.

**Grafik 2.25**

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013 - 2023



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024

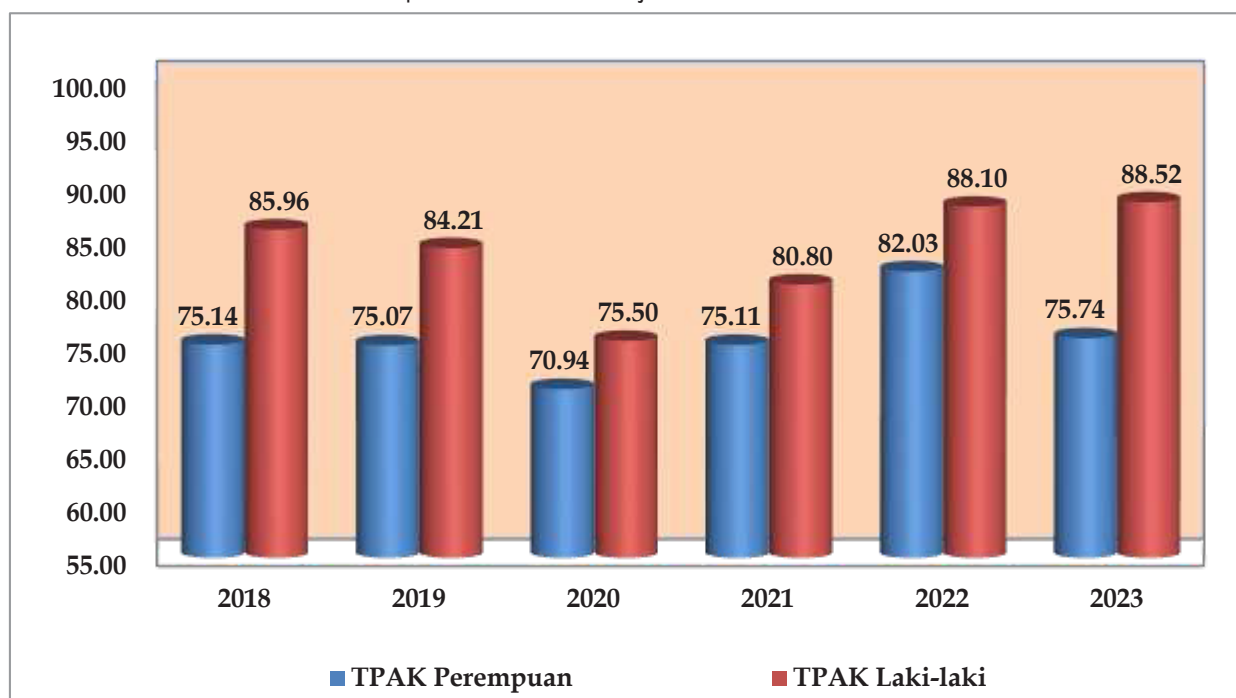


### 2.2.1.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Pada tahun 2023, berdasarkan jenis kelamin TPAK laki-laki sebesar 88,52 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK Perempuan yang tercatat sebesar 75,74 persen. Kondisi di Kabupaten Tana Toraja saat ini menggambarkan bahwa paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga sudah mulai terkikis. Hal ini ditandai bahwa meskipun TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK Perempuan namun selisihnya tidak terlalu besar. Berdasarkan nilai TPAK tahun 2023 menggambarkan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki yang termasuk angkatan kerja sekitar 89 orang sedangkan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan ada sekitar 76 orang yang termasuk angkatan kerja. Hal ini menandakan bahwa dominasi laki-laki sudah mulai berkurang dalam dunia kerja. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Grafik 2.26**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan  
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS RI, 2024



## 2.2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA

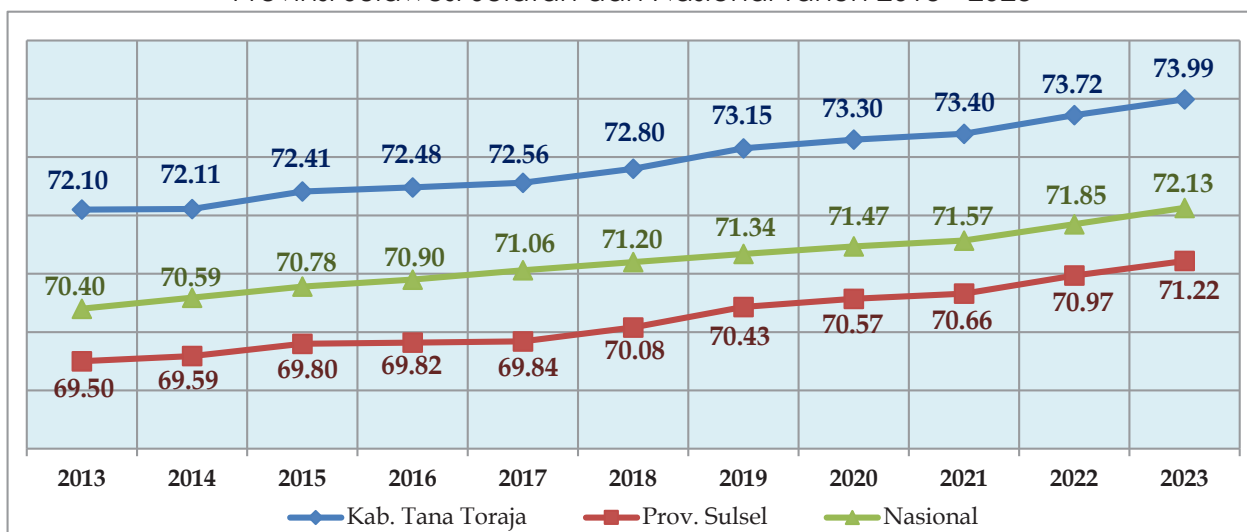
### 2.2.2.1 Usia Harapan Hidup (UHH)

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup, selain angka kesakitan masyarakat yang menggambarkan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. Umur harapan hidup merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Semakin tinggi capaian Umur Harapan Hidup maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir Umur Harapan Hidup di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal tersebut relevan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada Tahun 2023, Umur Harapan Hidup di Kabupaten Tana Toraja mencapai 73,99 tahun dan menjadi capaian tertinggi diantara 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan. Capaian Kabupaten Tana Toraja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71,22 tahun dan Nasional sebesar 72,13 tahun.

**Grafik 2.27**

Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013 - 2023



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2023

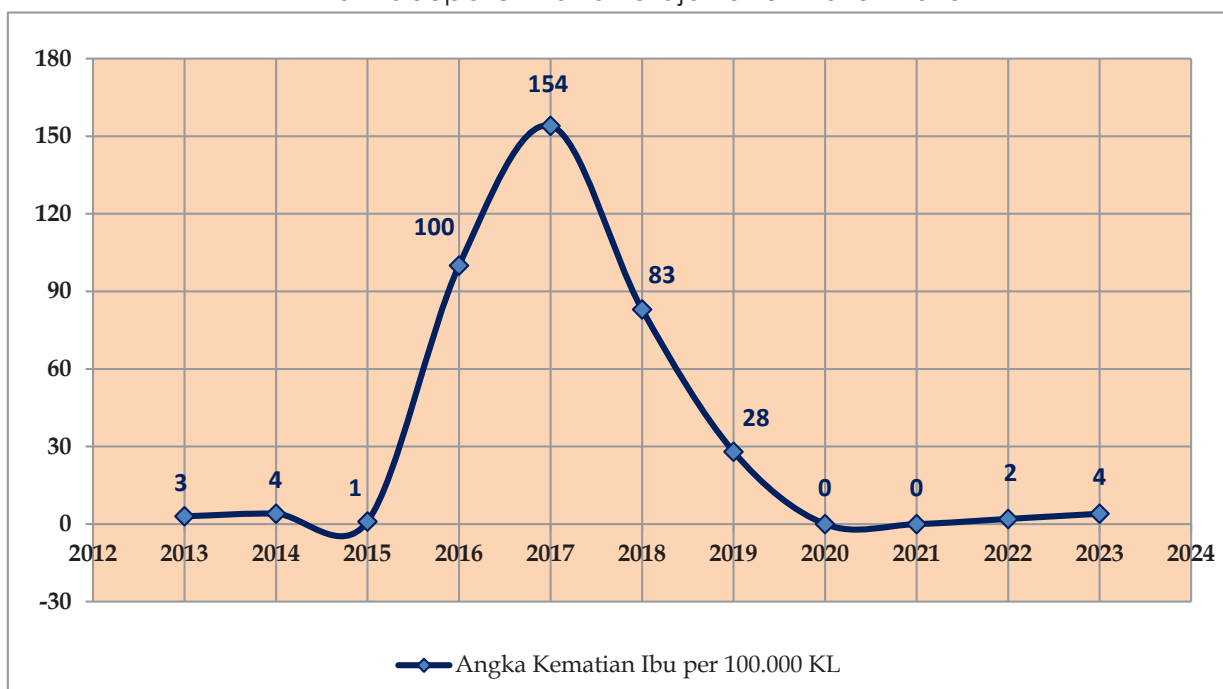


### 2.2.2.2 Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan sampai dengan pasca persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

**Grafik 2.28**

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 - 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, 2024

Dari grafik terlihat bahwa AKI sangat besar pada tahun 2016 sampai dengan 2019 dimana angka tertinggi tercatat pada tahun 2017 sebesar 154 Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. Adanya kasus kematian ibu disebabkan



oleh kondisi dimana ibu tidak siap mengalami kelahiran yaitu mengalami 4T (terlalu sering, terlalu banyak, terlalu muda dan terlalu tua) melahirkan. Penyebab langsung kematian ibu melahirkan seperti kasus pendarahan telah mengalami penurunan namun karena infeksi penyakit dan penyakit penyerta (jantung, hipertensi, kanker dll) mengalami peningkatan.

### **2.2.2.3 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan**

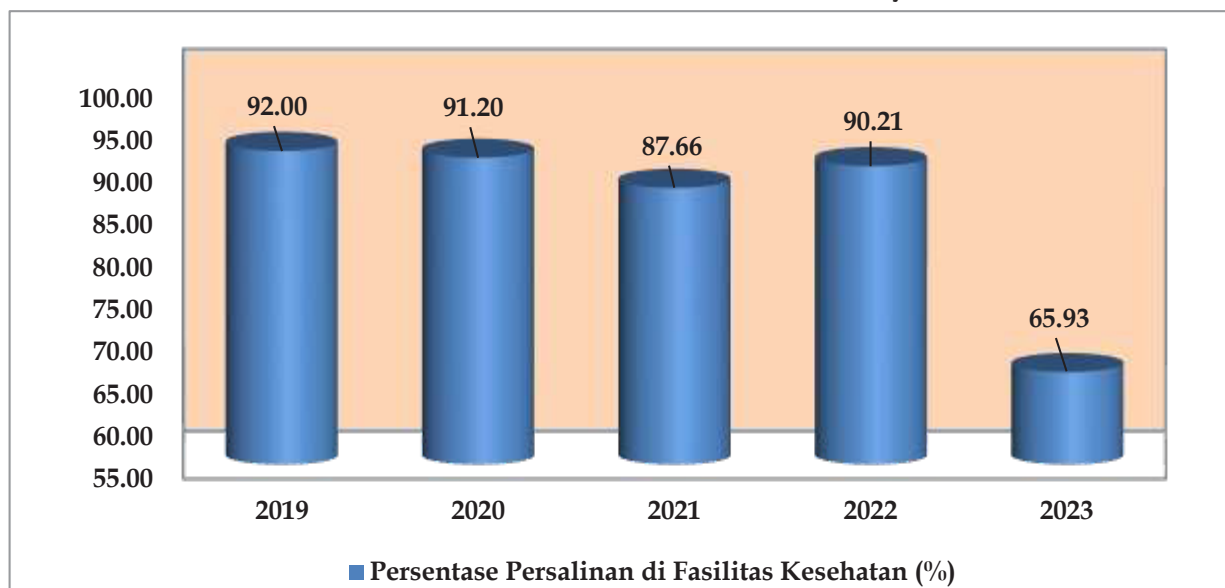
Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki manfaat yang sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi. Dalam proses persalinan, kehadiran tenaga medis yang terlatih dan fasilitas yang memadai menjadi faktor utama yang dapat meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan. Fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan lingkungan yang steril dan aman, serta dilengkapi dengan peralatan medis yang diperlukan untuk memantau kondisi ibu dan bayi selama proses persalinan. Selain itu, tenaga medis yang ada dapat memberikan perawatan yang komprehensif, mulai dari pemantauan kontraksi, pemberian obat-obatan yang diperlukan, hingga intervensi medis yang diperlukan dalam situasi darurat. Dalam fasilitas pelayanan kesehatan, ibu juga dapat menerima dukungan emosional dan informasi yang penting mengenai perawatan pasca-persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Dengan demikian, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki manfaat besar dalam menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap komplikasi yang mungkin terjadi selama proses persalinan.

Persentase persalinan pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 berdasarkan data Dinas Kesehatan hanya sebesar 65,93 persen. Angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan di bandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022, persentase persalinan di fasilitas kesehatan tercatat sebesar 90,21 persen. Hal tersebut antara lain dikarenakan jarak ke fasilitas kesehatan yang sulit dijangkau, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan ibu terkait pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan.



**Grafik 2.29**

Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kab. Tana Toraja Tahun 2019 - 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, 2024

#### 2.2.2.4 Prevalensi Stunting

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memberikan gambaran status gizi balita (stunting, wasting, underweight, overweight) yang determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak pada stunting. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan.

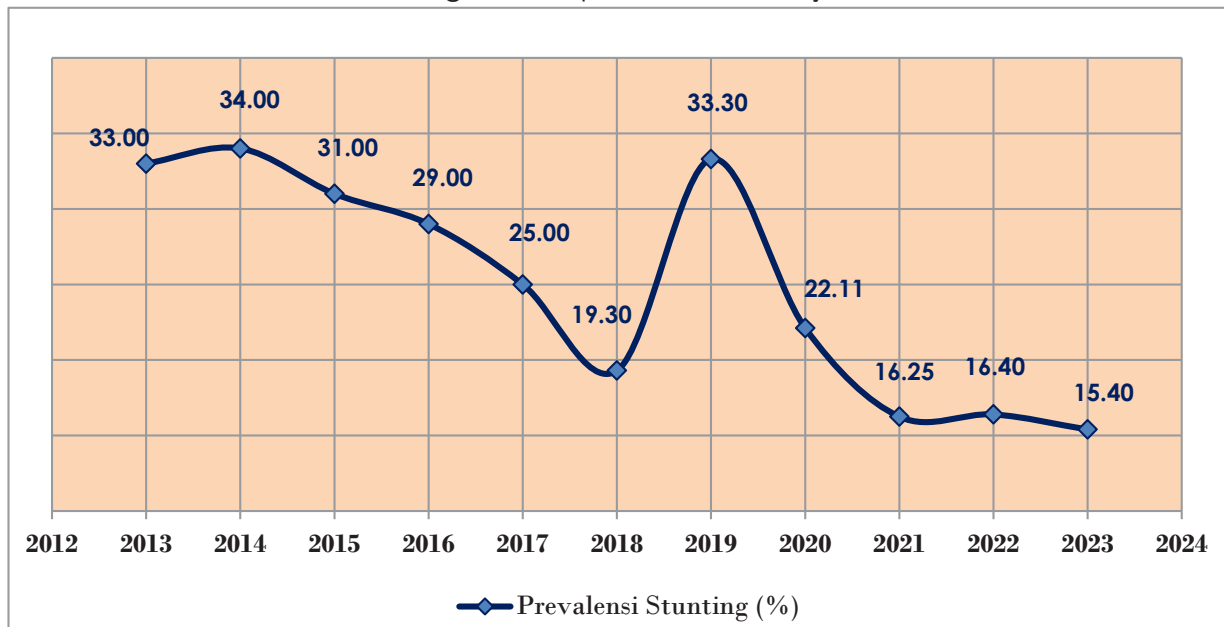
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, angka stunting di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dimana pada tahun 2013 sebesar 33,00 persen dan menjadi 15,40 persen pada tahun 2022, yang artinya terjadi penurunan rata-rata sebesar 1,80 persen per tahun. Angka stunting tertinggi terjadi pada 2014 sebesar 34,00 persen dan angka terendah pada tahun 2023 sebesar 15,40 persen. Beberapa faktor penghambat laju penurunan stunting adalah perilaku keluarga yang belum memahami secara komprehensif akan pentingnya menjaga kualitas janin dengan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil termasuk pencegahan penyakit. Hambatan lainnya yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran program



untuk pencegahan stunting secara konvergen di tingkat kabupaten hingga desa, sasaran intervensi yang kurang tepat, serta kurangnya tenaga gizi dan sebarannya yang belum merata.

**Grafik 2.30**

Prevalensi Stunting di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 - 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja, 2024

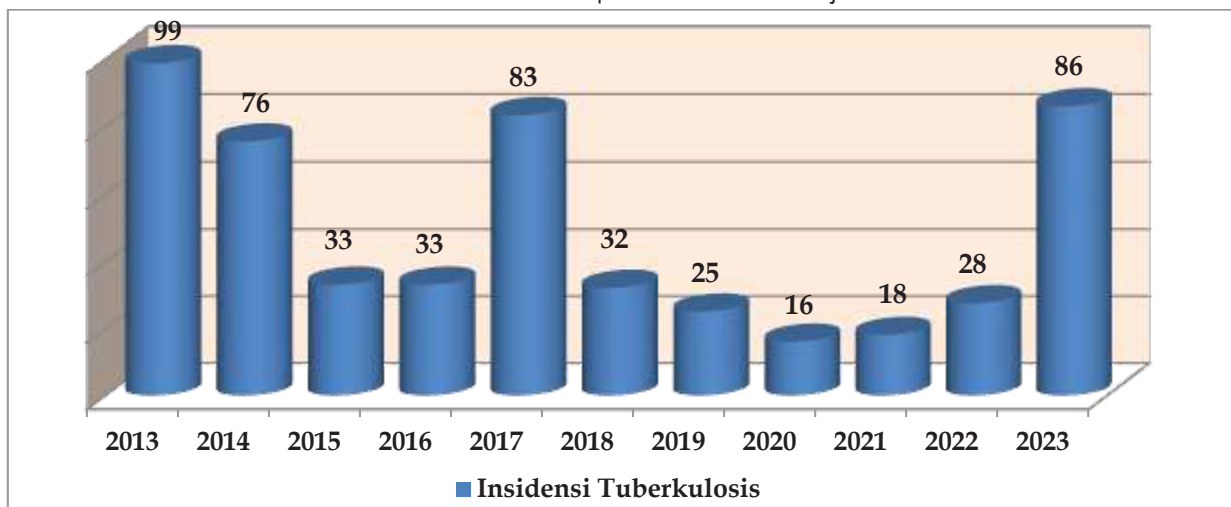
### 2.2.2.5 Insidensi Tuberkulosis

Beban masalah penyakit Tuberkulosis di dunia dan setiap wilayah direpresentasikan dalam angka kejadian Insiden, Prevalensi, dan Kematian akibat penyakit Tuberkulosis (TB). Penghitungan insiden TBC ini termasuk orang yang hidup dengan human immunodeficiency virus (HIV). Jumlah Kasus Insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Tahun 2013 hingga tahun 2016 mengalami tren menurun namun mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 33 kasus pada tahun 2016 menjadi 83 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2017. Setelah itu, Kasus Insidensi Tuberkulosis mengalami penurunan hingga tercatat ada 28 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 86 kasus per 100.000 penduduk. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



**Grafik 2.31**

Insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 - 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja, 2024

### 2.2.2.6 Cakupan Penemuan pada Terduga Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan pada Terduga kasus tuberkulosis diukur dari perbandingan antara jumlah kasus yang ditemukan dengan jumlah terduga tuberkulosis yang diperiksa. Cakupan penemuan pada terduga kasus tuberkulosis di Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2013 hingga tahun 2021 mengalami tren peningkatan dari 3,19 persen pada tahun 2013 menjadi 36,46 pada tahun 2021 namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan dimana tahun 2023 tercatat menjadi 25,00 persen.

**Grafik 2.32**

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 – 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja, 2024

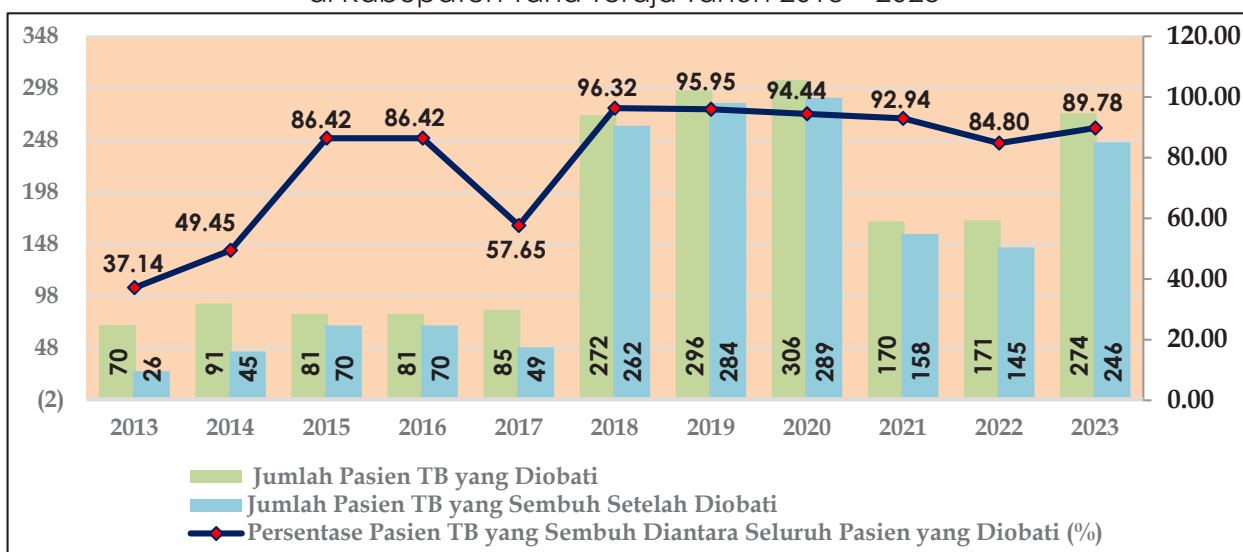


### 2.2.2.7 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis diukur dari persentase pasien yang sembuh diantara seluruh pasien yang diobati. Pada tahun 2023, Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Tana Toraja sebesar 89,78 persen sedangkan capaian tertinggi tercatat pada tahun 2018 sebesar 96,32 persen. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Grafik 2.33**

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 – 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja, 2024

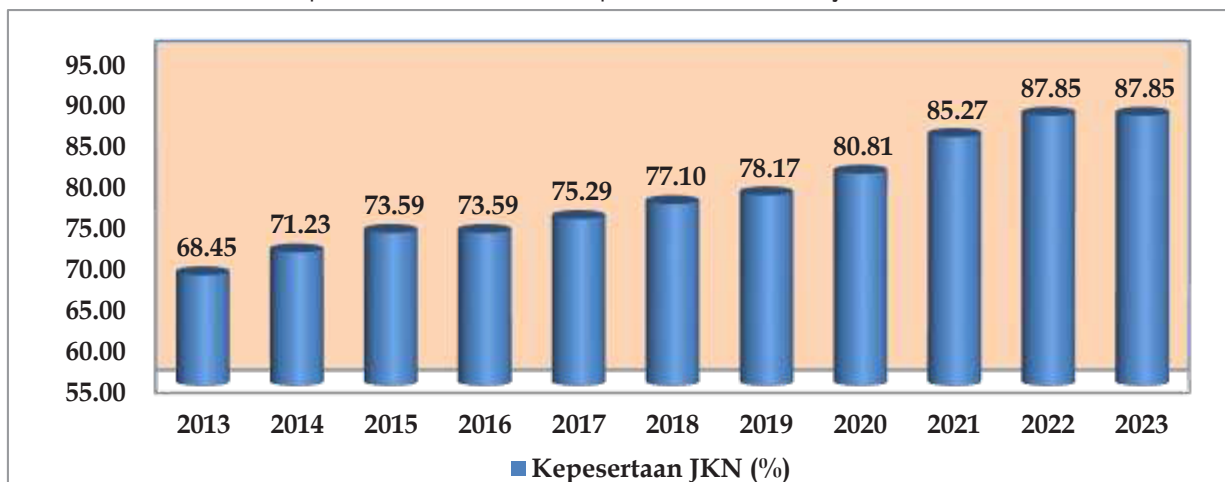
### 2.2.2.8 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional ditujukan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap penduduk Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera yang diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (managed care). Kepesertaan JKN penduduk Tana Toraja meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, kepesertaan JKN tercatat sebesar 68,45 persen kemudian meningkat menjadi 87,85 persen di tahun 2023.



**Grafik 2.34**

Persentase Kepesertaan JKN Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 – 2023



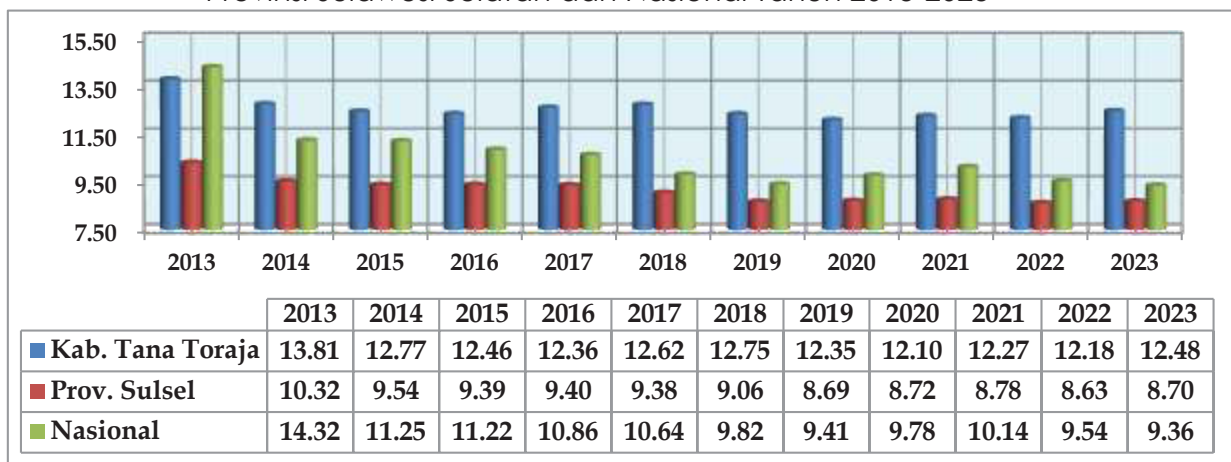
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, 2024

### 2.2.2.9 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun dimana pada tahun 2013 sebesar 13,81 persen kemudian turun menjadi 12,48 persen pada tahun 2023. Tingkat kemiskinan terendah dalam kurun waktu tersebut dicapai pada tahun 2020 dengan angka 12,10 persen. Meskipun mengalami kecenderungan yang sedikit menurun, namun tingkat kemiskinan di Tana Toraja masih diangka “dua digit” dan lebih besar jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

**Grafik 2.35**

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024



Pada periode yang sama, perkembangan jumlah penduduk miskin di Tana Toraja juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dimana pada tahun 2013 hingga 2016 mengalami penurunan kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Jumlah penduduk miskin kembali menurun hingga tahun 2020 dan merupakan jumlah penduduk miskin terendah selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Imbas pandemi covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021, dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 30.230 jiwa.

**Grafik 2.36**

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2013-2023



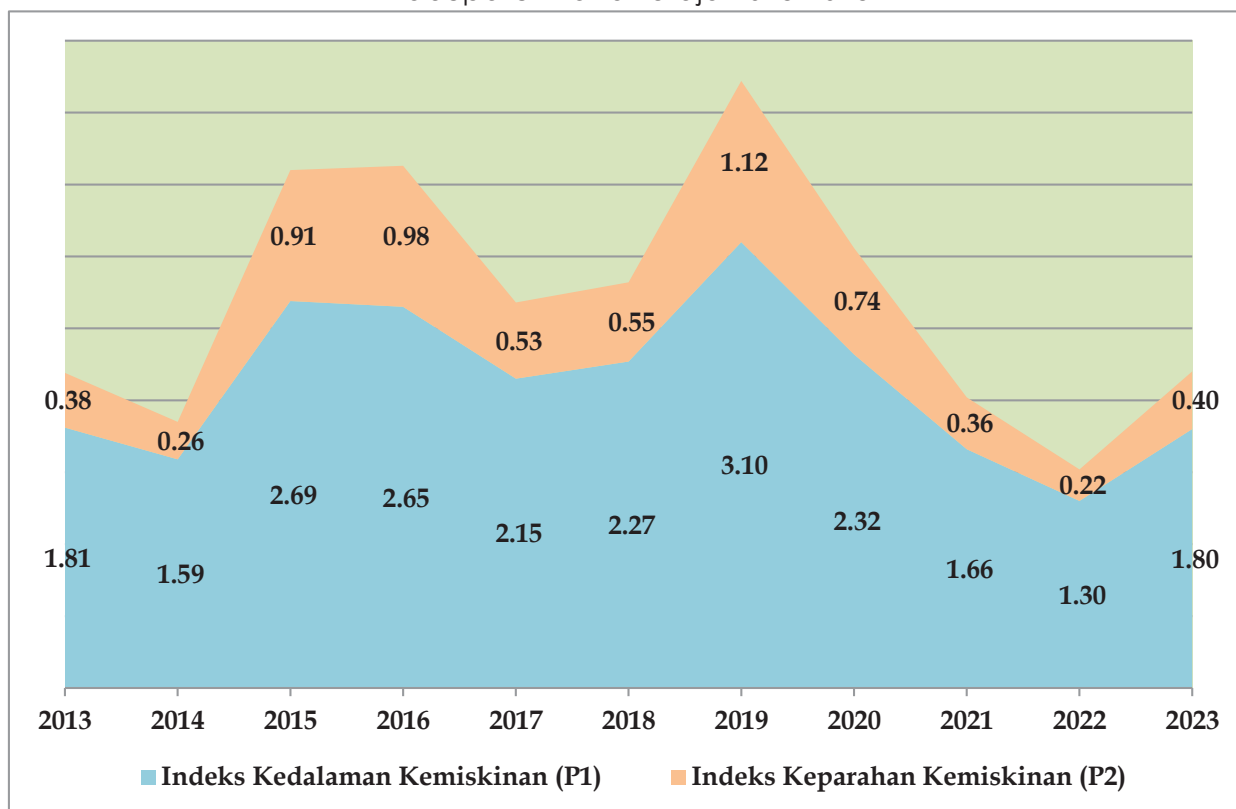
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2023, Indeks Keparahannya Kabupaten Tana



Toraja sebesar 0,40 dan berada sedikit di bawah provinsi yang mencapai 0,41. Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja sebesar 1,80 dan berada di atas provinsi yang mencapai angka 1,57.

**Grafik 2.37**  
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan  
Kabupaten Tana Toraja 2013-2023



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024

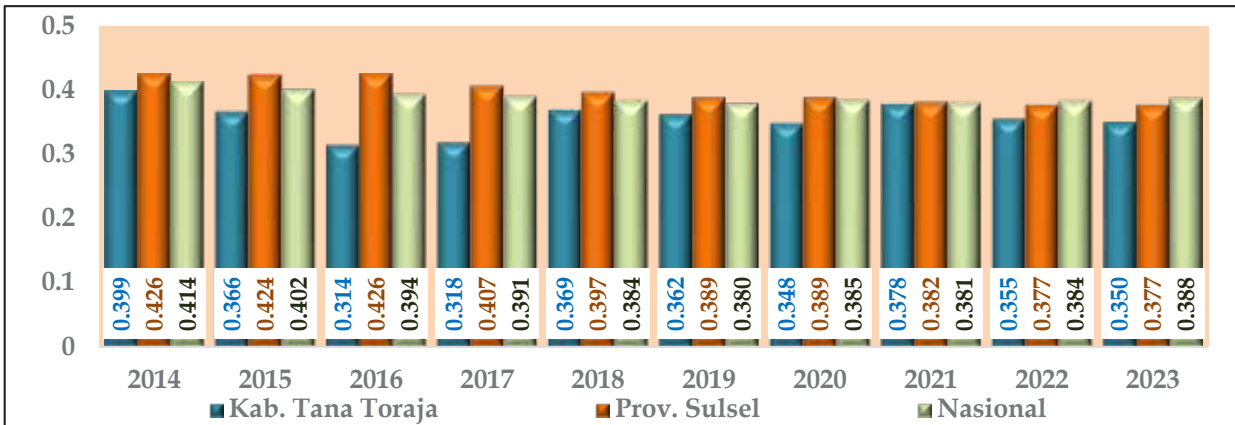
### 2.2.2.10 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan mengalami perbaikan. Pada tahun 2014 Indeks Gini di Kabupaten Tana Toraja sebesar 0,399 kemudian turun menjadi 0,350 pada tahun 2023 dimana angka terendah tercatat pada tahun 2016 sebesar 0,314. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu tersebut terjadi perbaikan dalam hal pemerataan pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Tana Toraja. Indeks Gini di Kabupaten Tana Toraja lebih baik dari provinsi dan nasional yang artinya bahwa ketimpangan di Kabupaten Tana Toraja lebih kecil dari rata-rata provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.



**Grafik 2.38**

Perbandingan Gini Ratio Kab. Tana Toraja,  
Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014 -2023

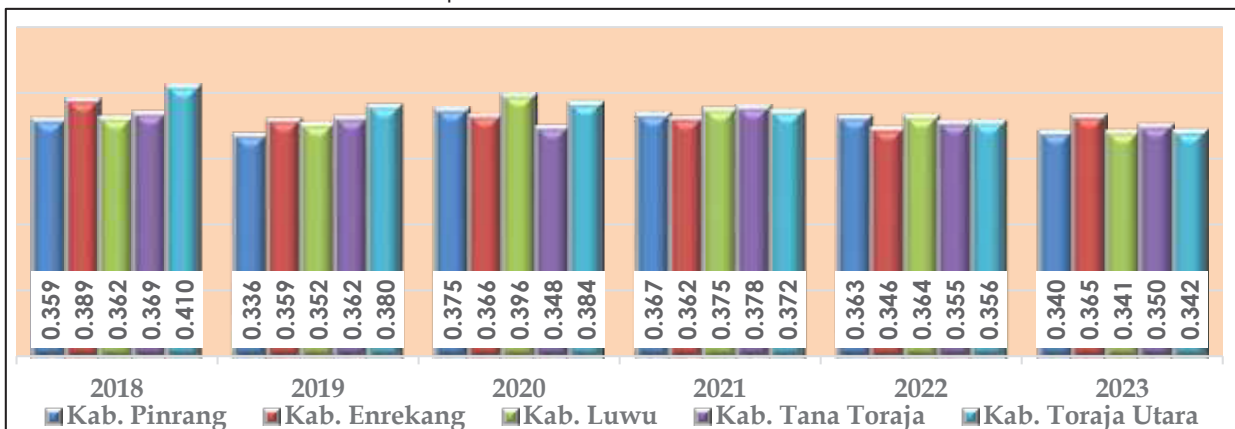


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, capaian indeks Gini Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 sebesar 0,350 masih lebih baik dari Kabupaten Enrekang dengan capaian 0,365 namun masih di bawah Kabupaten Pinrang sebesar 0,340 dan Kabupaten Luwu sebesar 0,341 dan Kabupaten Toraja Utara dengan capaian sebesar 0,342. Perbandingan capaian Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja dan kabupaten sekitar dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.39**

Perbandingan Gini Ratio Kab. Tana Toraja dengan  
Kabupaten Sekitar Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

### 2.2.2.11 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tana Toraja yang terserap dalam dunia kerja formal masih sangat minim. Penyandang disabilitas yang bekerja

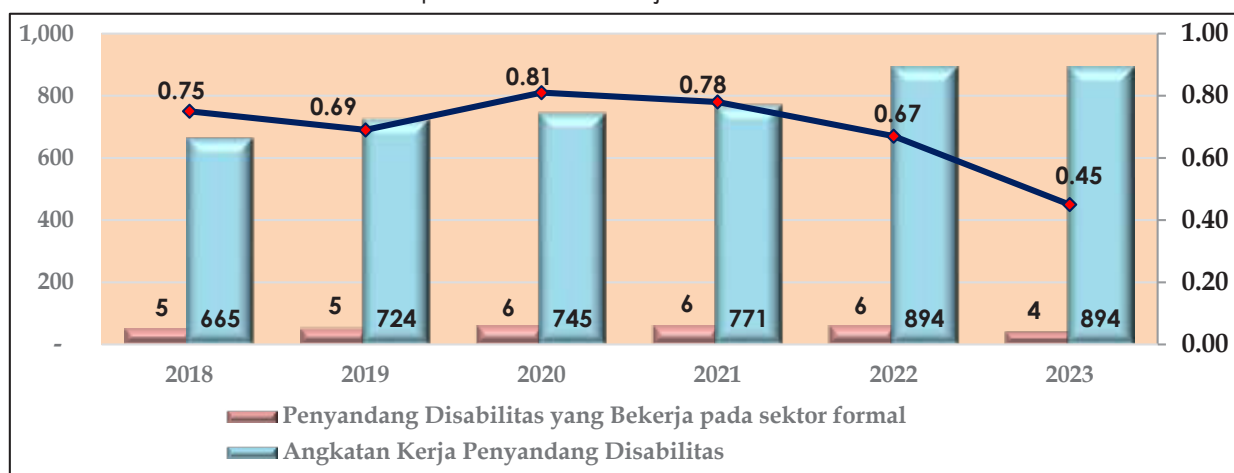


dari tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase dimana jumlah pekerja disabilitas laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Pada tahun 2018 hanya 4 orang penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal atau 0,60 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi hanya 2 orang penyandang disabilitas atau 0.22 persen.

Sejatinya penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya. Namun, mereka dinilai masih mengalami diskriminasi serta kerap mendapatkan perspektif berbeda dan dipandang sebelah mata. Adapun beberapa penyebab minimnya penyandang disabilitas yang masuk ke dunia kerja formal antara lain karena terbatasnya kemampuan dan keahlian dari penyandang disabilitas serta ketersediaan lapangan kerja itu sendiri. Oleh karena itu, paradigma terhadap isu penyandang disabilitas harus berubah, bukan lagi dipandang sebagai objek penerima bantuan, namun sebagai subjek dan bagian dari pembangunan bangsa yang harus dipandang dan dihormati dari kaca mata hak asasi manusia. Selain itu, fasilitasi dan pendampingan dari pemerintah serta orang tua atau pengasuh sebagai bagian terdekat dari penyandang disabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemenuhan kebutuhan dan akses bagi penyandang disabilitas.

**Grafik 2.40**

Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja pada Sektor Formal di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 – 2023



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tana Toraja, 2024



### 2.2.2.12 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2023 jumlah peserta program jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Jumlah peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan peserta Jaminan Kematian (JKm) pada tahun 2016 sebanyak 2.567 peserta kemudian meningkat menjadi 8.123 peserta pada tahun 2023 dimana capaian tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar 8.536 peserta. Jumlah peserta Jaminan Hari Tua (JHT) pada tahun 2016 sebanyak 1.624 peserta dan meningkat menjadi 2.107 pada tahun 2023, sedangkan untuk peserta Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 897 peserta pada tahun 2016 kemudian meningkat menjadi 1.346 peserta pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.11**

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2023

No.	Uraian	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja	2.567	2.793	1.867	2.432	5.200	4.729	6.365	8.123
2	Jumlah Peserta Jaminan Kematian	2.567	2.793	1.867	2.432	5.200	4.729	6.365	8.123
3	Jumlah Peserta Jaminan Hari Tua	1.624	737	395	1.112	2.063	2.140	2.142	2.107
4	Jumlah Peserta Jaminan Pensiun	897	491	124	967	1.159	1.236	1.416	1.346
5	Jumlah Perusahaan Terdaftar Menjadi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	93	384	258	328	399	402	388	313
6	Jumlah Tenaga Kerja	8.020	8.124	4.140	4.212	8.048	14.800	16.200	18.023



No.	Uraian	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar Menjadi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2.567	2.793	1.867	2.432	5.200	4.729	6.365	8.123
8	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	32,01	34,38	45,10	57,74	64,61	31,95	39,29	45,07

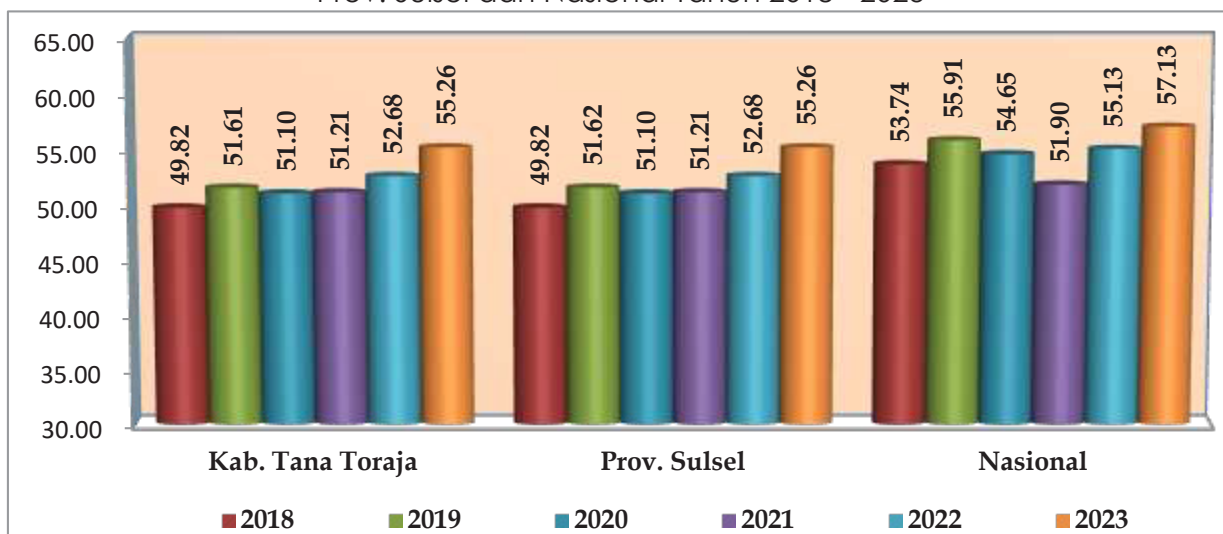
Sumber : BPJS Ketenagakerjaan & Dinas Nakertrans Kab. Tana Toraja, 2024

### 2.2.2.13 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan dibentuk oleh 7 dimensi meliputi Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tana Toraja dalam Kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023 menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada skor IPK Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2018 sebesar 49,872 kemudian menjadi 55,26 pada tahun 2023.

**Grafik 2.41**

Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kab. Tana Toraja, Prov. Sulsel dan Nasional Tahun 2018 - 2023



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tana Toraja, 2024



### 2.2.2.14 Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitas

Dukungan dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial keagamaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah khususnya pada sektor keagamaan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama khususnya di Kabupaten Tana Toraja. Dukungan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja antara lain sosialisasi kerukunan umat beragama, seminar moderasi beragama serta pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang sudah terbentuk di setiap kecamatan sejak tahun 2019. Meskipun rutin dilaksanakan setiap tahun, namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 kegiatan sosialisasi kerukunan umat beragama tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan Pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.12**

Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitas di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 - 2023

Kegiatan Keagamaan	Tahun									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>a. Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %
• Target	5 Kec.	3 Kec.	2 Kec.	2 Kec.	4 Kec.	3 Kec.	9 Kec.	5 Kec.	5 Kec.	5 Kec.
• Realisasi	5 Kec.	3 Kec.	2 Kec.	2 Kec.	4 Kec.	3 Kec.	-	-	5 Kec.	5 Kec.
<b>b. Seminar Moderasi Beragama</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %
• Target	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg.	1 Keg.
• Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg.	1 Keg.
<b>c. Terbentuknya FKUB Kecamatan</b>	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Tana Toraja, 2024

### 2.2.2.15 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/Indeks Kualitas Keluarga

Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dipengaruhi oleh Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur, Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik, Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi, Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi, dan Dimensi Kualitas



Ketahanan Sosial-Budaya. Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 58,18 poin pada tahun 2019 menjadi 70,55 poin pada tahun 2023.

**Grafik 2.42**

Indeks Kualitas Keluarga Kab. Tana Toraja Tahun 2019 – 2023



Sumber : DP3A PP&KB Kab. Tana Toraja Tahun 2024

#### 2.2.2.16 Persentase Anak Korban Kekerasan

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini menjadi keprihatinan bersama. Sejumlah kasus, seperti pemerkosaan anak oleh ayah kandung, pelecehan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, hingga anak meninggal akibat depresi dirundung oleh teman sebayanya mencuat ke publik. Kasus kekerasan baik fisik dan psikis terhadap anak semakin banyak terungkap lantaran masyarakat memiliki keberanian melapor. Di satu sisi, perkembangan media sosial membuat sebuah kasus terkait anak sulit untuk disembunyikan. Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak ini menimbulkan penderitaan bagi korban, yakni tidak hanya fisik namun juga psikis, ekonomi dan sosial yang berdampak langsung terhadap korban saat kekerasan terjadi, juga dapat meninggalkan dampak jangka panjang bagi korban. Karena itu, kekerasan menimbulkan kerugian besar terhadap korban, keluarga korban, bahkan masyarakat dan negara. Yaitu apabila kekerasan mengakibatkan dampak permanen terhadap korban dan menghalangi korban untuk meraih masa

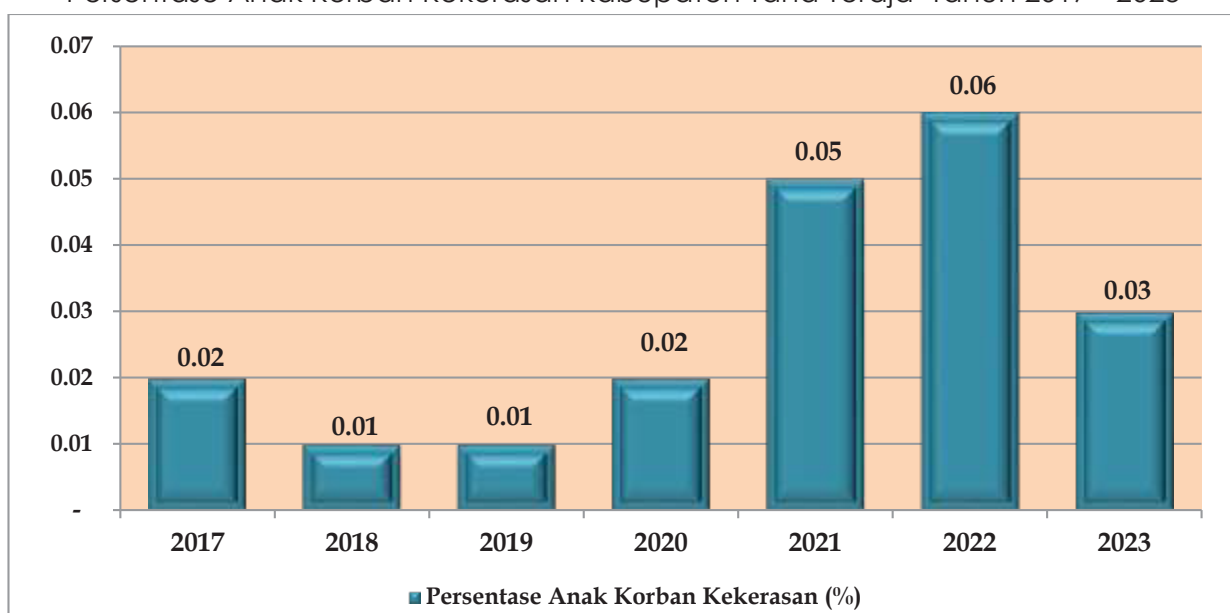


depannya, serta mencabut kesempatan korban untuk berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2023, persentase anak korban kekerasan di Tana Toraja mengalami fluktuasi dimana tahun 2017 terdapat 0,02 persen anak mengalami kekerasan kemudian menjadi 0,03 persen pada tahun 2023. Persentase tertinggi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan data Dinas PPPA dan PPKB terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 0,06 persen. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan risiko lewat pendidikan yang mengutamakan pendekatan disiplin positif, bukan penghukuman salah satunya melalui edukasi tentang pengasuhan dan penyediaan ruang-ruang layanan konseling keluarga yang mudah diakses masyarakat serta langkah-langkah pencegahan lainnya. Selain itu, situasi keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang anak merupakan prasyarat terciptanya kedekatan anak dengan orang tua serta kesempatan bagi anak untuk mendapat perhatian dan kasih sayang penuh dari orang tua. Hal ini penting dalam membentuk dan memupuk kecerdasan emosional anak agar belajar menghindari diri dari bahaya kekerasan, baik menjadi pelaku maupun karena menjadi korban.

**Grafik 2.43**

Persentase Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 - 2023



Sumber : Dinas PPPA dan PPKB Kab. Tana Toraja, 2024

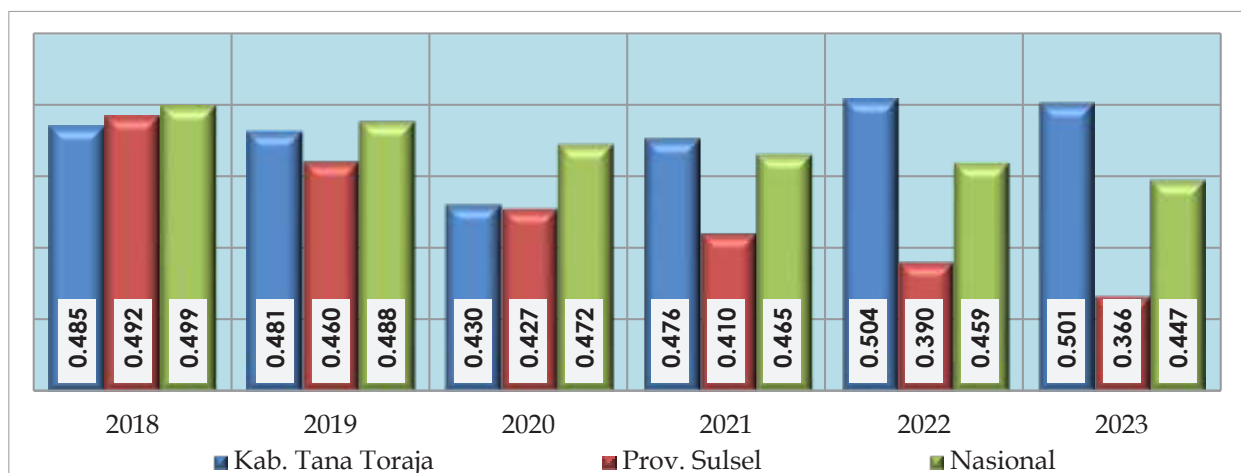


### 2.2.2.17 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender di Kabupaten Tana Toraja sejak tahun 2018 hingga 2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dimana pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,485 kemudian menjadi 0,501 pada tahun 2023. Nilai terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 0,430. Nilai Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 lebih besar dari capaian Sulawesi Selatan sebesar 0,366 dan Nasional sebesar 0,447.

**Grafik 2.44**

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tana Toraja,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Masih terdapatnya kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan IPG Tana Toraja masih berada jauh di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2013 hingga 2023. Meskipun capaian pembangunan perempuan masih belum mampu menyamai laki-laki, namun secara trend, perkembangan pembangunan manusia perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Tana Toraja selama sepuluh tahun terakhir selalu berada di bawah IPD Sulawesi Selatan dan IPG Nasional.



**Grafik 2.45**  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tana Toraja,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013 - 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

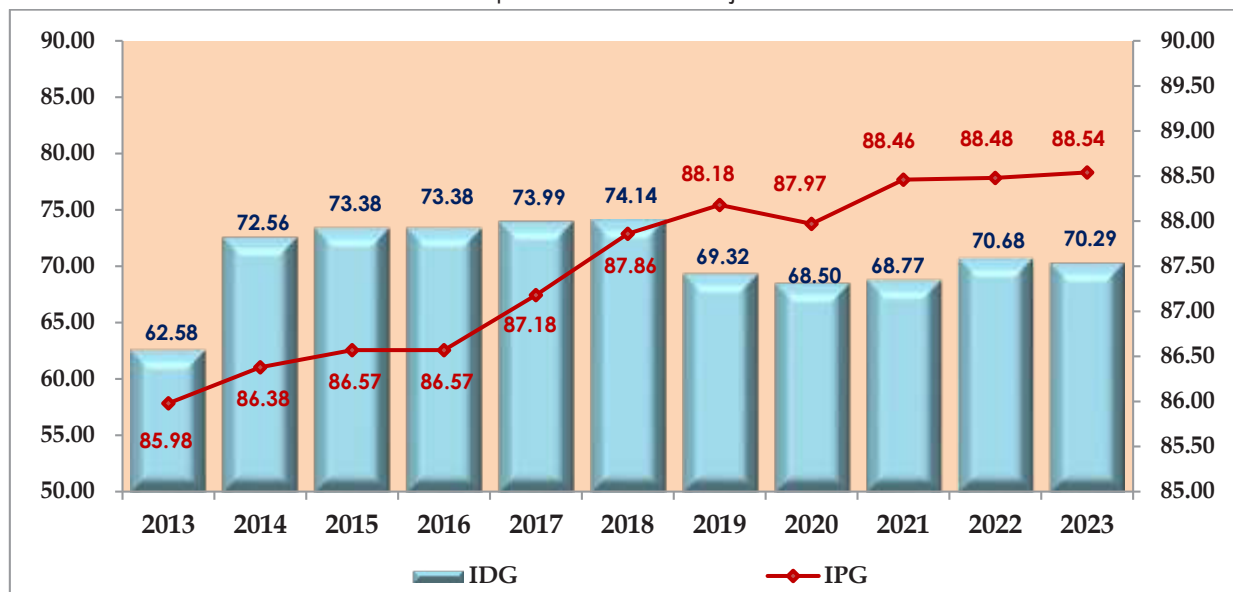
\* Tahun 2016 tidak dilaksanakan survei, menggunakan data tahun 2015

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir IDG Kabupaten Tana Toraja mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2013 tercatat sebesar 62,58 kemudian meningkat menjadi 70,29 pada tahun 2023. Meskipun demikian masih perlunya peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan proporsi laki-laki dan perempuan yang seimbang, serta partisipasi dan pengambilan keputusan dari aspek ekonomi yang mempertimbangkan kesetaraan posisi pekerjaan dan pendapatan laki-laki dan perempuan.



**Grafik 2.46**

IPG dan IDG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 - 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

\* Tahun 2016 tidak dilaksanakan survei, menggunakan data tahun 2015

## 2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.3.1 DAYA SAING EKONOMI DAERAH

Daya saing ekonomi daerah memberikan gambaran tentang seberapa baik suatu daerah dapat bersaing dalam konteks ekonomi regional, nasional, maupun global. Daya saing ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi.

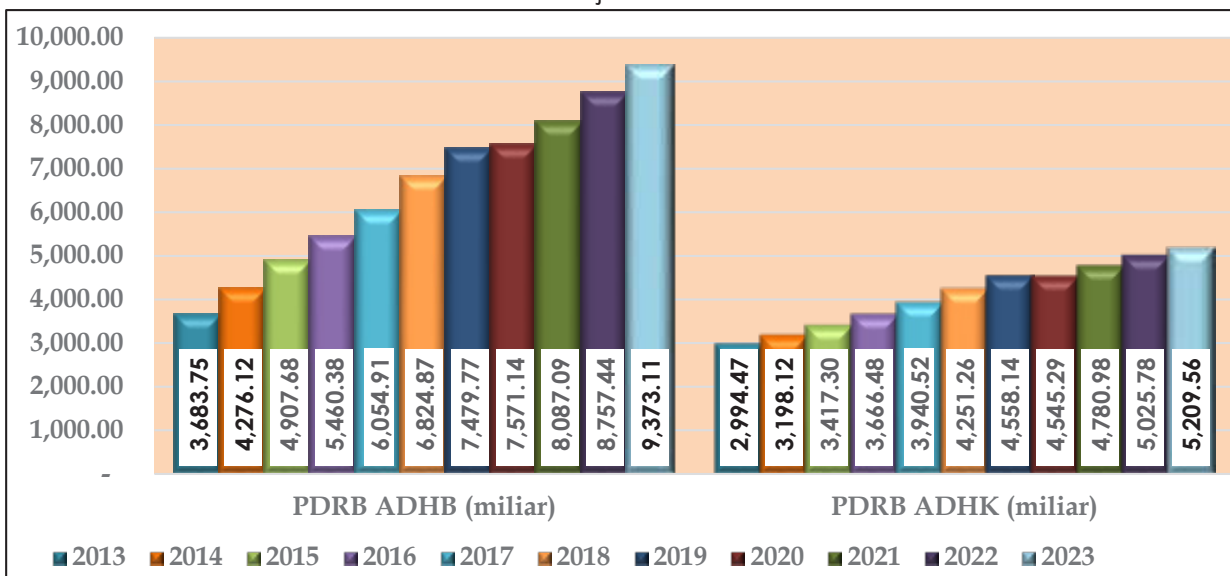
#### 2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi secara makro di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dua kriteria kinerja ekonomi makro yang terkait dengan PDRB ialah laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor-sektor ekonomi.



Nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp.3.683,75 miliar kemudian meningkat menjadi Rp. 9.373,11 miliar pada tahun 2023. Pada periode yang sama nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dari 4.558,14 pada tahun 2019 turun menjadi Rp. 4.545,12 miliar pada tahun 2020 namun setelah itu terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 tercatat mencapai Rp. 5.209,56 miliar. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 diakibatkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Tana Toraja.

**Grafik 2.47**  
PDRB ADHB dan ADHK (Menurut Lapangan Usaha)  
Kab. Tana Toraja Tahun 2013-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

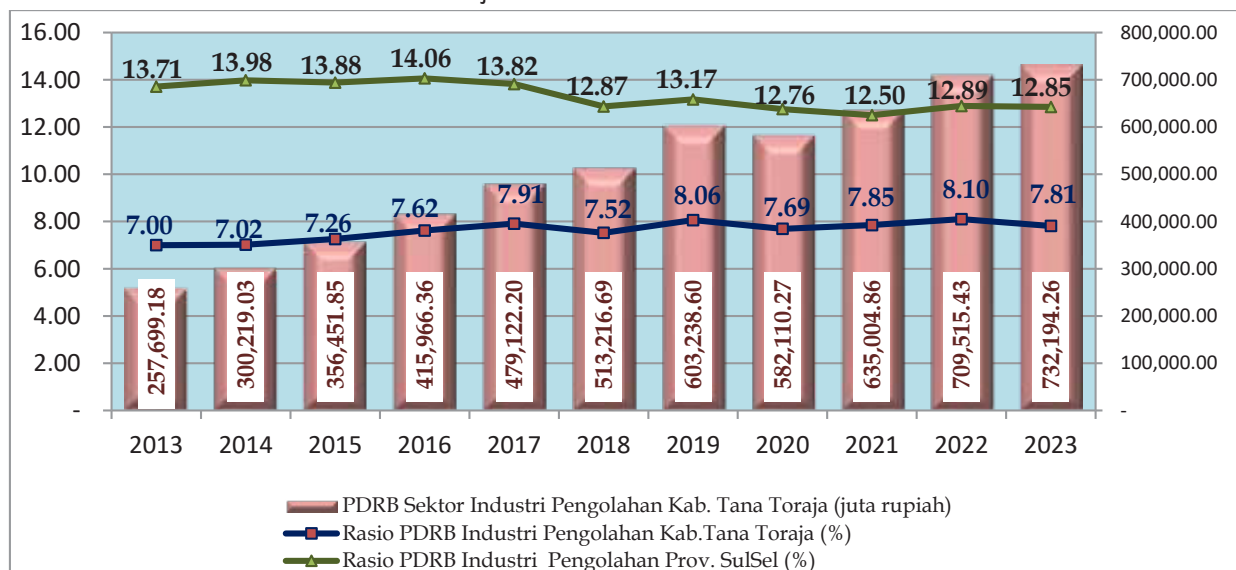
### 2.3.1.2 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Secara umum, pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat dampak Pandemi Covid-19 namun dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2013, Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan tercatat sebesar 257.699,18 juta



dengan rasio sebesar 7,00 persen kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 732.194,26 juta rupiah dengan rasio sebesar 7,81 persen. Perkembangan PDRB sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.48**  
Rasio PDRB Industri Pengolahan  
Kab. Tana Toraja dan Prov. Sulsel Tahun 2013 - 2023



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2024

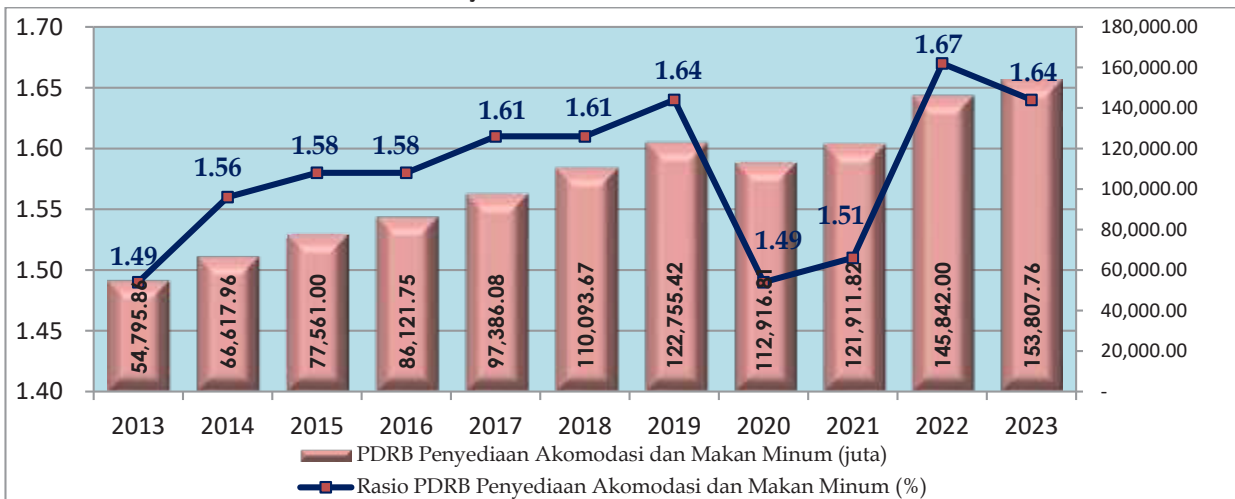
### 2.3.1.3 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pertumbuhan rasio PDRB sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan dimana tahun 2013 tercatat 1,49 persen kemudian meningkat menjadi 1,64 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan 0,15 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun setelah itu mengalami perbaikan, dimana hingga tahun 2022 tercatat sebesar 1,67 persen tetapi kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 1,64 pada tahun 2023. Sejalan dengan itu, nilai PDRB sektor akomodasi dan makan minum pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 nilai PDRB sektor akomodasi dan makan minum sebesar 122.755,42 juta turun menjadi 112.916,81 juta pada tahun 2020, namun setelah itu terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 tercatat sebesar 153.807,76 juta rupiah.



Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 merupakan dampak dari Pandemi Covid-19, namun perbaikan yang terjadi setelahnya seiring dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian Tana Toraja pasca Pandemi Covid-19.

**Grafik 2.49**  
Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum  
Kab. Tana Toraja dan Prov. Sulsel Tahun 2013 - 2023



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2024

### 2.3.1.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara

Di bidang Pariwisata, keberadaan Bandara Buntu Kunyi' Tana Toraja diharapkan menjadi salah satu pintu gerbang utama yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wisatawan baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara yang masuk ke Tana Toraja. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Tana Toraja dari tahun 2014 sampai 2017 terus mengalami peningkatan namun sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis dimana tahun 2021 tercatat hanya 100 orang wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Tana Toraja namun setelah itu mengalami peningkatan hingga tahun 2023 ada 4.024 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Tana Toraja. Demikian halnya dengan wisatawan nusantara, pada tahun 2018 tercatat ada sekitar 1.355.283 wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Tana Toraja namun setelahnya terus mengalami penurunan hingga tahun 2021 tercatat hanya 78.193 wisatawan. Pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan nusantara telah mengalami peningkatan menjadi 487.481 wisatawan. Penurunan signifikan yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari



pemberlakuan pembatasan penerbangan, larangan perjalanan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat adanya wabah Pandemi Covid-19.

Meskipun jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke Tana Toraja pasca pandemi Covid-19 sudah mengalami peningkatan, namun pariwisata unggulan di Tana Toraja masih perlu lebih dioptimalkan karena masih terbatas khususnya pada atraksi, aksesibilitas dan amenitas serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan. Berikut ini dapat dilihat perkembangan wisatawan yang berkunjung ke Tana Toraja dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

**Tabel 2.13**

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 – 2023

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Wisatawan Mancanegara (orang)	20.167	15.731	20.271	25.452	19.422	10.526	830	100	1.355	4.024
2.	Wisatawan Nusantara (orang)	60.069	82.673	1.056.592	1.173.183	1.355.283	1.030.821	93.787	78.193	480.631	487.481

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tana Toraja, 2024

### 2.3.1.5 Persentase Koperasi Sehat di Tingkat Kabupaten

Koperasi Sehat adalah koperasi yang memiliki nilai 81 - 100 dalam penilaian kesehatan meliputi 4 Aspek Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yaitu Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.

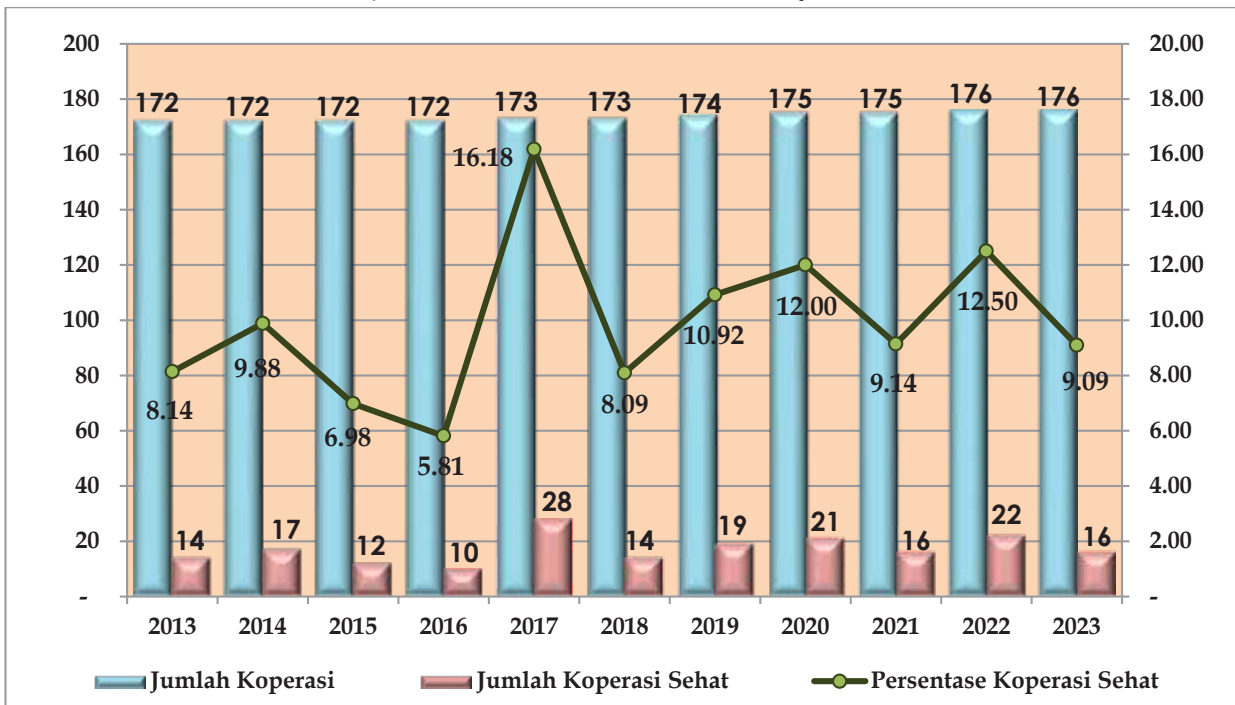
Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Tana Toraja kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan membaik namun nilainya masih sangat kecil. Pada tahun 2013, dari 172 jumlah koperasi hanya ada 14 koperasi yang tergolong koperasi sehat atau sekitar 8,14 persen kemudian di tahun 2023 dari 176 koperasi yang ada hanya 16 koperasi sehat atau 9,19 persen. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2017 dimana ada 28 koperasi sehat dari 173 koperasi yang ada di Kabupaten Tana Toraja atau sekitar



16,18 persen. Oleh karena itu, ke depan diharapkan Pemerintah dapat memberikan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan koperasi secara kontinu khususnya kepada koperasi yang kurang dan tidak sehat melalui peningkatan manajemen pengelolaan koperasi terkait menjaga tingkat permodalan dan tertib administrasi, melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan koperasi baik bagi anggota maupun pengurusnya serta pemberian bantuan permodalan kepada koperasi yang aktif dan mengawasi penggunaannya sehingga koperasi mempunyai motivasi untuk mengelola koperasi dengan baik.

**Grafik 2.50**

Persentase Koperasi Sehat di Kab. Tana Toraja Tahun 2013-2023



Sumber : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tana Toraja, 2024

### 2.3.1.6 Kontribusi Pilar Lingkungan Terhadap Penerapan Ekonomi Hijau

Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia yang ditunjang oleh

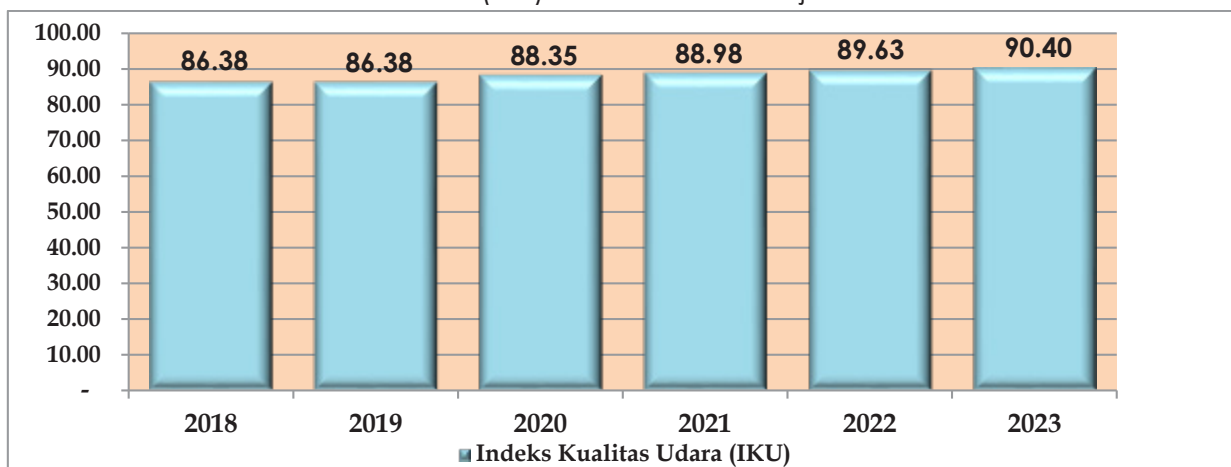


beberapa pilar, salah satunya adalah pilar lingkungan yang terdiri dari indeks kualitas air, udara dan lahan.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai polusi udara di suatu daerah yang pengukurannya dapat dilakukan dengan mengamati kualitas udara menggunakan kombinasi berbagai macam alat dan metode termasuk jaringan sensor polutan dan sistem informasi geografis dengan kisaran angka 0 sampai 500. Semakin tinggi nilai IKU untuk suatu wilayah, udara di wilayah tersebut menjadi semakin berbahaya pula bagi kesehatan makhluk hidup. Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai 2023, Nilai Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018, nilai Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 86,38 kemudian menjadi 90,40 pada tahun 2023.

**Grafik 2.51**

Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kab. Tana Toraja Tahun 2018-2023



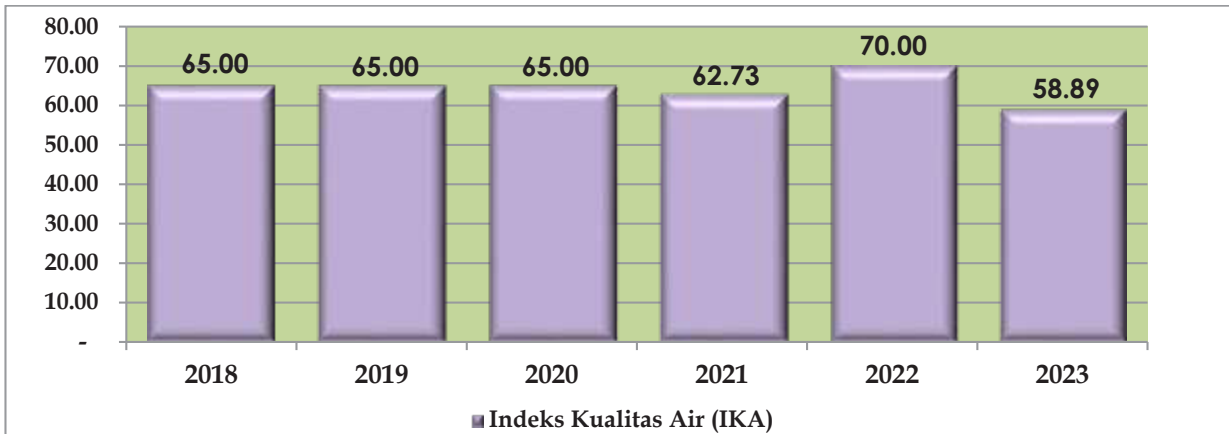
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja, 2024

Indeks kualitas air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai 2023, Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018, nilai Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 65,00 kemudian menjadi 58,89 pada tahun 2023.



**Grafik 2.52**

Indeks Kualitas Air (IKA) di Kab. Tana Toraja Tahun 2019-2023

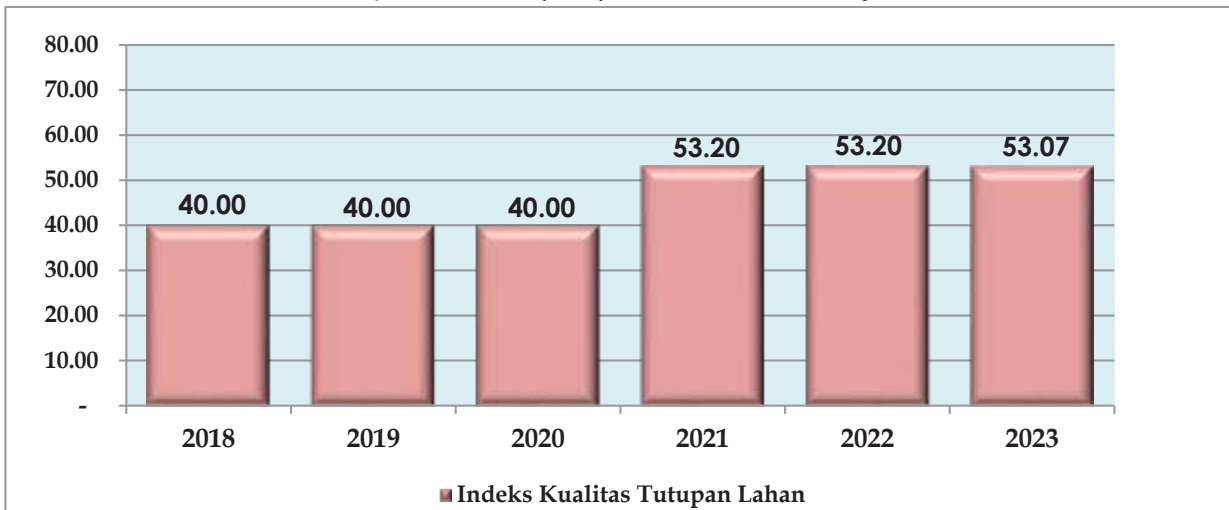


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja, 2024

Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tahun 2018, Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Tana Toraja sebesar 40,00 kemudian meningkat menjadi 53,07 pada tahun 2023.

**Grafik 2.53**

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kab. Tana Toraja Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja, 2024

### 2.3.1.7 Rasio Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

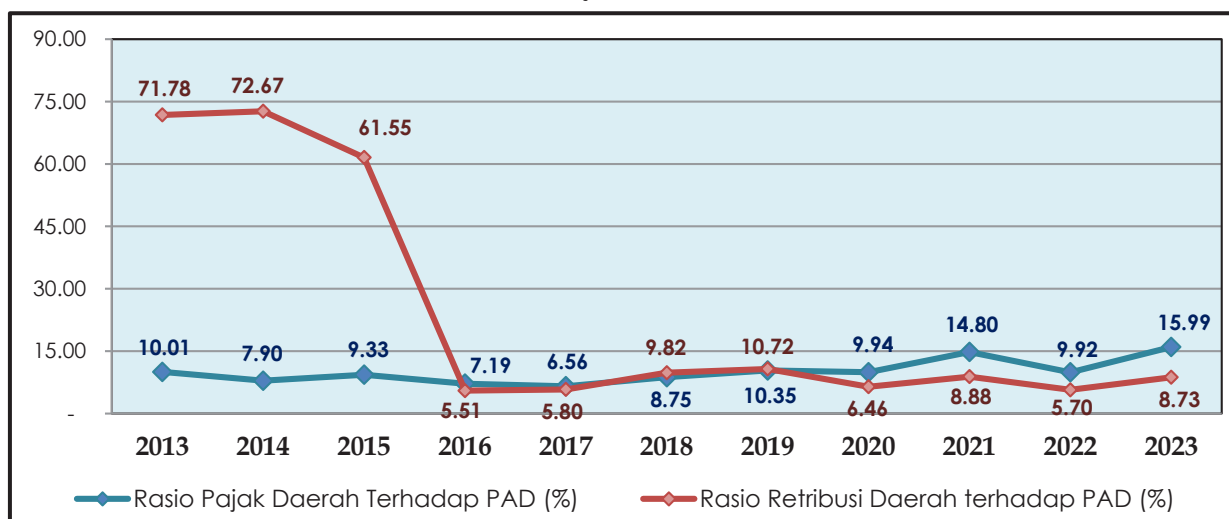
Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Rasio ini memberikan indikasi tentang seberapa efektif pemerintah daerah



dalam mengumpulkan penerimaan dari sumber-sumber ini. Terkait Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menandakan efektivitas dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak atau diversifikasi sumber pajak. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan pajak daerah. Selanjutnya terkait Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mengoptimalkan potensi penerimaan dari tarif layanan dan kegiatan tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengelola dan meningkatkan penerimaan dari retribusi daerah. Sebaliknya rasio yang rendah dapat menunjukkan potensi untuk meninjau kembali tarif retribusi atau meningkatkan kepatuhan. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah membantu pemerintah daerah dalam memahami seberapa efektif dan beragam sumber-sumber penerimaan daerah. Analisis rasio ini dapat memberikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan guna meningkatkan keberlanjutan keuangan daerah.

**Grafik 2.54**

Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD  
Kab. Tana Toraja Tahun 2013 – 2023



Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Toraja, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2023, rasio pajak terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja berfluktuasi dalam rentang 6 persen hingga



15 persen dimana capaian terendah tercatat pada tahun 2017 sebesar 6,56 persen dan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 15,99 persen. Dalam kurun waktu yang sama, rentang rasio retribusi terhadap PAD antara 5 persen hingga 72 persen. Pada tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 61,55 persen pada tahun 2015 turun menjadi 5,51 persen pada tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan pencatatan sumber pendapatan daerah.

### **2.3.1.8 Tingkat Inflasi**

Inflasi merupakan kenaikan harga barang/jasa secara umum. Perhitungan inflasi mengacu pada perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu. IHK memberikan informasi mengenai perkembangan naik atau turunnya harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Di Sulawesi Selatan, terdapat lima kabupaten/kota yang menjadi sampel untuk menghitung inflasi provinsi (zona inflasi), yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Bone (Watampone) dan Bulukumba. Inflasi Kabupaten Tana Toraja merujuk pada inflasi Kota Palopo.

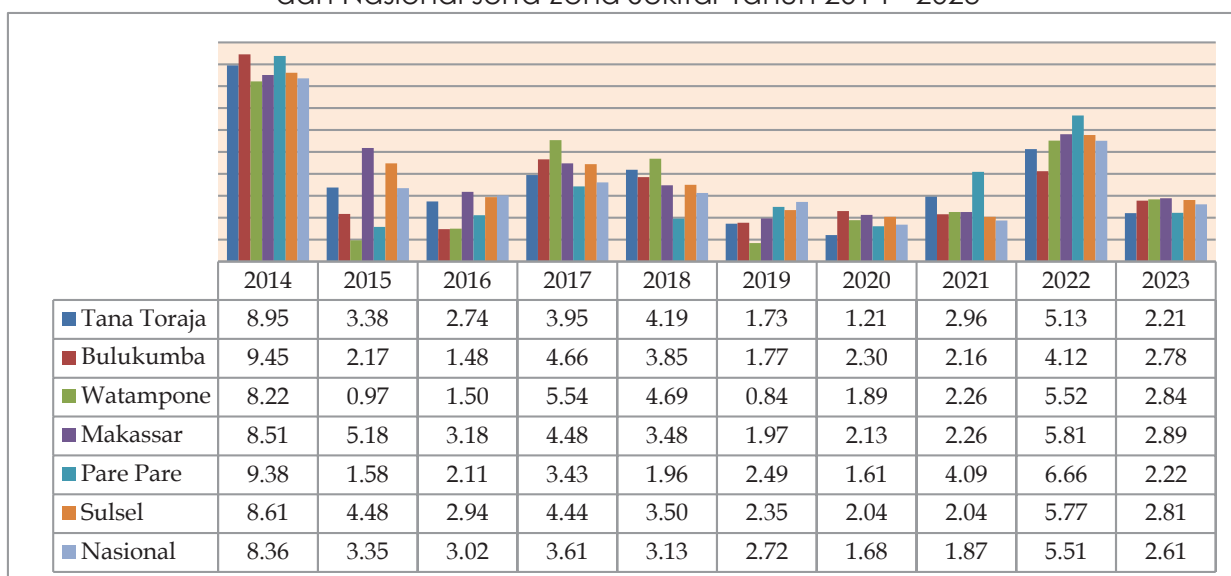
Menurut data BPS Kabupaten Tana Toraja nilai inflasi Kota Palopo yang menjadi rujukan Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2016 sebesar 2,74 persen dan Tahun 2019 turun menjadi 1,73 persen. Pada Tahun 2021, tingkat inflasi mencapai 2,96 persen, lebih tinggi dibanding dengan Tahun 2020 yang berada pada angka 1,21 persen kemudian pada tahun 2023 Kota Palopo mengalami inflasi sebesar 2,21 persen. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Secara yoy, pada bulan Desember 2023 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi : Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,46 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,65 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok transportasi sebesar 1,37 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,52 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,23 persen; serta kelompok



perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,80 persen. Sedangkan pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,12 persen dan kelompok pendidikan tidak terjadi perubahan indeks harga (stabil). Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2023 tercatat inflasi sebesar 0,50 persen dan tingkat inflasi tahun kalender/inflasi year to date (ytd) sebesar 2,21 persen. Laju inflasi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, nasional dan Zona sekitar dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.55**

Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional serta Zona Sekitar Tahun 2014 - 2023



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024

### 2.3.1.9 Persentase Desa Mandiri

Indeks Desa Membangun (IDM) menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. IDM menjadi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam proses pembangunan desa. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dengan modal sosial, modal ekonomi dan modal lingkungan. IDM dibentuk dari tiga indeks komposit yaitu indeks ketahanan sosial yang terdiri modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman. Indeks selanjutnya yakni ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa. Pencapaian itu bakal menjadi motivasi daerah lain untuk terus digenjot



pembangunan desa di daerahnya agar terjadi pengurangan signifikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta memiliki desa mandiri sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal mereka dalam kemandirian berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pemerintahan dan juga memiliki identitas dan karakteristik yang khas, serta menjaga nilai-nilai lokal yang positif dalam memperkuat perekonomian lokal. Hingga tahun 2023 belum ada desa yang berstatus Desa Mandiri di Kabupaten Tana Toraja. Perkembangan Desa Mandiri di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.14**

Indeks Desa Membangun Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 – 2023

STATUS LEMBAH/DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mandiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maju	0	0	1	1	1	1	2	3	7
Berkembang	17	17	17	17	39	48	63	75	76
Tertinggal	74	74	70	70	51	46	34	32	29
Sangat Tertinggal	21	21	24	24	21	17	13	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>

Sumber : DPML Kabupaten Tana Toraja, 2024

### 2.3.2 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

Daya saing sumber daya manusia merujuk pada kemampuan individu-individu dalam suatu populasi untuk bersaing secara efektif di pasar kerja atau dalam ekonomi secara keseluruhan. Daya saing sumber daya manusia memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia suatu negara atau daerah.

#### 2.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

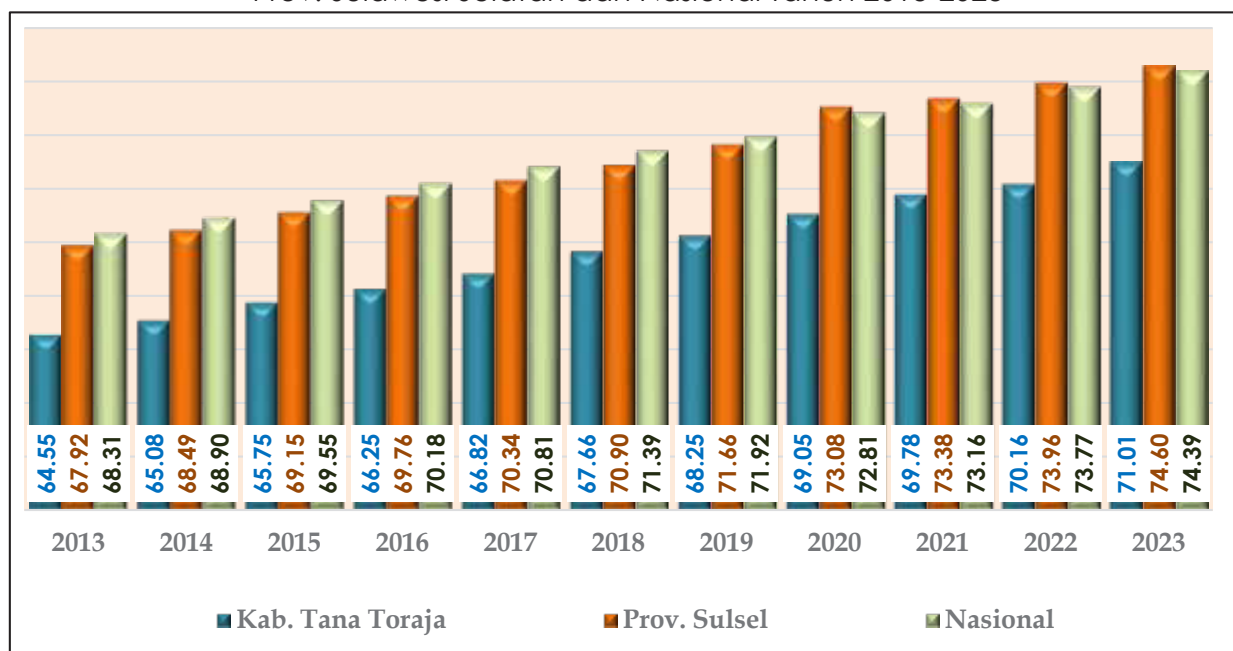
Secara umum, capaian IPM Kabupaten Tana Toraja sejak tahun 2013 hingga tahun 2023 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan



sebesar 0,91 persen, dimana capaian IPM pada tahun 2013 sebesar 64,55 dan meningkat menjadi 71,01 di tahun 2023. Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya yang terdiri dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun kondisi IPM di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tersebut selalu di bawah angka pencapaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

**Grafik 2.56**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tana Toraja,  
Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023



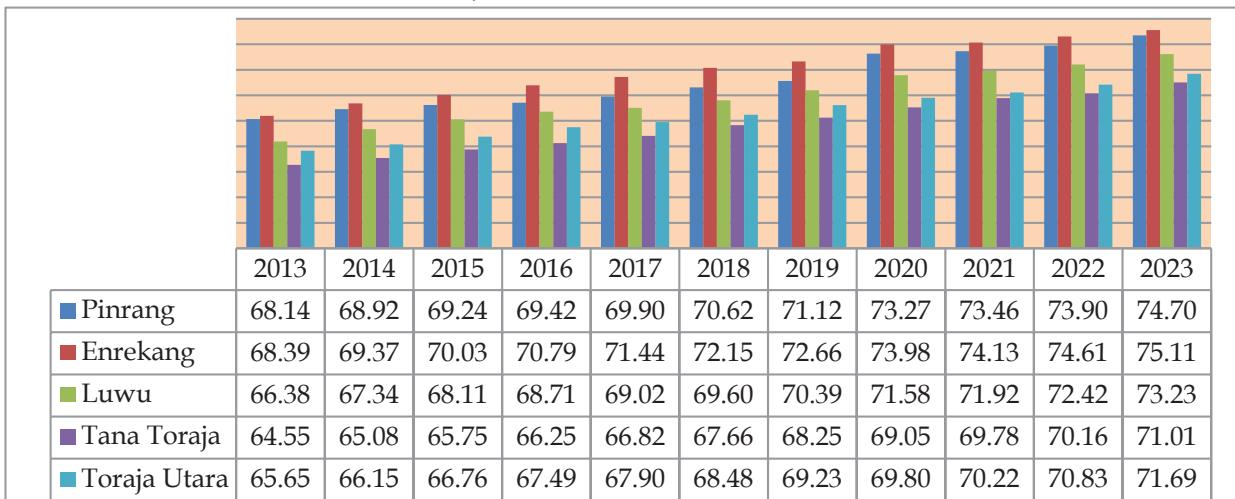
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Meskipun terus mengalami perkembangan, namun Capaian IPM Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 (71,01) menempati posisi ketiga terendah di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bone dan jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, capaian tersebut berada pada posisi terbawah bahkan masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Toraja Utara yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja seperti terlihat pada grafik berikut ini.



**Grafik 2.57**

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Sekitar Tahun 2013 - 2023



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Pertumbuhan positif merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Tana Toraja yang lebih baik. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir Rata-rata Lama Sekolah mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2023 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja sebesar 8,60 tahun yang artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tana Toraja adalah selama 8,60 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas 2.

### 2.3.2.2 Pendidikan Berkualitas Yang Merata

#### A. Literasi Membaca

Literasi membaca adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).

Kemampuan literasi terdiri atas kompetensi membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks, kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks dan kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks.



- Kompetensi membaca teks informasi kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi informasi.
- Kompetensi membaca teks sastra adalah kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi.
- Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks adalah kemampuan menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan suatu ide atau informasi eksplisit dalam teks informasi dan sastra.
- Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks adalah kemampuan membandingkan dan mengontraskan ide atau informasi dalam atau antar teks, membuat kesimpulan, mengelompokkan serta menggabungkan ide dan informasi dalam teks atau antar teks informasional (non fiksi).
- Kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks adalah kemampuan menganalisis, memprediksi, dan menilai konten, bahasa dan unsur-unsur dalam teks informasional (non fiksi) dan sastra.

**Tabel 2.15**

Capaian Literasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2023

Jenjang	Skor Literasi Rapor Tahun 2022	Skor Literasi Rapor Tahun 2023	Perubahan Skor dari Tahun Lalu	Peringkat Secara Nasional
SD	46,51	51,06	Naik 4,66	Peringkat Menengah (41% – 60%)
SMP	56,92	59,40	Naik 2,48	Peringkat Menengah (41% – 60%)

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tana Toraja, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa baik jenjang pendidikan SD maupun SMP, skor literasi di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dimana jenjang Sekolah Dasar (SD) mengalami peningkatan sebesar 4,66 poin dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami kenaikan 2,48 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

## B. Numerasi

Kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.



Terdapat beberapa aspek dalam kemampuan numerasi yaitu kompetensi pada domain bilangan, domain aljabar, domain geometri, domain data dan ketidakpastian, kompetensi mengetahui, kompetensi menerapkan dan kompetensi menalar.

- Kompetensi pada Domain Bilangan adalah kompetensi peserta didik dalam berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika pada konten bilangan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
- Kompetensi pada Domain Aljabar adalah kompetensi peserta didik dalam berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika pada konten aljabar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
- Kompetensi pada Domain Geometri adalah kompetensi peserta didik dalam berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika pada konten geometri untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
- Kompetensi pada Domain Data dan Ketidakpastian adalah kompetensi peserta didik dalam berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika pada konten data dan ketidakpastian untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
- Kompetensi mengetahui adalah kompetensi peserta didik pada kemampuan memahami fakta, proses, konsep dan prosedur.
- Kompetensi menerapkan adalah kompetensi peserta didik pada kemampuan menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta-fakta, relasi, proses, konsep, prosedur dan metode pada konten bilangan dengan konteks situasi nyata untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan.
- Kompetensi menalar adalah kompetensi peserta didik pada kemampuan menganalisis data dan informasi, membuat kesimpulan, memperluas pemahaman dalam situasi baru.



**Tabel 2.16**

Capaian Numerasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2023

Jenjang	Skor Numerasi Rapor Tahun 2022	Skor Numerasi Rapor Tahun 2023	Perubahan Skor dari Tahun Lalu	Peringkat Secara Nasional
SD	26,16	48,20	Naik 22,13	Peringkat Menengah (41% – 60%)
SMP	52,66	52,59	Naik 0,07	Peringkat Menengah (41% – 60%)

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tana Toraja, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa skor numerasi terjadi perubahan yang signifikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan perubahan skor naik 22,13 poin sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama hanya mengalami sedikit kenaikan yakni sebesar 0,07 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

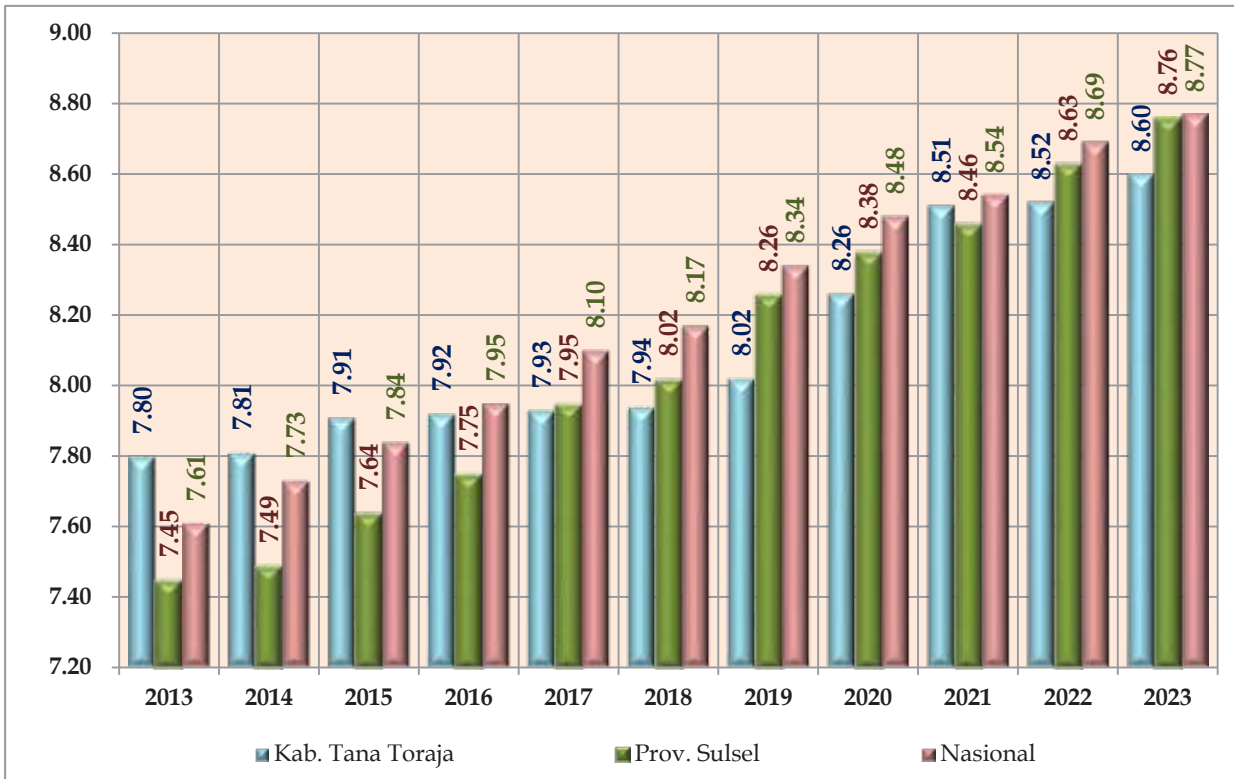
### 2.3.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah yaitu jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan beberapa informasi yaitu : a) partisipasi sekolah; b) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; c) ijazah tertinggi yang dimiliki; dan d) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Pada tahun 2013, capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja masih di atas capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Meskipun dalam kurun waktu sepuluh tahun semakin meningkat, namun pada tahun 2023 capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja sebesar 8,60 tahun telah berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,76 tahun dan Nasional sebesar 8,77 tahun.



**Grafik 2.58**

Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013 - 2023



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024

#### 2.3.2.4 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak usia sekolah. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tana Toraja dalam sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan yang menggembirakan. Pada tahun 2013, HLS Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 12,49 tahun kemudian meningkat menjadi 13,88 pada Tahun 2023. Capaian tersebut berada di atas capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Angka capaian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Tana Toraja memiliki harapan dapat menjalani pendidikan selama 13 tahun lebih atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma II.



**Grafik 2.59**

Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013 - 2023



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024

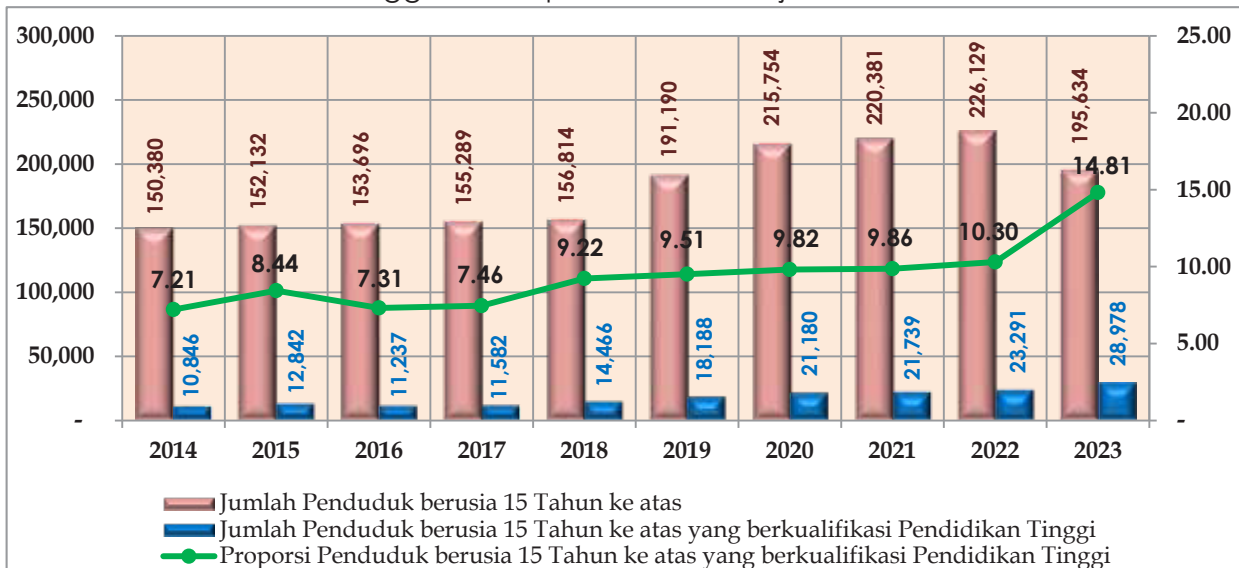
### 2.3.2.5 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing harus didukung oleh akses pendidikan yang berkualitas dan merata dengan sasaran meningkatkan jumlah penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi khususnya penduduk usia 15 tahun ke atas. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya namun secara umum jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2023 semakin meningkat dimana tahun 2014 tercatat ada 10.846 penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan kualifikasi pendidikan tinggi atau sekitar 7,21 persen dari jumlah penduduk di atas 15 tahun kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 28.978 penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan kualifikasi pendidikan tinggi atau sekitar 14,81 persen. Perkembangan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut ini.



**Grafik 2.60**

Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2023

### 2.3.2.6 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja menurut Keahliannya

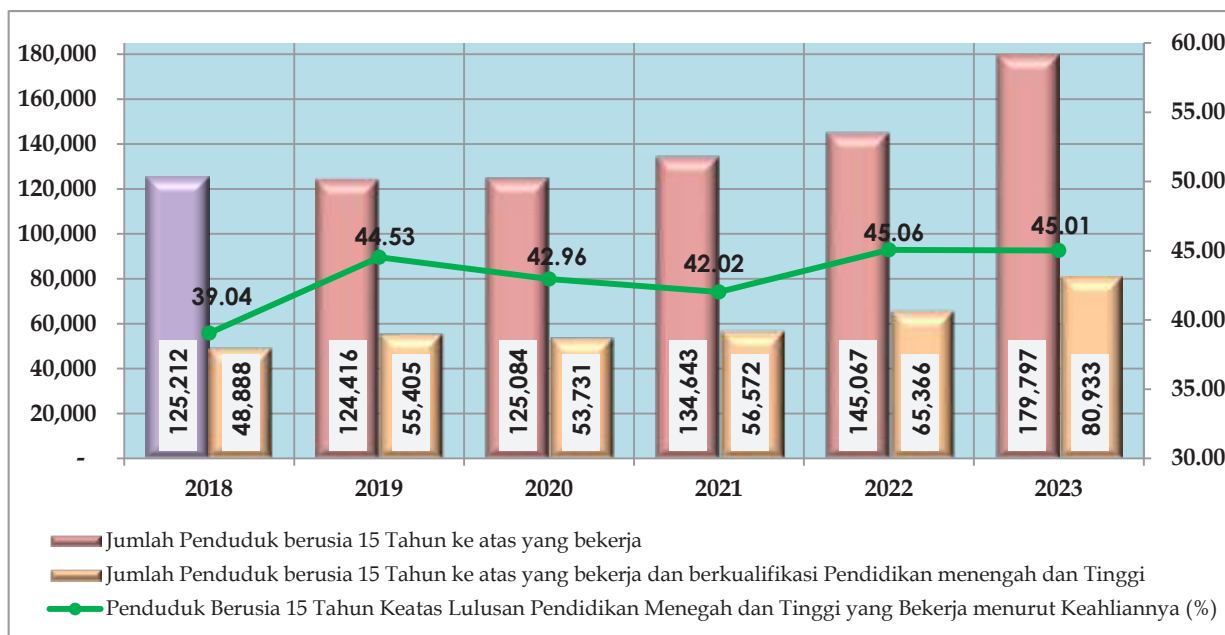
Persentase penduduk berusia 15 tahun keatas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja menurut keahliannya menggambarkan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Melalui indikator ini, dapat diukur kinerja pemerintah daerah dalam mendorong penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan penduduk di wilayah tersebut.

Dari tahun 2018 hingga tahun 2023, penduduk berusia 15 tahun keatas lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi persentase. Pada tahun 2018, dari 125.212 penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja, ada 48.888 penduduk yang merupakan lulusan Pendidikan menengah dan tinggi atau sekitar 39,04 persen kemudian meningkat menjadi 80.933 penduduk dari 179.797 penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2023 atau sekitar 45,01 persen. Perkembangan persentase penduduk berusia 15 tahun keatas lulusan pendidikan menengah dan



tinggi yang bekerja menurut keahliannya antara tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.61**  
Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas  
Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja menurut Keahliannya  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 - 2023



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2023

### 2.3.2.7 Indeks Pendidikan

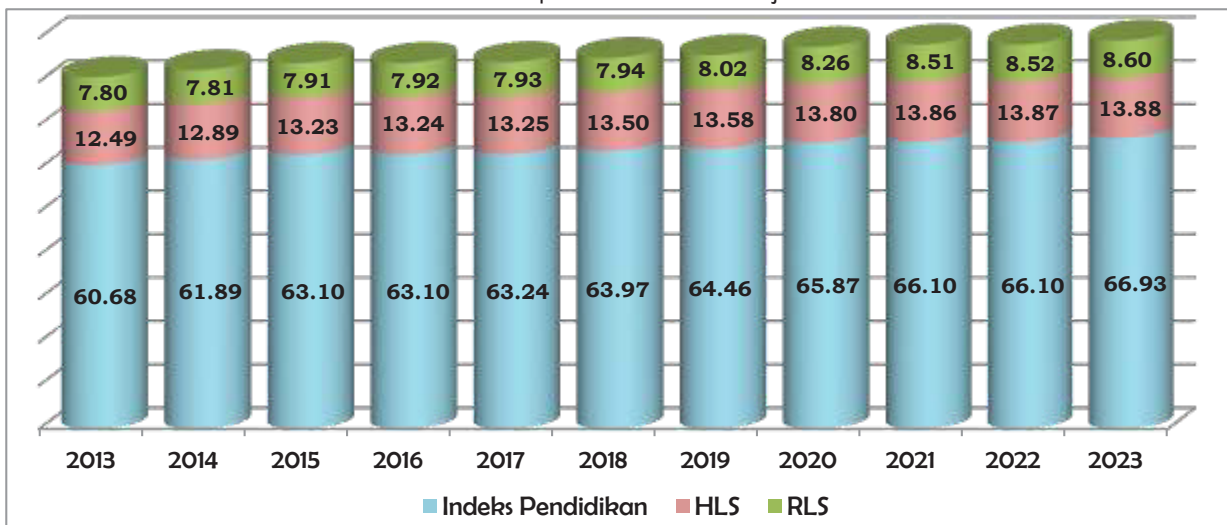
Indeks Pendidikan berdasarkan metode baru yang digunakan oleh BPS memperhitungkan 2 faktor yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS) merupakan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan didapatkan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. HLS dihitung pada rentang usia 7 tahun ke atas sesuai kebijakan program wajib belajar yang dijalankan oleh pemerintah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pemilihan rentang umur 25 tahun ke atas pada penghitungan RLS diasumsikan bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Berdasarkan standar internasional yang digunakan UNDP batas maksimum Harapan Lama Sekolah 18 tahun sedangkan batas



maksimum Rata-rata Lama Sekolah 15 tahun. Indeks Pendidikan di Kabupaten Tana Toraja pada kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tana Toraja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.62**

Indeks Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013-2023



Sumber ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tana Toraja, 2024

### 2.3.2.8 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat yaitu : Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi, Anggota perpustakaan.

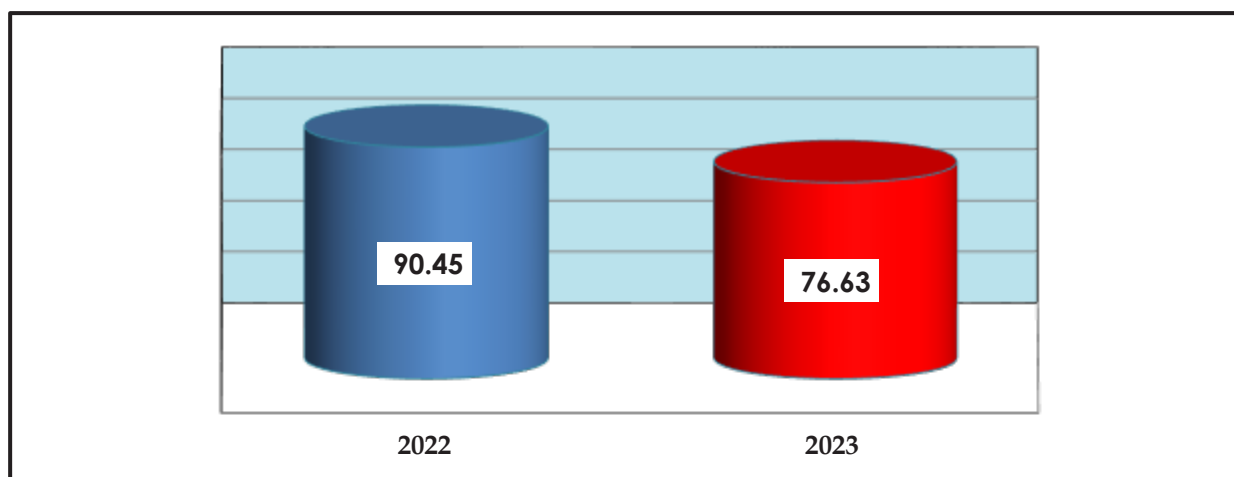
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja sebesar 90,45 poin kemudian turun menjadi 76,63 pada tahun 2023. Penurunan yang terjadi selain diakibatkan karena metode perhitungan yang



mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, kurangnya jumlah perpustakaan, tenaga pustakawan serta jumlah koleksi. Oleh karena, dalam rangka peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat di Tana Toraja menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pustakawan serta sarana prasarana perpustakaan.

**Grafik 2.63**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kab. Tana Toraja Tahun 2022-2023



Sumber ; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tana Toraja, 2024

### 2.3.3 DAYA SAING FASILITAS/INFRASTRUKTUR WILAYAH

Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah mencakup ketersediaan, aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Infrastruktur merupakan salah satu harapan penggerak ekonomi melalui terbukanya lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Sementara itu, infrastruktur juga berkontribusi dalam peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa, serta penurunan biaya logistik yang tentunya akan bermuara pada terciptanya efisiensi ekonomi.

#### 2.3.3.1 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Kategori hunian layak terdiri dari 4 komponen yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, dan akses sanitasi. Kondisi rumah di Kabupaten Tana Toraja sudah relatif semakin baik karena pemerintah meningkatkan kualitas hunian melalui program peningkatan rumah layak huni pada kawasan kumuh dan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

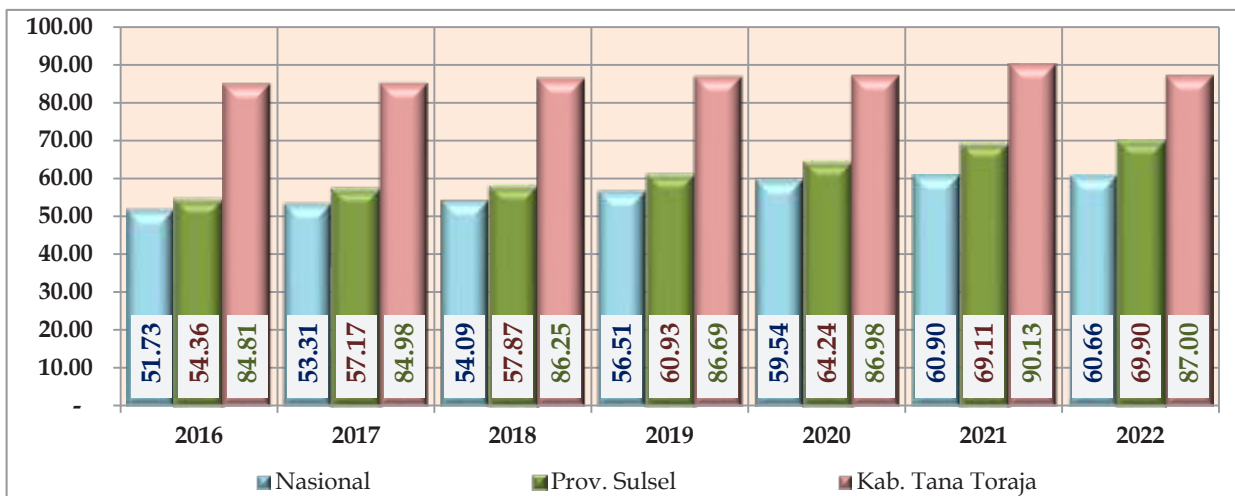


serta penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan standar pelayanan minimal (SPM).

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2021, Akses rumah layak huni di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dari 84,81 persen menjadi 90,13 persen, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 87,0 persen. Tren tersebut sama dengan tren capaian Nasional.

**Grafik 2.64**

Akses Rumah Layak Huni Nasional, Prov. Sulsel dan Kab. Tana Toraja  
Tahun 2016 - 2022



Sumber : BPS dan Dinas PRKP Kab. Tana Toraja, 2023

### 2.3.3.2 Jumlah Pelanggan Listrik

Energi listrik merupakan energi yang banyak digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan energi listrik tergolong sebagai energi utama yang sangat diperlukan manusia. Besarnya manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari membuat manusia sangat bergantung pada keberadaan energi tersebut karena listrik tidak hanya memungkinkan kita untuk mengoperasikan berbagai peralatan, tetapi juga membuat kehidupan manusia lebih mudah. Hal ini terutama penting dalam era modern, di mana banyak orang yang menggunakan peralatan listrik untuk memudahkan mengerjakan pekerjaan yang dilakukan.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023, jumlah pelanggan listrik mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 tercatat ada 43.356 pelanggan kemudian meningkat menjadi 54.483 pelanggan dengan persentase peningkatan tercatat sebesar 4,68 persen per tahun.



**Grafik 2.65**

Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan, 2024

### 2.3.3.3 Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, serta mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan Telekomunikasi, oleh karenanya untuk dapat mewujudkan layanan telekomunikasi yang baik bagi masyarakat, diperlukan sarana infrastruktur jaringan telekomunikasi yang memadai secara kualitas maupun cakupan yang luas ke seluruh pelosok wilayah khususnya untuk daerah terpencil yang masih banyak terdapat wilayah *blank spot*.

Kondisi cakupan layanan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Tana Toraja semakin meningkat, hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya wilayah *blank spot* di Kabupaten Tana Toraja. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya ada 96 dari 159 Lembang/Kelurahan atau sekitar 60,38 persen yang dapat menikmati layanan telekomunikasi dan Informatika (internet), kemudian dilakukan perbaikan dan peningkatan layanan sehingga pada tahun 2023, layanan telekomunikasi dan Informatika telah dinikmati oleh masyarakat pada 144 dari 159 Lembang/Kelurahan atau sekitar 90,57 persen. Meskipun demikian masih ada 15 Lembang/Kelurahan yang perlu mendapatkan perhatian sehingga ke



depan layanan telekomunikasi dan informatika dapat dinikmati pada seluruh wilayah di Kabupaten Tana Toraja.

**Tabel 2.17**  
Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Lembang/Kelurahan	159	159	159	159	159	159
2.	Jumlah Lembang/Kelurahan yang dilayani Telekomunikasi dan Informatika	99	109	112	136	140	144
3.	Persentase cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika	60,38	68,55	70,44	85,53	88,05	90,57

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Tana Toraja, 2024

### 2.3.4 DAYA SAING IKLIM INVESTASI

Daya saing iklim investasi adalah seberapa menariknya suatu wilayah atau negara bagi investor untuk menanamkan modalnya. Iklim investasi yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dengan kepastian hukum yang jelas, regulasi yang transparan, stabilitas politik dan ekonomi, serta infrastruktur yang memadai. Gambaran daya saing iklim investasi di Kabupaten Tana Toraja digambarkan pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat serta demokrasi substansial.

#### 2.3.4.1 Persentase Tindak Kriminalitas yang Tertangani

Kemampuan sebuah daerah bersaing dengan daerah lain untuk mendorong produktivitas perekonomian daerah tak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tapi faktor sosial juga tidak kalah pentingnya. Salah satu indikator aspek sosial adalah kemampuan daerah menangani kriminalitas. Menangani kriminalitas merupakan syarat mutlak jika sebuah daerah ingin meningkatkan daya saing, sebab daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi membuat aktivitas sosial-ekonomi terganggu dan akhirnya mempengaruhi daya saing daerah.

Sebagian besar penanganan tindakan kriminal tidak berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, tapi menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Meski begitu, kerja sama antara pemangku kepentingan dalam rangka menjaga



keamanan dan ketertiban di suatu daerah. Pada tahun 2020, jumlah angka kriminalitas di Kabupaten Tana Toraja tercatat sebanyak 190 kasus dengan jumlah yang ditangani sebesar 144 kasus atau 75,79 persen kemudian ditahun 2023 tercatat ada 324 kasus dan yang tertangani sebanyak 275 kasus atau sebesar 84,88 persen.

**Tabel 2.18**  
Angka Kriminalitas Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2023

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kriminalitas	190	234	404	324
2.	Angka Kriminalitas yang Tertangani	144	187	300	275
3.	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	75,79	79,91	74,26	84,88

Sumber : Satpol PP & Pemadam Kebakaran Kabupaten Tana Toraja, 2024

#### 2.3.4.2 Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota Legislatif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat (keterwakilan) paling sedikit 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Yang mana, pasal tersebut menyatakan bahwa, daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Lahirnya kuota perempuan melalui undang-undang tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual, undang-undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian kebijakan-kebijakan tersebut di atas tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan dalam parlemen. Jumlah keterlibatan perempuan dalam ranah politik di Kabupaten Tana Toraja pada periode 2019-2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode 2014-2019. Pada periode 2014-2019 terdapat sebanyak 6 perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Angka tersebut mencapai 20 persen dari jumlah keseluruhan anggota yakni 30 orang.



Pada periode selanjutnya yakni periode 2019-2024 angka tersebut justru mengalami penurunan. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja periode 2019-2024 hanya 4 orang atau sebesar 13,33 persen dari total 30 anggota yang artinya mengalami penurunan sebanyak 2 orang atau sebesar 6,67 persen dari periode sebelumnya.

#### **2.3.4.3 Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik**

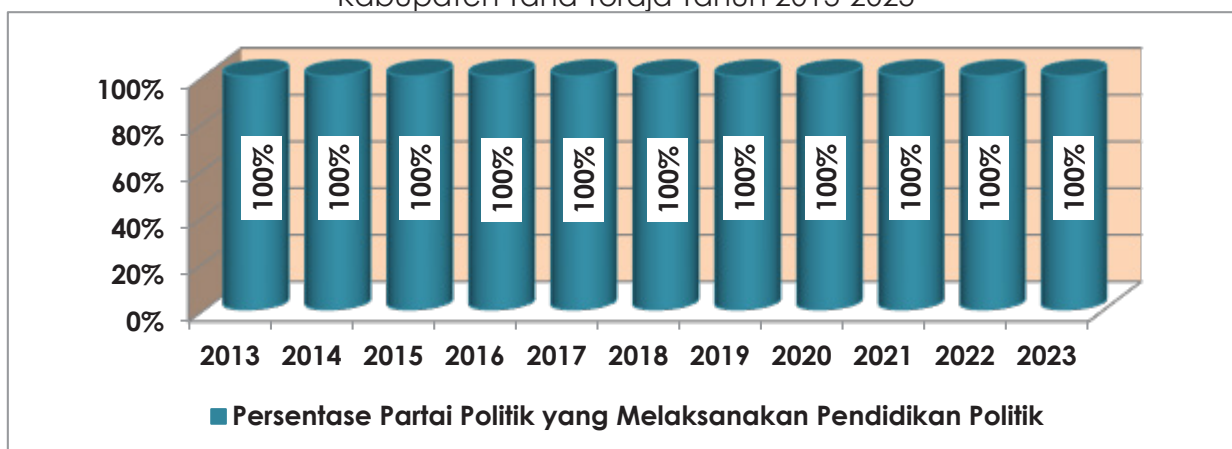
Partai politik memiliki peranan dalam pelaksanaan pendidikan politik dan berkewajiban dalam melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 dalam pasal 31 ayat 1 menyatakan Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain : (a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ; (b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ; dan (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk membina dan meningkatkan partisipasi generasi muda di dalam kehidupan politik diperlukan proses pendidikan politik yang terencana, terus menerus dan komprehensif sehingga partai dapat menghasilkan politisi-politisi masa depan yang lebih berkualitas. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Politik di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan angka yang baik dimana sejak tahun 2013 sampai dengan 2023, persentase Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik sebesar 100 persen yang artinya seluruh partai politik penerima bantuan dari pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dengan menggunakan dana sebesar 40 persen dari alokasi bantuan ke partai politik.



**Grafik 2.66**

Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik  
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013-2023



Sumber : Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Tana Toraja, 2024

#### 2.3.4.4 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. IDSD memetakan tingkat daya saing daerah baik level provinsi dan kabupaten Kota, sebagai upaya untuk mendorong kemandirian dan penguatan daya saing dalam pencapaian target pembangunan daerah. IDSD merupakan upaya untuk mengukur dan mengetahui kondisi daya saing suatu daerah ditinjau dari komponen lingkungan pendukung, SDM, pasar, dan ekosistem inovasi. Tujuan IDSD adalah memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Salah satu entry point dalam perumusan, penetapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. IDSD terdiri dari 4 Aspek dan 12 pilar meliputi :

1. Aspek Ekosistem Inovasi, yang memuat pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.
2. Aspek Lingkungan Pendukung, yang memuat pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK dan stabilitas ekonomi makro.
3. Aspek Sumber Daya Manusia, yang meliputi kesehatan dan keterampilan.
4. Aspek Pasar, yang meliputi pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan dan ukuran pasar.



Pencapaian skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2022 berdasarkan 4 aspek diuraikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.19**

Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2023

No.	ASPEK	2022	2023
<b>1</b>	<b>Aspek Ekosistem Inovasi</b>		
	Dinamisme Bisnis	5,00	2,98
	Kapabilitas Inovasi	1,69	2,66
<b>2</b>	<b>Aspek Lingkungan Pendukung</b>		
	Institusi	3,79	3,84
	Infrastruktur	2,50	1,82
	Adopsi TIK	2,44	3,88
	Stabilitas Ekonomi Makro	2,75	3,34
<b>3</b>	<b>Aspek Sumber Daya Manusia</b>		
	Kesehatan	4,08	4,13
	Keterampilan	3,12	3,70
<b>4</b>	<b>Aspek Pasar</b>		
	Pasar Produk	3,68	3,75
	Pasar Tenaga Kerja	2,50	2,74
	Sistem Keuangan	3,12	1,27
	Ukuran Pasar	0,31	3,80
	<b>Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kab. Tana Toraja</b>	<b>2,92 (Tinggi)</b>	<b>3,16 (Tinggi)</b>
	<b>Nilai Indeks Daya Saing Daerah Sulawesi Selatan</b>	<b>3,35 (Tinggi)</b>	<b>3,70 (Tinggi)</b>
	<b>Nilai Indeks Daya Saing Daerah Nasional</b>	<b>3,26 (Tinggi)</b>	<b>3,44 (Tinggi)</b>

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2024

## 2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Secara keseluruhan, pelayanan umum yang baik merupakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan stabil. Aspek pelayanan umum memiliki peran yang sangat penting karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengutamakan aspek pelayanan umum dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pemerintahan yang efektif. Gambaran terkait aspek pelayanan umum di Kabupaten Tana Toraja tergambar pada regulasi dan tata kelola yang



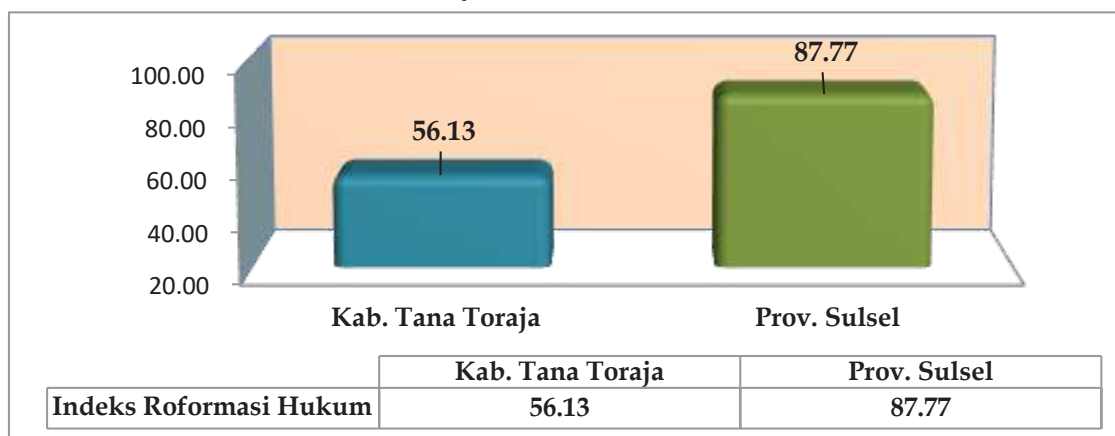
terintegrasi dan adaptif yang tercerminkan pada pencapaian indikator -indikator pelayanan pemerintahan.

#### 2.4.1 INDEKS REFORMASI HUKUM

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam Upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai Permenkumham nomor 17 Tahun 2022, indeks reformasi hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional.

**Grafik 2.67**

Perbandingan Indeks Reformasi Hukum  
Kab. Tana Toraja dan Prov. Sulsel Tahun 2023



Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Tana Toraja, 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 sebesar 56,13 dengan kategori Cukup masih jauh di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 87,77 dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menandakan bahwa Indeks Reformasi hukum perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan seluruh stakeholder dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas sehingga terwujud birokrasi yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu dibutuhkan penggerak yang betul-betul berkomitmen terhadap reformasi hukum, memahami substansi, konsisten dengan jalur perubahan yang disepakati, memberikan keteladanan



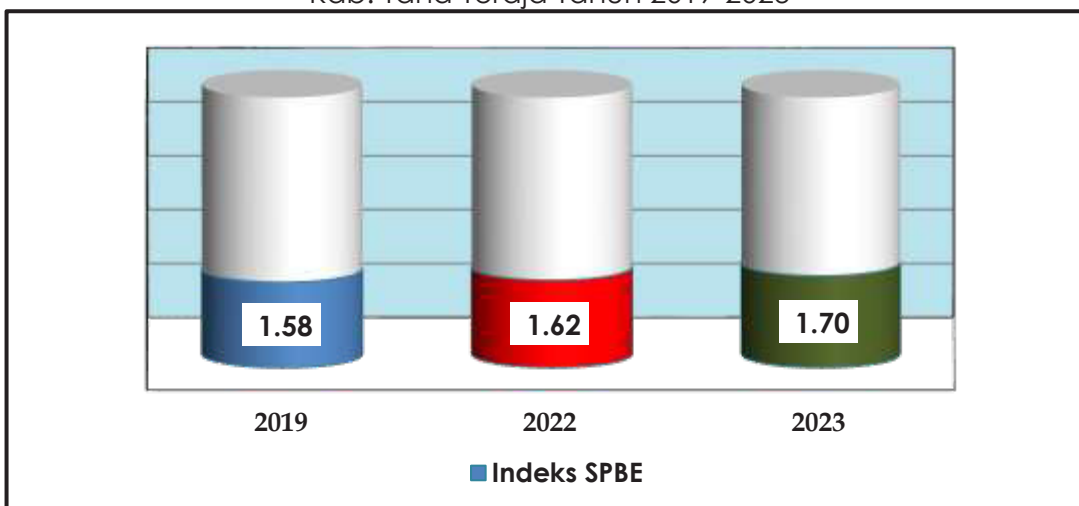
(lead by example), dan efektif mewujudkan agenda reformasi hukum dalam kebijakan pemerintah.

#### 2.4.2 INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Capaian nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 sebesar 1,70 atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 1,62. Meskipun mengalami sedikit kenaikan namun capaian Indeks SPBE Kabupaten Tana Toraja masih termasuk dalam kategori Kurang. Rendahnya capaian Indeks SPBE di Kabupaten Tana Toraja diakibatkan karena belum adanya kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur SPBE serta belum memiliki perencanaan strategis yang mengatur terkait SPBE. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai capaian Indeks SPBE maka harus didukung melalui penyusunan kebijakan internal yang mengatur arsitektur SPBE serta perencanaan strategis yang mengatur SPBE. Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.68**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  
Kab. Tana Toraja Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Tana Toraja, 2023

#### 2.4.3 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring



dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat, yang berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warganegara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan diadakannya survei kepuasan masyarakat adalah untuk mendapatkan umpan-balik atas kualitas pelayanan yang telah dilakukan penyelenggara pelayanan. Melalui survei kepuasan, masyarakat didorong untuk memberikan partisipasi sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan agar terjadi peningkatan atau perbaikan kualitas pelayanan dengan melakukan inovasi-inovasi pelayanan atas masalah yang disampaikan masyarakat dan konsumen saat survei kepuasan.

Pada tahun 2021, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan oleh dua perangkat daerah yakni RSUD Lakipadada dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian sejak tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga ikut telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

**Tabel 2.20**

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 - 2023

No.	Perangkat Daerah	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	RSUD Lakipadada	80,632 (Baik)	81,682 (Baik)	83,364 (Baik)
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,000 (Baik)	88,135 (Baik)	88,340 (Baik)
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	82,090 (Baik)	87,820 (Baik)

Sumber : RSUD Lakipadada, DisDukcapil & DPMPTSP Kab. Tana Toraja, 2024

#### 2.4.4 SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)

Upaya mewujudkan pemerintahan bersih terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu sumber persoalan yang diidentifikasi telah



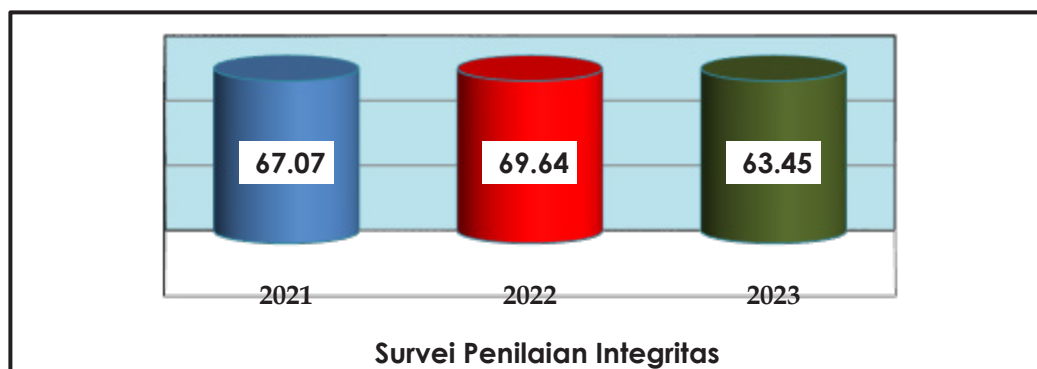
menghambat upaya ini adalah rendahnya integritas birokrasi, yang bisa menyebabkan pelayanan publik yang tidak akuntabel atau kebocoran anggaran. Pada dasarnya, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah menginisiasi upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Namun, capaian upaya-upaya tersebut belum memiliki ukuran yang objektif, maka Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menjawab kebutuhan akan perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah) dengan skor 100 menyatakan sangat bersih dari korupsi, dan 0 menunjukkan sangat korup. Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.

Hasil survei Penilaian Integritas di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni dari 67,07 pada tahun 2021 meningkat menjadi 69,64 pada tahun 2022 namun pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,19 poin menjadi 63,45.

**Grafik 2.69**

Survei Penilaian Integritas (SPI)  
Kab. Tana Toraja Tahun 2021-2023



Sumber: Inspektorat Kab. Tana Toraja, 2024



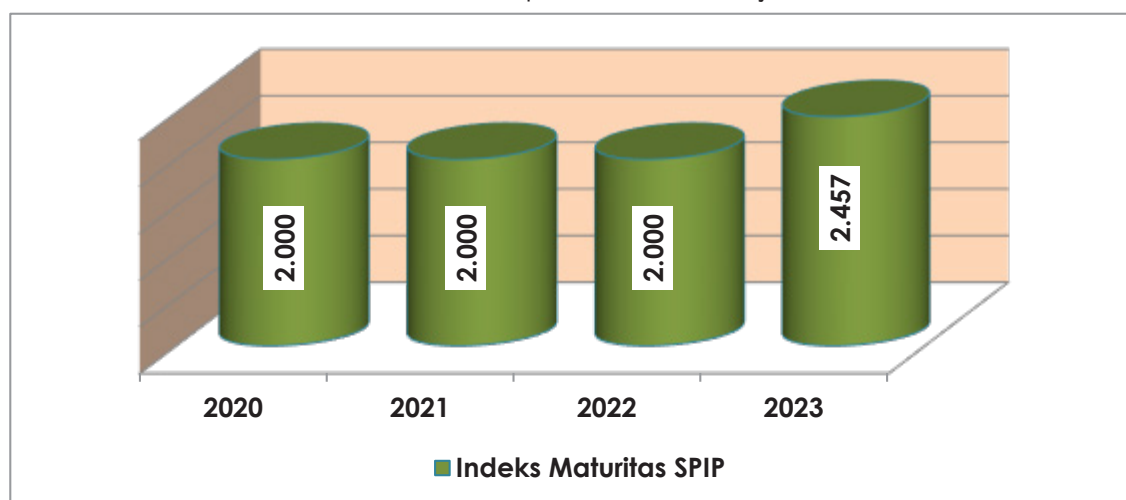
#### 2.4.5 INDEKS MATURITAS SPIP

Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, nilai indeks maturitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja baru mencapai level 2 atau termasuk kategori “berkembang”. Tingkat maturitas “Berkembang” menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasikan dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum tertangani secara memadai. Dari tahun 2020 hingga tahun 2022, nilai Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Tana Toraja tetap di angka 2 kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 2,547 atau sebesar 0,547 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

**Grafik 2.70**

Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2023



Sumber : Inspektorat Kab. Tana Toraja, 2024

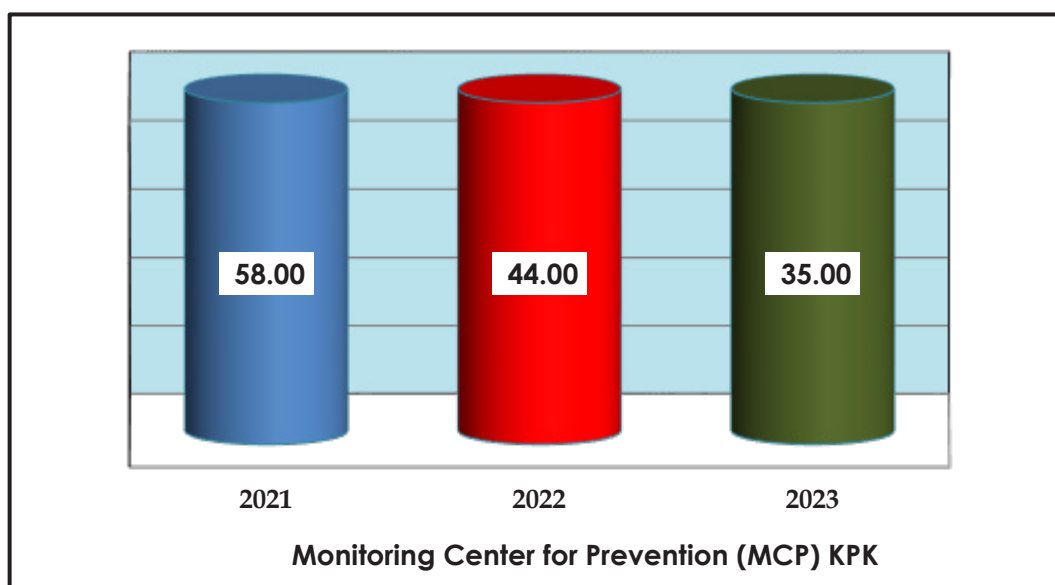


#### 2.4.6 MCP KPK

Setiap tahunnya, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP). Secara umum, MCP memiliki delapan cakupan intervensi yang terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa/kelurahan. Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, angka penilaian MCP KPK Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan dari 58 persen pada tahun 2021 menjadi 35 persen pada tahun 2023 yang diakibatkan beberapa hal diantaranya pemungutan pajak serta pengelolaan sertifikasi aset yang belum optimal, minimnya SDM Pengelola Barang/Jasa (PPBJ) serta belum lengkapnya Peraturan Daerah di beberapa sektor terkait 8 area intervensi. Oleh karena itu, Pembangunan sistem pencegahan korupsi daerah harus diawali dengan komitmen Kepala Daerah beserta jajaran, termasuk unsur legislatif. Hal ini merupakan kesatuan yang perlu disinergikan dan tidak dapat dipisahkan.

**Grafik 2.71**

Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK  
Kab. Tana Toraja Tahun 2021-2023



Sumber : Inspektorat Kab. Tana Toraja, 2024



#### **2.4.7 PERSENTASE WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI DAN BERSIH MELAYANI (WBBM) PEMERINTAH KABUPATEN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) di instansi Pemerintah disebutkan bahwa Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup :

- a. Pencanaan ZI;
- b. Penetapan unit kerja;
- c. Pembangunan unit kerja;
- d. Pemantauan Pembangunan ZI.

Kemudian diajukan untuk dilakukan evaluasi oleh TPN (Tim Penilai Nasional) yang mencakup :

- a. Evaluasi Pembangunan ZI oleh Tim Penilai Internal (TPI);
- b. Pengajuan unit kerja/ satuan kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM;
- c. Evaluasi Pembangunan ZI oleh TPN; dan
- d. Pemantauan unit kerja/ satuan kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kemudian Kementerian PAN RB menyusun profil Pembangunan ZI dari hasil evaluasi unit kerja pada instansi pemerintah yang diajukan mendapat predikat WBK dan WBBM.

Hingga saat ini belum ada satu pun Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tana Toraja yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Untuk mendorong indikator ini diperlukan perbaikan sistem dan tata kelola, mencakup pembangunan budaya kinerja, manajemen SDM, proses bisnis yang efektif dan efisien, inovasi yang berdampak ke masyarakat, pengawasan dan pengendalian internal, transparansi serta peningkatan kualitas pelayanan.

#### **2.4.8 INDEKS REFORMASI BIROKRASI**

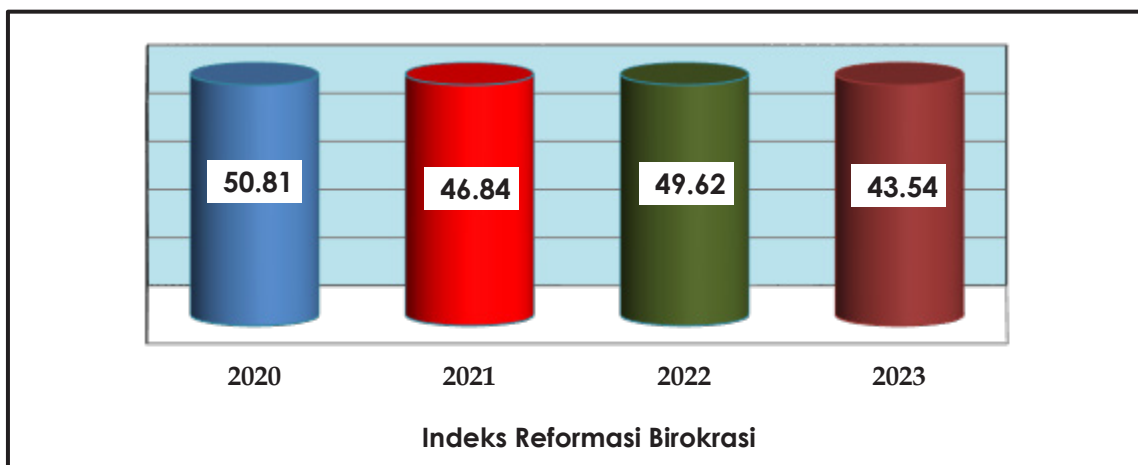
Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki



pelayanan publik yang berkualitas. Capaian Indeks Reformasi Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi. berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB RI tahun 2020, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tana Toraja sebesar 50,81 namun turun menjadi 48,84 pada tahun 2021. Tahun 2022 meningkat menjadi 49,62 kemudian turun pada angka 43,54 pada tahun 2023.

**Grafik 2.72**

Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2023



Sumber : Bagian Ortala Setda Kab. Tana Toraja, 2024

#### 2.4.9 INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

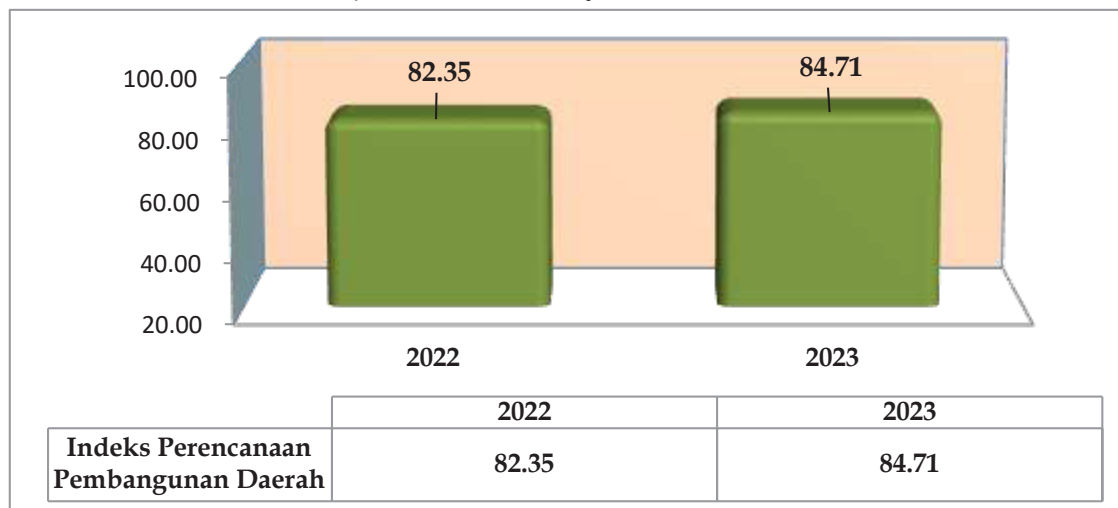
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam waktu tertentu. Sistem perencanaan pada dasarnya dimaksudkan untuk memandu, menghasilkan, mengendalikan dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan itu sendiri yang disesuaikan dengan esensi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) dikeluarkan oleh Kementerian PPN/ Bappenas sebagai alat untuk memastikan terjadinya keselarasan prioritas perencanaan pemerintah kabupaten dengan prioritas perencanaan pemerintah provinsi dan prioritas perencanaan nasional yang kemudian diturunkan ke dalam dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten



Tana Toraja pada tahun 2023 sebesar 84,71 persen atau mengalami peningkatan 2,36 persen dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 82,35 persen.

**Grafik 2.73**

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2023



Sumber : Bappelitbangda Kab. Tana Toraja, 2024

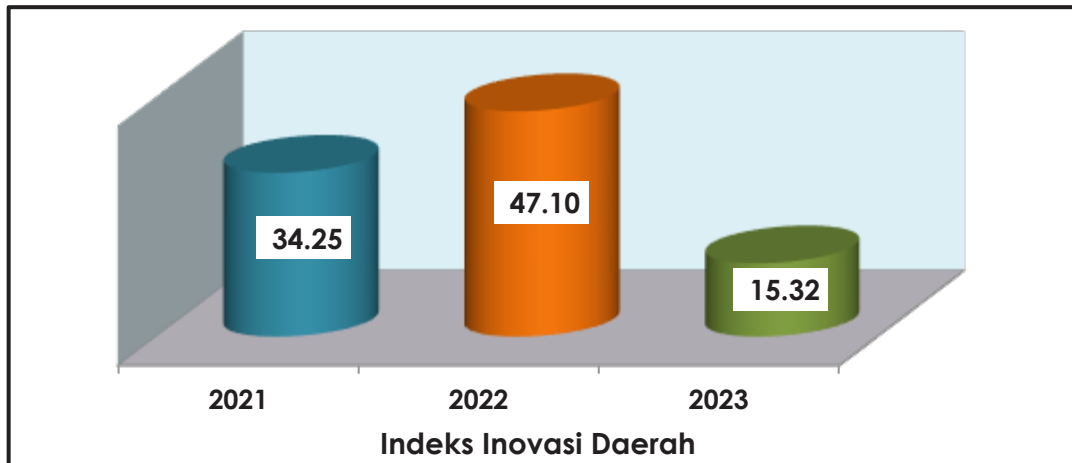
#### 2.4.10 INDEKS INOVASI DAERAH

Indeks Inovasi Daerah merupakan sejumlah inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2021 sebesar 34,25 dengan kategori Inovatif kemudian naik pada tahun 2022 menjadi 47,10 dengan kategori inovatif namun pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 15,32 dengan kategori kurang inovatif. Penurunan yang terjadi diakibatkan karena keterlambatan penginputan inovasi dan data dukung dalam aplikasi. Sampai batas akhir yang telah ditentukan. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tana Toraja masih perlu ditingkatkan dengan cara memberikan dukungan kepada perangkat daerah yang melakukan inovasi melalui regulasi, anggaran, serta kelengkapan administrasi lainnya.



**Grafik 2.74**

Indeks Inovasi Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2021-2023



Sumber : Bagian Ortala Setda Kab. Tana Toraja, 2024

## 2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2010 - 2030

### 2.5.1 KESIMPULAN HASIL EVALUASI RPJPD TAHUN 2010 – 2030

RPJPD merupakan Dokumen Pembangunan Jangka Panjang daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan periode waktu selama 20 tahun sebagaimana substansi keberadaannya, dokumen RPJP Daerah menjadi suatu kerangka strategis yang menjadi arah terhadap upaya, keputusan dan tindakan pembangunan baik dalam periode jangka pendek maupun jangka menengah. Dalam kapasitas tersebut, maka dokumen perencanaan jangka panjang harus mampu menjawab tantangan dan memberikan visi yang akan dicapai dari program-program pembangunan pada akhir periode perencanaan.

Evaluasi RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 dilakukan terhadap target indikator kinerja Sasaran Pokok Setiap Tahapan Pembangunan Lima Tahun RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan setiap periode lima tahun dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja RPJPD Kabupaten Tana Toraja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja per tahapan dalam periode RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030.



Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Daerah meliputi Evaluasi RPJPD dan RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan hasil evaluasi capaian RPJPD pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Pada Misi 1 yaitu Mewujudkan Masyarakat Tana Toraja yang unggul dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, penguasaan iptek terdapat 12 (dua belas) Sasaran Pokok dengan 12 indikator, dimana 2 (dua) indikator tercapai, 10 (sepuluh) indikator belum tercapai, namun dari 10 indikator yang belum tercapai ada 6 (enam) indikator yang capaiannya sudah di atas 99 (sembilan puluh sembilan) persen.
- Pada Misi 2 yaitu Melestarikan kebudayaan daerah Tana Toraja dengan memperkuat jati diri dan adat istiadat masyarakat Tana Toraja melalui pemberdayaan kelembagaan, pematapan aktivitas seni budaya dan penerapan nilai-nilai agama terdapat 2 (dua) Sasaran Pokok dengan 2 (dua) indikator, dimana terdapat 0 (nol) tercapai, 2 (dua) belum tercapai.
- Pada Misi 3 yaitu Mewujudkan ketenteraman daerah dan masyarakat Tana Toraja yang berkeadilan serta demokratis dengan memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, kesetaraan gender, budaya hukum, politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik terdapat 8 (delapan) Sasaran Pokok dengan 10 (sepuluh) indikator, dimana terdapat 5 (lima) indikator tercapai, 4 (empat) indikator belum tercapai, dan 1 (satu) indikator tidak tersedia data realisasinya.
- Pada Misi 4 yaitu Mewujudkan masyarakat Tana Toraja sejahtera dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Pokok dengan 12 (dua belas) indikator, dimana terdapat 2 (dua) indikator tercapai, 8 (delapan) indikator belum tercapai, dan 2 (dua) indikator tidak tersedia data realisasinya. Dari 8 (delapan) indikator yang belum



tercapai, terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya sudah di atas 99 (sembilan puluh sembilan) persen.

- Pada Misi 5 yaitu Mewujudkan pembangunan Tana Toraja yang lestari, handal dan merata dengan meningkatkan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur termasuk kesiagaan menghadapi bencana alam terdapat 7 (tujuh) Sasaran Pokok dengan 8 (delapan) indikator dimana terdapat 3 (tiga) indikator tercapai dan 5 (lima) indikator belum tercapai. Dari 5 (lima) indikator yang belum tercapai, terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya sudah di atas 99 (sembilan puluh sembilan) persen.

Selengkapnya rangkuman ketercapaian indikator pada setiap misi pembangunan RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.21**

Rangkaian Ketercapaian Misi Pembangunan  
RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030

Misi	Jumlah Total Indikator	Kategori Ketercapaian Indikator			% Ketercapaian
		Tercapai	Belum Tercapai	Tidak Ada Data	
Misi 1	12	2	10	0	16,67
Misi 2	2	0	2	0	0,00
Misi 3	10	5	4	1	50,00
Misi 4	12	2	8	2	16,67
Misi 5	8	3	5	0	37,50
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>27,27</b>

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja Tahun, 2024

Meskipun terdapat 29 (dua puluh sembilan) indikator yang belum tercapai namun ada 9 (sembilan) indikator diantaranya yang telah memiliki capaian di atas 99 (Sembilan puluh Sembilan) persen.

## 2.5.2 REKOMENDASI TERHADAP RPJPD TAHUN 2025 – 2045

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam



pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang kurangnya meliputi; indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat.

Berdasarkan kesimpulan evaluasi hasil RPJPD di atas, maka berikut disampaikan beberapa rekomendasi terhadap proses perencanaan dan proses pembangunan ke depannya.

### **2.5.2.1 Rekomendasi untuk Proses Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang**

Proses perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun) memiliki karakteristik tersendiri untuk dapat menentukan visi jangka panjang suatu daerah terlepas dari periodisasi kepala daerah yang berlangsung setiap lima tahun sekali. Untuk itu, dibutuhkan proses perencanaan yang dapat mengarahkan pembangunan dengan memperhatikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan berdasarkan tren yang terus berkembang dan kebutuhan yang akan terus tumbuh. Berdasarkan evaluasi RPJPD Kabupaten Tana Toraja, terdapat beberapa poin rekomendasi untuk proses penyusunan rencana jangka panjang berikutnya, antara lain :

- a. Penyusunan visi pembangunan jangka panjang perlu dibangun dengan pertimbangan tren dan kebutuhan di masa yang akan datang serta karakteristik dan konteks kewilayahan.
- b. Pendetailan visi menjadi tujuan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan pertimbangan waktu pencapaian sasaran pokok.
- c. Tantangan ke depan membutuhkan kemampuan rencana untuk dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah. Untuk itu, fleksibilitas yang terukur perlu dirancang agar dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi. Kemungkinan terjadinya kejadian tidak terduga seperti bencana alam maupun pandemi harus dipersiapkan dari awal perencanaan.



- d. Proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak secara partisipatif sehingga dapat mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Ruang diskusi dengan kelompok perempuan, minoritas, rentan, dan miskin perlu menjadi perhatian khusus untuk mewujudkan proses perencanaan yang inklusif.
- e. Penentuan means of verification atau cara mengukur ketercapaian indikator harus mempertimbangkan ketersediaan data dan relevansi dengan sasaran pokok yang akan diukur. Data yang dibutuhkan perlu disajikan secara time series sehingga dapat menggambarkan dinamika selama 20 tahun pembangunan.
- f. Perumusan indikator yang relevan untuk setiap sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tana Toraja harus mampu menggambarkan kondisi sasaran pokok yang ingin dicapai. Hal ini mengharuskan, pada beberapa konteks tertentu, indikator yang dirumuskan ke depan bersifat outcome yang dapat menggambarkan seluruh populasi dan tidak hanya menggambarkan output capaian penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berkaitan dengan sasaran pokok tersebut.

#### **2.5.2.2 Rekomendasi untuk Perencanaan Pembangunan 20 Tahun Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045**

Telaah terhadap ketercapaian dan faktor pendorong dan penghambat masing-masing misi pembangunan RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 menjadi bahan pembelajaran untuk mempertajam perencanaan pembangunan jangka panjang berikutnya. Setiap telaah tersebut berisikan catatan usulan tindaklanjut yang spesifik terhadap muatan setiap sasaran pokok pada masing-masing misi pembangunan.

Berdasarkan hasil telaah terhadap catatan pembangunan masing-masing sasaran pokok, rekap usulan tindaklanjut untuk proses perencanaan pembangunan 20 tahun mendatang menghasilkan beberapa catatan indikator yang masih relevan untuk digunakan di proses perencanaan berikutnya dan



beberapa indikator yang tidak relevan untuk digunakan. Selengkapnya rekap daftar catatan terhadap indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.22**

Usulan Tindak Lanjut Proses Perencanaan Untuk Misi 1  
RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030

<b>Misi 1 :</b> <b>Mewujudkan Masyarakat Tana Toraja yang unggul dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, penguasaan iptek</b>	
<b>Indikator yang masih relevan digunakan pada periode berikutnya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata lama sekolah (tahun)</li> <li>2. Indeks Pendidikan (indeks)</li> <li>3. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)</li> <li>4. Indeks Pembangunan Manusia (indeks)</li> <li>5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit (indeks)</li> <li>6. Persentase Fasyankes yang Memiliki Tenaga Sesuai Permenkes 43 Tahun 2009 (persen)</li> <li>7. Indeks Kesehatan (indeks)</li> <li>8. Angka Harapan Hidup (tahun)</li> </ol>
<b>Indikator yang tidak relevan digunakan di periode berikutnya</b>	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan (persen)
<b>Indikator dengan catatan khusus</b>	Indikator Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan sebaiknya diganti dengan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun agar lebih tajam dan mudah dihitung dan sesuai dengan indikator dalam Permendagri 86 tahun 2017
<b>Usulan indikator baru</b>	Laju pertumbuhan penduduk (persen)

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja Tahun, 2024

**Tabel 2.23**

Usulan Tindak Lanjut Proses Perencanaan Untuk Misi 2  
RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030

<b>Misi 2 :</b> <b>Melestarikan kebudayaan daerah Tana Toraja dengan memperkuat jati diri dan adat istiadat masyarakat Tana Toraja melalui pemberdayaan kelembagaan, pemantapan aktivitas seni budaya dan penerapan nilai-nilai agama</b>	
<b>Indikator yang masih relevan digunakan pada periode berikutnya</b>	Persentase kasus kriminal yang tertangani
<b>Indikator yang tidak relevan digunakan di periode berikutnya</b>	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan
<b>Indikator dengan catatan khusus</b>	Indikator Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan sebaiknya diganti dengan Penyelenggaraan festival seni dan budaya per tahun agar lebih tajam dan mudah dihitung dan sesuai dengan indikator dalam Permendagri 86 tahun 2017
<b>Usulan indikator baru</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Keindahan)</li> <li>2. Jumlah kejahatan yang dilaporkan</li> </ol>

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja Tahun, 2024



**Tabel 2.24**

Usulan Tindak Lanjut Proses Perencanaan Untuk Misi 3  
RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030

<b>Misi 3 :</b> <b>Mewujudkan ketenteraman daerah dan masyarakat Tana Toraja yang berkeadilan serta demokratis dengan memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, kesetaraan gender, budaya hukum, politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik</b>	
<b>Indikator yang masih relevan digunakan pada periode berikutnya</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase PROLEGDA yang terealisasi</li><li>2. Persentase Penyajian Profil Kependudukan</li><li>3. Angka Kriminalitas yang Tertangani</li><li>4. Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika</li></ol>
<b>Indikator yang tidak relevan digunakan di periode berikutnya</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Teknis, manajerial, sosial kultur)</li><li>2. Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik</li><li>3. Capaian kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik</li><li>4. Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li></ol>
<b>Indikator dengan catatan khusus</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indikator Capaian kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik sulit untuk diukur secara spesifik, harus dirumuskan lagi indikator yang lebih mudah untuk diukur secara kuantitatif</li><li>2. Indikator Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sulit untuk diukur secara spesifik, harus dirumuskan lagi indikator yang lebih mudah untuk diukur secara kuantitatif</li><li>3. Indikator Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik dirumuskan kembali menjadi indikator yang mudah diukur secara kuantitatif misalnya dengan indikator Jumlah uji KIR angkutan umum</li></ol>
<b>Usulan indikator baru</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah uji KIR angkutan umum</li><li>2. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural</li><li>3. Cakupan layanan telekomunikasi</li><li>4. Opini BPK</li></ol>

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja Tahun, 2024



**Tabel 2.25**

Usulan Tindak Lanjut Proses Perencanaan Untuk Misi 4  
RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030

<b>Misi 4 :</b> <b>Mewujudkan masyarakat Tana Toraja sejahtera dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat</b>	
<b>Indikator yang masih relevan digunakan pada periode berikutnya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDRB per Kapita</li> <li>2. Kunjungan Wisatawan</li> <li>3. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB</li> <li>4. Tingkat Kemiskinan</li> <li>5. Tingkat pengangguran Terbuka</li> <li>6. Jumlah produksi perikanan budidaya</li> </ol>
<b>Indikator yang tidak relevan digunakan di periode berikutnya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha</li> <li>2. Persentase usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang diberdayakan</li> <li>3. Produksi Daging Kerbau</li> <li>4. Produksi Daging Babi</li> </ol>
<b>Indikator dengan catatan khusus</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu rumusan indikator baru yang lebih tajam terkait indikator produksi daging kerbau</li> <li>2. Perlu rumusan indikator baru yang lebih tajam terkait indikator produksi daging babi</li> <li>3. Perlu dirumuskan kembali indikator terkait UMKM agar lebih mudah pengukurannya, misalnya dengan menggunakan indikator Persentase (jumlah) Koperasi dan UMKM yang aktif</li> </ol>
<b>Usulan indikator baru</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (jumlah) Koperasi dan UMKM yang aktif</li> <li>2. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB</li> </ol>

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja Tahun, 2024

**Tabel 2.26**

Usulan Tindak Lanjut Proses Perencanaan Untuk Misi 5  
RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030

<b>Misi 5 :</b> <b>Mewujudkan pembangunan Tana Toraja yang lestari, handal dan merata dengan meningkatkan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur termasuk kesiagaan menghadapi bencana alam</b>	
<b>Indikator yang masih relevan digunakan pada periode berikutnya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik</li> <li>3. Presentasi Lingkungan Permukiman Kumuh</li> </ol>
<b>Indikator yang tidak relevan digunakan di periode berikutnya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan kemanfaatan penelitian dan pengembangan</li> <li>2. Persentase Bangunan Pemerintah yang tertata dengan Baik</li> <li>3. Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan air minum curah Lintas Kabupaten/ Kota</li> </ol>
<b>Indikator dengan catatan khusus</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator Cakupan kemanfaatan penelitian dan pengembangan tidak sesuai dengan sasaran pokok, sebaiknya diganti dengan indikator Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA</li> </ol>



Misi 5 : Mewujudkan pembangunan Tana Toraja yang lestari, handal dan merata dengan meningkatkan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur termasuk kesiagaan menghadapi bencana alam	
	2. Indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan air minum curah Lintas Kabupaten/Kota diformulasikan ulang sehingga lebih mempermudah pengukuran
<b>Usulan indikator baru</b>	1. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA 2. Persentase penduduk berakses air minum 3. Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja Tahun, 2024

## 2.6 TREND DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Perencanaan pembangunan memerlukan informasi demografi baik informasi masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Informasi demografi masa datang berupa proyeksi penduduk dapat memberikan berbagai informasi yang akan mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi sehingga membantu dalam pembuatan kebijakan yang bisa diterapkan di berbagai skenario.

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar harus menjadi prioritas daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prasarana dan sarana dasar yang memadai merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah

### 2.6.1 PROYEKSI DEMOGRAFI KABUPATEN TANA TORAJA

Proyeksi kependudukan merupakan bagian penting yang perlu dilakukan sebelum menyusun analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana. Hasil proyeksi Penduduk menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran kebutuhan sarana dan prasarana untuk periode 20 tahun ke depan. Proyeksi Penduduk Kabupaten Tana Toraja didasarkan pada tiga parameter utama yang menentukan jumlah penduduk yaitu angka kelahiran (fertilitas), angka kematian (mortalitas), dan perpindahan Penduduk masuk-keluar (migrasi). Untuk



mengukur fertilitas, indikator yang digunakan adalah total fertility rate (TFR). Data TFR yang digunakan bersumber dari dokumen proyeksi penduduk yang dirilis oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Data TFR yang tersedia hanya data per lima tahunan. Data tersebut diproyeksi menggunakan metode interpolasi untuk mendapatkan data tahun-tahun yang tidak datanya tidak tersedia. Indikator lain yang digunakan sebagai asumsi adalah jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun baseline. Pada aspek mortalitas, indikator yang digunakan adalah angka harapan hidup laki-laki perempuan. Selain indikator-indikator tersebut ada beberapa indikator lainnya yang menjadi asumsi dalam memproyeksi kondisi demografi Kabupaten Tana Toraja dalam periode 2025-2045. Untuk mendapatkan gambaran rinci tentang indikator-indikator tersebut dan proyeksinya, Hasil analisis proyeksi kependudukan di Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.27**  
Asumsi Proyeksi Demografi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Asumsi Proyeksi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Fertility</b>											
TFR	2,62	2,58	2,54	2,51	2,47	2,43	2,4	2,37	2,34	2,31	2,28
GRR	1,27	1,25	1,24	1,22	1,21	1,19	1,18	1,16	1,15	1,13	1,12
NRR	1,23	1,21	1,2	1,19	1,17	1,15	1,14	1,13	1,11	1,1	1,09
Mean age of childbearing	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
Child-woman ratio	0,36	0,38	0,4	0,4	0,4	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36
<b>Mortality</b>											
Male LE	71,7	71,9	72,1	72,3	72,5	72,7	72,7	72,8	72,9	73	73,1
Female LE	75,5	75,6	75,8	76	76,1	76,3	76,4	76,4	76,5	76,6	76,6
Total LE	73,5	73,7	73,9	74	74,2	74,4	74,5	74,6	74,6	74,7	74,8
IMR	16,8	18,4	18	17,6	17,2	16,8	16,6	16,5	16,3	16,1	16
U5MR	22,6	21,9	21	20,6	20,1	19,6	19,4	19,2	19,1	18,9	18,7
Total 45q15	111,54	109,83	107,95	106,05	104,15	102,26	101,50	100,76	100,03	99,30	98,55
<b>Migration</b>											
Male	-60.793	-58.949	-57.107	-55.267	-53.429	-51.584	-49.741	-47.900	-46.061	-44.224	-42.389
Female	-68.132	-67.154	-66.178	-65.204	-64.232	-63.262	-62.294	-61.328	-60.364	-59.402	-58.442
Total	-128.925	-126.103	-123.285	-120.471	-117.661	-114.846	-112.035	-109.228	-106.425	-103.626	-100.831
<b>Vital Rates</b>											
CBR per 1000	21,2	20,8	20,5	20,1	19,7	19,3	18,8	18,3	17,8	17,3	16,7
CDR per 1000	6,3	6,3	6,8	7,1	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
RNI percent	1,49	1,46	1,37	1,3	1,24	1,19	1,14	1,09	1,04	0,98	0,92
GR percent	-42,48	-40,93	-39,49	-38,09	-36,75	-35,44	-34,18	-32,96	-31,79	-30,66	-29,57
<b>Annual births and deaths</b>											
Births	6.209	6.198	6.184	6.154	6.107	6.038	5.968	5.879	5.773	5.650	5.512
Deaths	1.836	1.864	2.049	2.174	2.253	2.302	2.347	2.380	2.406	2.431	2.458
Population											
Percent 0-4	9,62	10,07	10,33	10,36	10,12	9,55	9,37	9,18	8,97	8,75	8,52



Asumsi Proyeksi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Percent 5-14	12,88	12,63	12,66	12,99	13,65	14,67	15,31	15,95	16,56	17,11	17,55
Percent 15-24	18,64	17,96	17,18	16,35	15,49	14,63	13,79	13,01	12,32	11,77	11,41
Percent 15-49	55,86	55,31	54,7	54,02	53,31	52,59	51,88	51,19	50,55	49,95	49,42
Percent 15-64	69,23	68,93	68,58	68,19	67,72	67,2	66,63	66,04	65,47	64,96	64,56
Percent 65 and over	8,27	8,37	8,43	8,46	8,51	8,58	8,69	8,83	9	9,18	9,37
Percent females 15-49	54,55	54,05	53,5	52,91	52,28	51,63	51	50,39	49,81	49,28	48,82
Sex ratio	106,75	106,65	106,58	106,51	106,44	106,37	106,31	106,24	106,17	106,1	106,02
Dependency ratio	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,5	0,51	0,53	0,54	0,55
Median age	30	30	30	31	31	31	31	32	32	32	33



Lanjutan Asumsi Proyeksi Demografi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Asumsi Proyeksi	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
<b>Fertility</b>										
TFR	2,26	2,25	2,23	2,22	2,2	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15
GRR	1,11	1,1	1,09	1,09	1,08	1,07	1,07	1,06	1,06	1,05
NRR	1,08	1,07	1,06	1,06	1,05	1,04	1,04	1,03	1,03	1,02
Mean age of childbearing	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
Child-woman ratio	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,3	0,29	0,28	0,28	0,27
<b>Mortality</b>										
Male LE (Harapan Hidup)	73,1	73,2	73,2	73,3	73,4	73,4	73,5	73,5	73,6	73,6
Female LE (Harapan Hidup)	76,7	76,8	76,8	76,9	76,9	76,9	77	77	77,1	77,1
Total LE (Harapan Hidup)	74,9	74,9	75	75	75,1	75,1	75,2	75,2	75,3	75,3
IMR	15,9	15,7	15,6	15,5	15,4	15,3	15,2	15,1	15	14,9
U5MR	18,5	18,4	18,2	18,1	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4
Total 45q15	98,01	97,45	96,89	96,32	95,73	95,27	94,80	94,32	93,84	93,35
<b>Migration</b>										
Male	-40.556	-38.725	-36.896	-35.060	-33.226	-31.394	-29.564	-27.736	-25.910	-24.086
Female	-57.484	-56.528	-55.574	-54.622	-53.672	-52.724	-51.778	-50.834	-49.892	-48.952
Total	-98.040	-95.253	-92.470	-89.682	-86.898	-84.118	-81.342	-78.570	-75.802	-73.038
<b>Vital Rates</b>										
CBR per 1000	16,1	15,7	15,2	14,8	14,3	14	13,7	13,5	13,3	13,3
CDR per 1000	7,5	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,3
RNI percent	0,87	0,82	0,76	0,71	0,66	0,61	0,57	0,54	0,51	0,49
GR percent	-28,52	-27,5	-26,52	-25,55	-24,61	-23,69	-22,79	-21,91	-21,03	-20,16
<b>Annual births and deaths</b>										
Births	5,387	5,278	5,145	5,040	4,926	4,842	4,765	4,711	4,686	4,700
Deaths	2,493	2,533	2,577	2,624	2,672	2,723	2,776	2,831	2,889	2,952
Population										
Percent 0-4	8,27	8,03	7,79	7,56	7,35	7,15	6,96	6,81	6,67	6,58
Percent 5-14	17,86	17,99	17,9	17,54	16,87	16,54	16,2	15,83	15,46	15,08



Asumsi Proyeksi	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Percent 15-24	11,25	11,34	11,7	12,37	13,36	14,02	14,68	15,32	15,9	16,38
Percent 15-49	48,98	48,69	48,58	48,73	49,17	49,27	49,37	49,46	49,52	49,54
Percent 15-64	64,3	64,22	64,34	64,71	65,37	65,64	65,9	66,15	66,4	66,63
Percent 65 and over	9,56	9,76	9,96	10,18	10,42	10,67	10,94	11,21	11,47	11,71
Percent females 15-49	48,45	48,22	48,17	48,38	48,88	49	49,14	49,26	49,35	49,37
Sex ratio	105,94	105,86	105,77	105,68	105,58	105,48	105,37	105,26	105,14	105,02
Dependency ratio	0,56	0,56	0,55	0,55	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,5
Median age	33	33	34	34	34	35	35	35	36	36

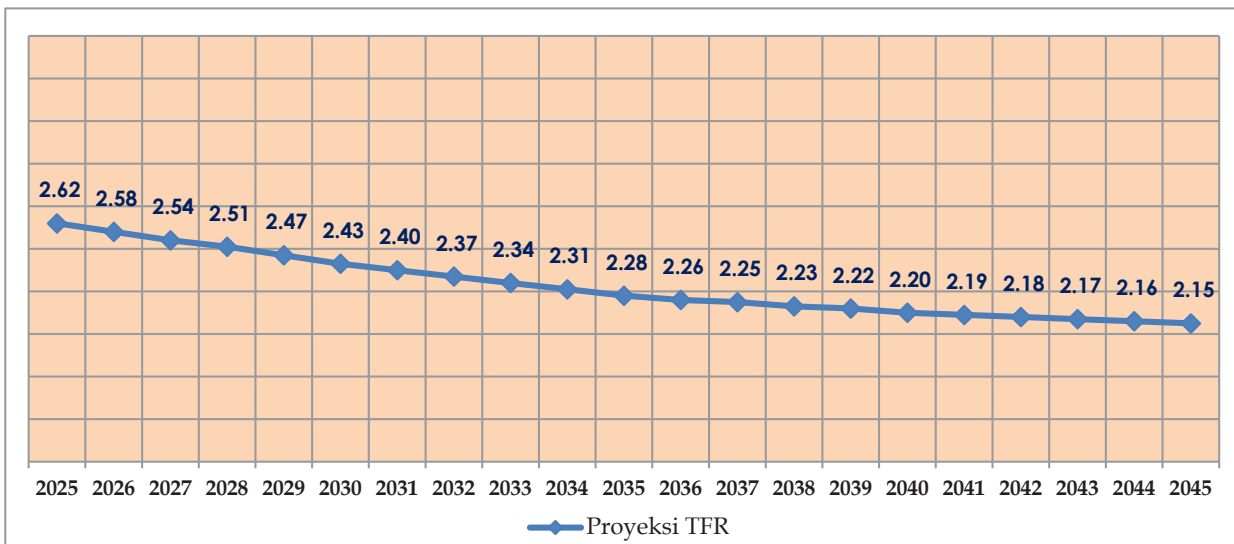
Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024



Berdasarkan tabel asumsi proyeksi demografi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045, dapat dilihat hasil proyeksi indikator yang menjadi asumsi penentu kondisi demografi Kabupaten Tana Toraja. Salah satu yang penting adalah TFR. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa TFR Kabupaten Tana Toraja asumsikan terus menurun karena diperkirakan angka kelahiran dalam jangka panjang akan menurun. Tahun 2045, TFR Kabupaten Tana Toraja diharapkan berada pada replacement rate yaitu 2,15 dan dapat dipertahankan diangka 2,15.

**Grafik 2.75**

Proyeksi TFR Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045



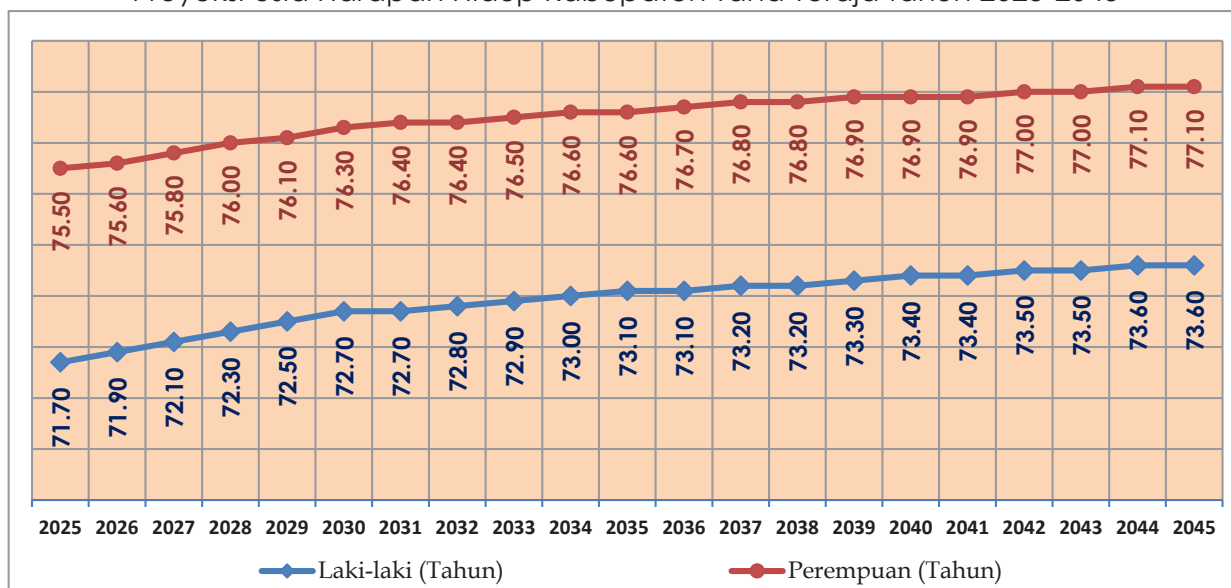
Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Variabel yang lainnya misalnya adalah angka mortalitas yang diukur menggunakan indikator usia harapan hidup laki-laki dan Perempuan. Untuk memproyeksi jumlah penduduk dimasa depan, variabel usia harapan penting menjadi krusial karena menentukan seberapa lama rerata penduduk di Kabupaten Tana Toraja hidup. Hasil proyeksi menunjukkan usia harapan hidup laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Tana Toraja mengalami kenaikan. Hasil proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa dimasa depan kualitas Kesehatan masyarakat jauh lebih baik dan perkembangan pengetahuan dan teknologi kedokteran semakin canggih. Tahun 2045, diperkirakan usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Tana Toraja bisa mencapai 77,10 tahun untuk Perempuan dan 73,60 tahun untuk laki-laki.



**Grafik 2.76**

Proyeksi Usia Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2045

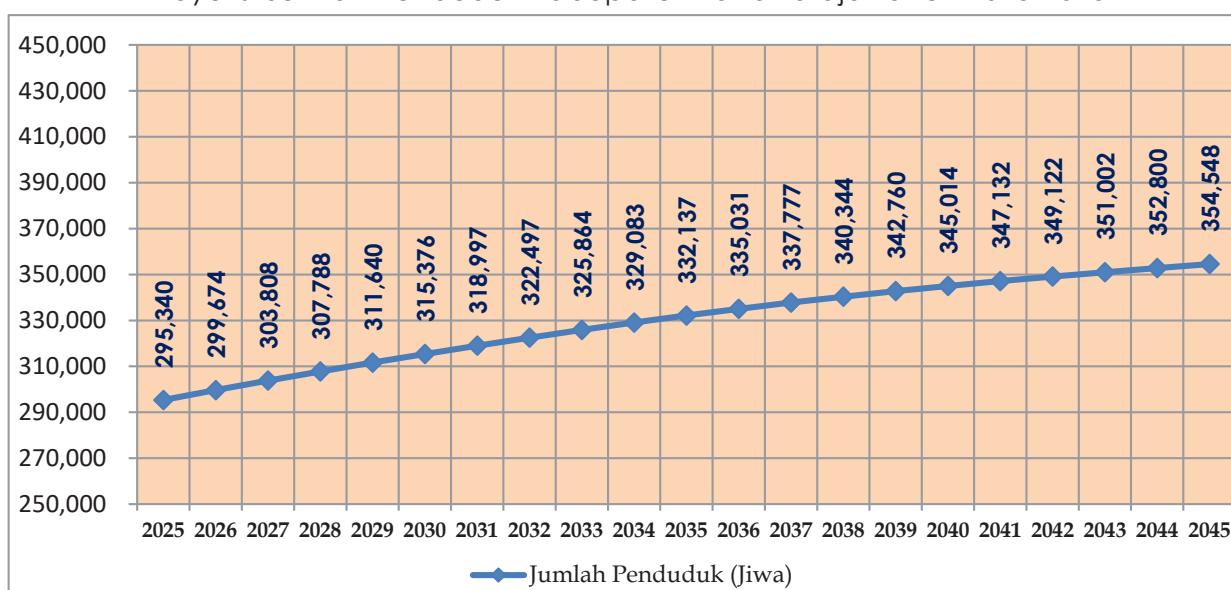


Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Selain indikator TFR dan UHH, ada banyak indikator lain yang digunakan sebagai asumsi dalam memproyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan tabel asumsi proyeksi demografi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka diperoleh hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 hingga 2045 sebagai berikut.

**Grafik 2.77**

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

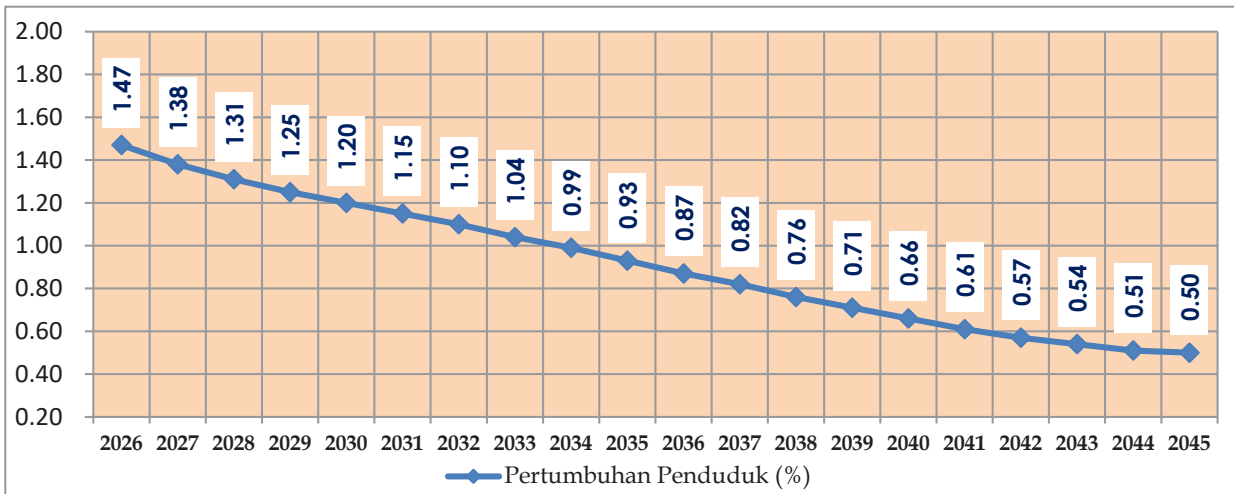


Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024



**Grafik 2.78**

Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045



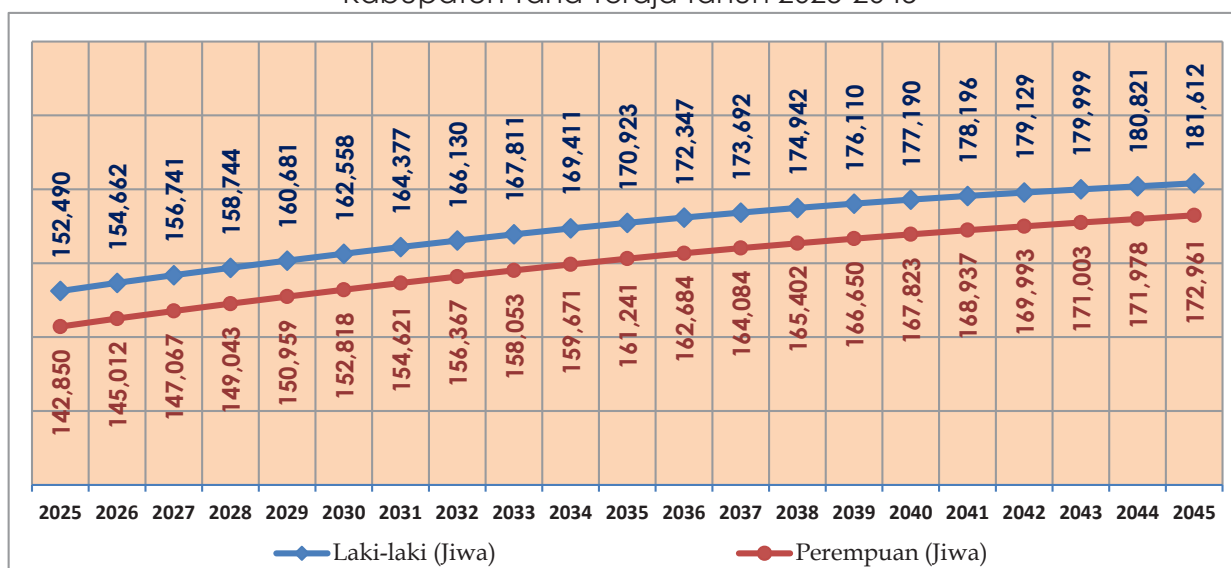
Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja secara absolut akan meningkat setiap tahunnya. Proyeksi kenaikan jumlah penduduk disebabkan asumsi bahwa usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Tana Toraja diperkirakan akan terus meningkat, baik laki-laki maupun Perempuan. Tahun 2025, diproyeksikan jumlah penduduk Tana Toraja mencapai 295.340 jiwa dan di tahun 2045 bertambah menjadi 354.548 jiwa. Namun penting diperhatikan, meski jumlah penduduk secara absolut bertambah, tapi pertumbuhannya diproyeksikan melambat. Tahun 2026 hingga 2033, pertumbuhan penduduk Tana Toraja diperkirakan masih di kisaran di atas 1 persen, tapi di tahun 2034 hingga 2045, angkanya melambat di bawah 1 persen. Proyeksi pelambatan pertumbuhan penduduk disebabkan karena asumsi bahwa TFR Tana Toraja perlahan menurun. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proyeksi penduduk laki-laki dan perempuan terus bertambah setiap tahunnya, dengan komposisi penduduk laki-laki tetap lebih banyak dibandingkan perempuan. Proporsi penduduk laki-laki masih berada di angka 51 persen, dan 49 persen merupakan penduduk Perempuan. Tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Tana Toraja diperkirakan mencapai 152.490 jiwa dan Perempuan mencapai 142.850 jiwa. Populasi diperkirakan akan terus bertambah hingga 2 tahun kemudian penduduk laki-laki mencapai 181.612 jiwa dan Perempuan sebanyak 172.936 jiwa.



**Grafik 2.79**

Proyeksi Penduduk Laki-laki dan Perempuan  
Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2045

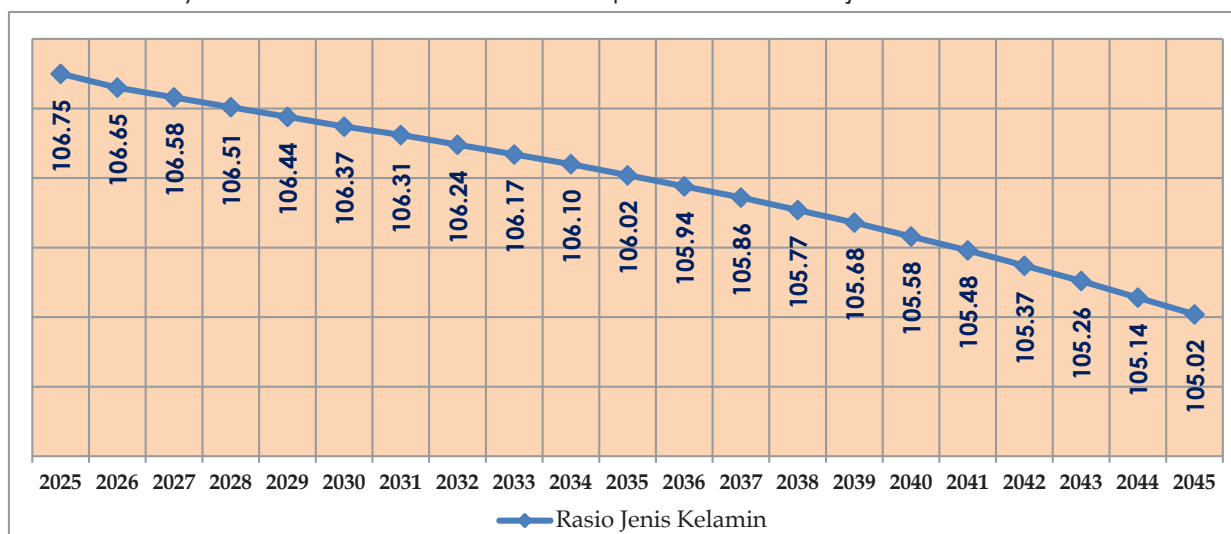


Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Karena jumlah laki-laki diperkirakan lebih banyak dari Perempuan, maka rasio jenis kelamin Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 hingga 2045 diproyeksikan masih di atas 100 persen. Meski begitu, tren rasio jenis kelamin diperkirakan akan terus menurun karena pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki lebih lambat dari Perempuan. Hal itu berkaitan dengan asumsi indikator usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki dan TFR yang cenderung melambat.

**Grafik 2.80**

Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045



Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024



Berdasarkan kategori kelompok umur, proyeksi penduduk Kabupaten Tana Toraja menunjukkan komposisi penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) bertambah tapi pertambahannya berkurang, sementara penduduk usia tidak produktif (65+) bertambah cukup tinggi. Penduduk usia produktif perlahan akan berkurang karena terjadi mereka yang sebelumnya produktif akan masuk pada usia tidak produktif. Tahun 2025, diperkirakan jumlah penduduk usia belum produktif Tana Toraja mencapai 66.460 jiwa atau setara dengan 22,50 persen dari total populasi, sementara penduduk tidak produktif sebanyak 24.410 jiwa atau setara 8,27 persen dari total populasi. Diperkirakan 20 tahun kemudian jumlah penduduk usia belum produktif mencapai 76.789 jiwa atau mencakup 21,66 persen dari total penduduk 2045, sedangkan penduduk usia tidak produktif sebanyak 41.519 jiwa atau setara 11,71 persen total populasi.

**Tabel 2.28**

Proyeksi Penduduk Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2025 dan 2045 (Jiwa)

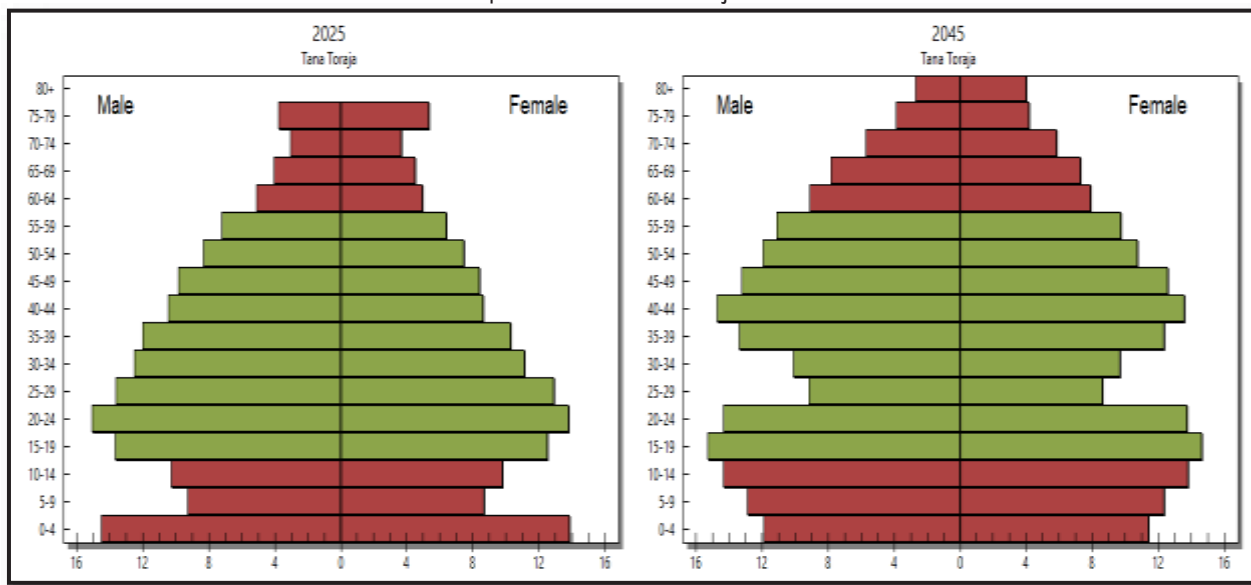
Kelompok Umur	Tahun 2025			Tahun 2045		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
0-4	14.500	13.910	28.410	11.888	11.437	23.325
5-9	9.260	8.730	17.990	12.884	12.403	25.287
10-14	10.260	9.800	20.060	14.353	13.824	28.177
15-19	13.640	12.560	26.200	15.300	14.638	29.938
20-24	15.030	13.830	28.860	14.346	13.803	28.149
25-29	13.630	12.920	26.550	9.154	8.662	17.817
30-34	12.520	11.170	23.690	10.114	9.699	19.814
35-39	12.000	10.340	22.340	13.404	12.390	25.794
40-44	10.410	8.650	19.060	14.715	13.585	28.300
45-49	9.830	8.450	18.280	13.235	12.602	25.837
50-54	8.320	7.470	15.790	11.948	10.766	22.713
55-59	7.200	6.420	13.620	11.087	9.774	20.861
60-64	5.080	5.000	10.080	9.095	7.923	17.018
65-69	4.020	4.530	8.550	7.835	7.326	15.162
70-74	3.060	3.690	6.750	5.703	5.869	11.572
75+	3.730	5.380	9.110	6.551	8.234	14.785
<b>Total</b>	<b>152.490</b>	<b>142.850</b>	<b>295.340</b>	<b>181.612</b>	<b>172.936</b>	<b>354.548</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024



**Grafik 2.81**

Piramida Penduduk Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dan Tahun 2045



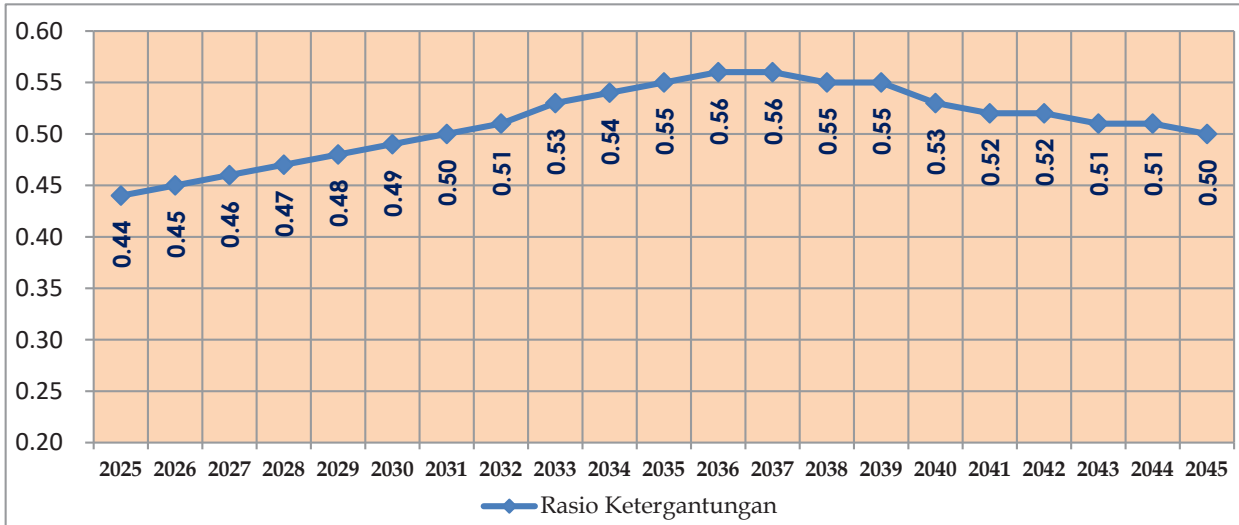
Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Karena diperkirakan jumlah penduduk usia produktif masih akan bertambah dalam beberapa tahun ke depan dan penduduk usia belum dan tidak produktif juga meningkat, membuat angka ketergantungan (dependency ratio) diproyeksikan naik. Tahun 2025 hingga 2037 diperkirakan tren angka ketergantungan mengalami kenaikan dari 0,44 atau 44 persen hingga menjadi 0,56 atau 56 persen. Kenaikan itu disebabkan karena jumlah penduduk usia belum dan tidak produktif mengalami kenaikan lebih cepat dibandingkan penduduk usia produktif. Penyebabnya karena diasumsikan harapan hidup terus meningkat dan TFR menurun. Penurunan mulai terjadi di tahun 2038 hingga 2045, tapi tidak signifikan dan cenderung stagnan pada lima tahun terakhir. Jika pemerintah daerah berhasil menaikkan angka harapan hidup dan mempertahankan TFR pada tingkat replacement, maka gambaran angka ketergantungan hingga tahun 2045 berada pada level 0,50 atau 50 persen. Tapi hasilnya akan berbeda jika salah satu dari asumsi tersebut terpenuhi, misalnya TFR ternyata tak bisa dipertahankan di level replacement rate dan akhir berada di bawah 2,10, maka rasio ketergantungan akan mengecil di awal tahun, tapi akan naik signifikan di tahun-tahun terakhir.



**Grafik 2.82**

Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045



Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

### 2.6.2 PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK

Pemerintah menaruh perhatian besar pada pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik utamanya yang terkait dengan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Sarana dan prasarana pelayanan publik berperan besar dalam pembangunan wilayah, dimana keberadaannya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya berpengaruh terhadap dimensi pembangunan lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), aksesibilitas daerah, prevalensi stunting hingga pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, khususnya yang terkait layanan dasar masyarakat di Kabupaten Tana Toraja didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Toraja yang mengatur perencanaan struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik sampai dengan Tahun 2045 dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayani.



### 2.6.2.1 Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal dan Permukiman

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang selain berfungsi sebagai tempat berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga, juga berperan besar dalam pembentukan karakter keluarga. Sehingga selain harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan dan keamanan, rumah juga harus memberikan kenyamanan bagi penghuninya, baik kenyamanan termal maupun psikis sesuai kebutuhan penghuninya. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga mesti memikirkan ketersediaan rumah seiring dengan perkembangan populasi untuk memastikan semua individu atau rumah tangga bisa memiliki rumah.

Untuk menghitung kebutuhan rumah, metode yang digunakan sederhana yaitu mengacu pada jumlah proyeksi penduduk dan mengasumsikan bahwa 1 keluarga terdiri dari 4 anggota keluarga, dimana asumsinya satu keluarga memiliki satu rumah. Berdasarkan asumsi tersebut, maka diperoleh estimasi kebutuhan rumah di Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2045 seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2.29**

Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Keluarga (Asumsi 1 Keluarga 4 Anggota Keluarga)	Kebutuhan Rumah (Asumsi 1 Keluarga/1 Rumah)
Tahun 2025	295.340	73.835	73.835
Tahun 2026	299.674	74.919	74.919
Tahun 2027	303.808	75.952	75.952
Tahun 2028	307.788	76.947	76.947
Tahun 2029	311.640	77.910	77.910
Tahun 2030	315.376	78.844	78.844
Tahun 2031	318.997	79.749	79.749
Tahun 2032	322.497	80.624	80.624
Tahun 2033	325.864	81.466	81.466
Tahun 2034	329.083	82.271	82.271
Tahun 2035	332.137	83.034	83.034
Tahun 2036	335.031	83.758	83.758
Tahun 2037	337.777	84.444	84.444
Tahun 2038	340.344	85.086	85.086
Tahun 2039	342.760	85.690	85.690
Tahun 2040	345.014	86.254	86.254
Tahun 2041	347.132	86.783	86.783



Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Keluarga (Asumsi 1 Keluarga 4 Anggota Keluarga)	Kebutuhan Rumah (Asumsi 1 Keluarga/1 Rumah)
Tahun 2042	349.122	87.281	87.281
Tahun 2043	351.002	87.751	87.751
Tahun 2044	352.800	88.200	88.200
Tahun 2045	354.548	88.637	88.637

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Tak cukup hanya mengestimasi kebutuhan rumah, pemerintah daerah juga mesti memastikan bahwa rumah tersebut adalah rumah layak huni atau sesuai dengan SNI 03-1733-2004. Dalam SNI, rumah dibagi dalam beberapa kategori, yaitu hunian bertingkat dan tidak bertingkat. Selain itu, penting untuk diperhatikan apakah hunian tersebut menjadi rumah pribadi atau sewa, misalnya seperti Rumah Susun (Rusun).

### 2.6.2.2 Kebutuhan Air Bersih

Bagian penting dalam sebuah tempat tinggal adalah ketersediaan air bersih. Menurut UNESCO, setiap individu berhak atas air bersih setidaknya 60 liter per hari. Olehnya itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan estimasi kebutuhan air bersih khusus untuk rumah tangga. Dengan menggunakan standar UNESCO, maka diperoleh kebutuhan air bersih per keluarga per liter per hari yang disajikan dalam tabel proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045.

**Tabel 2.30**

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Keluarga (Asumsi 1 Keluarga 4 Anggota Keluarga)	Kebutuhan Air Per Orang Per Liter Per Hari (Standar UNESCO)	Kebutuhan Air Bersih Per Keluarga (Liter/Hari)
Tahun 2025	295.340	73.835	60	4.430.100
Tahun 2026	299.674	74.919	60	4.495.110
Tahun 2027	303.808	75.952	60	4.557.120
Tahun 2028	307.788	76.947	60	4.616.820
Tahun 2029	311.640	77.910	60	4.674.600
Tahun 2030	315.376	78.844	60	4.730.640
Tahun 2031	318.997	79.749	60	4.784.955
Tahun 2032	322.497	80.624	60	4.837.455
Tahun 2033	325.864	81.466	60	4.887.960



Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Keluarga (Asumsi 1 Keluarga 4 Anggota Keluarga)	Kebutuhan Air Per Orang Per Liter Per Hari (Standar UNESCO)	Kebutuhan Air Bersih Per Keluarga (Liter/Hari)
Tahun 2034	329.083	82.271	60	4.936.245
Tahun 2035	332.137	83.034	60	4.982.055
Tahun 2036	335.031	83.758	60	5.025.465
Tahun 2037	337.777	84.444	60	5.066.655
Tahun 2038	340.344	85.086	60	5.105.160
Tahun 2039	342.760	85.690	60	5.141.400
Tahun 2040	345.014	86.254	60	5.175.210
Tahun 2041	347.132	86.783	60	5.206.980
Tahun 2042	349.122	87.281	60	5.236.830
Tahun 2043	351.002	87.751	60	5.265.030
Tahun 2044	352.800	88.200	60	5.292.000
Tahun 2045	354.548	88.637	60	5.318.220

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Angka estimasi tersebut tentu berpotensi mengalami perbedaan signifikan dengan kebutuhan yang seharusnya karena metode perhitungan tidak membedakan antara rumah yang ada di desa dan di kota, rumah mewah dan rumah sederhana. Rumah yang berada di desa dan di kota tentu memiliki kebutuhan air yang berbeda, ditambah dengan rumah mewah atau rumah sederhana. Oleh karena itu, dalam proses penyediaan kebutuhan air bersih kedepannya, penting bagi pemerintah daerah memperhatikan standar yang adalah dalam dokumen SNI 03-1733-2004.

### 2.6.2.3 Kebutuhan Energi Listrik

Lingkungan perumahan harus dilengkapi perencanaan penyediaan jaringan listrik sesuai ketentuan dan persyaratan teknis. Untuk menghitung estimasi kebutuhan Listrik rumah tangga, digunakan metode sederhana yaitu dengan mengalikan proyeksi jumlah rumah tangga dengan kebutuhan listrik per rumah tangga. Kebutuhan Listrik per rumah tangga diperoleh dari rerata konsumsi Listrik pelanggan di Indonesia yaitu 1.012 kilowatt jam (kWh) per tahun mengacu pada data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Hal itu disebabkan karena sebagian besar pelanggan listrik di Indonesia termasuk golongan R1-900 VA. Berdasarkan



data tersebut, maka diperoleh estimasi kebutuhan listrik per rumah tangga di Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2045 sebagai berikut.

**Tabel 2.31**

Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Keluarga (Asumsi 1 Keluarga 4 Anggota Keluarga)	Rerata Konsumsi Listrik Per Rumah Tangga (Kwh/Tahun)	Kebutuhan Listrik (Kwh/Tahun)
Tahun 2025	295.340	73.835	1012	74.721.020
Tahun 2026	299.674	74.919	1012	75.817.522
Tahun 2027	303.808	75.952	1012	76.863.424
Tahun 2028	307.788	76.947	1012	77.870.364
Tahun 2029	311.640	77.910	1012	78.844.920
Tahun 2030	315.376	78.844	1012	79.790.128
Tahun 2031	318.997	79.749	1012	80.706.241
Tahun 2032	322.497	80.624	1012	81.591.741
Tahun 2033	325.864	81.466	1012	82.443.592
Tahun 2034	329.083	82.271	1012	83.257.999
Tahun 2035	332.137	83.034	1012	84.030.661
Tahun 2036	335.031	83.758	1012	84.762.843
Tahun 2037	337.777	84.444	1012	85.457.581
Tahun 2038	340.344	85.086	1012	86.107.032
Tahun 2039	342.760	85.690	1012	86.718.280
Tahun 2040	345.014	86.254	1012	87.288.542
Tahun 2041	347.132	86.783	1012	87.824.396
Tahun 2042	349.122	87.281	1012	88.327.866
Tahun 2043	351.002	87.751	1012	88.803.506
Tahun 2044	352.800	88.200	1012	89.258.400
Tahun 2045	354.548	88.637	1012	89.700.644

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Angka estimasi tersebut tidak menggambarkan secara komprehensif kebutuhan Listrik rumah tangga di Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2045 karena ada banyak aspek yang tidak dimasukkan dalam perhitungan. Misalnya adalah golongan pelanggan, yang sangat mungkin beragam di Kabupaten Tana Toraja. Meski begitu, angka estimasi tersebut setidaknya memberikan gambaran umum tentang besaran kebutuhan listrik seiring dengan perubahan demografi Kabupaten Tana Toraja 20 tahun ke depan.



#### 2.6.2.4 Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan

Lingkungan perumahan harus dilayani sistem persampahan yang mengacu pada standar kelayakan. Jenis-jenis elemen perencanaan yang harus disediakan adalah gerobak sampah; bak sampah; tempat pembuangan sementara (TPS); dan tempat pembuangan akhir (TPA). Berikut standar penyediaan sarana persampahan dalam SNI 03-1733-2004.

**Tabel 2.32**  
Standar Nasional Penyediaan Prasarana Persampahan

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan	
	Sarana pelengkap	Status	Dimensi		
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi	-	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	2 m3		
	Bak sampah kecil		6 m3		
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	2 m3		Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m3		
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/TPA lokal	-		Mobil mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		25 m3		
Kota (> 480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA	-		
	Tempat daur ulang sampah		-		

Sumber: SNI 03-1733-2004

Berdasarkan standar nasional penyediaan sarana dan prasarana persampahan, dihitung estimasi kebutuhan sarana dan prasarana persampahan Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2045 yang disajikan dalam tabel proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 sebagai berikut.



**Tabel 2.33**

Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Keluarga (Asumsi 1 Keluarga 4 Anggota Keluarga)	Kebutuhan Tong Sampah	Kebutuhan Gerobak Sampah dan Bak Sampah Kecil Untuk RW	Kebutuhan Gerobak Sampah dan Bak Sampah Besar Untuk Kelurahan	Kebutuhan Mobil Sampah dan Bak Sampah Besar Untuk Kecamatan
Tahun 2025	295.340	73.835	73.835	118	10	2
Tahun 2026	299.674	74.919	74.919	120	10	2
Tahun 2027	303.808	75.952	75.952	122	10	3
Tahun 2028	307.788	76.947	76.947	123	10	3
Tahun 2029	311.640	77.910	77.910	125	10	3
Tahun 2030	315.376	78.844	78.844	126	11	3
Tahun 2031	318.997	79.749	79.749	128	11	3
Tahun 2032	322.497	80.624	80.624	129	11	3
Tahun 2033	325.864	81.466	81.466	130	11	3
Tahun 2034	329.083	82.271	82.271	132	11	3
Tahun 2035	332.137	83.034	83.034	133	11	3
Tahun 2036	335.031	83.758	83.758	134	11	3
Tahun 2037	337.777	84.444	84.444	135	11	3
Tahun 2038	340.344	85.086	85.086	136	11	3
Tahun 2039	342.760	85.690	85.690	137	11	3
Tahun 2040	345.014	86.254	86.254	138	12	3
Tahun 2041	347.132	86.783	86.783	139	12	3
Tahun 2042	349.122	87.281	87.281	140	12	3
Tahun 2043	351.002	87.751	87.751	140	12	3
Tahun 2044	352.800	88.200	88.200	141	12	3
Tahun 2045	354.548	88.637	88.637	142	12	3

Sumber: SNI 03-1733-2004

#### 2.6.2.5 Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Dalam pada SNI 03-1733-2004 telah ditetapkan standar sarana dan prasarana Kesehatan yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk. Tabel berikut menunjukkan rincian kebutuhan sarana dan prasarana Kesehatan berdasarkan SNI 03-1733-2004.



**Tabel 2.34**  
Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan

Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m <sup>2</sup> /jiwa)	Kriteria		Keterangan
		Luas Lantai Min. (m <sup>2</sup> )	Luas Lahan Min. (m <sup>2</sup> )		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
Posyandu	1.250	36	60	0,048	500 meter	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1000 meter	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4000 meter	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1500 meter	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3000 meter	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1500 meter	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotek
Apotek/ Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1500 meter	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotek

Sumber: SNI 03-1733-2004

Berdasarkan tabel Standar kebutuhan sarana kesehatan diperoleh gambaran bahwa untuk membangun satu Posyandu dimana ada 1.250 orang penduduk, dibutuhkan luas lantai minimum dan luas lahan minimum masing-masing 36 m<sup>2</sup> dan 60 m<sup>2</sup>. Standar itu juga dapat dibaca misalnya, untuk setiap penduduk sebanyak 1.250 orang, maka dibutuhkan 1 Posyandu, begitu pun dengan sarana kesehatan lainnya. Berdasarkan standar tersebut, maka dibuatkan proyeksi kebutuhan sarana kesehatan sebagai berikut.



**Tabel 2.35**

Proyeksi Kebutuhan Posyandu di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Posyandu
Tahun 2025	295.340	1.250	236
Tahun 2026	299.674	1.250	240
Tahun 2027	303.808	1.250	243
Tahun 2028	307.788	1.250	246
Tahun 2029	311.640	1.250	249
Tahun 2030	315.376	1.250	252
Tahun 2031	318.997	1.250	255
Tahun 2032	322.497	1.250	258
Tahun 2033	325.864	1.250	261
Tahun 2034	329.083	1.250	263
Tahun 2035	332.137	1.250	266
Tahun 2036	335.031	1.250	268
Tahun 2037	337.777	1.250	270
Tahun 2038	340.344	1.250	272
Tahun 2039	342.760	1.250	274
Tahun 2040	345.014	1.250	276
Tahun 2041	347.132	1.250	278
Tahun 2042	349.122	1.250	279
Tahun 2043	351.002	1.250	281
Tahun 2044	352.800	1.250	282
Tahun 2045	354.548	1.250	284

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Kebutuhan Posyandu Kabupaten Tana Toraja dihitung berdasarkan SNI 03-1733-2004. Dalam standar tersebut dijelaskan bahwa Posyandu dengan standarisasi yang dijelaskan pada tabel standar kebutuhan sarana kesehatan bahwa satu Posyandu sesuai standar dibangun dengan jumlah penduduk 1.250 jiwa. Karena Posyandu pada prinsipnya dibutuhkan oleh semua penduduk, maka jumlah penduduk yang dimasukkan dalam estimasi kebutuhan Posyandu adalah proyeksi total penduduk. Dengan menggunakan dua asumsi tersebut maka diperoleh kebutuhan Posyandu tahun 2025 sebanyak 236 unit. Angkanya terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, hingga tahun 2045 dibutuhkan 284 unit Posyandu di Kabupaten Tana Toraja.

Sarana dan prasarana kedua adalah balai pengobatan warga. Balai pengobatan merupakan salah satu jenis layanan di Puskesmas yang merupakan



tempat untuk melayani pemeriksaan umum oleh dokter yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, dan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang inap pada sarana kesehatan Puskesmas. Dalam SNI 03-1733-2004 ditentukan untuk satu Balai Pengobatan Warga sesuai standar, jumlah penduduknya setidaknya 2.500 orang. Dengan menggunakan proyeksi penduduk Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2025-2045, maka diperoleh kebutuhan balai pengobatan warga yang disajikan pada tabel proyeksi kebutuhan balai pengobatan warga di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045.

**Tabel 2.36**

Proyeksi Kebutuhan Balai Pengobatan Warga  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Balai Pengobatan Warga
Tahun 2025	295.340	2.500	118
Tahun 2026	299.674	2.500	120
Tahun 2027	303.808	2.500	122
Tahun 2028	307.788	2.500	123
Tahun 2029	311.640	2.500	125
Tahun 2030	315.376	2.500	126
Tahun 2031	318.997	2.500	128
Tahun 2032	322.497	2.500	129
Tahun 2033	325.864	2.500	130
Tahun 2034	329.083	2.500	132
Tahun 2035	332.137	2.500	133
Tahun 2036	335.031	2.500	134
Tahun 2037	337.777	2.500	135
Tahun 2038	340.344	2.500	136
Tahun 2039	342.760	2.500	137
Tahun 2040	345.014	2.500	138
Tahun 2041	347.132	2.500	139
Tahun 2042	349.122	2.500	140
Tahun 2043	351.002	2.500	140
Tahun 2044	352.800	2.500	141
Tahun 2045	354.548	2.500	142

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Hasil proyeksi kebutuhan Balai Pengobatan Warga di Kabupaten Tana Toraja bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Tahun 2025, diperkirakan Kabupaten Tana Toraja membutuhkan 118 unit balai pengobatan dan



di tahun 2045 mencapai 142 unit. Semakin menua populasi, maka semakin urgen balai pengobatan untuk disediakan, baik itu oleh pemerintah daerah maupun swasta.

Sarana dan prasarana ketiga adalah klinik bersalin. Klinik Bersalin merupakan pelayanan kesehatan khusus untuk ibu hamil. Klinik ini adalah tempat untuk prosedur persalinan berisiko rendah, terutama secara alami. Perawatan di rumah bersalin dilakukan oleh bidan. Berbeda dengan asumsi jumlah penduduk pada perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana sebelumnya, untuk menghitung kebutuhan klinik bersalin yang digunakan adalah proyeksi penduduk Perempuan berdasarkan usia subur (15-49 tahun). Standar nasional untuk klinik bersalin adalah 30.000 penduduk dan mengacu pada standar yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasilnya menunjukkan kebutuhan klinik bersalin di Kabupaten Tana Toraja sepanjang tahun 2025 hingga 2045 adalah tiga klinik, tentu dengan memperhatikan sebaran agar dapat dijangkau oleh masyarakat.

**Tabel 2.37**

Proyeksi Kebutuhan BKIA / Klinik Bersalin  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Penduduk Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan BKIA / Klinik Bersalin
Tahun 2025	77.921	30.000	3
Tahun 2026	78.381	30.000	3
Tahun 2027	78.685	30.000	3
Tahun 2028	78.855	30.000	3
Tahun 2029	78.920	30.000	3
Tahun 2030	78.907	30.000	3
Tahun 2031	78.855	30.000	3
Tahun 2032	78.791	30.000	3
Tahun 2033	78.730	30.000	3
Tahun 2034	78.694	30.000	3
Tahun 2035	78.705	30.000	3
Tahun 2036	78.824	30.000	3
Tahun 2037	79.117	30.000	3
Tahun 2038	79.680	30.000	3
Tahun 2039	80.622	30.000	3
Tahun 2040	82.026	30.000	3
Tahun 2041	82.786	30.000	3
Tahun 2042	83.532	30.000	3



Tahun	Penduduk Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan BKIA / Klinik Bersalin
Tahun 2043	84.236	30.000	3
Tahun 2044	84.866	30.000	3
Tahun 2045	85.378	30.000	3

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Sarana dan prasarana selanjutnya adalah Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan. Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

Untuk satu unit Puskesmas Pembantu, setidaknya bisa mencakup 30.000 penduduk dengan standarisasi luas bangunan sesuai dengan SNI. Berdasarkan cakupan jumlah penduduk tersebut, maka diperoleh estimasi kebutuhan Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan sebanyak tiga unit sepanjang tahun 2025 hingga 2045.

**Tabel 2.38**

Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan
Tahun 2025	295.340	30.000	10
Tahun 2026	299.674	30.000	10
Tahun 2027	303.808	30.000	10
Tahun 2028	307.788	30.000	10
Tahun 2029	311.640	30.000	10
Tahun 2030	315.376	30.000	11
Tahun 2031	318.997	30.000	11
Tahun 2032	322.497	30.000	11
Tahun 2033	325.864	30.000	11
Tahun 2034	329.083	30.000	11
Tahun 2035	332.137	30.000	11
Tahun 2036	335.031	30.000	11
Tahun 2037	337.777	30.000	11
Tahun 2038	340.344	30.000	11



Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan
Tahun 2039	342.760	30.000	11
Tahun 2040	345.014	30.000	12
Tahun 2041	347.132	30.000	12
Tahun 2042	349.122	30.000	12
Tahun 2043	351.002	30.000	12
Tahun 2044	352.800	30.000	12
Tahun 2045	354.548	30.000	12

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Sarana dan prasarana yang termasuk penting adalah Puskesmas. Puskesmas didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, paripurna, dan terpadu bagi seluruh penduduk yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas. Ada 3 fungsi pokok puskesmas, yaitu:

1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya
2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat
3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Umumnya di banyak daerah, Puskesmas tersedia minimal satu untuk setiap kecamatan dan bisa lebih dari satu jika wilayahnya relatif luas. Kabupaten Tana Toraja nampaknya juga termasuk daerah yang memiliki Puskesmas di setiap kecamatan, sehingga tak menjadi persoalan dalam jangka panjang. Yang penting diperhatikan adalah ketersediaan balai pengobatan karena peranannya memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya.

**Tabel 2.39**

Proyeksi Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Puskesmas dan Balai Pengobatan
Tahun 2025	295.340	120.000	2
Tahun 2026	299.674	120.000	2



Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Puskesmas dan Balai Pengobatan
Tahun 2027	303.808	120.000	3
Tahun 2028	307.788	120.000	3
Tahun 2029	311.640	120.000	3
Tahun 2030	315.376	120.000	3
Tahun 2031	318.997	120.000	3
Tahun 2032	322.497	120.000	3
Tahun 2033	325.864	120.000	3
Tahun 2034	329.083	120.000	3
Tahun 2035	332.137	120.000	3
Tahun 2036	335.031	120.000	3
Tahun 2037	337.777	120.000	3
Tahun 2038	340.344	120.000	3
Tahun 2039	342.760	120.000	3
Tahun 2040	345.014	120.000	3
Tahun 2041	347.132	120.000	3
Tahun 2042	349.122	120.000	3
Tahun 2043	351.002	120.000	3
Tahun 2044	352.800	120.000	3
Tahun 2045	354.548	120.000	3

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan. Dalam SNI, jumlah penduduk pendukung untuk satu tempat praktek dokter adalah 5.000 jiwa. Dengan membagi angka tersebut dan jumlah penduduk, maka diperoleh kebutuhan tempat praktek dokter di Kabupaten Tana Toraja yang disajikan pada tabel proyeksi kebutuhan tempat praktek dokter di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045.

**Tabel 2.40**

Proyeksi Kebutuhan Tempat Praktek Dokter  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Tempat Praktek Dokter
Tahun 2025	295.340	5.000	59
Tahun 2026	299.674	5.000	60
Tahun 2027	303.808	5.000	61
Tahun 2028	307.788	5.000	62
Tahun 2029	311.640	5.000	62



Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Tempat Praktek Dokter
Tahun 2030	315.376	5.000	63
Tahun 2031	318.997	5.000	64
Tahun 2032	322.497	5.000	64
Tahun 2033	325.864	5.000	65
Tahun 2034	329.083	5.000	66
Tahun 2035	332.137	5.000	66
Tahun 2036	335.031	5.000	67
Tahun 2037	337.777	5.000	68
Tahun 2038	340.344	5.000	68
Tahun 2039	342.760	5.000	69
Tahun 2040	345.014	5.000	69
Tahun 2041	347.132	5.000	69
Tahun 2042	349.122	5.000	70
Tahun 2043	351.002	5.000	70
Tahun 2044	352.800	5.000	71
Tahun 2045	354.548	5.000	71

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Fasilitas Kesehatan terakhir adalah apotek atau rumah obat. Apotek berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan. Standar nasional ketersediaan satu apotek bisa mencakup 30.000 penduduk. Berdasarkan standar tersebut, maka dikalkulasi kebutuhan apotek di Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 hingga 2045 seperti dalam tabel proyeksi kebutuhan apotek/rumah obat di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045.

**Tabel 2.41**

Proyeksi Kebutuhan Apotek /Rumah Obat  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Apotek /Rumah Obat
Tahun 2025	295.340	30.000	10
Tahun 2026	299.674	30.000	10
Tahun 2027	303.808	30.000	10
Tahun 2028	307.788	30.000	10
Tahun 2029	311.640	30.000	10
Tahun 2030	315.376	30.000	11
Tahun 2031	318.997	30.000	11
Tahun 2032	322.497	30.000	11



Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Apotek /Rumah Obat
Tahun 2033	325.864	30.000	11
Tahun 2034	329.083	30.000	11
Tahun 2035	332.137	30.000	11
Tahun 2036	335.031	30.000	11
Tahun 2037	337.777	30.000	11
Tahun 2038	340.344	30.000	11
Tahun 2039	342.760	30.000	11
Tahun 2040	345.014	30.000	12
Tahun 2041	347.132	30.000	12
Tahun 2042	349.122	30.000	12
Tahun 2043	351.002	30.000	12
Tahun 2044	352.800	30.000	12
Tahun 2045	354.548	30.000	12

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

### 2.6.2.6 Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan adalah proyeksi kebutuhan rombongan kelas (rombel), jumlah kelas, dan satuan pendidikan (jumlah sekolah). Jenjang pendidikan pertama yang diproyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikannya adalah pendidikan anak usia dini yang dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan Rombel, kelas, dan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan PAUD usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun diperoleh hasil berikut.

**Tabel 2.42**

Proyeksi Jumlah Rombongan Belajar, Jumlah Kelas, dan Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan PAUD Usia Di Atas 4 Tahun Sampai 6 Tahun di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Total Penduduk Usia di atas 4-6 Tahun	Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar PAUD Usia di atas 4-6 tahun	Jumlah Rombongan Belajar Setiap Satuan Pendidikan	Jumlah Kebutuhan Rombel	Jumlah Rombel Per Kelas (Asumsi 1 Kelas 6 Rombel)	Jumlah Kebutuhan Satuan Pendidikan
2025	7.566	15	16	504	84	32
2026	8.223	15	16	548	91	34
2027	9.144	15	16	610	102	38
2028	10.347	15	16	690	115	43
2029	11.855	15	16	790	132	49



Tahun	Proyeksi Total Penduduk Usia di atas 4-6 Tahun	Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar PAUD Usia di atas 4-6 tahun	Jumlah Rombongan Belajar Setiap Satuan Pendidikan	Jumlah Kebutuhan Rombel	Jumlah Rombel Per Kelas (Asumsi 1 Kelas 6 Rombel)	Jumlah Kebutuhan Satuan Pendidikan
2030	13.677	15	16	912	152	57
2031	13.397	15	16	893	149	56
2032	12.117	15	16	808	135	50
2033	12.080	15	16	805	134	50
2034	12.010	15	16	801	133	50
2035	11.901	15	16	793	132	50
2036	11.769	15	16	785	131	49
2037	11.616	15	16	774	129	48
2038	11.426	15	16	762	127	48
2039	11.204	15	16	747	124	47
2040	10.950	15	16	730	122	46
2041	10.694	15	16	713	119	45
2042	10.466	15	16	698	116	44
2043	10.229	15	16	682	114	43
2044	9.997	15	16	666	111	42
2045	9.783	15	16	652	109	41

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah dijelaskan bahwa Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar PAUD Usia di atas 4-6 tahun maksimum 15 siswa, sementara jumlah Rombel per satuan pendidikan maksimal 16 Rombel. Untuk mengetahui jumlah kebutuhan Rombel, maka jumlah proyeksi penduduk Usia di atas 4-6 Tahun dikalikan dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar PAUD usia di atas 4-6 tahun sehingga diperoleh angka jumlah kebutuhan Rombel per tahun. Tahun 2025, diperkirakan kebutuhan Rombel jenjang pendidikan PAUD usia di atas 4-6 tahun di Kabupaten Tana Toraja mencapai 504 Rombel. Angka tersebut berubah-ubah seiring dengan perubahan jumlah penduduk usia di atas 4 tahun hingga 6 tahun. Kebutuhan Rombel tertinggi diperkirakan terjadi di tahun 2030, saat itu diproyeksi populasi penduduk usia di atas 4 hingga 6 tahun mencapai 13.677 jiwa, sehingga kebutuhan Rombel tahun 2030 diperkirakan mencapai 912 Rombel. Setelah itu, jumlah kebutuhan Rombel



diperkirakan terus menurun sejalan dengan penurunan jumlah penduduk usia di atas 4-6 tahun. Tahun 2045 diperkirakan kebutuhan Rombel adalah 652 Rombel.

Jika diasumsikan satu kelas pada jenjang pendidikan PAUD usia di atas 4-6 tahun maksimal sebanyak enam Rombel, maka diperoleh kebutuhan jumlah kelas jenjang pendidikan PAUD usia di atas 4-6 tahun. Tahun 2025, diperkirakan kebutuhan kelas PAUD usia di atas 4-6 tahun mencapai 84 kelas. Angkanya terus bertambah hingga tahun 2030 sebanyak 152 kelas, setelah itu mengalami penurunan. Hingga tahun 2045, diperkirakan jumlah kebutuhan kelas jenjang pendidikan PAUD usia di atas 4-6 tahun tersisa 109 kelas. Penting untuk dicatat, bahwa proyeksi jumlah kelas tidak berarti bahwa setiap tahun pemerintah daerah perlu membangun sejumlah kelas berdasarkan angka-angka tersebut. Sebagai contoh misalnya, proyeksi kebutuhan kelas tahun 2025 sebanyak 84 kelas. Jika di Kabupaten Tana Toraja saat ini sudah memiliki 60 ruang kelas, berarti pemerintah daerah hanya perlu menyediakan 24 ruangan kelas, begitu seterusnya.

Setelah diperoleh proyeksi kebutuhan Rombel dan kelas, selanjutnya diproyeksi kebutuhan jumlah satuan pendidikan PAUD usia di atas 4-6 tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, diatur bahwa satu satuan pendidikan PAUD usia di atas 4-6 tahun maksimal hanya memiliki Rombel sebanyak 16 Rombel. Jika jumlah kebutuhan Rombel dibagi dengan jumlah maksimal Rombel per satuan pendidikan, maka didapatkan proyeksi kebutuhan jumlah satuan pendidikan. Tahun 2025, diperkirakan kebutuhan satuan pendidikan jenjang PAUD usia di atas 4-6 tahun sebanyak 32 satuan pendidikan. Jumlahnya bertambah hingga mencapai angka tertinggi tahun 2030 yaitu 57 satuan pendidikan dan kemudian menurun hingga tahun 2045 hanya dibutuhkan 41 satuan pendidikan.

Penduduk usia PAUD selanjutnya akan melanjutkan pendidikan pada jenjang SD Sederajat, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana kelas dan jumlah sekolah juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan jumlah rombongan belajar, jumlah kelas, dan



jumlah satuan pendidikan jenjang pendidikan SD Sederajat, maka diperoleh hasil yang disajikan pada tabel proyeksi jumlah rombongan belajar, jumlah kelas, dan jumlah satuan pendidikan jenjang pendidikan SD sederajat di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045.

**Tabel 2.43**

Proyeksi Jumlah Rombongan Belajar, Jumlah Kelas, dan Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan SD Sederajat di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Total Penduduk Usia 7-12 Tahun	Jumlah Peserta Didik Per Rombongan Belajar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Kebutuhan Rombel	Kebutuhan Kelas (Asumsi 1 Kelas Terdapat 3 Rombel)	Kebutuhan Jumlah Sekolah (Asumsi Satu Sekolah Memiliki 20 Kelas)
2025	21.775	28	778	259	13
2026	21.432	28	765	255	13
2027	21.573	28	770	257	13
2028	22.277	28	796	265	13
2029	23.624	28	844	281	14
2030	25.685	28	917	306	15
2031	28.530	28	1.019	340	17
2032	32.210	28	1.150	383	19
2033	34.356	28	1.227	409	20
2034	36.098	28	1.289	430	21
2035	37.287	28	1.332	444	22
2036	37.757	28	1.348	449	22
2037	37.331	28	1.333	444	22
2038	35.852	28	1.280	427	21
2039	35.554	28	1.270	423	21
2040	35.164	28	1.256	419	21
2041	34.680	28	1.239	413	21
2042	34.106	28	1.218	406	20
2043	33.474	28	1.196	399	20
2044	32.806	28	1.172	391	20
2045	32.091	28	1.146	382	19

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Hasil Proyeksi jumlah rombongan belajar, jumlah kelas, dan jumlah satuan pendidikan jenjang pendidikan SD Sederajat di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 menunjukkan jumlah kebutuhan Rombel yang terus bertambah seiring dengan kenaikan jumlah calon peserta didik atau penduduk berusia 7-12 tahun. Pemerintah membatasi jumlah peserta didik per rombongan belajar Sekolah



Dasar/Madrasah Ibtidaiyah paling banyak 28 orang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 47 Tahun 2023. Jika dibagi antara jumlah penduduk berusia 7-12 tahun dengan batasan peserta didik per Rombel, maka diperoleh kebutuhan Rombel tahun 2025 hingga 2045. Tahun 2025, kebutuhan Rombel jenjang pendidikan SD Sederajat di Kabupaten Tana Toraja yaitu 778 Rombel, kemudian terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi di tahun 2036 sebanyak 1.348 Rombel. Karena jumlah penduduk usia 7-12 tahun menurun setelah tahun 2036, maka jumlah kebutuhan Rombel juga menurun, hingga di tahun 2045 hanya butuh 1.146 Rombel.

Untuk memperoleh proyeksi kebutuhan kelas, diasumsikan bahwa satu kelas menampung tiga Rombel. Tidak ada standar baku yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan jumlah Rombel dalam satu kelas, sehingga diambil asumsi tersebut. Menggunakan asumsi satu kelas menampung tiga Rombel, maka jumlah kelas yang dibutuhkan tahun 2025 adalah 259 kelas dan terus bertambah hingga mencapai angka tertinggi sebanyak 449 kelas tahun 2036. Tahun 2045, kebutuhan kelas jenjang pendidikan SD Sederajat mencapai 382 kelas.

Karena proyeksi kebutuhan kelas telah dihitung, maka bisa diperoleh kebutuhan satuan pendidikan atau sekolah. Untuk menghitung kebutuhan sekolah diasumsikan bahwa satu sekolah SD Sederajat memiliki 20 kelas (tidak ada standar baku tentang jumlah kelas untuk satu sekolah), sehingga diperoleh jumlah kebutuhan sekolah SD Sederajat tahun 2025 sebanyak 13 unit. Jumlah tersebut bertahan hingga tahun 2028, dan kemudian bertambah di tahun 2029 menjadi 14 unit. Kenaikan kebutuhan jumlah sekolah berlanjut hingga tahun 2036 mencapai 22 unit sekolah, dan menurun sampai tahun 2045 hanya 19 unit sekolah.

Jenjang pendidikan selanjutnya adalah SMP Sederajat, dimana diproyeksi jumlah calon peserta didiknya atau penduduk usia 13-15 tahun lebih sedikit dibandingkan penduduk usia 7-12 tahun. Proyeksi penduduk usia 13-15 tahun mencapai angka tertingginya di tahun 2039 sebanyak 19.694 orang. Ketentuan pemerintah terkait jumlah peserta didik per rombongan belajar SMP Sederajat adalah 32 peserta didik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 47 Tahun 2023. Berdasarkan itu, diperoleh estimasi



kebutuhan Rombel sebanyak 421 untuk tahun 2025, kemudian turun terus hingga tahun 2031 sebanyak 325 peserta didik per Rombel. Kenaikan terjadi di tahun 2032 hingga mencapai angka tertingginya tahun 2039 yaitu 615 peserta didik per Rombel.

Jika diasumsikan bahwa satu kelas bisa menampung tiga Rombel, maka dapat dihitung kebutuhan kelas. Tahun 2025, jumlah kelas yang dibutuhkan sebanyak 140 kelas, kemudian turun hingga tahun 2032 sebanyak 110 kelas. Tahun 2033 terjadi kenaikan menjadi 115 kelas dan terus bertambah hingga tahun 2039 menjadi 205 kelas. Setelah itu terjadi penurunan jumlah kelas karena total penduduk usia 13-15 tahun menurun, hingga di tahun 2045 jumlah kelas yang dibutuhkan sebanyak 182 kelas.

Berdasarkan proyeksi kebutuhan kelas, maka diproyeksi kebutuhan jumlah sekolah jenjang pendidikan SMP Sederajat dengan asumsi bahwa satu sekolah memiliki 10 kelas. Dengan asumsi tersebut didapatkan proyeksi kebutuhan sekolah yang disajikan per tahun pada tabel proyeksi jumlah rombongan belajar, jumlah kelas, dan jumlah satuan pendidikan jenjang pendidikan SMP Sederajat di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045. Sepanjang tahun 2025 hingga 2045, kebutuhan sekolah terbanyak adalah 21 unit di tahun 2039, setelah itu terjadi penurunan kebutuhan seiring dengan penurunan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Perlu dicatat bahwa kebutuhan Rombel, kelas, dan sekolah juga bergantung pada angka partisipasi sekolah. Meski jumlah penduduknya banyak, tapi angka partisipasi sekolahnya rendah, maka tak dibutuhkan banyak sekolah, kelas, maupun Rombel.

**Tabel 2.44**

Proyeksi Jumlah Rombongan Belajar, Jumlah Kelas, dan  
Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan SMP Sederajat  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Total Penduduk Usia 13-15 Tahun	Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar SMP Sederajat	Jumlah Kebutuhan Rombel	Kebutuhan Kelas (Asumsi 1 Kelas Terdapat 3 Rombel)	Kebutuhan Jumlah Sekolah (Asumsi Satu Sekolah Memiliki 10 Kelas)
2025	13.478	32	421	140	14
2026	12.689	32	397	132	13



Tahun	Total Penduduk Usia 13-15 Tahun	Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar SMP Sederajat	Jumlah Kebutuhan Rombel	Kebutuhan Kelas (Asumsi 1 Kelas Terdapat 3 Rombel)	Kebutuhan Jumlah Sekolah (Asumsi Satu Sekolah Memiliki 10 Kelas)
2027	11.970	32	374	125	12
2028	11.340	32	354	118	12
2029	10.838	32	339	113	11
2030	10.511	32	328	109	11
2031	10.406	32	325	108	11
2032	10.567	32	330	110	11
2033	11.034	32	345	115	11
2034	11.843	32	370	123	12
2035	13.026	32	407	136	14
2036	14.618	32	457	152	15
2037	16.651	32	520	173	17
2038	19.143	32	598	199	20
2039	19.694	32	615	205	21
2040	19.403	32	606	202	20
2041	18.100	32	566	189	19
2042	18.021	32	563	188	19
2043	17.886	32	559	186	19
2044	17.710	32	553	184	18
2045	17.493	32	547	182	18

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

### 2.6.2.7 Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk, kebutuhan terhadap infrastruktur jalan akan semakin meningkat karena kenaikan jumlah populasi akan berpengaruh terhadap mobilitas penduduk di daerah. Pertumbuhan penduduk akan diikuti dengan peningkatan jumlah kendaraan dan intensitas mobilitas. Seiring bertambahnya populasi, permintaan terhadap infrastruktur transportasi yang memadai juga meningkat untuk mendukung aktivitas harian seperti bekerja, sekolah, dan distribusi barang. Kenaikan populasi akan menciptakan tekanan terhadap kapasitas jalan yang ada, sehingga diperlukan perencanaan dan pengembangan jaringan jalan baru atau peningkatan kapasitas jalan yang sudah ada untuk menghindari kemacetan, memperlancar arus lalu lintas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.



Kabupaten Tana Toraja telah memproyeksikan jumlah penduduk dalam 20 tahun ke depan. Proyeksi tersebut menunjukkan jumlah populasi akan terus bertambah, tapi dengan laju pertumbuhan yang melambat. Laju pertumbuhan penduduk yang diperkirakan masih menunjukkan tren positif, menjadi variabel yang menentukan perkiraan kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Tana Toraja. Metode yang digunakan dalam memproyeksi kebutuhan infrastruktur jalan dalam dokumen ini adalah mengkomparasi pertumbuhan penduduk dengan kondisi panjang jalan. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Kebutuhan Panjang Jalan (Km)} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Rasio Penduduk Per Kilometer Jalan}}$$

Sedangkan untuk menghitung rasio penduduk per kilometer jalan, digunakan rumus :

$$\text{Rasio Penduduk Per Km Jalan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Panjang Jalan}}$$

Untuk kepentingan proyeksi, rasio penduduk per Km jalan menjadi patokan standar yang digunakan untuk memproyeksi kebutuhan panjang jalan. Proyeksi kebutuhan panjang jalan tidak memperhatikan jalan berdasarkan kewenangan dan jalan berdasarkan kondisi. Proyeksi ini juga tidak memperhatikan wilayah perkotaan dan pedesaan, serta aspek-aspek lain yang berpengaruh terhadap kebutuhan infrastruktur jalan. Satu-satunya variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk.

Setelah dilakukan estimasi dengan menggunakan proyeksi jumlah penduduk, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel proyeksi kebutuhan panjang jalan Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2045.

**Tabel 2.45**

Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Panjang Jalan (Km)	Rasio penduduk per kilometer jalan (Jiwa/Km)
Tahun 2023	257.901	1.397,75	185
Tahun 2025	295.340	1.397,75	211
Tahun 2026	299.674	1.397,75	214
Tahun 2027	303.808	1.397,75	217



Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Panjang Jalan (Km)	Rasio penduduk per kilometer jalan (Jiwa/Km)
Tahun 2028	307.788	1.397,75	220
Tahun 2029	311.640	1.397,75	223
Tahun 2030	315.376	1.397,75	226
Tahun 2031	318.997	1.397,75	228
Tahun 2032	322.497	1.397,75	231
Tahun 2033	325.864	1.397,75	233
Tahun 2034	329.083	1.397,75	235
Tahun 2035	332.137	1.397,75	238
Tahun 2036	335.031	1.397,75	240
Tahun 2037	337.777	1.397,75	242
Tahun 2038	340.344	1.397,75	243
Tahun 2039	342.760	1.397,75	245
Tahun 2040	345.014	1.397,75	247
Tahun 2041	347.132	1.397,75	248
Tahun 2042	349.122	1.397,75	250
Tahun 2043	351.002	1.397,75	251
Tahun 2044	352.800	1.397,75	252
Tahun 2045	354.548	1.397,75	254

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2024

Pada tabel proyeksi kebutuhan panjang jalan Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2045 diproyeksikan bahwa panjang jalan Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 mencapai 1.397,75 Km sudah memadai meskipun jumlah penduduk terus bertambah, sehingga pada prinsipnya Kabupaten Tana Toraja tak perlu menambah jumlah panjang jalan. Hal itu disebabkan karena rasio penduduk per panjang jalan hingga tahun 2045 (tanpa ada perubahan panjang jalan) masih berada diangka 254 jiwa per km panjang jalan. Rasio penduduk per km panjang jalan sebesar 254 berarti bahwa, rata-rata, terdapat 254 orang untuk setiap kilometer jalan yang ada di wilayah tersebut. Angka tersebut masih relatif rendah atau bisa dikatakan bahwa beban infrastruktur jalan yang ditanggung dengan proyeksi penduduk yang mengalami kenaikan masih memadai.

Meski begitu, proyeksi kebutuhan panjang jalan yang hanya menggunakan satu variabel tentu tidak bisa dikatakan valid untuk menentukan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dalam jangka panjang sebab ada banyak variabel yang mesti menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah faktor geografis. Angka rasio penduduk per panjang jalan sebesar 254 bisa juga termasuk



kategori tinggi, jika ada wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Tana Toraja yang sulit diakses atau belum ada akses infrastruktur jalan sama sekali. Jika kondisinya seperti itu, maka tentu pemerintah daerah perlu mengupayakan pembangunan jalan baru agar wilayah-wilayah tersebut bisa diakses.

Secara rinci, pemerintah Kabupaten Tana Toraja sudah merumuskan pembangunan infrastruktur jalan dalam dokumen RTRW 2024-2043. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa sistem jaringan transportasi yang akan dibangun dalam jangka panjang salah satunya adalah sistem jaringan jalan yang salah satunya jalan umum. Jalan umum terdiri atas jalan kolektor; jalan lokal; dan jalan lingkungan. Jalan kolektor yang akan dibangun di Kabupaten Tana Toraja untuk jangka panjang adalah:

1. Ruas Bangkailan – Batualu;
2. Ruas Batupapan - Bandara Pongtiku - Bts. Kab. Toraja Utara;
3. Ruas Batutu – Tawao;
4. Ruas Bittuang – Rattetangga;
5. Ruas Bts. Kab. Enrekang (Kaduaja – Mebali);
6. Ruas Bts. Kab. Tator – Enrekang;
7. Ruas Bts. Kab. Tator/Bts. Kab. Toraja Utara - Bts. Kota Makale;
8. Ruas Bts. Kota Makale - Bts. Kab. Enrekang;
9. Ruas Jl. Dalam Kota Makale;
10. Ruas Jln. Merdeka (Makale);
11. Ruas Jln. Nusantara (Makale);
12. Ruas Jln. Pontiku (Makale);
13. Ruas Kaduaja - Pa'buaran;
14. Ruas Kalembang – Rantekurra;
15. Ruas Kondoran – Makula;
16. Ruas Leatung - Kapa';
17. Ruas Lebannu – Batutu;
18. Ruas Makale – Kondoran;
19. Ruas Makale – Sapandeata;
20. Ruas Makale - Se'seng;



21. Ruas Makula – Batualu;
22. Ruas Mappa – Buakayu;
23. Ruas Masuppu - Bts. Kab. Pinrang;
24. Ruas Passobo - Matangli – Masuppu;
25. Ruas Pa'tengko – Bangkailan;
26. Ruas Pattawanan – Batutu;
27. Ruas Rantetayo – Kalembang;
28. Ruas Rantetayo – Kurruk;
29. Ruas Rantetayo – Tamorron;
30. Ruas Rattetangnga – Bolokan;
31. Ruas Sandale - Kanan Dena;
32. Ruas Sandangan - Talayo/Masuppu;
33. Ruas Seseng - Bts. Prov. Sulbar;
34. Ruas Sipe' – Sandangan;
35. Ruas Suaya – Palipu; dan
36. Ruas Tetebassi – Kondoran.

Jalan kolektor primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Selain jalan kolektor primer, pembangunan infrastruktur jalan juga diarahkan untuk pembangunan jalan lokal dan jalan lingkungan yang melintasi semua kecamatan. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan. Rincian pembangunan jalan lokal dan jalan lingkungan di sajikan pada tabel berikut :



**Tabel 2.46**

Rencana Pembangunan Ruas Jalan Lokal Primer  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024-2043

No.	Nama Ruas Jalan Lokal Primer	Kecamatan
1	Balla/Sarambu Balla - Sarambu Assing	Kecamatan Bittuang
2	Balombong - Mila	Kecamatan Sangalla Selatan
3	Bambalu - Rante Kurra	Kecamatan Kurra
4	Bangkailan - Pasar Kuni	Kecamatan Mengkendek
5	Bangunan - Saruran	Kecamatan Mappak
6	Bangunan Butang - Pasapa'	Kecamatan Mappak
7	Batualu - Balalo	Kecamatan Sangalla Selatan
8	Batukara - Pattawanan	Kecamatan Rano
9	Batusura' - Palesan	Kecamatan Rembon
10	Bau - Ra'da'	Kecamatan Bittuang
11	Bebo - Kalimbuang	Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Sangalla Utara
12	Belau - Kadundung	Kecamatan Masanda
13	Bera - Pangra'ta	Kecamatan Makale Selatan
14	Bolokan - To' Uru	Kecamatan Bittuang
15	Boronan - Tandung	Kecamatan Saluputi
16	Botang - Palangka	Kecamatan Makale
17	Buakayu - Ollon	Kecamatan Bonggakaradeng
18	Buakayu - Peaun Ratte Buttu	Kecamatan Bonggakaradeng
19	Bubun Bombo - Uluway	Kecamatan Mengkendek
20	Bubun Tondon - Kole	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
21	Buisun - Lea	Kecamatan Makale
22	Buntu - Perindingan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
23	Buntu Datu - Maliba'	Kecamatan Mengkendek
24	Buntu Kalando - Lemo	Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla
25	Burasia - Bau	Kecamatan Bittuang
26	Burasia - Tedong-tedong	Kecamatan Bittuang, Kecamatan Malimbong Balepe
27	Buttu Ria - Tanete /Pangkali	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Rantetayo
28	Durian - Patappo	Kecamatan Malimbong Balepe, Kecamatan Rembon
29	Durian - Tombang	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan
30	Gasing - Palangka	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Mengkendek
31	Ge'tengan - Tampo	Kecamatan Mengkendek
32	Gotta - Ratte	Kecamatan Masanda
33	Gotta - Rembo-Rembo	Kecamatan Bittuang, Kecamatan Masanda



No.	Nama Ruas Jalan Lokal Primer	Kecamatan
34	Kaduaja - Pa'buaran	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Makale Selatan
35	Kalembang - Bambalu	Kecamatan Kurra, Kecamatan Rantetayo
36	Kalembang - Belalang	Kecamatan Rantetayo, Kecamatan Saluputi
37	Kalimbua - Tawao	Kecamatan Rano
38	Kalimbuang - Turunan	Kecamatan Sangalla, Kecamatan Sangalla Utara
39	Kaluppang - Tombang	Kecamatan Rantetayo
40	Kambelangi - Pullanan	Kecamatan Sangalla Selatan
41	Kamiri - Buntu Ba'tan	Kecamatan Sangalla Selatan
42	Karakayu - Lo'ko	Kecamatan Sangalla Selatan
43	Keatang - Kalimbuang	Kecamatan Makale Utara
44	Kendenan - Mangau	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan
45	Kokkang - Batusura'	Kecamatan Rembon
46	Kole Patane - Longdo	Kecamatan Malimbong Balepe, Kecamatan Rembon
47	Kuririk - Ra'bung	Kecamatan Saluputi
48	Lamunan - Awa	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan
49	Langso - Rante	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
50	Langso - Ta'pankila	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
51	Lebannu - Kangdo	Kecamatan Rano
52	Lemo -Rorre	Kecamatan Makale Utara
53	Lempe - Sassa'	Kecamatan Mengkendek
54	Lengke' - Bala	Kecamatan Mengkendek
55	Madandan - Dulang	Kecamatan Rantetayo
56	Makula - Palipu'	Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla Selatan
57	Maliba - Bubun Bombo	Kecamatan Mengkendek
58	Mappa - Buakayu	Kecamatan Bonggakaradeng
59	Mappajang - Nusa	Kecamatan Bonggakaradeng
60	Mareali - Suka	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Utara
61	Marinding - Ge'tengan	Kecamatan Mengkendek
62	Marinding - Songgo	Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla Selatan
63	Maroson - Ullin	Kecamatan Makale, Kecamatan Rantetayo, Kecamatan Rembon
64	Matangli - Sandangan	Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Malimbong Balepe
65	Maulu - Pangdo	Kecamatan Rembon
66	Maulu - Tana Malea	Kecamatan Makale, Kecamatan Rantetayo, Kecamatan Rembon



No.	Nama Ruas Jalan Lokal Primer	Kecamatan
67	Mebali - Padangiring	Kecamatan Rantetayo, Kecamatan Saluputi
68	Minanga - Lengke'	Kecamatan Mengkendek
69	Nonok - Sangbua	Kecamatan Rembon
70	Ollon/Pabatan - Panombonan Sima	Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Simbuang
71	Padangiring - Kani	Kecamatan Rantetayo
72	Nama Ruas Jalan Lokal Primer	Kecamatan
73	Palangka - Surruk	Kecamatan Makale Selatan
74	Pala-pala - Benteng	Kecamatan Makale Utara
75	Palesan - Mappa	Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Rembon
76	Palesan - Ratte Patappo	Kecamatan Malimbong Balepe, Kecamatan Rembon
77	Pambala - Pangleon	Kecamatan Makale
78	Pangleon - Pasar Kuni	Kecamatan Mengkendek
79	Pangleon - Ta'pankila'	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
80	Pangra'ta - Perindingan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Makale Selatan
81	Pangra'ta - Tallang Sura	Kecamatan Mengkendek
82	Pa'pulungan - Lengke'mila	Kecamatan Sangalla Selatan, Kecamatan Sangalla Utara
83	Paria - Sarong	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Mengkendek
84	Pasapa - Rembo rembo	Kecamatan Bittuang, Kecamatan Masanda
85	Pasar Baru - Pasang	Kecamatan Sangalla Utara
86	Pasar Lekke - Sarangdena'	Kecamatan Simbuang
87	Pa'tekke - Pa'buaran	Kecamatan Makale Selatan
88	Patekke - Tondok Lemo	Kecamatan Makale Selatan
89	Pa'tengko - Kambuno	Kecamatan Mengkendek
90	Patongloan - Gotta	Kecamatan Bittuang, Kecamatan Masanda
91	Pattan - Ra'bung	Kecamatan Saluputi
92	Peaun Ratte Buttu - Mappajang	Kecamatan Bonggakaradeng
93	Perindingan - Ra'pu Pa'buaran	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Makale Selatan
94	Pondingao - Pasapa	Kecamatan Masanda
95	Pongbembe - Sarangdena	Kecamatan Simbuang
96	Rabakanan - Randanan	Kecamatan Mengkendek
97	Ra'bung - Bone	Kecamatan Malimbong Balepe, Kecamatan Saluputi
98	Ra'da - Balepe	Kecamatan Bittuang, Kecamatan Malimbong Balepe
99	Rada - Rea	Kecamatan Rembon, Kecamatan Saluputi
100	Rante - Padangiring	Kecamatan Makale, Kecamatan Rantetayo



No.	Nama Ruas Jalan Lokal Primer	Kecamatan
101	Rante Kurra - To'uru	Kecamatan Kurra
102	Rantelemo - Turunan	Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla
103	Rantelemo - Tilangnga	Kecamatan Makale Utara
104	Rantetayo - Kalembang	Kecamatan Rantetayo
105	Rantetayo - Tamorron	Kecamatan Rantetayo
106	Ratte - Pasang	Kecamatan Malimbong Balepe, Kecamatan Saluputi
107	Rattepao - Tondok Tua	Kecamatan Masanda
108	Rembon - Tapparan	Kecamatan Rantetayo, Kecamatan Rembon
109	Rembo-rembo - Ra'da	Kecamatan Bittuang
110	Rembo'-rembo' - Rayan	Kecamatan Bittuang
111	Salubarani - Langso	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
112	Sanda Bilik - Surruk	Kecamatan Makale Selatan
113	Sandale - Kanan Dena	Kecamatan Sangalla Utara
114	Sapandeata - Patekke	Kecamatan Makale Selatan
115	Sarangdena - Lebang	Kecamatan Mappak, Kecamatan Simbuang
116	Sareong - Pangkali	Kecamatan Rantetayo
117	Sasak - Bau	Kecamatan Bittuang
118	Senden - Taneteata	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Mengkendek
119	Se'seng - Burasia	Kecamatan Bittuang
120	Se'seng - Transmigrasi	Kecamatan Bittuang
121	Siguntu - Palapala	Kecamatan Makale Utara
122	Sillanan - Perindingan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
123	Solo' - Kote'	Kecamatan Sangalla
124	Suaya - Palipu	Kecamatan Sangalla
125	Surruk - Pangra'ta	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Makale Selatan
126	Tabatan - To'pinus	Kecamatan Saluputi
127	Talinga Batu - Pasapa	Kecamatan Masanda
128	Tallang Sura' - To'bala	Kecamatan Mengkendek
129	Tampapute - Buntu Tabang	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
130	Tampo - Tarangga	Kecamatan Mengkendek
131	Tamporan - Marintang	Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla Selatan
132	Tanamalea - Tonglo	Kecamatan Makale, Kecamatan Rantetayo
133	Tanete - Kanan Dena'	Kecamatan Sangalla Utara
134	Tanete - Lobe	Kecamatan Sangalla, Kecamatan Sangalla Utara
135	Tangki' - Randanan	Kecamatan Mengkendek



No.	Nama Ruas Jalan Lokal Primer	Kecamatan
136	Tapparan - Supate	Kecamatan Rantetayo
137	Tarangga - Bubun Bombo	Kecamatan Mengkendek
138	Tarangga - Tondok Bangla'	Kecamatan Mengkendek
139	Tarongko - Tana Malea	Kecamatan Makale, Kecamatan Rantetayo
140	Tarundung - Bangunan	Kecamatan Mappak
141	Tawao - Pongkamisi	Kecamatan Rano
142	Tendan Ku'lang - Tampapute	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
143	Tengan - Kalembang	Kecamatan Mengkendek
144	Tete Tallu - Pasa' Asu	Kecamatan Sangalla Utara
145	Tetebassi - Kondoran	Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Sangalla Utara
146	Tina - Barra-barra	Kecamatan Rantetayo
147	Nama Ruas Jalan Lokal Primer	Kecamatan
148	To'buangin - Marinding	Kecamatan Mengkendek
149	To'deata - Ge'tengan	Kecamatan Mengkendek
150	To'kalimbuang - Tilangnga	Kecamatan Makale Utara
151	To'kua - Karurung	Kecamatan Mengkendek
152	Tombang - Pasang	Kecamatan Makale Selatan
153	Tondok banga' - Pasar Lebang	Kecamatan Mappak
154	Tondok Iring - Lea	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Sangalla
155	Tondok Lemo - Pattawanan	Kecamatan Makale Selatan
156	Tonga - Batubai	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
157	To'panopi - Pagassingan	Kecamatan Sangalla Utara
158	To'panopi - Pa'gassingan	Kecamatan Sangalla Utara
159	To'tallang - Lengke'	Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Mengkendek
160	To'tallang - Lengle'	Kecamatan Mengkendek
161	To'tallang - Sandabilik	Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan
162	Totumbang - Tetelitik	Kecamatan Sangalla, Kecamatan Sangalla Selatan, Kecamatan Sangalla Utara
163	Ukka - Pangleon	Kecamatan Rantetayo
164	Ulusalu - Tiakka	Kecamatan Saluputi
165	Uluway - Roni/Sanglelen	Kecamatan Mengkendek
166	Walakaero - Pa'bakka	Kecamatan Sangalla, Kecamatan Sangalla Selatan

Sumber : Dokumen Ranperda RTRW Kabupaten Tana Toraja 2024-2043



**Tabel 2.47**

Rencana Pembangunan Infrastruktur Jalan Lokal Sekunder  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024-2043

No.	Nama Ruas Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan
1	Jl. Dalam Kota Bittuang	Kecamatan Bittuang
2	Jl. Dalam Kota Buakayu	Kecamatan Bonggakaradeng
3	Jl. Dalam Kota Ge'tengan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
4	Jl. Dalam Kota Ge'tengan	Kecamatan Mengkendek
5	Jl. Dalam Kota Makale	Kecamatan Makale
6	Jl. Dalam Kota Rante Lemo	Kecamatan Makale Utara
7	Jl. Dalam Kota Rantetayo	Kecamatan Rantetayo
8	Jl. Dalam Kota Rembon	Kecamatan Malimbong Balepe
9	Jl. Dalam Kota Rembon	Kecamatan Rembon
10	Jl. Dalam Kota Sangalla	Kecamatan Sangalla
11	Jl. Dalam Kota Sangalla	Kecamatan Sangalla Utara
12	Jl. Dalam Kota Ulsalu	Kecamatan Saluputi
13	Jl. PU - Lapandan	Kecamatan Makale

Sumber : Dokumen Ranperda RTRW Kabupaten Tana Toraja 2024-2043

**Tabel 2.48**

Rencana Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkungan Primer  
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024-2043

No.	Nama Ruas Jalan Lingkungan Primer	Kecamatan
1	Ballang - Lengke'tangti	Kecamatan Mengkendek
2	Bubun Sillanan - Mila'	Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kecamatan Mengkendek
3	Buntu Kalando - Lemo	Kecamatan Mengkendek Kecamatan Sangalla
4	Buntu Limbong - Benaru	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
5	Buntu Marinding - Barua	Kecamatan Mengkendek Kecamatan Sangalla Selatan
6	Dolo - Kambuno	Kecamatan Mengkendek
7	Dulang - Lengke	Kecamatan Rantetayo
8	Gandangbatu - Pessaluan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan
9	Kuririk - Pattan	Kecamatan Saluputi
10	Lempe - Purapiso Ranteba'tan	Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kecamatan Mengkendek
11	Madandan - Bolong	Kecamatan Rantetayo
12	Maroson - Padakka	Kecamatan Kurra
13	Maulu - Lindo Bulan/Batu Sura'	Kecamatan Rembon
14	Mebali - Ba'ba/Tiakka	Kecamatan Rantetayo Kecamatan Rembon Kecamatan Saluputi
15	Nusa - Me'tan	Kecamatan Bonggakaradeng
16	Pa'batanan - Tengnge Tabang	Kecamatan Kurra



No.	Nama Ruas Jalan Lingkungan Primer	Kecamatan
17	Parodo - Burasia	Kecamatan Bittuang
18	Pasar Kuni - Bastem/Bts Luwu	Kecamatan Mengkendek
19	Pasar Kuni - Sumalu/Bts Torut	Kecamatan Mengkendek Kecamatan Sangalla Selatan
20	Petumpangan - Gampolan Tallang Sura'	Kecamatan Mengkendek
21	Pongbembe - Massawa	Kecamatan Simbuang
22	Ra'bung - Tombang	Kecamatan Saluputi
23	Sadipe - Lekke	Kecamatan Simbuang
24	Suaya - Palipu	Kecamatan Sangalla
25	Tabang - Balla	Kecamatan Kurra
26	Tangki' - Pangra'ta'	Kecamatan Mengkendek
27	Tapparan - Rarung	Kecamatan Rantetayo Kecamatan Rembon
28	To'tallang - Lengle'	Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kecamatan Mengkendek
29	Tokesan - Mila	Kecamatan Sangalla Selatan
30	Tosi' - Longdo	Kecamatan Rembon

Sumber : Dokumen Ranperda RTRW Kabupaten Tana Toraja 2024-2043

Rencana pembangunan infrastruktur jalan tersebut di desain untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagian jalan tersebut sudah tersedia, namun pemeliharaan atau perbaikan juga menjadi bagian dalam rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tana Toraja dalam jangka panjang. Diharapkan dengan terbangun dan terpeliharanya infrastruktur jalan tersebut, bisa menopang mobilitas masyarakat Kabupaten Tana Toraja, terutama yang bermukim di wilayah yang sulit diakses.

## 2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Pengembangan wilayah Kabupaten Tana Toraja diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Toraja untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tana Toraja dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan

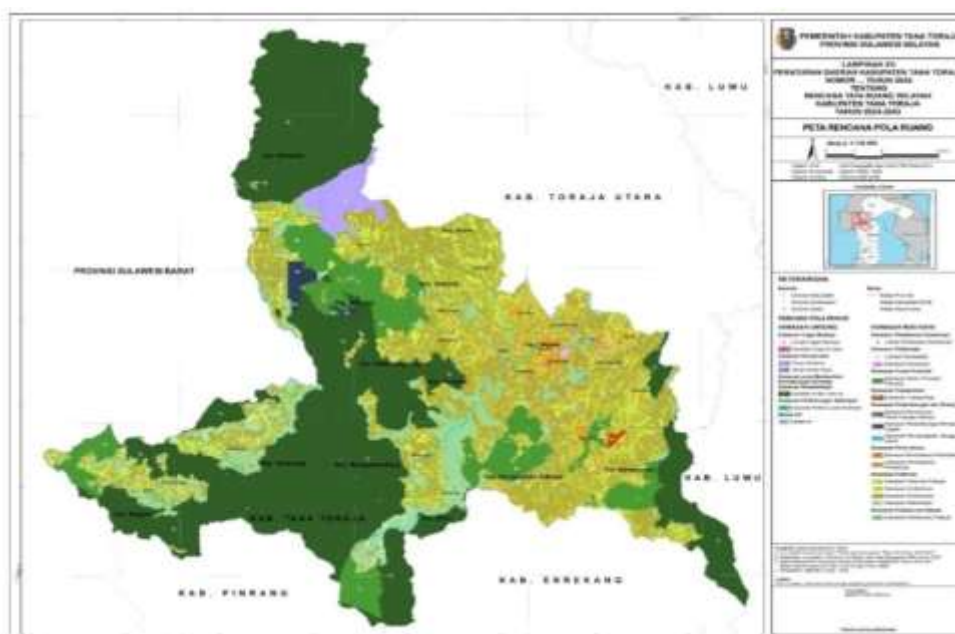


berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju kabupaten yang terkemuka di Indonesia.

RTRW Kabupaten Tana Toraja merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional dan pola ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

**Gambar 2.5**

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tana Toraja



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

### 2.7.1 KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG

Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Toraja. Menyadari pentingnya keberadaan dan fungsi kawasan lindung bagi kehidupan manusia di satu sisi, dan melihat besarnya ancaman pengrusakan oleh penduduk karena desakan ekonomi di sisi lain, perlu dibangun suatu sistem pengelolaan kawasan lindung yang lebih rasional dengan memanfaatkan komunitas yang tinggal di kawasan hutan untuk



dijadikan penjamin keasrian dan kelestarian hutannya. Paradigmanya perlu diubah dari penekanan pada aspek legal dan lingkungan semata-mata ke aspek keterpaduan antara legal-lingkungan dan sosial – ekonomi – budaya.

Masyarakat tidak hanya dilihat sebagai ancaman, tetapi juga sebagai potensi yang bermanfaat sebagai pengendali dan pemelihara lingkungan secara aktif. Dalam pendekatan ini, kawasan lindung dilindungi oleh penduduk karena memberikan keuntungan ekonomi secara langsung. Programnya perlu dirancang secara cermat, sehingga terwujud manajemen terpadu dan seimbang antara pengembangan ekonomi dengan pelestarian sumber daya alam, sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Perhatian khusus perlu diberikan pada pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan lindung di sekitar pusat-pusat pertumbuhan. Ini menjadi penting, karena Kabupaten Tana Toraja akan semakin tumbuh berkembang sehingga tekanan terhadap ruang darat pada umumnya akan meningkat dengan cepat. Di sekitar pusat-pusat pertumbuhan, konversi kawasan lindung ke kawasan budi daya pertanian, permukiman serta kawasan perkotaan lainnya akan lebih intensif.

#### **2.7.1.1 Badan Air**

Badan Air merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya. Badan air pada Kabupaten Tana Toraja memiliki luas kurang lebih seluas 480,46 Ha yang terdapat pada Kecamatan Bittuang, Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Kurra, Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Malimbong Balepe, Kecamatan Mappak, Kecamatan Masanda, Kecamatan Rano, Kecamatan Rantetayo, Kecamatan Rembon, Kecamatan Saluputi, dan Kecamatan Simbuang.

#### **2.7.1.2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan



ruang yang cukup bagi peresapan air hujan untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengontrol tata air permukaan. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Tana Toraja merupakan kawasan hutan lindung dengan luas 83.539,12 ha yang tersebar pada 10 (sepuluh) kecamatan. Persentase terbesar sebaran luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Tana Toraja terdapat di Kecamatan Bonggakaradeng seluas 19.108,17 ha dan Kecamatan Simbuang seluas 16.509,38. Adapun persebaran hutan lindung di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana diuraikan pada tabel dan gambar berikut :

**Tabel 2.49**  
Persebaran Hutan Lindung di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Hutan Lindung (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bituang	8.661,03	10,37
2	Kecamatan Bonggakaradeng	19.108,17	22,87
3	Kecamatan Malimbong Balepe	5.752,59	6,89
4	Kecamatan Mappak	7.271,34	8,70
5	Kecamatan Masanda	15.814,25	18,93
6	Kecamatan Mangkendek	6.540,05	7,83
7	Kecamatan Rano	1.212,12	1,45
8	Kecamatan Rembon	1.571,31	1,88
9	Kecamatan Sanggalla Selatan	1.098,88	1,31
10	Kecamatan Simbuang	16.509,38	19,76
<b>Total</b>		<b>83.539,12</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 2.7.1.3 Kawasan Perlindungan Setempat

Persebaran kawasan perlindungan setempat pada Kabupaten Tana Toraja tersebar pada beberapa Kecamatan, dengan kawasan perlindungan setempat terluas ada pada Kecamatan Bonggakaradeng seluas 169,56 Ha. untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut :



**Tabel 2.50**

Persebaran Kawasan Perlindungan Setempat di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Bittuang	145,71
2	Kecamatan Bonggakaradeng	169,56
3	Kecamatan Kurra	1,23
4	Kecamatan Makale	51,28
5	Kecamatan Makale Selatan	54,15
6	Kecamatan Makale Utara	37,57
7	Kecamatan Malimbong Balepe	0,66
8	Kecamatan Mappak	53,40
9	Kecamatan Masanda	24,65
10	Kecamatan Rano	49,32
11	Kecamatan Rantetayo	35,87
12	Kecamatan Rembon	106,86
13	Kecamatan Saluputi	65,56
14	Kecamatan Simbuang	77,64
<b>Total</b>		<b>873,45</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Adapun jenis Kawasan perlindungan setempat yang ada di Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas :

#### **A. Kawasan Sempadan Sungai**

Daerah aliran sungai mempunyai karakter ekosistem alam yang sangat dipengaruhi oleh sistem hidrologi sungainya. Kualitas interkoneksi hulu dan hilir sangat penting. Kestabilan debit air dipengaruhi oleh musim penghujan dan kemarau, iklim serta interkoneksi antara lingkungan darat dengan lingkungan perairannya. Prinsip selama mungkin menahan dan memanfaatkan air sebelum mengalir sampai ke laut tepat ditindaklanjuti dengan membangun one river one plan one management. Agar sistem hidrologi sungai terlindung baik kestabilan volume debit air maupun kualitas airnya, maka daerah hulu sungai lebih difungsikan sebagai kawasan lindung makro DAS sedangkan sempadan sungai di daerah hilir difungsikan sebagai kawasan lindung setempat. Sungai dan jalur hijau sempadannya juga sangat dibutuhkan untuk mobilitas ragam



perikanan dalam mobilitas hulu-hilir dan sebaliknya, yang sangat diperlukan dalam menjaga keberlanjutan regenerasinya.

Kawasan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Saddang dan anak sungai lainnya dengan ketentuan :

- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berpenduduk ditetapkan paling sedikit berjarak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk ditetapkan paling sedikit berjarak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- Daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berpenduduk dengan kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter ditetapkan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai.
- Daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berpenduduk dengan kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai.
- Daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk dengan kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter ditetapkan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai.
- Daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk dengan kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) meter dari tepi kiri dan kanan sungai.
- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan yang berpenduduk ditetapkan paling sedikit berjarak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.



- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk ditetapkan paling sedikit berjarak 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- Daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan yang berpenduduk untuk sungai kecil ditetapkan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) sampai dengan 55 (lima puluh lima) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai.
- Daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan yang berpenduduk untuk sungai besar ditetapkan dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) sampai dengan 110 (seratus sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai.
- Daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk untuk sungai kecil ditetapkan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai.
- Daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk untuk sungai besar ditetapkan dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai.
- melakukan restorasi kawasan hutan khususnya pada daerah sempadan.

Penanggulangan DAS kritis dapat dilakukan melalui reboisasi hutan, pengubahan peran masyarakat kawasan hutan dalam mencari nafkah dari penebang hutan tidak arif dalam mencari nafkah menjadi pelestari hutan melalui usaha hutan rakyat, serta revitalisasi sistem hidrolika dengan membangun embung, situs dan wetland di daerah hulu maupun hilir.

## **B. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan**

Kawasan ruang terbuka hijau, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH



publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL dan PPK.

### **2.7.2 KAWASAN KONSERVASI**

Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan Konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Perlindungan tersebut bertujuan untuk melestarikan hutan dan kehidupan yang ada di dalamnya agar bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Hutan konservasi merupakan hutan milik negara yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengertian hutan konservasi menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah sebagai berikut: Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, Kawasan konservasi yang ada di Kabupaten Tana Toraja, yaitu taman hutan raya seluas kurang lebih 4.007,44 ha, Taman Nasional seluas kurang lebih 70,68 ha, yang masing-masing tersebar di Kecamatan Bittuang dan Kecamatan Masanda.

### **2.7.3 KAWASAN CAGAR BUDAYA**

Kawasan cagar budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas berada. Rencana pengembangan kawasan cagar budaya bertujuan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kawasan cagar budaya di wilayah Kabupaten diperlukan penetapannya untuk usaha preservasi peninggalan sejarah dan budaya warisan generasi pendahulu. Budaya sifatnya dialektis sehingga secara dinamis tumbuh



berkembang sesuai dengan interaksi antar etnis yang sangat didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belakangan ini. Daya kemandirian beragam budaya Nusantara yang menunjukkan keunikan dan kearifan masing-masing budaya dengan nilai-nilai kearifan lokalnya sebagai jati diri masing-masing yang sesuai dengan karakter alam dan sosial ekonomi masyarakatnya perlu ditumbuhkembangkan dalam asas Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini diperlukan untuk memperkuat eksistensi jati diri etnis yang ada di Kabupaten Tana Toraja sehingga dalam aktualisasi diri di era perubahan global ini masyarakat Tana Toraja dapat tetap menunjukkan kearifan jati dirinya tanpa terombang-ambing oleh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nurani dan pandangan hidupnya. Warisan fisik bangunan atau artefak masa lalu yang dapat dijadikan indikator produk peradaban masa lalu, yang sekaligus juga dapat menjaga spirit generasi kini dan generasi penerus harus dijaga dalam kawasan cagar budaya.

Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Tana Toraja merupakan kawasan cagar budaya yang ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi budaya bangsa yang bernilai tinggi untuk kepentingan ilmu pengetahuan berupa bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah. Kawasan cagar budaya di Kabupaten Tana Toraja memiliki luas kurang lebih 6,66 ha yang berada di Kecamatan Makale Utara.

#### **2.7.4 KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA**

Kawasan budi daya adalah merupakan wilayah yang dapat di budi dayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Kriteria kawasan budi daya adalah ukuran yang meliputi daya dukung, aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Penetapan kawasan budi daya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang.

Kriteria teknis sektoral kawasan budi daya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budi daya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budi daya yang



menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan. Pengelolaan kawasan budi daya adalah suatu pendekatan dalam mengelola kawasan-kawasan di luar kawasan lindung agar pemanfaatannya dilakukan secara optimal, selaras, dan serasi dengan kawasan lindung dalam mewujudkan pembangunan daerah. Kawasan peruntukan budi daya di Kabupaten Tana Toraja yang diarahkan berdasarkan potensinya terdiri atas :

#### 2.7.4.1 Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Tana Toraja adalah kawasan hutan produksi Terbatas di Kabupaten Tana Toraja adalah merupakan kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 19.638,85 ha. yang terdistribusi dalam 11 (Sebelas) kecamatan. Kawasan hutan produksi dikelola dengan konsep hutan desa serta dilakukan tebang pilih dan peremajaan secara berkelanjutan untuk menghindari perubahan tutupan vegetasi yang signifikan. Mengimplementasikan konsep dan kebijakan pengelolaan hutan produksi lestari. Adapun distribusi dan luasan masing-masing kecamatan diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.51**  
Persebaran Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bittuang	5.919,32	30,18
2	Kecamatan Bonggakaradeng	2.217,16	11,30
3	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	2.404,87	12,26
4	Kecamatan Makale Selatan	1.464,72	7,47
5	Kecamatan Malimbong Balepe	674,99	3,44
6	Kecamatan Mappak	2.174,46	11,09
7	Kecamatan Masanda	1.179,36	6,01
8	Kecamatan Mengkendek	2.685,42	13,69
9	Kecamatan Rano	336,97	1,72
10	Kecamatan Saluputi	558,24	2,85
11	Kecamatan Simbuang	23,34	0,12
<b>Total</b>		<b>19.638,85</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023



#### 2.7.4.2 Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan peruntukan perkebunan rakyat di Kabupaten Tana Toraja diarahkan seluas 13.483,35 ha yang terdistribusi dalam 19 (Sembilan Belas) kecamatan. Berdasarkan hasil KLHS Revisi RTRW Kabupaten Tana Toraja, direkomendasikan konsep pengelolaan Kawasan hutan rakyat yang berkelanjutan dengan menjaga tutupan vegetasi pada lahan tersebut dengan konsep Agroforestri. Daerah yang rawan longsor tinggi pada kawasan hutan rakyat, harus tetap dijaga penutupan vegetasi untuk tetap berupa hutan tanaman dan ditetapkan sebagai kawasan perlindungan dari rawan bencana. Melakukan rehabilitasi lahan atau revegetasi kembali lahan terbuka menjadi hutan tanaman. Membuat daerah tangkapan air atau embung pada kawasan hutan rakyat khususnya pada daerah yang memiliki jasa ekosistem tata air sangat rendah. Kawasan hutan rakyat yang memiliki potensi penyedia KEHATI yang tinggi harus dijaga penutupan vegetasi untuk tetap berupa hutan tanaman. Adapun distribusi dan luasan masing-masing kecamatan diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.52**

Persebaran Kawasan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bittuang	473,08	3.51
2	Kecamatan Bonggakaradeng	1.897,69	14.07
3	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	244,69	1.81
4	Kecamatan Kurra	58,09	0.43
5	Kecamatan Makale	320,03	2.37
6	Kecamatan Makale Selatan	1.663,05	12.33
7	Kecamatan Makale Utara	167,54	1.24
8	Kecamatan Malimbong Balepe	64,29	0.48
9	Kecamatan Mappak	1.505,47	11.17
10	Kecamatan Masanda	1.122,59	8.33
11	Kecamatan Mengkendek	657,60	4.88
12	Kecamatan Rano	1.836,67	13.62
13	Kecamatan Rantetayo	44,66	0.33
14	Kecamatan Rembon	811,60	6.02
15	Kecamatan Saluputi	239,56	1.78
16	Kecamatan Sangalla	120,89	0.90



No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
17	Kecamatan Sangalla Selatan	152,67	1.13
18	Kecamatan Sangalla Utara	63,98	0.47
19	Kecamatan Simbuang	2.039,19	15.12
<b>Total</b>		<b>13.483,35</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 2.7.4.3 Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tana Toraja terdiri atas beberapa bagian, yaitu :

#### A. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tana Toraja direncanakan seluas 15.515,26 ha yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luasan yang bervariasi sesuai dengan potensi wilayahnya. Adapun persebaran dan luasan pada masing-masing kecamatan diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.53**

Persebaran Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bittuang	1.099,47	7,09
2	Kecamatan Bonggakaradeng	404,49	2,61
3	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	923,00	5,95
4	Kecamatan Kurra	1.229,07	7,92
5	Kecamatan Makale	642,65	4,14
6	Kecamatan Makale Selatan	431,41	2,78
7	Kecamatan Makale Utara	544,65	3,51
8	Kecamatan Malimbong Balepe	603,14	3,89
9	Kecamatan Mappak	366,37	2,36
10	Kecamatan Masanda	342,20	2,21
11	Kecamatan Mengkendek	2.776,28	17,89
12	Kecamatan Rano	467,49	3,01
13	Kecamatan Rantetayo	1.164,85	7,51
14	Kecamatan Rembon	966,82	6,23
15	Kecamatan Saluputi	934,57	6,02
16	Kecamatan Sangalla	445,75	2,87
17	Kecamatan Sangalla Selatan	1.050,31	6,77



No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
18	Kecamatan Sangalla Utara	620,55	4,00
19	Kecamatan Simbuang	502,16	3,24
<b>Total</b>		<b>15.515,26</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Dari luas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tana Toraja 15.515,26 ha diantaranya ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (KP2B), dengan luasan 13.440,60 hektar. Lebih jelasnya sebaran ruang KP2B, di perhatikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.54**

Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)  
di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bittuang	935,70	6,96
2	Kecamatan Bongkaradeng	367,69	2,74
3	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	805,01	5,99
4	Kecamatan Kurra	1.010,15	7,52
5	Kecamatan Makale	570,24	4,24
6	Kecamatan Makale Selatan	392,89	2,92
7	Kecamatan Makale Utara	490,71	3,65
8	Kecamatan Malimbong Balepe	504,88	3,76
9	Kecamatan Mappak	247,74	1,84
10	Kecamatan Masanda	290,46	2,16
11	Kecamatan Mengkendek	2.516,28	18,72
12	Kecamatan Rano	422,55	3,14
13	Kecamatan Rantetayo	1.111,55	7,53
14	Kecamatan Rembon	827,06	6,15
15	Kecamatan Saluputi	756,18	5,63
16	Kecamatan Sangalla	403,25	3,00
17	Kecamatan Sangalla Selatan	951,15	7,08
18	Kecamatan Sangalla Utara	548,39	4,08
19	Kecamatan Simbuang	388,74	2,89
<b>Total</b>		<b>5.794,51</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023



## B. Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura di Kabupaten Tana Toraja seluas 5.794,51 ha, yang terdistribusi di 19 kecamatan di wilayah Kabupaten Tana Toraja. Adapun distribusi dan luasan pada masing-masing kecamatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.55**

Rencana Kawasan Pertanian Hortikultura di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bittuang	665,22	11.31
2	Kecamatan Bonggakaradeng	355,58	6.14
3	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	323,22	5.58
4	Kecamatan Kurra	292,39	5.05
5	Kecamatan Makale	67,98	1.17
6	Kecamatan Makale Selatan	342,45	5.91
7	Kecamatan Makale Utara	29,56	0.51
8	Kecamatan Malimbong Balepe	494,99	8.54
9	Kecamatan Mappak	529,97	9.15
10	Kecamatan Masanda	545,23	9.41
11	Kecamatan Mengkendek	856,43	14.78
12	Kecamatan Rano	145,61	2.51
13	Kecamatan Rantetayo	127,76	2.20
14	Kecamatan Rembon	132,07	2.28
15	Kecamatan Saluputi	192,19	3.32
16	Kecamatan Sangalla	22,70	0.39
17	Kecamatan Sangalla Selatan	271,53	4.69
18	Kecamatan Sangalla Utara	8,37	0.14
19	Kecamatan Simbuang	401,25	6.92
<b>Total</b>		<b>5.794,51</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

## C. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Tana Toraja seluas 48.001,60 ha, tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Pengembangan kegiatan budi



daya tanaman perkebunan di wilayah Kabupaten Tana Toraja diarahkan pada beberapa potensi perkebunan. Adapun distribusi dan luasan pada masing-masing kecamatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.56**

Luas dan Persebaran Kawasan Perkebunan di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bittuang	4.842,76	10.09
2	Kecamatan Bongkaradeng	1.864,94	3.89
3	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	3.822,82	7.96
4	Kecamatan Kurra	3.025,52	6.30
5	Kecamatan Makale	1.600,28	3.33
6	Kecamatan Makale Selatan	2.729,11	5.69
7	Kecamatan Makale Utara	999,45	2.08
8	Kecamatan Malimbong Balepe	2.272,63	4.73
9	Kecamatan Mappak	2.305,35	4.80
10	Kecamatan Masanda	2.723,25	5.67
11	Kecamatan Mengkendek	7.208,42	15.02
12	Kecamatan Rano	1.250,63	2.61
13	Kecamatan Rantetayo	1.289,59	2.69
14	Kecamatan Rembon	2.887,31	6.02
15	Kecamatan Saluputi	1.981,33	4.13
16	Kecamatan Sangalla	850,60	1.77
17	Kecamatan Sangalla Selatan	2.748,5	5.73
18	Kecamatan Sangalla Utara	734,68	1.53
19	Kecamatan Simbuang	2.864,39	5.97
<b>Total</b>		<b>48.001,60</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

#### D. Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi wilayah yang potensial secara ekonomis untuk peternakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Tana Toraja seluas 2.407,61 Ha. Adapun distribusi dan luasan pada masing-masing kecamatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.57**

Luas dan Persebaran Kawasan Peternakan di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bonggakaradeng	594,92	24,7
2	Kecamatan Mappak	573,88	23,85
3	Kecamatan Rano	13,07	0,54
4	Kecamatan Simbuang	1.225,74	50,89
<b>Total</b>		<b>2.407,61</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 2.7.5 KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan di Kabupaten Tana Toraja merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral logam dan pertambangan batuan. Dan adapun kawasan peruntukan wilayah energi di Kabupaten Tana Toraja terdiri atas kawasan pertambangan mineral logam, kawasan peruntukan pertambangan batuan, dan kawasan peruntukan pembangkitan tenaga listrik.

Kawasan pertambangan mineral logam pada Kabupaten Tana Toraja memiliki luas 1.265,86 Ha yang terdapat pada Kecamatan Bittuang, Kecamatan Malimbong Balepe, dan Kecamatan Masanda. Untuk kawasan pertambangan batuan sendiri memiliki luasan 33,34 Ha dan tersebar di Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Sangalla, dan Kecamatan Sangalla Utara. Sedangkan untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik memiliki luas kurang lebih 9,24 Ha dan terdapat di Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Sangalla Utara.

### 2.7.6 KAWASAN PARIWISATA

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja seluas 116,33 ha, tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Adapun persebaran pada setiap kecamatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.58**

Persebaran Kawasan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja

No.	Nama Usulan Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata	Lokasi	
			Kelurahan/ Lembang	Kecamatan
1	Lemo	- Situs cagar budaya (Liang Paa') - Tau-tau - Rumah Tongkonan sasana Budaya	Kelurahan Lemo	Kecamatan Makale Utara
2	Tilangnga	- Kolam alam untuk rekreasi tirta - Situs budaya	Kelurahan Sarira	Kecamatan Makale Utara
3	Sirope	- Liang Paa' - Tau-tau - Liang Pia (Passillirian)	Kelurahan Lion Tondok Iring	Kecamatan Makale Utara
4	Sarapung	Passillirian (kuburan bayi di pohon)	Kelurahan Tongko Sarapung	Kecamatan Sangalla'
5	Suaya	- Liang Paa' - Tau-tau - Erong - Pemandangan alam	Lembang Kaero	Kecamatan Sangalla'
6	Tampangallo	- Gua purba - Tau-tau - Erong - Pemandangan alam	Kelurahan Tongko Sarapung	Kecamatan Sangalla'
7	Buntu Kalando	- Rumah adat (tongkonan) - Museum mini	Kelurahan Tongko Sarapung	Kecamatan Sangalla'
8	Makula	- Kolam dan sumber air panas alam - Inn (penginapan) - Restoran	Lembang Tokesan	Kecamatan Sangalla' Selatan
9	Goa Sullukan	- Goa alam - Pemandangan alam	Lembang Tokesan	Kecamatan Sangalla' Selatan
10	Desa Wisata Bebo'	- Pemukiman tradisional - Kuburan gantung Tana'tak - Benteng pertahanan purba - Mata air todolo - passillirian	Kelurahan Bebo'	Kecamatan Sangalla' Utara
11	Desa Wisata Tumbang datu	- Pemukiman tradisional - Kuburan gantung Tana'tak - Benteng pertahanan purba	Lembang Tumbang Datu	Kecamatan Sangalla' Utara
12	Sillanan	- Pemukiman tradisional - Pemakaman purba - Rante - Mata air todolo - Agro wisata - Desa wisata	Lembang Sillanan	Kecamatan Gandang Batu Sillanan
13	Potok Tengan Kandora	- Situs purbakala Puang Parranan - Pemukiman tradisional - Kuburan gantung - Mata air purba - Panorama alam	Kelurahan Tengan	Kecamatan Mengkendek
14	Tumakke	- Cagar budaya (rumah adat tongkonan beratap batu) - Perkampungan tradisional	Lembang Banga	Kecamatan Rembon



No.	Nama Usulan Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata	Lokasi	
			Kelurahan/ Lembang	Kecamatan
15	Pango-pango	- Kawasan Agro Wisata kopi - Panorama alam - Desa wisata	Kelurahan Tosapan	Kecamatan Makale Selatan
16	Wisata Religi Buntu Burake	- Patung Yesus Kristus memberkati - Panorama alam - Goa Maria - Kuburan purba - Pemukiman tradisional	Kelurahan Buntu Burake	Kecamatan Makale
17	Sarambu Assing	- Kawasan wisata alam - Air terjun - Hutan wisata - Perkebunan kopi	Lembang Patongloan	Kecamatan Bittuang
18	Barereng	- Kawasan wisata alam - Kola pemancingan - Air terjun - Hutan wisata - Perkebunan kopi	Lembang Rante Limbong	Kecamatan Kurra
19	Talondo tallu	- Kawasan wisata alam - Air terjun - Hutan wisata - Perkebunan kopi	Lembang Balepe'	Kecamatan Malimbong Balepe'
20	Sassa'	- Pemukiman tradisional - Situs purbakala - Panorama alam - Perkebunan kopi	Lembang Gasing	Kecamatan Mengkendek
21	Tapparan (Arung Jeram)	- Sungai Mai'ting untuk arung Jeram - Panorama alam	Lembang Maroson	Kecamatan Kurra
22	Buntu Tondon	- Kuburan pahat - Tau-tau - Erong - Panorama alam	Kelurahan Tondon Mamullu	Kecamatan Makale
23	Pattan Ulusalu	- Tongkonan layuk (rumah adat) - Rante - Simbuang batu (menhir)	Kelurahan Pattan	Kecamatan Saluputti
24	Lo'ko Tongko	- Goa alam purba - Pemukiman tradisional - Panorama alam	Kelurahan Tongko Sarapung	Kecamatan Sangalla'
25	Banua Kasalle Bau	- Rumah adat - Perkampungan tradisional - Panorama alam	Lembang Kaero	Kecamatan Sangalla'
26	Rurak	- Goa alam - Kuburan alam	Lemb. Ke'Pe' Tinoring	Kecamatan Mengkendek
27	Buntu Sarira	- Panorama alam - Hamparan awan pada pagi hari - Matahari terbit dan matahari terbenam - Perkebunan kopi rakyat - Situs perjuangan Topada Tindo - Perkampungan tradisional	Kelurahan Sarira	Kecamatan Makale Utara
28	Goa Alam Kambuno	- Goa alam - Sungai bawah tanah	Kelurahan Sarira	Kecamatan Makale Utara



No.	Nama Usulan Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata	Lokasi	
			Kelurahan/ Lembang	Kecamatan
29	Padang Savana Ollon dan Kendenan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Padang savana</li><li>- Panorama alam</li><li>- Kuburan purba Liang Saratu'</li><li>- Desa Wisata Ollon</li><li>- Sungai Masuppu</li></ul>	Lembang Bau Selatan	Kecamatan Bonggakaradeng
31	Ratte Sarumbu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Air terjun</li><li>- Hutan wisata</li><li>- Perkebunan kopi toraja di Bolokan</li><li>- Panorama alam</li></ul>	Lembang Balla	Kecamatan Bittuang
31	Sa'pak Bayo-bayo	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keluarga Kudus Nasaret</li><li>- Goa alam bersejarah</li><li>- Kuburan purba</li><li>- Situs sumur Puang</li><li>- Pemukiman tradisional</li><li>- Sungai dari batu</li><li>- Labirin doa</li><li>- Trekking dalam kawasan</li><li>- Penginapan (wisma)</li><li>- Restoran</li></ul>	Lembang Saluallo	Kecamatan Sangalla Utara

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2023

### 2.7.7 KAWASAN PERMUKIMAN

pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Tana Toraja diarahkan sesuai dengan lokasi pengembangannya yang terdiri atas :

#### 2.7.7.1 Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah kawasan permukiman yang berada di kawasan perkotaan PKL Makale, kawasan perkotaan PPK dan atau kawasan permukiman perkotaan PPL lainnya dengan luas 2.513,17 ha dengan ketentuan :

- Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, perkantoran, pelayanan umum, perdagangan, jasa dan mixuse dengan menginspirasi pada sistem tongkonan.
- Kawasan perumahan di kawasan perkotaan terutama di PKL, PPK dan PPL dengan kepadatan penduduk tinggi pengembangannya diarahkan vertikal dengan intensitas sedang sampai tinggi



### 2.7.7.2 Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah kawasan permukiman yang berada di kawasan perdesaan dan kawasan permukiman lainnya dengan luas 6.418,88 Ha yang tersebar pada kawasan budi daya, dengan ketentuan:

- a. kawasan peruntukan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
- b. bangunan di kawasan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal sistem tongkonan.

Rencana pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Toraja, di samping mengarahkan kegiatan perumahan secara proporsional juga akan mengarahkan Kawasan Perkantoran yang terdiri atas :

- a. Kawasan perkantoran yang melayani skala lokal, skala kabupaten dan perkantoran vertikal diarahkan secara proporsional pada Kawasan Perkotaan PKL Makale.
- b. Kawasan perkantoran yang melayani skala kawasan dan lingkungan diarahkan pada pusat-pusat perkotaan kecamatan dan pusat-pusat kawasan perdesaan.

Demikian pula halnya dengan rencana sarana pelayanan umum merupakan, yang terdiri atas. sarana pelayanan umum skala regional/perkotaan, skala kawasan, skala sub kawasan/lingkungan diarahkan secara proporsional pada Kawasan Perkotaan PKL Makale, sedangkan sarana pelayanan umum skala kawasan, skala sub kawasan/lingkungan diarahkan pada PPK dan PPL. Sementara itu, kawasan perdagangan dan jasa merupakan kawasan perdagangan dan jasa, yang terdiri atas :

- a. Kawasan perdagangan dan jasa yang melayani skala kabupaten diarahkan secara proporsional pada Kawasan Perkotaan PKL Makale.
- b. Kawasan perdagangan dan jasa yang melayani skala kawasan dan lingkungan diarahkan pada pusat-pusat perkotaan kecamatan dan pusat-pusat kawasan perdesaan.



### 2.7.8 KAWASAN TRANSPORTASI

Pembangunan sektor transportasi di Kabupaten Tana Toraja tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dipadukan secara keseluruhan dari pembangunan sektor transportasi Provinsi Sulawesi, terutama Kota Makassar yang menjadi Kota inti. Dengan adanya pengintegrasian antar sistem transportasi ini di dalam Provinsi Sulawesi, khususnya Kota Makassar dengan Kabupaten Tana Toraja sebagai kawasan/destinasi wisata dapat semakin menarik dan meningkatkan wisatawan.

Selanjutnya untuk mewujudkan sistem transportasi terpadu yang efektif dan efisien, maka perencanaan sistem transportasi Kabupaten Tana Toraja harus diselaraskan dengan arahan yang tertuang dalam rencana tata ruang Kota Makassar. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan dan perencanaan transportasi di masa mendatang tidak menimbulkan berbagai permasalahan, sehingga tatanan sistem transportasi Kabupaten Tana Toraja berkembang sesuai dengan rencana yang diharapkan, dimana perencanaan sistem transportasi tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan harus dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh batas wilayah administratif wilayah.

Sistem transportasi Kabupaten Tana Toraja hanya terbentuk oleh sistem transportasi darat, yakni transportasi jalan dan bandar udara umum. Seiring dengan pengembangan wilayah Kabupaten Tana Toraja sebagai kawasan wisata dan keterkaitan wilayah dengan Kota Makassar sebagai Kota Inti, maka Kabupaten Tana Toraja memiliki peranan dalam mewujudkan sistem transportasi multimoda, baik antarmoda maupun intermoda. Adapun kawasan transportasi pada Kabupaten Tana Toraja memiliki luasan seluas 186,46 hektare yang terdapat di Kecamatan Makale Kecamatan Mengkendek, dan Kecamatan Rantetayo.



### **Perumahan adat Sillanan**

berada di Lembang Sillanan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Tana Toraja. Daya tarik dari perkampungan yang sudah berusia sekitar 974 tahun ini adalah Tongkonan dan rumah adat Toraja serta kuburan alam atau liang batu yang dilengkapi dengan kasopi pada dinding bukit batu. Kasopi merupakan patung dari orang yang sudah meninggal atau Tau-tau yang dipahat dalam bentuk pohon.



### **Tongkonan Papa Batu'**

Tongkonan ini sangat disakralkan oleh warga. Ukuran kira-kira 3x10 meter. Ada beberapa hal yang tidak kita temukan pada tongkonan lain.





## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja sepenuhnya didasarkan pada analisis data pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Permasalahan Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia/dicapai.

Dari hasil analisis data pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah teridentifikasi sejumlah permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian dan harus diselesaikan dalam jangka panjang yakni sebagai berikut :

##### **3.1.1 MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN**

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tana Toraja yang membutuhkan penyelesaian dalam jangka panjang adalah kemiskinan. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja masih mencatat angka dua digit, yaitu 12,48 persen (2023). Angka ini relatif lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan (8,70 persen). Angka ini juga telah menempatkan Kabupaten Tana Toraja pada urutan keenam tingkat kemiskinan tertinggi, dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Jeneponto, Luwu, Enrekang dan Luwu Utara. Meskipun penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan kecenderungan yang positif dalam rentang waktu yang panjang, namun dalam satu dekade terakhir, penurunan angka kemiskinan berjalan relatif lambat.

Beberapa penyebab tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja antara lain, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki penduduk miskin, tidak bekerja (menganggur) atau bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak memberi balas jasa ekonomi (gaji atau upah) yang memadai,



terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan publik, rendahnya akses penduduk miskin terhadap sumber daya ekonomi, dan perlindungan dan jaminan sosial yang tidak mampu menjangkau seluruh rumah tangga dan penduduk miskin.

### **3.1.2 RENDAHNYA TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT**

Permasalahan utama berikutnya adalah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini setidaknya tercermin dari rendahnya pendapatan per kapita. Pada tahun 2023, menurut data BPS, pendapatan per kapita Kabupaten Tana Toraja hanya sebesar Rp 32,38 juta per orang per tahun. Angka ini telah menempatkan Kabupaten Tana Toraja pada posisi kedua terendah dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Jeneponto. Pendapatan per kapita Kabupaten Tana Toraja hanya sekitar setengah dari pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Selatan (Rp 69,70 juta per orang per tahun). Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Kota Makassar yang merupakan daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, pendapatan per kapita Kabupaten Tana Toraja hanya sekitar seperlima.

Rendahnya pendapatan per kapita Kabupaten Tana Toraja terkait dengan rendahnya tingkat produktivitas penduduk akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, mata pencaharian penduduk yang masih bertumpu pada sektor pertanian, kurang berkembangnya industri pengolahan hasil-hasil pertanian, terbatasnya lapangan kerja yang memberi balas jasa ekonomi yang baik, kurang berkembangnya sentra-sentra ekonomi, dan tidak meluasnya aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

### **3.1.3 RENDAHNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah juga merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tana Toraja. Hal ini dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tana Toraja yang hanya sebesar 71,01 pada tahun 2023. Angka ini masih berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan (74,60) dan Nasional (74,39). Rendahnya IPM Kabupaten Tana Toraja telah menempatkan daerah ini pada posisi ketiga terendah di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bone.



Ada dua penyebab utama rendahnya IPM di Kabupaten Tana Toraja yaitu rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tana Toraja hanya 8,60 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Angka ini berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan (8,76) Begitu pula dengan pengeluaran per kapita, hanya sebesar Rp. 8,02 juta per orang per tahun, jauh di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan (Rp. 11,84 juta per orang per tahun).

### **3.1.4 BELUM MEMADAINYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAERAH**

Belum memadainya ketersediaan infrastruktur daerah juga menjadi salah satu permasalahan utama di Kabupaten Tana Toraja. Permasalahan infrastruktur daerah yang paling menonjol adalah terbatasnya infrastruktur telekomunikasi. Para era digital saat ini, ketersediaan jaringan telekomunikasi menjadi suatu keniscayaan, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Tana Toraja yang *blank spot*. Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, masih ada 15 dari 159 lembang/kelurahan di Kabupaten Tana Toraja yang belum dapat dijangkau oleh jaringan telekomunikasi.

Masih adanya beberapa wilayah yang *blank spot* diakibatkan karena operator jaringan seluler tidak membangun *Tower Base Transceiver Station (BTS)* sebagai titik utama dalam jaringan telekomunikasi seluler pada daerah tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan telekomunikasi mempertimbangkan jumlah pengguna yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan biaya operasional pembangunan BTS yang cukup besar sehingga hal tersebut dianggap tidak menguntungkan perusahaan.

### **3.1.5 BELUM MEMADAINYA FASILITAS PENDUKUNG PARIWISATA**

Fasilitas pendukung pariwisata yang belum memadai merupakan permasalahan yang juga harus mendapatkan perhatian. Kabupaten Tana Toraja merupakan pintu gerbang pariwisata di Indonesia Timur dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sehingga pariwisata merupakan potensi utama Kabupaten Tana Toraja. Namun hal tersebut tidak didukung dengan penyediaan 3A (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas) yang



memadai. Selain itu, pengelolaan destinasi wisata baru yang ada di kecamatan atau lembang/kelurahan juga masih sangat minim.

Rendahnya kualitas konektivitas antar kecamatan dan lembang/kelurahan serta kurangnya kreativitas masyarakat lokal menjadi faktor penghambat pengembangan sektor pariwisata, sehingga merugikan pengembangan ekonomi lokal. Peningkatan konektivitas menjadi kunci untuk mempercepat pergerakan barang, jasa, dan wisatawan antar wilayah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

### **3.1.6 BELUM OPTIMALNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Tata kelola pemerintahan yang belum optimal juga menjadi permasalahan utama di Kabupaten Tana Toraja. Indeks SPBE di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 tercatat hanya 1,70 dan masih di kategori kurang. Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi hanya mencapai 43,54 dan hingga saat ini belum ada satu pun Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tana Toraja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM).

Rendahnya capaian tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja karena belum adanya kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur SPBE serta belum memiliki perencanaan strategis yang mengatur terkait SPBE. Selain itu, kurangnya koordinasi, masih adanya ego sektoral, kualitas Sumber Daya Aparatur yang kurang mumpuni serta penerapan *reward and punishment* bagi ASN yang tidak maksimal juga menjadi penyebab rendahnya capaian tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja.

### **3.1.7 PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

Penurunan kualitas lingkungan hidup juga menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Tana Toraja yang mengalami penurunan dari 74,27 pada tahun 2022 menjadi 70,38 pada tahun 2023.



Penurunan IKLH disebabkan oleh menurunnya indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Belum adanya regulasi terkait perlindungan mata air yang dapat mencegah pencemaran terhadap sumber-sumber mata air dan air baku menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas air di Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan menurunnya kualitas udara disebabkan oleh meningkatnya polusi kendaraan, pembakaran sampah dan aktivitas pembangunan.

### **3.1.8 BELUM OPTIMALNYA RESILIENSI SOSIAL BUDAYA DAN BENCANA**

Belum optimalnya resiliensi terhadap sosial budaya dan bencana di Kabupaten Tana Toraja menjadi permasalahan utama yang perlu segera di atasi. Hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan kebudayaan yang pada tahun 2023 tercatat hanya 52,68 serta Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Tana Toraja yang berada pada kategori tinggi merupakan ancaman serius yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Tana Toraja. Selain itu, kondisi perubahan iklim, kerentanan sosial budaya dan risiko bencana semakin meningkat, mengakibatkan dampak yang merugikan terhadap keberlanjutan masyarakat dan lingkungan.

Ketidakeimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya lokal menjadi salah satu akar masalah. Perubahan iklim telah mempercepat kerusakan lingkungan dan situs-situs budaya bersejarah di Tana Toraja. Upaya untuk menjaga dan merestorasi warisan budaya harus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi resiliensi, mengingat betapa pentingnya identitas budaya dalam memperkuat ketahanan masyarakat.

## **3.2 ISU STRATEGIS**

Isu strategis perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu-isu strategis baik secara global, nasional dan daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan dan berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang



di Tana Toraja. Sebagai faktor eksternal dalam proses penyelenggaraan pembangunan, isu strategis ini tidak semuanya dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah sehingga mitigasi sangat di perlukan untuk mencegah dampak-dampak negatif yang akan di alami dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tana Toraja.

### **3.2.1 ISU GLOBAL**

#### **3.2.1.1 Perubahan Iklim**

Perubahan iklim adalah ancaman global yang mendapat perhatian semua negara, termasuk Indonesia. Laporan World Economic Forum 2024 menyebutkan bahwa hingga tahun 2034, dunia akan mengalami krisis perubahan sistem bumi akibat perubahan iklim. Secara ilmiah, perubahan iklim adalah perubahan signifikan dalam pola cuaca global atau regional selama periode panjang, baik disebabkan oleh proses alami maupun aktivitas manusia. United Nations menyatakan bahwa sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, menjadi penyebab utama perubahan iklim

Indikator utama mengukur perubahan iklim adalah temperatur bumi yang mengalami perubahan secara ekstrim dalam beberapa tahun terakhir. NASA merekam data suhu bumi sejak tahun 1995 hingga saat ini dan membuat ilustrasi kenaikan temperatur bumi. Grafik ini (grafik ilustrasinya dapat dilihat pada <https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature>) menunjukkan perubahan suhu permukaan bumi secara global dibandingkan dengan rata-rata jangka panjang dari tahun 1951 hingga 1980. Suhu rata-rata permukaan bumi pada tahun 2023 adalah yang terpanas dalam catatan sejak pencatatan dimulai pada tahun 1880 (sumber: NASA/GISS).

Di Indonesia, tanda-tanda perubahan iklim terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Analisis data BMKG mencatat anomali suhu tahunan yang dirasakan oleh masyarakat. Dari pengamatan tahun 1981 hingga 2023, tahun 2016 adalah yang terpanas dengan anomali 0,6 °C, sementara 2023 menempati urutan kedua dengan 0,5 °C. Meski data suhu permukaan tidak lengkap, Kabupaten Tana Toraja mengalami anomali cuaca, yaitu ketidaksesuaian antara cuaca aktual dan yang



diharapkan. Petani di Tana Toraja merasakan curah hujan tinggi saat musim kemarau dan musim kemarau yang panjang.

Anomali cuaca berdampak negatif pada sektor pertanian di Kabupaten Tana Toraja, terutama bagi petani kopi. Studi oleh Rizaldi dan Fitria Hanifia (2017) menunjukkan bahwa perubahan iklim mengurangi area yang sangat sesuai (S1) untuk tanaman kopi di Tana Toraja dan menurunkan produktivitasnya. Produktivitas kopi arabika diperkirakan turun sekitar 20 persen, sementara robusta turun sekitar 40 persen di hampir semua kecamatan dalam jangka panjang. Potensi penurunan produktivitas kopi sebesar 20 persen untuk arabika dan 40 persen untuk robusta akan memperlambat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian. Pada 2023, pertanian menyumbang 22,14 persen PDRB Kabupaten Tana Toraja, dominan dibandingkan sektor lainnya. Jika sektor pertanian terguncang akibat penurunan produktivitas kopi dan sektor lain tidak mampu mengompensasinya, pertumbuhan ekonomi Tana Toraja akan melambat. Tren perlambatan ini sudah terlihat mengikuti pola pertumbuhan sektor pertanian. Penurunan produktivitas kopi akibat perubahan iklim akan menurunkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan iklim juga berpotensi mengganggu sektor pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. Meski belum ada penelitian khusus tentang dampaknya di daerah ini, banyak studi menunjukkan bahwa pariwisata rentan terhadap cuaca ekstrem akibat perubahan iklim, menyebabkan kerugian ekonomi (Sharon F.H. Pang, Bob McKercher, dan Bruce Prideaux, 2013). Badai parah dapat mengganggu transportasi, pasokan listrik, dan air yang vital bagi industri ini (Mark Nicholls, 2014). Kabupaten Tana Toraja yang mengandalkan pariwisata alam akan merasakan dampak negatif perubahan iklim, seperti cuaca buruk, kerusakan objek wisata, dan keterbatasan akses ke destinasi wisata, yang mengurangi jumlah wisatawan. Jika gagal beradaptasi, peranan pariwisata terhadap ekonomi daerah akan menyusut, menyisakan destinasi indah tanpa pengunjung.

Pemerintah daerah perlu memberi perhatian terhadap dampak perubahan iklim dalam jangka panjang. Desain perencanaan jangka panjang harus memasukkan variabel dan kalkulasi perubahan iklim sebelum menetapkan



program. Adaptasi terhadap perubahan iklim, bisa menjadi salah satu strategi yang bisa diupayakan dalam jangka panjang agar dampak negatif dari perubahan iklim bisa diminimalkan.

### **3.2.1.2 Perkembangan Teknologi**

Diskusi tentang perkembangan teknologi belakangan masuk pada isu pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pekerjaan, interaksi sosial, pendidikan, kesehatan, dll. Laporan terbaru dari Microsoft dan LinkedIn berjudul *AI at Work Is Here; Now Comes the Hard Part Employees want AI, Leaders Are Looking For A Path Forward*. Dalam laporan tersebut, disimpulkan bahwa Tahun 2024 adalah tahun di mana AI di tempat kerja menjadi kenyataan. Penggunaan AI hampir dua kali lipat dalam enam bulan terakhir di tahun 2024, dengan 75 persen pekerja di sektor pengetahuan secara global memanfaatkannya. Karyawan yang mengalami kesulitan dengan kecepatan dan volume pekerjaan yang harus mereka selesaikan, memanfaatkan AI sendiri ke tempat kerja untuk membantu efisiensi pekerjaan.

Perkembangan teknologi memudahkan aktivitas harian, dari belanja hingga pekerjaan. Di bidang medis, teknologi menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan harapan hidup, termasuk di Kabupaten Tana Toraja. Kemajuan teknologi pertanian membuat pengolahan lahan lebih efisien, meningkatkan produksi pangan. Akses energi, listrik, sanitasi, dan air bersih di Tana Toraja juga meningkat berkat teknologi. Selain itu, teknologi komunikasi seperti Zoom dan Google Meet memungkinkan ASN Tana Toraja berkoordinasi dengan pemerintah pusat tanpa harus ke Jakarta, dan pekerja Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan dari klien luar negeri tanpa bertemu langsung.

Di balik dampak positifnya, teknologi juga memiliki dampak negatif yang perlu diantisipasi. Misalnya, dalam sektor pertanian, teknologi yang memudahkan penanaman, pemupukan, dan panen membuat pemilik lahan tidak lagi membutuhkan buruh tani. Mesin dianggap lebih efisien dan murah dibandingkan tenaga manusia, mengurangi penyerapan tenaga kerja dan berpotensi meningkatkan pengangguran di pedesaan.



Kecerdasan buatan (AI), meski belum optimal di Kabupaten Tana Toraja, berpotensi meningkatkan perekonomian daerah. Laporan Microsoft dan LinkedIn mencatat bahwa pekerja yang menggunakan AI merasa lebih efisien, fokus, kreatif, dan menikmati pekerjaan mereka. Jika AI digunakan secara luas di Tana Toraja, produktivitas pekerja akan meningkat karena rutinitas menjadi lebih efisien. Namun, AI juga berpotensi menghilangkan pekerjaan seperti teller bank, petugas pos, kasir, dan lainnya. Sebaliknya, pekerjaan baru terkait teknologi dan AI seperti spesialis AI, analis data, dan saintis diperkirakan akan berkembang.

Untuk mengantisipasi dampak negatif perkembangan teknologi, seperti pengurangan tenaga kerja, pemerintah perlu mengambil pendekatan multifaset yang mencakup pendidikan ulang dan pelatihan keterampilan baru bagi angkatan kerja, kebijakan perlindungan sosial yang ditingkatkan, dan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah tenaga kerja. Pertama, program pendidikan dan pelatihan ulang harus difokuskan pada keterampilan digital dan teknologi yang relevan dengan industri masa depan, sehingga tenaga kerja dapat beradaptasi dengan perubahan pasar kerja.

### **3.2.1.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Indonesia satu dari 190 negara yang menyepakati implementasi Sustainable Development Goals (tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB). Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah sebuah kesepakatan pembangunan yang baru, bertujuan untuk mendorong perubahan menuju pembangunan yang berkelanjutan, dengan berlandaskan pada hak asasi manusia dan kesetaraan, serta mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diimplementasikan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusivitas, untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal atau "No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target, bertujuan untuk melanjutkan upaya dan pencapaian dari Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015.



Sebelum menjadi kesepakatan global, isu pembangunan berkelanjutan muncul dari paradoks di mana pertumbuhan ekonomi cepat, tetapi menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan pendapatan. Istilah ini diperkenalkan dalam Laporan Brundtland yang diterbitkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan PBB pada 1987. Laporan ini mengamati bahwa meski banyak negara berhasil meningkatkan indikator pembangunan seperti menurunkan angka kematian bayi, menaikkan harapan hidup, meningkatkan literasi, dan meningkatkan produksi pangan, keberhasilan ini datang dengan biaya lingkungan yang tinggi, disebut sebagai kegagalan pembangunan.

Dilatarbelakangi oleh kegagalan pembangunan, Laporan Brundtland, yang berjudul "Our Common Future" ("Masa Depan Kita Bersama"), menyajikan gagasan dan rekomendasi tentang bagaimana mencapai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Laporan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan agar sumber daya alam dapat dikelola dengan bijaksana dan kepentingan semua orang dapat diakomodasi. Keseimbangan tersebut kini dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan.

Indonesia menyetujui untuk terlibat dalam pencapaian global tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah, baik di level pusat maupun daerah, harus mencapai tujuan dan target TPB yang telah ditetapkan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Regulasi ini mengatur tentang sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka nasional Tahun 2020-2024.

Selain itu, untuk memastikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Tana Toraja mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan, dibuat regulasi tentang kewajiban menyusun beragam dokumen tentang lingkungan hidup seperti Dokumen Rencana



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk jangka waktu 30 tahun dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menyesuaikan dengan periode dokumen rencana jangka panjang dan jangka menengah daerah. Tak hanya diwajibkan untuk menyusun, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan semua isu dan rekomendasi KLHS dalam dokumen rencana jangka panjang dan menengah untuk memastikan agenda pembangunan daerah menyeimbangkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Sebagai daerah yang bergantung pada sumber daya alam, Kabupaten Tana Toraja sangat berkepentingan pada implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Penting bagi daerah ini yang mengandalkan pertanian dan pariwisata, serta memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan akan memastikan sektor pariwisata tetap lestari dan menarik bagi wisatawan, serta memperpanjang umur sektor pertanian dengan mengurangi penggunaan pestisida kimia. Namun, menemukan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan sulit, karena pertumbuhan ekonomi sering kali merusak lingkungan, sementara pelestarian lingkungan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jika Tana Toraja berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi mungkin akan lambat tapi berkualitas, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

## **3.2.2 ISU NASIONAL**

### **3.2.2.1 Pemanfaatan Bonus Demografi**

Tana Toraja ke depan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2050. Dalam periode tersebut, Tana Toraja menjadi salah satu wilayah dengan usia produktif siap kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia



produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang ke depan.

Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan perlindungan lansia, tanpa mengabaikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

### **3.2.2.2 Pemindahan Ibu Kota Negara**

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. IKN bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur atau hanya memindahkan pusat pemerintahan belaka tetapi merupakan sebuah transformasi bangsa dalam mengatasi ketimpangan wilayah serta upaya membangun kota yang cerdas, hijau dan inklusif, yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. IKN diharapkan dapat menjadi motor penggerak kemajuan Indonesia di berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, budaya dan lingkungan. Pemindahan ibu kota negara memiliki potensi untuk membawa dampak positif yang signifikan bagi Provinsi Sulawesi Selatan secara umum dan secara khusus bagi Kabupaten Tana Toraja.

Dengan pemindahan IKN, diharapkan perekonomian Tana Toraja dapat memainkan peranan penting dalam akselerasi dan penguatan perekonomian baik



provinsi maupun nasional melalui pengelolaan sumber daya alam unggulan seperti pertanian dan pariwisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat melalui dukungan iklim investasi yang ditandai dengan kemudahan investasi pada pengelolaan sumber daya alam sehingga akan menempatkan Tana Toraja sebagai daerah yang sangat strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan siap untuk memanfaatkan segenap peluang yang tersedia, salah satunya adalah menjadi alternatif tempat berwisata bagi warga IKN karena Kabupaten Tana Toraja telah ditunjang oleh infrastruktur perhubungan udara yang memadai.

Oleh karena itu, percepatan realisasi pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) merupakan sebuah peluang besar bagi Kabupaten Tana Toraja untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dalam berbagai aspek, namun perlu diperhatikan bahwa untuk memaksimalkan peluang ini, diperlukan perencanaan dan implementasi yang matang dari pemerintah pusat dan daerah.

### **3.2.3 ISU DAERAH**

#### **3.2.3.1 Optimalisasi Pusat-Pusat Pertumbuhan**

Pengembangan wilayah Kabupaten Tana Toraja dalam tataran pembangunan nasional dan provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam tataran nasional dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah, namun hingga saat ini belum optimal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja. Pengembangan wilayah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada Kecamatan yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Sedangkan berdasarkan koridor pemerataan diarahkan pada kecamatan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.



Kabupaten Tana Toraja, dengan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/Kepala BPN, memiliki potensi besar untuk pengembangan berbagai sektor. Beberapa kecamatan dapat dijadikan kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dapat memberikan kontribusi signifikan pada sektor ekonomi lokal. Selain itu kawasan pariwisata seperti desa Bebo' Tumbang datu, Kuburan Adat Lemo, dan sejumlah destinasi wisata lainnya telah berkembang menjadi daya tarik yang memperkaya destinasi wisata di Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat menarik wisatawan untuk menikmati keindahan alam dan budaya

Potensi sumber daya air juga memperkaya Kabupaten Tana Toraja, dengan air tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, sumber air seperti Sungai Saddang, Sungai Noling memberikan dukungan vital untuk aktivitas pertanian dan pariwisata serta kebutuhan rumah tangga. Sungai Saddang sebagai sungai terpanjang di Sulawesi Selatan, memainkan peran kunci dalam memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, pertanian dan daya tarik pariwisata. Selain itu luasnya kawasan hutan lindung sebesar 84.240 Ha menunjukkan komitmen Kabupaten Tana Toraja dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Keberadaan hutan lindung ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat menciptakan harmoni antara pembangunan dan pelestarian lingkungan alam.

Dalam konteks kebijakan pengembangan wilayah, Kabupaten Tana Toraja mengacu pada PP no 26 tahun 2008 tentang RTRWN. Sebagai Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan, upaya penataan ruang difokuskan pada rehabilitasi dan revitalisasi, dengan harapan dapat mempercepat pembangunan wilayah. Rencana pembangunan infrastruktur seperti jaringan jalan pengumpan, bandar udara, eksplorasi Panas Bumi dan fasilitas wisata alam dan budaya mendukung pembangunan ekonomi di masyarakat. Terlebih lagi, rencana pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan bendungan dan embung menunjukkan keseriusan dalam mengelola aspek lingkungan. Begitu pula dengan rencana pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana, yang menekankan pengendalian pengembangan kota-kota dan kawasan budidaya untuk



melindungi dari risiko bencana alam. Secara keseluruhan, kabupaten Tana Toraja menjalani perkembangan yang berkelanjutan, menggabungkan potensi alam, kekayaan budaya, dan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan.

### **3.2.3.2 Kesenjangan Antar Wilayah**

Kesenjangan antar kawasan di Kabupaten Tana Toraja menjadi salah satu isu dalam pembangunan wilayah. Data indeks ketimpangan menunjukkan disparitas ekonomi yang mencolok di antara berbagai kecamatan. Kabupaten Tana Toraja memiliki beberapa kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi khususnya pada kecamatan terpencil, sementara kecamatan lain, seperti Kecamatan Makale menikmati tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

Indeks ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tana Toraja mencerminkan ketidakmerataan distribusi kekayaan. Meskipun terdapat potensi pertanian, perkebunan, dan pariwisata di beberapa kawasan, namun akses terhadap peluang ekonomi tidak merata. Ini dapat terkait dengan infrastruktur yang belum merata, kurangnya aksesibilitas terhadap pasar, serta perbedaan dalam pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

Kemantapan jalan juga menjadi faktor yang memengaruhi kesenjangan antar kawasan. Kondisi jalan yang tidak merata dapat menghambat aksesibilitas dan distribusi barang, memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Beberapa kecamatan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pusat-pusat ekonomi atau fasilitas kesehatan dan pendidikan, mengisolasi mereka dari peluang pembangunan yang lebih besar. Pengembangan jaringan jalan pengumpan yang diusulkan dalam kebijakan pembangunan wilayah dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antar kawasan. Prioritas dalam memperbaiki konektivitas jalan, terutama yang menghubungkan kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi, dapat membuka akses baru untuk pembangunan ekonomi. Ini dapat meningkatkan mobilitas penduduk, mempercepat distribusi barang, dan merangsang pertumbuhan ekonomi di kawasan yang terpinggirkan.



Dalam melihat kesenjangan antar kawasan, peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Program pembangunan harus dirancang dengan memperhitungkan kebutuhan dan potensi setiap kawasan. Dukungan untuk pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, dan pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan perlu menjadi fokus utama. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Kawasan pariwisata yang berkembang dapat menciptakan peluang pekerjaan lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor pariwisata ini didistribusikan secara merata di seluruh kawasan.

Melalui upaya bersama dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, diharapkan kesenjangan antar kawasan di Kabupaten Tana Toraja dapat diminimalkan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga menciptakan dasar yang lebih kokoh untuk pembangunan berkelanjutan di seluruh kabupaten.

### **3.2.3.3 Hilirisasi Sumber Daya Alam**

Kabupaten Tana Toraja, sebagai gerbang menuju Indonesia Timur, memiliki potensi besar dalam hierarki sumber daya alamnya untuk mendukung Industrialisasi Kawasan Timur dan menjadi salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan yang terdekat dengan Ibu Kota Negara (IKN). Melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, kabupaten ini dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Data menunjukkan bahwa industri pengolahan kecil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Sektor pengolahan hasil sumber daya alam seperti kopi, coklat, dan tenun tradisional merupakan daya tarik utama bagi industri kecil dan UMKM di Kabupaten Tana Toraja. Produk-produk tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan pengakuan dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Data menunjukkan bahwa peningkatan produksi dan nilai tambah produk lokal



dapat menjadi kunci kesuksesan dalam hierarki sumber daya alam kabupaten ini. Keberhasilan hierarki sumber daya alam juga terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Dukungan untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pelaku UMKM menjadi esensial untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk penguatan jaringan distribusi dan pemasaran.

Sejalan dengan visi IKN, Kabupaten Tana Toraja dapat menjadi pusat produksi dan pengolahan sumber daya alam di kawasan timur Indonesia. Data menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur seperti jalan dan transportasi dapat membuka aksesibilitas yang lebih baik untuk distribusi produk, mendorong pertumbuhan industri, dan mempercepat integrasi ekonomi nasional. Namun, tantangan terkait infrastruktur dan aksesibilitas masih harus diatasi. Peningkatan jalan dan transportasi, terutama yang menghubungkan ke wilayah lain di Indonesia Timur, menjadi kunci untuk memastikan produk-produk lokal dapat mencapai pasar secara efisien. Data menunjukkan bahwa perbaikan kondisi jalan dan transportasi dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan industri pengolahan kecil dan UMKM di Kabupaten Tana Toraja.

Selain itu, dukungan kebijakan yang terarah dapat mempercepat proses hierarki sumber daya alam. Langkah-langkah kebijakan yang mendukung UMKM, seperti penyederhanaan regulasi dan fasilitasi akses ke pasar, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri pengolahan kecil. Melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, Kabupaten Tana Toraja dapat memperkuat posisinya sebagai gerbang menuju Indonesia Timur. Dengan peningkatan investasi dalam industri pengolahan kecil dan UMKM, kabupaten ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap IKN dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.



**Rambu Solo'** Dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman merupakan ritual yang paling penting, tak heran kalau biaya upacara pemakamam tersebut bernilai hingga mencapai milyaran rupiah. Upacara Adat Rambu Solo sering juga disebut upacara penyempurnaan kematian, karena orang yang meninggal baru dianggap benar-benar meninggal setelah seluruh prosesi upacara ini dilengkapi. Jika belum, maka orang yang meninggal tersebut hanya dianggap sebagai orang "sakit" atau "*to makula*", sehingga ia tetap diperlakukan seperti halnya orang hidup, yaitu dibaringkan di tempat tidur dan diberi hidangan makanan dan minuman, bahkan selalu diajak berbicara.





## BAB IV

### VISI DAN MISI DAERAH

#### 4.1. VISI

Pengertian Visi dalam RPJPD ini adakah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN dan Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045. Visi daerah menunjukkan mengenai apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat atau *stakeholder* pembangunan daerah yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Visi daerah juga menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Rumusan Visi RPJPD Kabupaten Tana Toraja mengacu pada Visi RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**, dan Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 yaitu **“Sulawesi Selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai dan keselarasannya dengan Visi RPJPN dan Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan, maka rumusan Visi RPJPD Kabupaten Tana Toraja 2025-2045 adalah sebagai berikut :

#### **“TANA TORAJA PRODUKTIF, MAJU DAN BERKELANJUTAN”**

Visi di atas mencerminkan cita-cita bersama masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk menjadi daerah yang produktif, maju dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya secara berkelanjutan.

**Produktif** adalah kondisi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2045 yang ditandai dengan penduduk yang produktif, yaitu penduduk yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk barang dan jasa. Meningkatnya produktivitas penduduk pada gilirannya akan memperkuat daya saing daerah, sehingga mampu bersaing di panggung ekonomi regional dan nasional. Untuk



memperkuat daya saing daerah diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan dan dukungan infrastruktur yang memadai, kemajuan teknologi dan inovasi yang progresif, skala ekonomi dan ukuran pasar yang luas, dan institusi dan kebijakan pemerintah daerah yang kuat.

**Maju** adalah kondisi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2045 dimana masyarakat hidup sejahtera, terbebas dari kemiskinan, dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan merata serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Kondisi maju tersebut juga ditandai oleh kualitas manusia yang unggul, dimana masyarakat Tana Toraja memiliki derajat kesehatan, derajat pendidikan, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) yang memungkinkannya mempunyai kualitas modal manusia.

**Berkelanjutan** adalah kondisi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2045 yang hidup dalam kualitas lingkungan hidup yang terpelihara serta mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan untuk menjamin keterpenuhan kebutuhan hidup generasi berikutnya. Berkelanjutan juga merupakan kondisi Kabupaten Tana Toraja yang memiliki tata kelola yang baik dimana prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan kepada hukum termanifestasikan dalam pemerintahan yang didalamnya partisipasi masyarakat sipil termanifestasikan secara substantif.

**Tabel 4.1**

Keselarasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan  
RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045
(1)	(2)	(3)
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan	Tana Toraja Produktif, Maju dan Berkelanjutan



## 4.2. SASARAN VISI

Visi RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) sasaran visi beserta indikator dan target kinerjanya sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
Keselarasan Sasaran Visi  
RPJPD Prov. Sulawesi Selatan dan RPJPD Kab. Tana Toraja Tahun 2025-2045

No	RPJPD Prov. Sulsel Tahun 2025-2045				RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045						
	Sasaran Visi	Indikator	Base Line 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base Line 2025	Target 2045			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1. PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	76,58 - 77,35	422,16 - 497,92	Meningkatnya pendapatan per kapita	1. PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	35,46	223,34			
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	71,31	275,29					2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	8,00	13,30
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	12,95 - 13,05	18,62 - 19,92							
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	7,30-7,89	0,19-0,69	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	3. Tingkat Kemiskinan (%)	10,01	0,69			
		5. Gini Ratio (Indeks)	0,371 - 0,376	0,309 - 0,332		4. Gini Ratio (Indeks)	0,346	0,306			
		6. Kontribusi PDRB Provinsi Sulsel terhadap Nasional (%)	3,21	3,23		5. Kontribusi PDRB Kab. (%)	1,43	1,69			
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-6,30	6,90-8,94		6. Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,32	8,09-8,34			
3	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	54-55	75-80	Meningkatnya daya saing daerah	7. Indeks Inovasi Daerah	18,62	51,62			
		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,00		8. Indeks Daya Saing Daerah	3,19	3,74			
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks modal manusia	0,52	0,69	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	9. Indeks Pembangunan Manusia	71,57	79,93			
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,00	89,74	Berkurangnya intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	10. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	0,82	45,25			
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,60	84,75		11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,30	78,53			



Untuk menjamin pencapaian sasaran visi, maka target tersebut dibagi atas empat tahap dimana setiap tahapan memiliki jangka waktu lima tahun. Sasaran visi, indikator dan target kinerja untuk setiap tahapan lima tahunan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3**  
Sasaran Visi, Indikator dan Target Kinerja Setiap Tahapan  
RPJPD Kab. Tana Toraja Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Base Line 2025	2029	2034	2039	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pendapatan per kapita	1. PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	35,45	79,98	128,46	177,95	223,34
		2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	8,00	9,78	10,94	13,36	13,30
2	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	3. Tingkat Kemiskinan (%)	10,01	7,68	5,35	3,02	0,69
		4. Gini Ratio (Indeks)	0,346	0,336	0,326	0,316	0,306
		5. Kontribusi PDRB Kab. (%)	1,43	1,55	1,64	1,69	1,69
		6. Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,32	7,38-7,57	7,62-7,80	7,86-8,05	8,09-8,34
3	Meningkatnya daya saing daerah	7. Indeks Inovasi Daerah	18,62	25,22	33,47	41,72	51,62
		8. Indeks Daya Saing Daerah	3,19	3,33	3,46	3,60	3,74
4	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	9. Indeks Pembangunan Manusia	71,57	73,24	75,33	77,42	79,93
5	Berkurangnya intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	10. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	0,82	3,78	9,89	27,66	45,25
		11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,30	75,15	76,20	77,26	78,53

### 4.3. MISI

Pengertian Misi dalam RPJPD ini adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Tana Toraja untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan Tahun 2045. Upaya umum tersebut bersifat menggerakkan perubahan secara transformatif, bukan sekedar evolusi ataupun reformasi. Transformasi menjadi keniscayaan agar Tana Toraja dapat berkontribusi signifikan terhadap tercapainya cita-cita nasional untuk berposisi sebagai lima besar kekuatan ekonomi di dunia pada tahun 2045 dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Rumusan misi RPJPD Kabupaten Tana Toraja terdiri atas



upaya umum terkait substansi transformasi, upaya umum terkait landasan transformasi, dan upaya umum terkait kerangka implementasi transformasi. Rumusan Misi RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan transformasi sosial**, dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
2. **Mewujudkan transformasi ekonomi**, difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau serta pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja.
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas**, difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.
4. **Mewujudkan ketahanan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas ekonomi makro daerah**, ditekankan pada upaya menciptakan sebuah lingkungan yang harmonis, aman dan ekonomis yang stabil. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan jaringan sosial dan komunitas, memastikan keamanan dan ketertiban dengan kerja sama erat antara masyarakat dan aparat penegak hukum serta mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Pendekatan ini juga melibatkan pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Dengan menjamin keamanan, ketertiban dan stabilitas ekonomi Tana Toraja bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung untuk pertumbuhan dan



kemajuan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus menjaga keutuhan dan kesejahteraan jangka panjang bagi warganya.

5. **Mewujudkan pariwisata yang unik, eksotik dan ramah lingkungan**, dititik beratkan pada upaya mengembangkan dan mempromosikan kekayaan budaya serta keindahan alam khas daerah dengan pendekatan yang berkelanjutan. Melalui penonjolan keunikan budaya seperti upacara adat dan rumah tradisional Tongkonan serta eksplorasi potensi alam yang eksotik termasuk pegunungan dan lembah, pariwisata Tana Toraja diharapkan dapat menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Selain itu, praktik-praktik wisata berkelanjutan diterapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, edukasi tentang kesadaran lingkungan kepada wisatawan dan masyarakat lokal serta pengembangan ekowisata yang minim dampak negatif. Strategi ini didukung oleh peningkatan infrastruktur, promosi intensif dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pertumbuhan kepariwisataan yang berkualitas dan berdampak positif bagi ekonomi lokal serta kelestarian budaya dan alam Tana Toraja.
6. **Mewujudkan konektivitas antar Kecamatan dan Lembang/Kelurahan serta peningkatan kualitas SDA dan lingkungan secara berkelanjutan**, diarahkan pada usaha meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan dan memastikan setiap wilayah terhubung dengan baik melalui infrastruktur yang efisien sambil menjaga keberlanjutan alam dan lingkungan. Dengan mengimplementasikan solusi yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, penanaman vegetasi dan penerapan teknologi ramah lingkungan, Tana Toraja berkomitmen untuk menjaga keindahan alam dan kearifan lokalnya. Seiring dengan itu, peningkatan konektivitas antarwilayah diharapkan akan merangsang pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing dan menciptakan lingkungan yang seimbang antara pembangunan dan keberlanjutan.
7. **Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**, difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi



standar kualitas tinggi tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Dengan fokus pada keberlanjutan, upaya pembangunan mencakup penggunaan teknologi hijau, penerapan desain ramah lingkungan, dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam. Sarana dan prasarana yang dikembangkan diharapkan dapat mendukung kebutuhan masyarakat, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus melindungi kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Dengan komitmen pada pengembangan yang ramah lingkungan, Kabupaten Tana Toraja berusaha mencapai keseimbangan yang optimal antara pembangunan fisik dan pelestarian alam untuk mewujudkan visi daerah yang berkelanjutan hingga tahun 2045.

8. **Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas yang unggul berlandaskan nilai budaya untuk kesinambungan pembangunan**, diarahkan pada mendorong dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kreativitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sambil memastikan bahwa setiap inovasi dan kemajuan tetap menghormati dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Toraja sehingga dapat mencapai kesinambungan pembangunan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan misi RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.4**

Keselarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

No	RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045
	Agenda	Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi
3		Transformasi tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas



No	RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045
	Agenda	Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro	Mewujudkan ketahanan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas ekonomi makro daerah
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan pariwisata yang unik, eksotik dan ramah lingkungan
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan konektivitas antar Kecamatan dan Lembang/Kelurahan serta peningkatan kualitas SDA dan lingkungan secara berkelanjutan
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8		Kesinambungan Pembangunan	Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas yang unggul berlandaskan nilai budaya untuk kesinambungan pembangunan



**Sirope (sirompa)** Smerupakan salah satu tempat pekuburan atau pemakaman batu pahat pada tebing batu kapur dengan tempat pemakaman purba yang terbuat dari kayu (erong) serta beberapa patung. Kompleks pemakaman Sirope ini milik dari kaum bangsawan yang ada di sekitar wilayah Lion Tondok Iring. Masyarakat setempat membuat erong dengan cara membuat liang kubur lalu digantung pada batu cadas atau tebing.





### Seni Musik dan Tari

Suku Toraja melakukan tarian dalam beberapa acara, kebanyakan dalam upacara penguburan. Tarian tersebut untuk menunjukkan rasa duka cita, dan untuk menghormati sekaligus menyemangati arwah almarhum karena sang arwah akan menjalani perjalanan panjang menuju akhirat dan juga untuk merayakan Hari Pengucapan Syukur.

Alat musik tradisional Toraja adalah suling bambu yang disebut Pa'suling. Suling berlubang enam ini dimainkan pada banyak tarian, seperti pada tarian Ma'bondensan, ketika alat ini dimainkan bersama sekelompok pria yang menari dengan tidak berbaju dan berkuku jari panjang. Suku Toraja juga mempunyai alat musik lainnya, misalnya Pa'pelle yang dibuat dari daun palem dan dimainkan pada waktu panen dan ketika upacara pembukaan rumah.



## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

#### 5.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Kabupaten Tana Toraja yang dilaksanakan secara bertahap per lima tahun dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Tana Toraja. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi daerah.

Arah Kebijakan untuk mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Kabupaten Tana Toraja, dilaksanakan secara bertahap yaitu :

**A. Tahapan Pertama (Periode 2025-2029) adalah Perkuatan Fondasi Transformasi.**

Pada tahap ini, transformasi sosial dititikberatkan pada terpenuhinya pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang inklusif. Penguatan pelayanan dasar kesehatan melalui perluasan akses dan kemudahan pelayanan kesehatan primer dan jaminan kesehatan, peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Penguatan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan melalui percepatan wajib belajar 13 tahun dengan fokus pada penuntasan seluruh anak usia dini mendapat akses pendidikan anak usia dini (PAUD), perluasan akses layanan pendidikan, dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Penguatan perlindungan sosial melalui perluasan akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan serta optimalisasi integrasi dan akurasi layanan perlindungan sosial.

Transformasi ekonomi diarahkan pada hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset dan inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital, pembangunan Kota Makale dan Ibukota Kecamatan sebagai pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan riset dan inovasi.



Transformasi tata kelola difokuskan pada penguatan pengembangan kelembagaan inovatif, tepat fungsi, bersih, SDM ASN yang berkualitas, kebijakan pembangunan berdasarkan bukti, penerapan manajemen risiko, perencanaan dan pengendalian pembangunan, pelayanan publik melalui teknologi informasi yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil.

Pembangunan ketahanan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada pengembangan budaya hukum yang mengedepankan keseimbangan transformasi tata kelola ketenteraman dan ketertiban masyarakat, akuntabel berbasis digital dan penguatan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai. Stabilitas ekonomi daerah ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

Pariwisata yang unik, eksotik dan ramah lingkungan diarahkan pada peningkatan kualitas sektor kepariwisataan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata serta daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya pariwisata yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Pembangunan konektivitas antar kecamatan dan lembang/kelurahan serta peningkatan kualitas SDA dan lingkungan secara berkelanjutan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dengan penguatan kerjasama antar kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, Penuntasan RDTR beberapa Kota Kecamatan sebagai penyokong Ibukota Makale. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk air bersih dan air layak minum,



sanitasi aman, persampahan) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok.

Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas yang unggul berlandaskan nilai budaya untuk kesinambungan diarahkan pada pengembangan sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global.

**B. Tahapan Kedua (Periode 2030-2034) adalah Akselerasi Transformasi yang Diartikan bahwa Telah Terwujud Fondasi Transformasi yang Kuat.**

Pada tahap ini, transformasi sosial dititikberatkan pada peningkatan pembangunan manusia yang sehat, inklusif, aman bencana melalui percepatan pembangunan sumberdaya manusia yang inovatif dan produktif. Percepatan wajib belajar 13 tahun lebih dikembangkan dengan fokus pada penguatan pendidikan vokasi. Penguatan kelembagaan untuk pelayanan kesehatan di wilayah sulit akses, pemberdayaan kader kesehatan dan perluasan upaya promotif dan preventif menjadi fokus dalam mencapai pembangunan manusia yang sehat. Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif lebih melembaga pada tahap ini.

Transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan wilayah serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi beserta penguasaan teknologi menengah dan tinggi.

Transformasi tata kelola difokuskan pada peningkatan fungsi kelembagaan yang kolaboratif, adaptif, inklusif berbasis teknologi informasi, SDM ASN yang sejahtera dan berkompeten serta masyarakat sipil yang partisipatif.

Pembangunan ketahanan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter, adaptifnya pengelolaan fiskal



terhadap guncangan perekonomian serta optimalnya pengelolaan sektor keuangan.

Pariwisata yang unik, eksotik dan ramah lingkungan diarahkan pada pembangunan Infrastruktur Pusat Informasi Daerah, Pusat Informasi Pariwisata, Pusat aktivitas seni dan budaya, jaringan komunikasi elektronik secara terintegrasi, dan infrastruktur pendukung pariwisata lainnya dalam rangka peningkatan daya saing perekonomian yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan kelembagaan.

Pembangunan konektivitas antar Kecamatan dan Lembang/Kelurahan serta peningkatan kualitas SDA dan lingkungan secara berkelanjutan diarahkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Penuntasan RDTR Kota Kecamatan sebagai penyokong Ibukota Makale.

Percepatan peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing yang merata antar kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas yang unggul berlandaskan nilai budaya untuk kesinambungan pembangunan diarahkan pada penguatan sektor unggulan, perluasan lingkup dan jenis kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global.

### **C. Tahapan Ketiga (Periode 2035-2039) adalah Perluasan Transformasi dan Tana Toraja Memulai Upaya untuk Melakukan Ekspansi Global.**

Pada tahap ini, transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan daya saing sumber daya manusia menjadi semakin cerdas, inovatif dan produktif serta kemudahan akses terhadap Pendidikan tinggi.



Transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan daya saing yang tinggi dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan rantai nilai, penguasaan teknologi menengah dan tinggi dan menjadi pintu gerbang Kawasan Sulawesi Selatan dalam ekonomi global. Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya kelembagaan, SDM ASN serta masyarakat sipil yang profesional dan akuntabel.

Pembangunan ketahanan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada pemantapan ketertiban dan keamanan sebagai daya tarik global, kawasan bebas korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan aset, perbaikan tata kelola melalui pendekatan Corruption Impact Assessment, paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil serta kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik dan ekonomi.

Pariwisata yang unik, eksotik dan ramah lingkungan diarahkan pada Pengembangan industri pariwisata budaya dan alam yang ramah lingkungan untuk mendukung fungsi Kabupaten Tana Toraja sebagai Kawasan Strategis Nasional, dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya dan kearifan lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur.

Pada Pembangunan konektivitas antar Kecamatan dan Lembang/ Kelurahan serta peningkatan kualitas SDA dan lingkungan secara berkelanjutan diarahkan pada peningkatan konektivitas yang berkualitas terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah.

Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada pemenuhan akses dan kualitas infrastruktur sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan) secara merata di seluruh wilayah.



Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas yang unggul berlandaskan nilai budaya untuk kesinambungan pembangunan diarahkan pada percepatan peningkatan daya saing sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala nasional dan global.

**D. Tahapan Keempat (Periode 2040-2045) adalah Tana Toraja Berhasil Mendukung Perwujudan Indonesia Emas 2045.**

Pada tahap ini, transformasi sosial dititikberatkan pada perwujudan manusia Tana Toraja yang berkualitas dan yang memiliki daya saing internasional melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni dan budaya yang tinggi.

Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan Tana Toraja sebagai Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terbaik 5 di Sulawesi Selatan.

Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang berintegritas, bersih, inovatif, adaptif, inklusif, profesional dan akuntabel.

Pembangunan ketahanan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada Tana Toraja menuju zero corruption dan terselamatkannya aset dan keuangan daerah, masyarakat damai yang taat hukum dan aparat penegak hukum yang berintegritas dan memiliki paradigma restoratif dengan berlandaskan hak asasi manusia, terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat, menguatnya pengelolaan fiskal dan sektor keuangan untuk menghadapi berbagai ancaman dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Pariwisata yang unik, eksotik dan ramah lingkungan diarahkan pada Perwujudkan pariwisata yang unik, eksotik dan ramah lingkungan difokuskan pada terwujudnya keunggulan sumber daya pariwisata, manusia pelaku pariwisata berkualitas, penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan Masyarakat, pelestarian situs warisan budaya komunitas lokal masyarakat Tana Toraja, dan Tana Toraja menjadi pusat tujuan wisata global.



Pembangunan konektivitas antar Kecamatan dan Lembang/Kelurahan serta peningkatan kualitas SDA dan lingkungan secara berkelanjutan diarahkan untuk menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di seluruh wilayah dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan untuk menjaga ketersediaan dan kualitas infrastruktur sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan) yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas yang unggul berlandaskan nilai budaya untuk kesinambungan pembangunan diarahkan pada perluasan kolaborasi peningkatan daya saing sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala nasional dan global.

Arah Kebijakan dijabarkan dan diformulasikan menurut tahapan lima tahunan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :



**Tabel 5.1**  
Arah Kebijakan Lima Tahunan Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

VISI (1)	MISI (2)	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP 1 2025-2029 (3)	TAHAP 2 2030-2034 (4)	TAHAP 3 2035-2039 (5)	TAHAP 4 2040-2045 (6)
TANA TORAJA MAJU, PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN	1. Mewujudkan transformasi sosial	Pada tahap ini, Transformasi sosial difitikberatkan pada terpenuhinya pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang inklusif. Penguatan pelayanan dasar kesehatan melalui perluasan akses dan kemudahan pelayanan kesehatan primer dan jaminan kesehatan, peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Penguatan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan melalui percepatan wajib belajar 13 tahun dengan fokus penuntasan seluruh anak usia dini mendapat akses pendidikan anak usia dini (PAUD), perluasan akses layanan pendidikan, dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Penguatan perlindungan sosial melalui perluasan akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, serta optimalisasi integrasi dan akurasi layanan perlindungan sosial	Pada tahap ini, Transformasi sosial difitikberatkan pada peningkatan pembangunan manusia yang sehat, inklusif, aman bencana melalui percepatan pembangunan sumberdaya manusia yang inovatif, dan produktif. Percepatan wajib belajar 13 tahun lebih dikembangkan dengan fokus pada penguatan pendidikan vokasi. Penguatan kelembagaan untuk pelayanan kesehatan di wilayah sulit akses, pemberdayaan kader kesehatan, dan perluasan upaya promotif dan preventif menjadi fokus dalam mencapai pembangunan manusia yang sehat. Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif lebih melembaga pada tahap ini	Transformasi sosial difitikberatkan pada penguatan daya saing sumber daya manusia menjadi semakin cerdas, inovatif dan produktif serta kemudahan akses terhadap pendidikan tinggi	Transformasi sosial difitikberatkan pada perwujudan manusia Tana Toraja yang berkualitas dan yang memiliki daya saing internasional melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan budaya yang tinggi
	2. Mewujudkan transformasi ekonomi	Transformasi ekonomi diarahkan pada hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset dan inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital, pembangunan Kota Makale dan	Transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, serta optimalisasi sumber-sumber	Transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan daya saing yang tinggi dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan	Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan Tana Toraja sebagai Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terbaik 5 di Sulawesi Selatan.



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP 1 2025-2029 (3)	TAHAP 2 2030-2034 (4)	TAHAP 3 2035-2039 (5)	TAHAP 4 2040-2045 (6)
(1)	(2)	ibukota Kecamatan sebagai pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan riset & inovasi.	pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi beserta penguasaan teknologi menengah & tinggi.	rantai nilai, penguasaan teknologi menengah dan tinggi, dan menjadi pintu gerbang Kawasan Sulawesi Selatan dalam ekonomi global. Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya kelembagaan, SDM ASN & masyarakat sipil yang profesional dan akuntabel.	
	<b>3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas</b>	Transformasi tata kelola difokuskan pada penguatan pengembangan kelembagaan inovatif, tepat fungsi, bersih, SDM ASN yang berkualitas, kebijakan pembangunan berdasarkan bukti, penerapan manajemen risiko, perencanaan dan pengendalian pembangunan, pelayanan publik melalui teknologi informasi yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil	Transformasi tata kelola difokuskan pada peningkatan fungsi kelembagaan yang kolaboratif, adaptif, inklusif berbasis teknologi informasi, SDM ASN yang sejahtera & berkompeten dan masyarakat sipil yang partisipatif.	Mewujudkan kelembagaan, SDM ASN & Masyarakat sipil yang profesional & akuntabel	Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan & kelembagaan yang berintegritas, bersih, inovatif, adaptif, inklusif, profesional & akuntabel
	<b>4. Mewujudkan ketahanan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas ekonomi makro daerah</b>	Pembangunan ketahanan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada pengembangan budaya hukum yang mengedepankan keseimbangan transformasi tata kelola ketenteraman dan ketertiban masyarakat, akuntabel berbasis digital, dan penguatan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai. Stabilitas ekonomi daerah dikekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga	Pembangunan ketahanan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter, adaptifnya pengelolaan fiskal terhadap guncangan perekonomian serta optimalnya pengelolaan sektor keuangan	Pembangunan ketahanan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada Tana Toraja menuju zero corruption dan terselamatkannya aset dan keuangan daerah; masyarakat damai yang taat hukum dan aparat penegak hukum yang berintegritas dan memiliki paradigma restoratif dengan berlandaskan hak asasi manusia, terwujudnya demokrasi substansial yang	



ARAH KEBIJAKAN				
TAHAP 1 2025-2029	TAHAP 2 2030-2034	TAHAP 3 2035-2039	TAHAP 4 2040-2045	
(3)	(4)	(5)	(6)	
keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan		bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi.		mengemban amanat rakyat, menguatnya pengelolaan fiskal dan sektor keuangan untuk menghadapi berbagai ancaman, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan
<p><b>5. Mewujudkan pariwisata yang unik, eksofik dan ramah lingkungan</b></p> <p>Peningkatan kualitas sektor kepariwisataan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata serta daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya pariwisata yang dilindungi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di wilayah Kabupaten Tana Toraja</p>	<p>Pembangunan Infrastruktur Pusat Informasi Daerah, Pusat Informasi Pariwisata, Pusat aktivitas seni dan budaya, jaringan komunikasi elektronik secara terintegrasi, dan infrastruktur pendukung pariwisata lainnya dalam rangka peningkatan daya saing perekonomian yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan kelembagaan</p>	<p>Pengembangan industri pariwisata budaya dan alam yang ramah lingkungan untuk mendukung fungsi Kabupaten Tana Toraja sebagai Kawasan Strategis Nasional, dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya dan kearifan lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur</p>	<p>Perwujudan pariwisata yang unik, eksofik dan ramah lingkungan difokuskan pada terwujudnya keunggulan sumber daya pariwisata, manusia pelaku pariwisata berkualitas; penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan Masyarakat, pelestarian situs warisan budaya komunitas lokal masyarakat Tana Toraja, dan Tana Toraja menjadi pusat tujuan wisata global.</p>	
<p><b>6. Mewujudkan konektivitas antar Kecamatan dan Lembang/Kelurahan serta peningkatan kualitas SDA dan lingkungan secara berkelanjutan</b></p> <p>Pada Pembangunan konektivitas antar Kecamatan dan Lembang/Kelurahan serta peningkatan kualitas SDA dan lingkungan secara berkelanjutan tahap ini diarahkan pada Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi</p>	<p>Pada Pembangunan konektivitas antar Kecamatan dan Lembang/Kelurahan serta peningkatan kualitas SDA dan lingkungan secara berkelanjutan tahap ini diarahkan pada Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi</p>	<p>Pada Pembangunan konektivitas antar Kecamatan dan Lembang/Kelurahan serta peningkatan kualitas SDA dan lingkungan secara berkelanjutan tahap ini diarahkan pada Peningkatan konektivitas berkualitas terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung dengan pengembangan energi baru</p>	<p>Pada Pembangunan konektivitas antar Kecamatan dan Lembang/Kelurahan serta peningkatan kualitas SDA dan lingkungan secara berkelanjutan tahap ini diarahkan pada Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah dengan dukungan tata kelola kelembagaan</p>	



ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4
		2025-2029 (3)	2030-2034 (4)	2035-2039 (5)	2040-2045 (6)
(1)	(2)		Baru dan Terbarukan. Penuntasan RDTR Kota Kecamatan sebagai penyokong Ibukota Makale.	terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah.	yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi
	<b>7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan</b>	Pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok	Percepatan peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing yang merata antar kawasan perkotaan dan perdesaan	Pemenuhan akses dan kualitas infrastruktur sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan) secara merata di seluruh wilayah.	Menjaga ketersediaan dan kualitas infrastruktur sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan) yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
	<b>8. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas yang unggul berlandaskan nilai budaya untuk kesinambungan pembangunan</b>	Pengembangan sektor unggulan dan kerja sama daerah dalam skala regional, nasional dan global	Penguatan sektor unggulan, perluasan lingkup dan jenis kerja sama daerah dalam skala regional, nasional dan global	Percepatan peningkatan daya saing sektor unggulan dan kerja sama daerah dalam skala nasional dan global	Perluasan kolaborasi peningkatan daya saing sektor unggulan dan kerja sama daerah dalam skala nasional dan global



## 5.2. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

### 5.2.1. SASARAN POKOK

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang progresif yang memuat 17 Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 Indikator Utama Pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

Sasaran pokok merupakan langkah awal yang cukup penting guna menggambarkan kondisi yang diinginkan dengan visi/misi pada akhir periode 20 (dua puluh) tahun dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan serta menjadi acuan dalam perumusan arah pembangunan jangka panjang daerah. Selanjutnya, sasaran pokok ini dijabarkan ke dalam arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan diukur pencapaiannya melalui indikator utama pembangunan. Sasaran pokok dibuat pada tiap butir misi untuk menjelaskan fokus dan keterkaitannya, diwakili dengan pilihan indikator kinerja beserta target kerjanya yang menjelaskan sasaran pokok dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun. Dengan memperhatikan visi dan misi serta arah pembangunan Kabupaten Tana Toraja, maka dirumuskan sasaran pokok pembangunan jangka panjang tahun 2025- 2045 sebagai berikut :

1. **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**, melalui pendekatan siklus hidup, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan.
2. **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**, dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas yang mengacu pada upaya untuk memberikan akses yang sama terhadap seluruh penduduk tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis.



3. **Terlindunginya kelayakan hidup masyarakat**, ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, risiko dan kerentanan termasuk akibat bencana dan perubahan iklim, agar masyarakat Tana Toraja menjadi masyarakat yang berkualitas, sehat dan produktif. Perlindungan sosial yang komprehensif, inklusif, dan adaptif dibutuhkan untuk memastikan para lansia, penyandang disabilitas, anak-anak hingga usia 6 tahun, pekerja informal dan berisiko, serta kelompok masyarakat rentan lainnya, terlindungi kelayakan hidupnya.
4. **Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi daerah**, dengan harapan produktivitas sektor ekonomi Tana Toraja tidak hanya bertumpu pada faktor produksi konvensional seperti penambahan kapital dan tenaga kerja, melainkan juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) yang secara signifikan akan lebih mengefisienkan penyediaan barang dan jasa serta meningkatkan daya saing usaha. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perhatian harus diberikan pada strategi kebijakan yang mendorong inovasi.
5. **Meningkatnya peranan ekonomi hijau dalam perekonomian daerah berbasis digital**, dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas produksi berbasis sumber daya alam dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Ekonomi hijau memberikan pendekatan makro-ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan fokus utama pada investasi, lapangan kerja dan keterampilan. Ekonomi hijau adalah fokus pada energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi dalam pembangunan ekonomi hijau dioptimalkan untuk memperluas akses untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil dan merata melalui pembangunan ekosistem digital Tangguh yang dapat mendukung perekonomian Tana Toraja salah satunya melalui penyediaan jaringan seluler pada titik blank spot.
6. **Meningkatnya investasi dan ekspor**, dalam arti bahwa Investasi dan ekspor menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi akan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan peningkatan ekspor akan mengurangi



tekanan defisit transaksi berjalan. Investasi dan ekspor diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Investasi di Tana Toraja diharapkan dapat berfokus pada sektor unggulan yang bisa memberikan serapan tenaga kerja yang tinggi, seperti sektor pertanian dan pariwisata yang akan meningkatkan produktivitas serta mendorong hasil pertanian dan pariwisata. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong investasi pada sektor yang mendorong pengembangan sumber daya manusia, transformasi digital, dan ekonomi yang berkelanjutan.

7. **Menurunnya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan**, dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Upaya untuk pemanfaatan potensi ekonomi pedesaan yang berorientasi pada keunggulan geografis dan sumber daya lokal, keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan pedesaan, dukungan anggaran dan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung kemajuan pedesaan sehingga dapat mengurangi migrasi desa ke kota, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. Perlu untuk membangun industri perdesaan serta industri lain yang terkait dengan industri perdesaan. Industri perdesaan didukung dengan sistem dan infrastruktur logistik dan rantai pasok perdesaan yang handal serta ekosistem bisnis berbasis digital, agar dapat menguatkan relasi antara desa dan kota.
8. **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif**, dimaksudkan untuk menyikapi tuntutan dinamisasi era mendatang, dimana pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis sehingga lebih cepat, responsif dan efisien. Tata kelola pemerintahan ini juga perlu disertai dengan peningkatan kualitas kepemimpinan yang mampu berpikir ke depan dan antisipatif, mampu mengkaji ulang hasil pemikiran dan mampu berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin. Perlu dilakukan perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya.



Digitalisasi layanan pemerintah kepada publik harus memberi kemudahan akses dan perluasan jangkauan pelayanan publik yang lebih responsif. Pengembangan inovasi perlu terus dikuatkan dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan responsif.

9. **Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum**, dengan harapan dapat mewujudkan rasa aman dan nyaman seluruh masyarakat untuk dapat beraktivitas dengan baik dan lancar setiap hari. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketenteraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk itu perlu mengoptimalkan upaya untuk menjamin terselenggaranya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman, mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
10. **Meningkatnya kapasitas fiskal daerah**, dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan sumber daya fiskal yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu perlu meningkatkan kinerja seluruh elemen fiskal daerah, meliputi pengelolaan dana transfer agar dapat mendorong perbaikan kualitas belanja daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal, pengelolaan APBD, menguatkan kemampuan perpajakan serta kerja sama antar daerah. Peningkatan kapasitas fiskal dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik serta optimalisasi peran sektor keuangan. Kapasitas fiskal Kabupaten Tana Toraja diharapkan semakin membaik dan meningkat hingga level yang tinggi.
11. **Meningkatnya daya saing daerah**, dimana pengembangan sektor unggulan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa daerah yang berdaya saing adalah daerah yang memiliki sektor unggulan. Meningkatkan daya saing daerah memerlukan kemampuan mengidentifikasi potensi unggulan daerah. Selain itu perlu memperkuat



infrastruktur ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan penguasaan teknologi dan menciptakan inovasi yang mampu menguatkan daya saing daerah serta memperluas kerja sama skala nasional dan internasional.

12. **Menguatnya ketahanan sosial budaya**, dimana era globalisasi membawa banyak dampak positif, seperti pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan pertukaran budaya yang lebih luas. Namun, di sisi lain globalisasi juga membawa tantangan dan ancaman di bidang sosial budaya. Diperlukan strategi yang tepat agar masyarakat dapat memaksimalkan manfaat positif globalisasi sambil mengatasi dampak negatifnya di bidang sosial budaya dan menjaga kelestarian budaya serta harmoni sosial. Lingkungan keluarga sangat penting sebagai ujung tombak dalam membangun ketahanan sosial budaya dalam keberagaman. Keluarga harus mampu menjaga dan menciptakan keharmonisan sosial, empati sosial dan ketimpangan serta anggota keluarga yang tidak kondusif. Melalui hal tersebut jaminan sosial budaya masyarakat dapat terwujud dengan baik.
13. **Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta ketahanan energi, air dan pangan**, mengingat pangan, energi, dan air merupakan kebutuhan dasar manusia dan ketiganya membentuk hubungan yang sangat erat, termasuk dampaknya terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan diperlukan ketahanan dalam kestabilan air, energi, pertanian dan ketersediaan akses distribusi untuk menghasilkan produk dengan kuantitas dan kualitas. Untuk memastikan kesinambungan penyediaan air bersih dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, diperlukan tata kelola lanskap yang optimal dan penting pula untuk mengelola ancaman terhadap pasokan dan kualitas air dalam menghadapi dunia yang semakin urban, degradasi bentang alam dan tantangan atas perubahan iklim. Ketahanan energi merupakan penyediaan jasa energi kepada konsumen secara adil, terjangkau, handal, efisien, ramah lingkungan, proaktif dan dapat diterima secara sosial. Pengembangan energi



terbarukan akan membawa ketahanan yang lebih besar di masa depan. Hutan memiliki peran penting dalam memperkuat energi, karena merupakan salah satu sumber energi terbarukan.

14. **Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim**, dimaksudkan untuk mewujudkan kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta komitmen yang jauh lebih kuat terhadap pelaksanaan kebijakan berbasis keberlanjutan lingkungan dan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan komitmen kuat untuk pelaksanaan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui, serta peningkatan kualitas keandalan infrastruktur terhadap bencana. Diperlukan pula penerapan strategi yang tepat untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim.

### 5.2.2. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah yang merupakan penjabaran dari sasaran pokok.

Arah Pembangunan Kabupaten Tana Toraja selama 20 tahun ke depan telah diselaraskan dengan Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum di dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 serta Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045. Arah Pembangunan Kabupaten Tana Toraja terdiri atas 17 poin yaitu :

- 1) Kesehatan Untuk Semua;
- 2) Pendidikan Berkualitas yang Merata;
- 3) Perlindungan Sosial yang Adaptif;
- 4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
- 5) Penerapan Ekonomi Hijau;
- 6) Transformasi Digital;



- 7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
- 8) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
- 9) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif;
- 10) Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan;
- 11) Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
- 12) Daya Saing Daerah Tinggi;
- 13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
- 14) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif;
- 15) Lingkungan Hidup Berkualitas;
- 16) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan; dan
- 17) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Penyelarasan Arah Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional dan Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.2**

Keselarasan Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, RPJPD Prov. Sulawesi Selatan dan RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

No.	Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Pembangunan RPJPD Prov. Sulsel Tahun 2025-2045	Arah Pembangunan RPJPD Kab. Tana Toraja Tahun 2025-2045
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IE1. Kesehatan untuk Semua	1. Kesehatan untuk Semua	1. Kesehatan Untuk Semua
	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	5. Penerapan Ekonomi Hijau
	IE 6. Transformasi Digital	6. Transformasi Digital	6. Transformasi Digital
	IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi



No.	Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Pembangunan RPJPD Prov. Sulsel Tahun 2025-2045	Arah Pembangunan RPJPD Kab. Tana Toraja Tahun 2025-2045
3	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif
4	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan	10. Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan
	IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
	IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	12. Kerja sama Antar Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi	12. Daya Saing Daerah Tinggi
5	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	15. Lingkungan Hidup Berkualitas
	IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
	IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Arah pembangunan Kabupaten Tana Toraja inilah yang diharapkan dapat menjadi penjabaran untuk mencapai sasaran pokok. Keterkaitan antara sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.3**

Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan  
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)
1. <b>Mewujudkan transformasi sosial</b>	1. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat	1. Kesehatan Untuk Semua
	2. Meningkatkan kualitas pendidikan Masyarakat	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
	3. Terlindunginya kelayakan hidup masyarakat	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2. <b>Mewujudkan transformasi ekonomi</b>	4. Meningkatkan produktivitas sektor ekonomi yang	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)
	didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi daerah	
	5. Meningkatnya peranan ekonomi hijau dalam perekonomian daerah berbasis digital	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru
	6. Meningkatnya investasi dan ekspor	6. Transformasi Digital
6. Mewujudkan konektivitas antar Kecamatan dan Lembang/Kelurahan serta peningkatan kualitas SDA dan lingkungan secara berkelanjutan	7. Menurunnya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
4. Mewujudkan ketahanan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas ekonomi makro daerah	9. Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif
	10. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	10. Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan
	11. Meningkatnya Daya Saing Daerah	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5. Mewujudkan pariwisata yang unik, eksotik dan ramah lingkungan	12. Menguatnya ketahanan sosial budaya	12. Daya Saing Daerah Tinggi
		13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	13. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta ketahanan energi, air dan pangan	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		15. Lingkungan Hidup Berkualitas
8. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas yang unggul berlandaskan nilai budaya untuk kesinambungan pembangunan	14. Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim	16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
		17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim



### **5.2.3 ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI**

Arah kebijakan transformasi Kabupaten Tana Toraja menggambarkan upaya transformasi Tana Toraja untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045 serta upaya transformasi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah serta mendukung pencapaian Visi Kabupaten Tana Toraja.

Arah kebijakan transformasi Kabupaten Tana Toraja dalam kerangka perwujudan Indonesia Emas diprioritaskan pada transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; keamanan daerah tangguh dan demokrasi berkeadilan; stabilitas ekonomi makro daerah; ketahanan sosial budaya dan ekologi; serta implementasi transformasi.

Dalam kerangka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045, arah kebijakan transformasi diarahkan untuk mencapai sasaran pokok yang dijabarkan dari arah pembangunan, yang secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.



**Tabel 5.4** Keterkaitan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan dengan Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Arah Kebijakan Transformasi			
				2025	2045				
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Kesehatan Untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	(5)	(6)	1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 2) Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis 3) Penguatan dan perwujudan upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah Kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim			
				74,37	78,15				
				82,33	100				
				2	Kesehatan Ibu dan Anak	a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	2,00	0	4) Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses 5) Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses
				23,20			5,20		
				3	Penanganan Tuberkulosis:	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	37,52	100	6) Pencegahan dan Penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen 7) Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisektor



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Arah Kebijakan Transformasi
				2025 (5)	2045 (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment successrate) (%)	72,91	100	8) Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya untuk daerah sulit akses dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam
			4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	88,55	100	9) Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis Masyarakat
			5 a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : i) Literasi Membaca	52,71	66,75-71,37	10) Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses
			ii) Numerasi	50,41	63,66-68,06	11) Peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,84	10,64-11,24	1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) secara terintegrasi sesuai kewenangan pemerintah kabupaten
						2) Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan Internet of Things (IoT).
						3) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
						4) Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah terbuka, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah terpencil



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Arah Kebijakan Transformasi	
				2025 (5)	2045 (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
3.	Terlindungnya Kelayakan Hidup Masyarakat	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	c) Harapan Lama Sekolah	13,98	14,69-14,94	5) Pemerataan kualitas antar satuan Pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulus dengan kualitas yang setara dan tingkat keberkajaan tinggi	
			6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	14,83	14,99-15,05	6) Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha.	
			7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	15,41	28,01	7) Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja	
			8 a) Tingkat Kemiskinan (%)	10,01	0,69	8) Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah seperti pertanian dan pariwisata	
			b) Indeks Gini	0,346	0,306	1) Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran	
			9 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	24,80	52,80	2) Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial	
			10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	48,49	82,66	3) Memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas	
							4) Mengembangkan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang baik dan responsif bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya
							5) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan dan daerah terpencil antara lain dengan



No. (1)	Sasaran Pokok (2)	Arah Pembangunan (3)	Indikator Utama Pembangunan (4)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (7)
				2025 (5)	2045 (6)	
						penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas
						6) Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil
4.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi yang Didukung Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,00	13,30	1) Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya dalam mineral, pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya
			12 Pengembangan Pariwisata			
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,67	1,97	2) Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya)
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	532.18 2	1.647.889	3) Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism).
			13 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) (Berdasarkan data PDRB Menurut Lap Usaha Kab/Kota pada Sektor 13 dan 17 BPS)	2,25	2,73	4) Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan
			14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			a) Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota	945	1.754	5) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Arah Kebijakan Transformasi
				2025 (5)	2045 (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b) Persentase koperasi sehat di kab/kota c) Return on Aset (ROA) BUMD (%) d) Produktivitas Pertanian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padi (T/Ha)</li> <li>• Jagung (T/Ha)</li> </ul>	21,24	56,64	6) Penguatan regulasi dan kelembagaan ekonomi serta infrastruktur ekonomi
				2,52	12,54	7) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
						8) Penguatan sektor pertanian, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
				6,89	8,49	
				7,70	9,10	
			15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,23	1,83	9) Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan dan industri
			16 a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	83,99	91,94	10) Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja perempuan
			b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	82,99	89,39	11) Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif
			17 Tingkat Penguasaan IPTEK : Indeks Inovasi Daerah	18,62	51,62	12) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok dalam rangka menunjang inovasi daerah
5.	Meningkatnya Peranan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Dalam Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Digital	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	18 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru a) Indeks Ekonomi Hijau	30,42	45,39	1) Peningkatan kapasitas sumber daya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Arah Kebijakan Transformasi
				2025 (5)	2045 (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b) Kontribusi Pilar Lingkungan terhadap Penerapan Ekonomi Hijau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas air</li> <li>• Indeks Kualitas udara</li> <li>• Indeks Kualitas Tutupan Lahan</li> </ul> c) Penerapan Ekonomi Biru :	74,15 79,63 64,69	78,15 85,63 66,06	2) Pengembangan jasa lingkungan dan imbal jasa lingkungan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivitas Perikanan Tangkap</li> <li>• Produktivitas Perikanan Budidaya</li> </ul> 19 a) Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	26,12 780,88	37,38 1,415,68	3) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah melalui pengembangan komoditas perikanan tangkap dan budidaya
		6. Transformasi Digital	b) Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika	49,53 91,75	100 100	1) Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dasar penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber 2) Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan
6.	Meningkatnya Nilai dan Kontribusi Investasi Serta Nilai Ekspor Terhadap Pembangunan Secara Optimal	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20 Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	10,243	7,763	1) Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Arah Kebijakan Transformasi
				2025 (5)	2045 (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Menurunnya Kesenjangan Pembangunan Antara Perkotaan dan Perdesaan	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran)	32,54	33,14	2) Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global
			22 Net Ekspor Barang dan Jasa (BPS, PDRB ADHK Kab/Kota Menurut Pengeluaran)	-6,425	-3,085	3) Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi
			23 Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan			
			a) Proporsi kontribusi PDRB ADHB kab/kota terhadap provinsi	1,43	1,69	1) Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif
			b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	57,60	100	2) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur terutama pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik
			c) Persentase desa mandiri	0,68	13,61	3) Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. 4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah 5) Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
				6) Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif		



No. (1)	Sasaran Pokok (2)	Arah Pembangunan (3)	Indikator Utama Pembangunan (4)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (7)
				2025 (5)	2045 (6)	
8.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif & Inovatif	24 Indeks Reformasi Hukum  25 Indeks SPBE	57,97  1,96	86,37  4,56	1) Optimalisasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah 2) Pembangunan dan pengembangan Big Data harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi 3) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE guna penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, dan pelebagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah 4) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi
			26 Indeks Pelayanan Publik : a) Survei Kepuasan Layanan Publik  b) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	72,40	92,20	5) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsif melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju zero Complain, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik yang responsif, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yang disediakan pemerintah 6) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah 7) Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Arah Kebijakan Transformasi
				2025 (5)	2045 (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			27 Indeks Penilaian Integritas			
			a) Indeks Survei Penilaian Integritas	65,61	87,21	8) Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
			b) Nilai MCP KPK	44	90	9) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tata kelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi
			c) Indeks Maturitas SPIP	2.781	4,00	10) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tata kelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi
9.	Terpeliharanya Ketenaran dan Keterlibatan Umum Daerah	10. Ketaatan Hukum Keterlibatan dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan	28 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100	1) Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial 2) Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif
			29 Persentase tindak kriminal yang ditangani	86,72	100	3) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko
			30 Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	6,66	30,00	4) Penguatan integritas partai politik
10.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31 Rasio Pajak Daerah terhadap PAD (%)	16,61	22,81	1) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD); aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD).
			32 Tingkat Inflasi (%)	4,68	1,68	2) Penguatan pengendalian inflasi daerah
			33 Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	3,22	9,99	3) Peningkatan kualitas iklim investasi serta pemberian kemudahan berinvestasi bagi para investor
			34 Persentase Keberadaan Perbankan di tiap kecamatan	26,32	100	4) Peningkatan kualitas iklim investasi serta pemberian kemudahan berinvestasi bagi para investor



No. (1)	Sasaran Pokok (2)	Arah Pembangunan (3)	Indikator Utama Pembangunan (4)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (7)
				2025 (5)	2045 (6)	
11.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	12. Daya Saing Daerah Tinggi	35 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	70,468	89,892	1) Peningkatan daya saing dan kerja sama daerah dalam skala regional, nasional dan global
			36 Indeks Daya Saing Daerah	3,19	3,74	2) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional
12.	Menguatnya Ketahanan Sosial Budaya	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37 a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	3,2	24,2	1) Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial
						2) Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal serta melindungi warisan budaya
						3) Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas inovasi
			b) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	77,75	97,95	4) Peningkatan sinergitas antara lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan. Intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat
						5) Pembinaan kerukunan antar umat beragama
						6) Penguatan pendidikan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama sejak dini
		14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	38 Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi (%)	100	100	7) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
			a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,08	98,49	8) Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
			b) Persentase Anak Korban Kekerasan (%)	0,027	0,003	9) Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan



No. (1)	Sasaran Pokok (2)	Arah Pembangunan (3)	Indikator Utama Pembangunan (4)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (7)
				2025 (5)	2045 (6)	
						sistem perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah
			40 Indeks Ketimpangan Gender	0,465	0,205	10) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
						11) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
						12) Pengintegrasian Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sektor
13.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Kefahanan Energi, Air dan Pangan	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41 Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati : a) Indeks pertanian (IP) padi	2,00	3,00	1) Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi 2) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif
			b) Proporsi sawah irigasi	42,38	80,49	3) Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian
			c) Produktivitas Budidaya Perikanan Darat	747,82	1,042	4) Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting
			d) Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn)	16,7	22,7	5) Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (melalui sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap
			42 Kualitas Lingkungan Hidup			6) Peningkatan produktivitas budidaya perikanan untuk pemenuhan konsumsi masyarakat
						7) Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Arah Kebijakan Transformasi
				2025 (5)	2045 (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<p>penguatan/pemanfaatan jasa ekosistem lingkungan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal</p> <p>8) Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan budaya setempat</p> <p>9) Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau</p> <p>10) Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mengatasi permasalahan kehutanan di Tana Toraja</p> <p>11) Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan</p> <p>12) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman</p> <p>13) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir</p> <p>14) Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani</p> <p>15) Pemenuhan akses pengumpulan serta pengolahan sampah dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah</p> <p>16) Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW Nexus</p>
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,30	78,53	
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	6,5	39,5	
			c) Pengelolaan Sampah			
			i) Timbunan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	10,77	90	
			ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	32,75	100	
		16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan			
			a) Ketahanan Energi			
			i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	224,81	301,39	



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Arah Kebijakan Transformasi
				2025 (5)	2045 (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b) Ketahanan Pangan			17) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain
			i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	9,19	4,36	18) Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang untuk meningkatkan derajat kesehatan
			ii) Indeks Ketahanan Pangan	77,03	80,43	19) penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah khususnya pada daerah terpencil atau terkena dampak bencana
			iii) Skor Pola Pangan Harapan	85,40	98,00	20) Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas
			c) Ketahanan air			21) Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim
			i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /defik)* (dihitung dari data SimSPAM)	0,222	0,642	22) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air
			ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	4,8	100	23) Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat
						24) Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum
						25) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air



No. (1)	Sasaran Pokok (2)	Arah Pembangunan (3)	Indikator Utama Pembangunan (4)	Target		Arah Kebijakan Transformasi (7)	
				2025 (5)	2045 (6)		
14.	Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Dan Mitigasi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44 Indeks Risiko Bencana	138.42	98.66	26) Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan, dan pengawasan kualitas air minum	
				1) Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan non struktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana			
				2) Pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai risiko akibat bencana alam dan perubahan iklim			
				3) Penegakan standar keandalan bangunan serta pemerajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim			
				4) Pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana			
				5) Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta implementasi pembangunan rendah karbon	0,82	45,25	
6) Peningkatan rehabilitasi hutan/lahan dan mempertahankan luas tutupan hutan minimal							
			45 Penurunan Emisi GRK (%)				



#### **5.2.4. INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

Indikator utama pembangunan merupakan alat ukur untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam mencapai sasaran pokok berdasarkan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan dan ketercapaian sasaran pokok, serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang nasional diperlukan indikator utama pengukur keberhasilan sesuai dengan koridor yang ditetapkan dalam kebijakan pembangunan nasional. Penyelarasan indikator utama pembangunan Kabupaten Tana Toraja dengan indikator utama pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan beserta targetnya disajikan pada tabel berikut ini.



**Tabel 5.5**  
Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 dan Penyerajarannya dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Arah Pembangunan

No.	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Prov. Sulsel				IUP RPJPD Kab. Tana Toraja			
		Indikator	Target		Indikator	Target			
			2025	2045		2025	2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	IE.1. Kesehatan Untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 2 Kesehatan Ibu dan Anak a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 3 Penanganan Tuberkulosis: a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment successrate) (%) 4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 5 a) Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : i) Literasi Membaca ii) Numerasi b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : i) Literasi Membaca ii) Numerasi	73,39 140 23,9 79 91,54 98 8,33-12,50 0,00-4,17	79,18 16 6,1 95 98 99,5 66,67-70,83 58,33-62,50	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 2 Kesehatan Ibu dan Anak a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan b) Jumlah Kematian Ibu c) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 3 Penanganan Tuberkulosis: a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment successrate) (%) 4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 5 a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : i) Literasi Membaca ii) Numerasi	74,37 82,33 2,00 23,20 37,52 72,91 88,55	78,15 100 0 5,20 100 100 100		
2	IE.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata								



No. (1)	Arah Pembangunan (2)	IUP RPJPD Prov. Sulsel				IUP RPJPD Kab. Tana Toraja			
		Indikator (3)	Target		Indikator (6)	Target			
			2025 (4)	2045 (5)		2025 (7)	2045 (8)		
3	IE.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,47	11,97-12,02	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,84	10,64-11,24		
		d) Harapan Lama Sekolah	13,80-13,81	15,27-15,31	c) Harapan Lama Sekolah	13,98	14,69-14,94		
		6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	12,81	12,81-13,96	6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	14,83	14,99-15,05		
		7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	76,58	90,00	7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang diformatkan	15,41	28,01		
		8 Tingkat Kemiskinan (%)	7,30-7,89	0,19 – 0,69	8 a) Tingkat Kemiskinan (%)	10,01	0,69		
					b) Indeks Gini	0,346	0,306		
		9 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,5-45,0	79,22	9 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	24,80	52,80		
		10 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	50	10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	48,49	82,66		
		11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,95-13,05	18,62-19,92	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,00	13,30		
		12 Pengembangan Pariwisata			12 Pengembangan Pariwisata				
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,51	2,40	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,67	1,97		
		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)	78,22	195,55	b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	532.182	1.647.889		
		13 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif provinsi terhadap PDB Ekonomi Kreatif (%)	2,68	2,97	13 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) (Berdasarkan data PDRB Menurut Lap Usaha Kab/Kota pada Sektor 13 dan 17 BPS)	2,25	2,73		
		14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				
4	IE.4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada level Provinsi (%)	10,24	13,08					



No.	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Prov. Sulsel				IUP RPJPD Kab. Tana Toraja			
		Indikator	Target		Indikator	Target			
			2025	2045		2025	2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
5	IE.5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	b) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	1,46	3,38	a) Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota	945	1.754		
		c) Rasio kewirausahaan Provinsi (%)	3,53	10,02	b) Persentase koperasi sehat di kab/kota	21,24	56,64		
		d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	3,53	10,02					
		e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,97	5,62	c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,52	12,54		
		f) Nilai Tukar Petani Pangan	98	115-117	d) Produktifitas Pertanian : • Padi (T/Ha) • Jagung (T/Ha)	6,89 7,70	8,49 9,10		
		g) Nilai Tukar Nelayan	112	120-122					
		15 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	3,80-4,10	2,63-3,64					
		16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,3	64,7	15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,23	1,83		
		17 Tingkat Penguasaan IPTEK : Indeks Kapasitas Inovasi			16 a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	83,99	91,94		
		18 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	82,99	89,39		
		a) Indeks Ekonomi Hijau	67,80	77,03	17 Tingkat Penguasaan IPTEK : Indeks Inovasi Daerah	18,62	51,62		
		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	53,85	79,69	18 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru				
					a) Indeks Ekonomi Hijau	30,42	45,39		
					Kontribusi Pilar Lingkungan terhadap Penerapan Ekonomi Hijau :				
					a) Indeks Kualitas air	74,15	78,15		
					b) Indeks Kualitas udara	79,63	85,63		
					c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	64,69	66,06		
					Penerapan Ekonomi Biru :				
			a) Produktifitas Perikanan Tangkap	26,12	37,38				
			b) Produktifitas Perikanan Budidaya	780,88	1,415,68				



No.	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Prov. Sulsel				IUP RPJPD Kab. Tana Toraja			
		Indikator	Target		Indikator	Target			
			2025 (4)	2045 (5)		2025 (7)	2045 (8)		
6	IE.6. Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	7,7	19	a) % layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi b) Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika	49,53	100
7	IE7.7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	8,67	5,25	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	10,243	7,763
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,07	38,92	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran)	32,54	33,14
		22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	6,8	12,9	22	Net Ekspor Barang dan Jasa (BPS, PDRB ADHK Kab/Kota Menurut Pengeluaran)	-6,425	-3,085
		23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan			23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan		
8	IE.8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	a)	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	1,47	1,81	a)	Proporsi kontribusi PDRB ADHB kab/kota terhadap provinsi	1,43	1,69
		b)	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	77,5	100	b)	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	57,60	100
		c)	Persentase desa mandiri	0,75	9,93	c)	Persentase desa mandiri	0,68	13,61
		24	Indeks Reformasi Hukum	79,9	100	24	Indeks Reformasi Hukum	57,97	86,37
9	IE.9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	25	Indeks SPBE	3,2	5,0	25	Indeks SPBE	1,96	4,56
		26	Indeks Pelayanan Publik	4,41	5,00	26	Indeks Pelayanan Publik :		
		a)	Survei Kepuasan Layanan Publik			a)	Survei Kepuasan Layanan Publik	72,40	92,20
		b)	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah			b)	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	85,18	89,88
		27	Indeks Integritas Nasional	73,95	89,08	27	Indeks Penilaian Integritas		
		a)	Indeks Survei Penilaian Integritas			a)	Indeks Survei Penilaian Integritas	65,61	87,21
		b)	Nilai MCP KPK			b)	Nilai MCP KPK	44	90
		c)	Indeks Maturitas SPIP			c)	Indeks Maturitas SPIP	2,781	4,00



No.	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Prov. Sulsel				IUP RPJPD Kab. Tana Toraja			
		Indikator	Target		Indikator	Target			
			2025 (4)	2045 (5)		2025 (7)	2045 (8)		
10	IE.10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial	(3)	28	100	28	100			
			29	81,91	29	86,72			
			30	Tinggi	30	6,66			
			31	0,9	31	16,61			
11	IE.11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	(3)	32	1,1-3,2	32	4,68			
			33	Tinggi	33	3,22			
			a)	61,60					
			b)	2,91					
12	IE.12. Kerja sama Antar Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi	(3)	c)	29.931.570,98					
			d)	58,4					
			34	99,04	34	26,32			
			35	90	35	70,468			
13	IE.13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	(3)	36	4,04	36	3,19			
			37	65,44-66,14	37	3,2			
			38	84,61-84,83	38	100			



No.	Arah Pembangunan	IUP RP JPD Prov. Sulsel				IUP RP JPD Kab. Tana Toraja			
		Indikator	Target		Indikator	Target			
			2025	2045		2025	2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
14	IE.14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39 a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga b) Indeks Perlindungan Anak c) Indeks Pembangunan Pemuda	70,34-70,35 61,37-62,48 54,67-55,42	75,33-75,42 75-85 69-75	39 a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga b) Persentase Anak Korban Kekerasan (%)	73,08 0,027	98,49 0,003		
15	IE.15. Lingkungan Hidup Berkualitas	40 Indeks Ketimpangan Gender 41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,348-0,344 0,537	0,163-0,122 0,634	40 Indeks Ketimpangan Gender 41 Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati : a) Indeks pertanian (IP) padi b) Proporsi sawah irigasi c) Produktivitas Budidaya Perikanan Darat d) Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn)	0,465 2,00 42,38 747,82 16,7	0,205 3,00 80,49 1,042 22,7		
16	IE.16. Berketahanan Energi, Air dan Pangan	42 Kualitas Lingkungan Hidup a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman c) Pengelolaan Sampah i) Timbunan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	77,60 12,83 11	84,75 60,00 90	42 Kualitas Lingkungan Hidup a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman c) Pengelolaan Sampah i) Timbunan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	74,30 6,5 10,77	78,53 39,5 90		
		43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan a) Ketahanan Energi i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar*) b) Ketahanan Pangan	1,680 298	5,355 338	43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan a) Ketahanan Energi i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) b) Ketahanan Pangan	224,81	301,39		



No.	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Prov. Sulsel				IUP RPJPD Kab. Tana Toraja			
		Indikator	Target		Indikator	Target			
			2025 (4)	2045 (5)		2025 (7)	2045 (8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,05	0,42	i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	9,19	4,36		
		c) Ketahanan air			ii) Indeks Ketahanan Pangan	77,03	80,43		
		i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)*	3,3	12,26	iii) Skor Pola Pangan Harapan	85,40	98,00		
		ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,01	100	c) Ketahanan air				
		44 Indeks Risiko Bencana	150,07	122,30-98,59	i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)* (dihitung dari data SimSPAM)	0,222	0,642		
		45 Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	4,8	100		
17	IE.17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	a) Kumulatif	6,53	32,56	44 Indeks Risiko Bencana	138,42	98,66		
		b) Tahunan	12,82	69,93	45 Penurunan Emisi GRK (%)	0,82	45,25		

Selanjutnya, untuk memberikan arahan pencapaian target indikator pembangunan jangka panjang pada pembangunan jangka menengah daerah, ditetapkan target capaian indikator pembangunan setiap periode 5 tahunan hingga akhir periode RPJPD di tahun 2045 seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.6**  
Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Berdasarkan Tahapan Pembangunan  
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Kab. Tana Toraja Indikator Utama Pembangunan	Base Line 2025	Target 2045	Tahap I 2025-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Kesehatan Untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,37	78,15	75,12	76,07	77,01	78,15
		2 Kesehatan Ibu dan Anak						
		a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	82,33	100	90,52	95,99	97,99	100
		b) Jumlah Kematian Ibu	2,00	0	2,00	1,00	0	0
		c) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,20	5,20	19,60	15,10	10,60	5,20
		3 Penanganan Tuberkulosis:						
		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	37,52	100	48,81	62,93	77,05	100
		b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment successrate) (%)	72,91	100	80,73	90,50	100	100
		4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	88,55	100	91,66	98,05	100	100
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :						
		i) Literasi Membaca	52,71	66,75-71,37	52,71-56,59	57,52-61,21	62,14-65,83	66,75-71,37
		ii) Numerasi	50,41	63,66-68,06	50,41-53,16	54,87-58,39	59,27-62,78	63,66-68,06
		b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,84	10,64-11,24	8,84-9,32	9,44-9,80	9,92-10,40	10,64-11,24
		c) Harapan Lama Sekolah	13,98	14,69-14,94	13,98-14,17	14,22-14,41	14,46-14,65	14,69-14,94



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Kab. Tana Toraja Indikator Utama Pembangunan	Base Line 2025	Target 2045	Tahap I 2025-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3. Terlindunginya Kelayakan Hidup Masyarakat	3. Perilindungan Sosial yang Adaptif	6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	14,83	14,99-15,05	14,83-14,87	14,88-14,93	14,94-14,97	14,99-15,05	
		7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	15,41	28,01	17,93	21,08	24,23	28,01	
4. Meningkatkan Produktivitas Sektor Ekonomi yang Didukung Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	8 a) Tingkat Kemiskinan (%)	10,01	0,69	7,68	5,35	3,02	0,69	
		b) Indeks Gini	0,346	0,306	0,336	0,326	0,316	0,306	
		9 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	24,80	52,80	30,40	37,40	44,40	52,80	
		10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	48,49	82,66	55,32	63,86	72,41	82,66	
		11 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	8,00	13,30	9,78	10,94	13,36	13,30	
		12 Pengembangan Pariwisata							
		c) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,67	1,97	1,73	1,81	1,88	1,97	
		b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	532.182	1.647.889	779.943	1.064.924	1.329.905	1.647.889	
		13 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) (Berdasarkan data PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab/Kota pada Sektor 13 dan 17 BPS)	2,25	2,73	2,34	2,46	2,58	2,73	
		14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD							
a) Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota	945	1.754	1.107	1.309	1.511	1.754			
b) Persentase koperasi sehat di kab/kota	21,24	56,64	28,32	37,17	46,02	56,64			
c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,52	12,54	4,53	7,03	9,54	12,54			
d) Produktivitas Pertanian :									
• Padi (T/Ha)	6,89	8,49	7,21	7,61	8,01	8,49			
• Jagung (T/Ha)	7,70	9,10	7,98	8,33	8,68	9,10			
15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,23	1,83	2,95	2,60	2,25	1,83			
16 a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	83,99	91,94	85,73	87,37	90,49	91,94			
b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	82,99	89,39	84,27	85,87	87,47	89,39			



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Kab. Tana Toraja Indikator Utama Pembangunan	Base Line 2025	Target 2045	Tahap I 2025-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5. Meningkatkan Peranan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Dalam Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Digital	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	17 Tingkat Penguasaan IPTEK :							
		Indeks Inovasi Daerah	18,62	51,62	25,22	33,47	41,72	51,62	
6. Meningkatkan Nilai dan Kontribusi Investasi Serta Nilai Ekspor Terhadap Pembangunan Secara Optimal	6. Transformasi Digital	18 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	30,42	45,39	34,16	37,90	41,65	45,39	
		Kontribusi Pilar Lingkungan terhadap Penerapan Ekonomi Hijau :							
		a) Indeks Kualitas air	74,15	78,15	74,95	75,95	76,95	78,15	78,15
		b) Indeks Kualitas udara	79,63	85,63	80,83	82,33	83,83	85,63	85,63
		c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan	64,69	66,06	64,96	65,30	65,65	66,06	66,06
7. Menurunkan Kesenjangan Pembangunan Antara Perkotaan dan Perdesaan	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penerapan Ekonomi Biru :							
		a) Produktivitas Perikanan Tangkap	26,12	37,38	28,37	31,19	34,01	37,38	37,38
6. Meningkatkan Nilai dan Kontribusi Investasi Serta Nilai Ekspor Terhadap Pembangunan Secara Optimal	6. Transformasi Digital	b) Produktivitas Perikanan Budidaya	780,88	1,415,68	907,84	1,066,54	1,225,24	1,415,68	
		19 a) Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	49,53	100	60,13	73,38	86,63	100	100
6. Meningkatkan Nilai dan Kontribusi Investasi Serta Nilai Ekspor Terhadap Pembangunan Secara Optimal	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	b) Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika	91,75	100	94,11	97,07	100	100	
		20 Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	10,243	7,763	9,747	9,127	8,507	7,763	7,763
7. Menurunkan Kesenjangan Pembangunan Antara Perkotaan dan Perdesaan	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran)	32,54	33,14	32,66	32,81	32,96	33,14	
		22 Net Ekspor Barang dan Jasa (BPS, PDRB ADHK Kab/Kota Menurut Pengeluaran)	-6,425	-3,085	-5,590	-4,755	-3,920	-3,085	-3,085
7. Menurunkan Kesenjangan Pembangunan Antara Perkotaan dan Perdesaan	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23 Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan							
		a) Proporsi kontribusi PDRB ADHB kab/kota terhadap provinsi	1,43	1,69	1,55	1,64	1,69	1,69	1,69
		b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	57,60	100	68,50	82,13	95,76	100	100
7. Menurunkan Kesenjangan Pembangunan Antara Perkotaan dan Perdesaan	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	c) Persentase desa mandiri	0,68	13,61	1,36	3,40	6,80	13,61	
		24 Indeks Reformasi Hukum	57,97	86,37	63,65	70,75	77,87	86,37	86,37



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP RPJPD Kab. Tana Toraja Indikator Utama Pembangunan	Base Line 2025	Target 2045	Tahap I 2025-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
8. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif & Inovatif	25 Indeks SPBE	1,96	4,56	2,48	3,13	3,78	4,56	
		26 Indeks Pelayanan Publik :							
9. Terpeliharanya Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Daerah	10. Ketaatan Hukum Keterlibatan dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan	a) Survei Kepuasan Layanan Publik	72,40	92,20	76,36	81,31	86,26	92,20	
		b) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	85,18	89,88	86,12	87,29	88,47	89,88	
		27 Indeks Penilaian Integritas							
		a) Indeks Survei Penilaian Integritas	65,61	87,21	69,93	75,33	80,73	87,21	
		b) Nilai MCP KPK	44	90	63	75	80	90	
		d) Indeks Maturitas SPIP	2,781	4,00	3,249	3,834	4,419	5,00	
10. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	28 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100	100	100	100	100	
		29 Persentase tindak kriminal yang ditangani	86,72	100	90,36	94,91	99,46	100	
		30 Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	6,66	30,00	10,00	16,66	23,33	30,00	
		31 Rasio Pajak Daerah terhadap PAD (%)	16,61	22,81	17,85	19,4	20,95	22,81	
11. Meningkatnya Daya Saing Daerah	12. Daya Saing Daerah Tinggi	32 Tingkat Inflasi (%)	4,68	1,68	4,08	3,33	2,58	1,68	
		33 Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	3,22	9,99	5,00	7,14	8,56	9,99	
12. Menguatnya Ketahanan Sosial Budaya	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	34 Persentase Keberadaan Perbankan di tiap kecamatan	26,32	100	47,37	63,16	84,21	100	
		35 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	70,468	89,892	75,824	83,769	85,536	89,892	
12. Menguatnya Ketahanan Sosial Budaya	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	36 Indeks Daya Saing Daerah	3,19	3,74	3,33	3,46	3,60	3,74	
		a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	3,2	24,2	7,4	12,65	17,9	24,2	
		b) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	77,75	97,95	81,19	85,49	89,79	97,95	
		38 Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	



Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	IUP RPJPD Kab. Tana Toraja Indikator Utama Pembangunan (3)	Base Line 2025 (4)	Target 2045 (5)	Tahap I 2025-2029 (6)	Tahap 2 2030-2034 (7)	Tahap 3 2035-2039 (8)	Tahap 4 2040-2045 (9)	
13. Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Ketahanan Energi, Air dan Pangan	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39 a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,08	98,49	78,17	84,52	90,87	98,49	
		b) Persentase Anak Korban Kekerasan (%)	0,027	0,003	0,022	0,016	0,011	0,003	
		40 Indeks Ketimpangan Gender	0,465	0,205	0,413	0,348	0,283	0,205	
	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41 Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati :							
		a) Indeks pertanian (IP) padi	2,00	3,00	2,00	2,50	2,500	3,00	
		b) Proporsi sawah irigasi	42,38	80,49	50,06	59,62	69,13	80,49	
		c) Produktivitas Budi daya Perikanan Darat	747,82	1,042	806,66	880,21	953,76	1,042	
	16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	42 Kualitas Lingkungan Hidup	d) Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn)	16,7	22,7	17,9	19,4	20,9	22,7
			43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan						
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,30	78,53	75,15	76,20	77,26	78,53	
b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		6,5	39,5	10	14,2	19,45	39,5		
c) Pengelolaan Sampah									
i) Timbunan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		10,77	90	20	43,33	66,67	90		
ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	32,75	100	80	86,67	93,33	100			
16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	a) Ketahanan Energi	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	224,81	301,39	240,93	261,09	281,24	301,39	
		b) Ketahanan Pangan							
	i) Prevalensi Ketidakkucupan Konsumsi Pangan (%)	9,19	4,36	8,22	7,74	5,81	4,36		



Sasaran Pokok (1)	Arah Pembangunan (2)	IUP RPJPD Kab. Tana Toraja Indikator Utama Pembangunan (3)	Base Line 2025 (4)	Target 2045 (5)	Tahap I 2025-2029 (6)	Tahap 2 2030-2034 (7)	Tahap 3 2035-2039 (8)	Tahap 4 2040-2045 (9)
		ii) Indeks Ketahanan Pangan	77,03	80,43	77,71	78,56	79,41	80,43
		iii) Skor Pola Pangan Harapan	85,40	98,00	87,92	91,07	94,22	98,00
		c) Ketahanan air						
		i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)* (dihitung dari data SimSPAM)	0,222	0,642	0,306	0,411	0,516	0,642
		ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	4,8	100	30	53,33	76,66	100
14. Meningkatkan Kapasitas Adaptasi Dan Mitigasi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44 Indeks Risiko Bencana	138,42	98,66	122,47	115,03	107,59	98,66
		45 Penurunan Emisi GRK Tahunan	0,82	45,25	3,78	9,89	27,66	45,25



### **5.3. ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

Arah pembangunan kewilayahan menggambarkan arah kebijakan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dengan tetap mengoptimalkan pengembangan potensi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan pada setiap daerah khususnya terkait dengan tata ruang dan pertanahan, pengelolaan kawasan perkotaan dan atau sistem permukiman, pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah berdasarkan transformasi pembangunan, landasan transformasi dan kerangka implementasi.

Dalam konteks perencanaan wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka dilakukan suatu kajian secara spesifik pada kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Tana Toraja. Kawasan Strategis Kabupaten Tana Toraja yang dimaksud adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Tana Toraja. Jenis kawasan strategis, antara lain adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, kawasan strategis dari sudut kepentingan pemanfaatan alam dan penggunaan teknologi.

#### **5.3.1. KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan dan merupakan program nasional yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan potensi strategis yang dimilikinya. Adapun Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari :

##### **A. Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja mempertimbangkan dengan kriteria :



- Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh.
- Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten.
- Memiliki potensi ekspor.
- Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah.
- Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
- Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.
- Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.
- Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi.
- Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.
- Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
- Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.
- Memiliki pusat pengembangan produk unggulan.
- Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pada kriteria di atas, maka KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja, yaitu:

- a. Kawasan perkotaan baru satelit bandar udara Toraja dan sekitarnya di Kecamatan Mengkendek.
- b. Kawasan desa wisata di koridor jalan lingkar pariwisata.
- c. Kawasan pengembangan ternak dan perkebunan Simbuang-Mappak di Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak.
- d. Kawasan pengembangan ternak dan perkebunan Masanda di Kecamatan Masanda.
- e. Kawasan agrowisata Gandangbatu Sillanan di Kecamatan Gandangbatu Sillanan.



- f. Kawasan perkebunan Kurra-Bittuang di Kecamatan Kurra dan Kecamatan Bittuang.
- g. Kawasan perkotaan satelit Bittuang di Kecamatan Bituang.
- h. Kawasan perkotaan satelit Ge'tengan di Kecamatan Mengkendek.
- i. Kawasan perkotaan satelit Rantetayo di Kecamatan Rantetayo.
- j. Kawasan perkotaan satelit Ulusalu-Malimbong-Rembon di Kecamatan Ulusalu, Kecamatan Malimbong dan Kecamatan Rembon;
- k. Kawasan perkotaan satelit Bonggakaradeng di Kecamatan Bonggakaradeng, dan
- l. Kawasan wisata alam Buntu Sarira dan wisata alam permandian Tilanga' di Kecamatan Makale Utara.

## **B. Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan.
- Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya.
- Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya.
- Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya.
- Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Dengan mempertimbangkan kriteria penetapan kawasan strategis di atas dikaitkan dengan kondisi sosial budaya di Kabupaten Tana Toraja, maka kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis adalah sebagai berikut.

- a. Kawasan Wisata Buntu Burake di Kecamatan Makale.
- b. Kawasan Wisata Buntu Kandora di Kecamatan Mengkendek.
- c. Kawasan Wisata Desa Adat Bebo' Tumbang Datu di Kecamatan Sangalla Utara.
- d. Kawasan Wisata Kaero-Makula di Kecamatan Sangalla'.



- e. Kawasan Wisata Kuburan Adat Lemo di Kecamatan Makale Utara.
- f. Kawasan Wisata Sillanan di Kecamatan Gandangbatu Sillanan.

### **C. Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Tana Toraja dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

- Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati.
- Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan.
- Memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian.
- Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro.
- Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- Memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam.
- Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Dengan mempertimbangkan kriteria penetapan kawasan strategis di atas dikaitkan dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Tana Toraja, maka kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten Tana Toraja dari sudut kepentingan fungsi dan daya lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Wisata Alam Pango-Pango di Kecamatan Makale Selatan.
- b. Kawasan Wisata Karst dan Danau Assa di Kecamatan Sangalla.
- c. Kawasan Wisata Ollon di Kecamatan Bongkaradeng.
- d. Kawasan Wisata Sarambu Assing di Kecamatan Bittuang.
- e. Kawasan Wisata Talondo Tallu di Kecamatan Bittuang

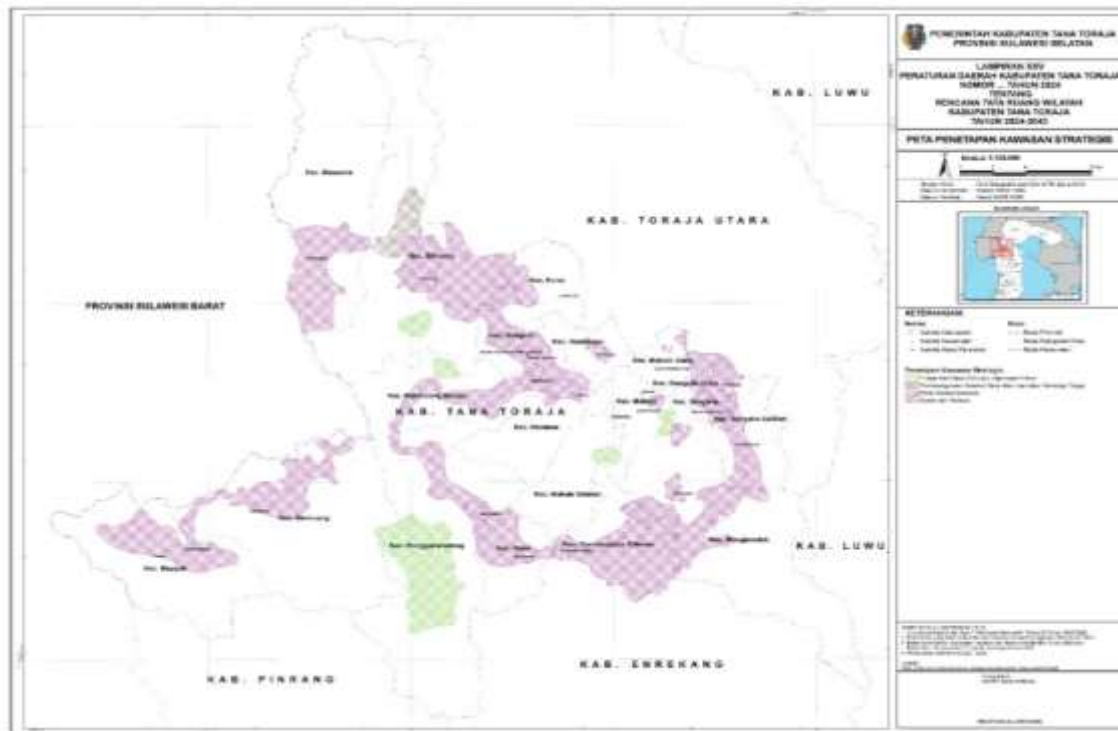


#### D. Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Teknologi Tinggi

Dengan mempertimbangkan kriteria penetapan kawasan strategis di atas dikaitkan dengan sudut kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi di Kabupaten Tana Toraja, maka kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten Tana Toraja dari sudut kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi adalah kawasan panas bumi Bittuang di Kecamatan Bittuang.

**Gambar 5.1**

Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Tana Toraja



Sumber : Rancangan RTRW Kab. Tana Toraja

#### 5.3.2. PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG

Konsep pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem pusat permukiman) yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.



Konsep pengembangan pusat permukiman Kabupaten Tana Toraja ditempuh dengan dua pendekatan yaitu pendekatan melalui pengembangan kegiatan dan pendekatan dengan menciptakan struktur ruang secara meluas ke arah kawasan-kawasan pinggiran. Gambaran secara lebih jelas konsep struktur ruang wilayah Kabupaten Tana Toraja diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Pengembangan melalui Optimalisasi Penataan Kawasan Pusat Kegiatan**

Kebutuhan optimalisasi melalui penataan Kawasan Pusat Kegiatan di Makale sebagai akibat dari kejenuhan dan ketidakefektifan pengaturan ruang kotanya. Indikasi-indikasi tersebut adalah :

- Kawasan pusat Kota Makale sering terjadi kemacetan lalu lintas khususnya pada jam-jam sibuk akibat bertumpuknya berbagai kegiatan.
- Harga lahan sangat tinggi dan ketersediaan lahan yang sangat terbatas sehingga sulit melakukan ekspansi/perluasan usaha.
- Pemisahan ruang yang tidak jelas akibat kurangnya pilihan ruang/tempat.
- Degradasi lingkungan seperti pencemaran lingkungan air, udara, dan sampah yang mulai mengancam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka upaya pengembangan Kota Makale dapat ditempuh dengan optimasi penataan kawasan pusat kegiatan kota. Optimalisasi ini diarahkan untuk membangkitkan kembali (revitalisasi) kawasan pusat kota yang mulai meredup. Revitalisasi ini dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- Pemisahan blok-blok yang jelas dalam kawasan dengan fungsi yang jelas pula.
- Melengkapi kawasan dengan fasilitas bongkar muat dan parkir sehingga tidak berada di bahu jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas.
- Melengkapi sarana dan prasarana mulai dari pergerakan, komunikasi, kebersihan, perangkutan, perdagangan, dan lain-lain.
- Penataan kawasan permukiman di pinggiran kawasan Perkotaan Makale terutama yang ada di sepanjang aliran sungai.



## **B. Pengembangan melalui Sistem Kegiatan Berjenjang**

Pengembangan sistem kegiatan berjenjang ditujukan untuk memberikan pemisahan yang tegas terhadap kegiatan-kegiatan yang berkembang saat ini. Hal ini juga ditempuh untuk memberikan pelayanan yang optimal antar pusat kegiatan.

Untuk mengembangkan kota maka diperlukan pemisahan jenjang kegiatan sehingga untuk kegiatan-kegiatan tertentu dan jenis tertentu maka tidak perlu harus menuju ke pusat kota. Sebagai contoh kegiatan perdagangan eceran untuk kebutuhan sehari-hari maka masyarakat dari kecamatan sekitarnya tidak perlu melakukan perjalanan menuju pusat kota di Makale.

Untuk memisahkan jenjang-jenjang dan skala pelayanan maka di masing-masing kecamatan harus mulai dikembangkan kegiatan tertentu, jenis tertentu, dan untuk skala tertentu (dalam hal ini kecamatan namun bisa juga skala kota tergantung jenis kegiatannya). Sementara itu kawasan pusat kegiatan di Kota Makale harus ditetapkan lebih tegas untuk jenis-jenis kegiatan, spesifikasinya, dan skala pelayanannya.

Dengan memperhatikan telaah-telaah yang ada maka konsep pengembangan kota melalui pemisahan jenjang kegiatan dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Kawasan pusat kegiatan kota hanya difungsikan untuk kegiatan perdagangan grosir, perkantoran, perguruan tinggi, dan pelayanan jasa dengan skala nasional, regional, dan kota.
- Di masing-masing pusat kecamatan dibentuk pusat-pusat perdagangan skala kecamatan dengan spesifikasi perdagangan eceran yang didukung transportasi lokal yang memadai. Pada node-node kecamatan dapat diikuti prasarana berupa sub terminal sebagai pendukung perdagangan eceran skala kecamatan.
- Fungsi-fungsi lain di luar perdagangan yang melayani skala kecamatan dapat diaglomerasikan dalam kawasan pusat perdagangan jenjang kecamatan.



### **C. Pengembangan Melalui Pembentukan Pusat Pertumbuhan Baru**

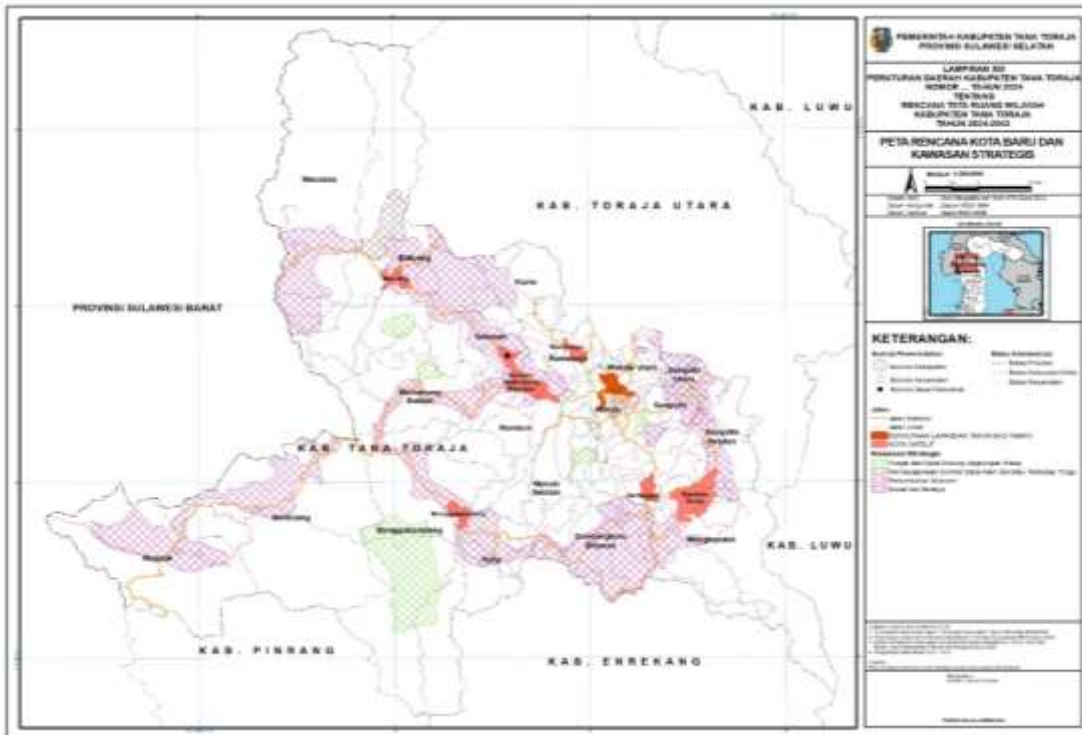
Pembentukan pusat pertumbuhan baru dimaksudkan sebagai magnet tandingan (Counter Magnet) bagi kawasan pusat kegiatan yang telah ada. Tanpa adanya pembentukan pusat pertumbuhan baru, kawasan pusat kegiatan hanya akan menjadi pusat tunggal (Single Nucleous) sehingga akan menarik seluruh kegiatan yang ada di wilayah hinterland. Konsekuensi ini akan menyebabkan hinterland tidak bisa tumbuh karena hanya bergantung pada kawasan pusat kegiatan, sementara kota lama akan mengalami berbagai permasalahan perkotaan, seperti permasalahan macet, kesembrautan penggunaan lahan, banjir, persampahan, dan lainnya.

Untuk melakukan pemerataan pertumbuhan maka pembentukan pusat pertumbuhan baru harus dilakukan untuk memberikan 'perlawanan' bagi pusat kegiatan lama. Disadari bahwa pusat lama selama ini telah mulai jenuh akibat tumpang tindih dan terlampauinya kapasitas daya tampung lahan. Kejenuhan perkembangan pusat kota yang dapat menjadi pendorong (Push Forces) bagi tumbuhnya pusat pertumbuhan baru. Selain itu, kota baru juga dikembangkan sebagai upaya untuk mengatasi pertumbuhan populasi yang pesat di kota-kota utama dan untuk meredakan tekanan pada infrastruktur dan sumber daya yang terbatas. Kawasan yang dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru berupa kawasan perkotaan baru satelit, baik kota baru yang terdapat dalam wilayah Perkotaan Makale maupun kota baru satelit di luar wilayah Perkotaan Makale, sebagai berikut :



**Gambar 5.2**

Peta Rencana Sebaran Kota Baru di Kabupaten Tana Toraja



Sumber : Rancangan RTRW Kab. Tana Toraja

**a) Kota Baru Perkotaan Lapandan-Tarongko-Tampo**

Kota baru satelit Perkotaan Lapandan-Tarongko merupakan rencana kota baru yang dikembangkan dalam wilayah Perkotaan Makale. Pembangunan Kota Baru Lapandan-Tarongko menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi kepadatan di Kota Makale. Melalui pembangunan kota baru Lapandan-Tarongko memungkinkan dilakukan pemisahan dari Kota Makale (sebagai kota utama) serta tekanan pada infrastruktur dan layanan di Kota Makale dapat berkurang.

Selain itu, membangun kota baru memberikan kesempatan untuk merencanakan dan membangun infrastruktur yang dapat menangani pertumbuhan populasi dengan lebih baik dan memperhitungkan sistem transportasi yang baik dari awal sehingga dapat mendorong pembangunan pusat-pusat ekonomi dan bisnis di kota baru. Dengan perencanaan yang baik, pembangunan kota baru dapat mempertahankan dan mempromosikan kawasan hijau, taman kota, dan



ruang terbuka, meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi penduduk. Demikian pula halnya dengan pengembangan perumahan yang lebih terjangkau di luar kota inti, serta dapat mencakup kontrol pertumbuhan yang terkendali, mencegah urban spiral yang tidak terkendali di sekitar kota inti.

Adapun profil umum kota baru satelit Perkotaan Lapandan-Tarongko, antara lain :

- Merupakan Kota Satelit Dalam Kota Makale yang terdapat di sebelah utara.
- Melintas rencana jalan lingkar pariwisata bagian barat (Middle Ring Road) Lamunan – Batupapan – Bungin dan terdapat permukiman swadaya.
- Penggunaan lahan pada umumnya kebun dan tanaman pangan (non LP2B), serta bukan daerah rawan bencana alam.

#### **b) Kota Baru Satelit Perkotaan Ge'tengan**

Kota baru satelit Perkotaan Ge'tengan di Kecamatan Mengkendek dalam tipologinya merupakan kota baru penunjang (supporting new town) yaitu kota satelit yang merupakan penunjang pertumbuhan Kota Makale sebagai kota induk, sehingga secara fungsional dan identitasnya sebagian besar tergantung kepada kota induknya, umumnya merupakan suatu kota tempat tinggal seperti kota satelit di pinggiran. Kota baru satelit Perkotaan Getengan merupakan kota baru satelit yang dikembangkan diantara Kota Makale dengan Duri Kabupaten Enrekang. Pembangunan kota baru satelit Perkotaan Ge'tengan dimaksudkan sebagai alternatif upaya memecahkan dan mengatasi masalah pertumbuhan permukiman tersebar yang tak terkendali serta menjadi penyangga perkembangan Kota Makale dari arah selatan.

Adapun profil kota baru satelit Perkotaan Ge'tengan, antara lain :

- Merupakan ibukota Kecamatan Mangkendek sehingga penggunaan lahannya sudah mencirikan kegiatan perkotaan.



- Terdapat aglomerasi fasilitas Pendidikan (SMA, PT), Pasar Tradisional, hotel bintang 4 (Hotel Sahid), serta terdapat potensi pariwisata yang strategis dikembangkan.
- Jaraknya dari Kota Makale kurang lebih 13 kilometer, dan secara geografi berada di antara Kota Makale dan Kota Enrekang (Kampung Duri) serta Dilintasi rencana jalan tol Makassar-Palopo.
- Kota Satelit Ge'tengan merupakan kota yang direncanakan dibangun dan dikembangkan pada saat suatu kota telah ada sebelumnya.
- Kota Satelit Ge'tengan merupakan kota kecil di Kabupaten Tana Toraja akan dibangun dan dikembangkan menjadi suatu kota yang lengkap dan ditingkatkan kemampuannya berhubung peningkatan fungsinya menjadi suatu kota fungsional tertentu.
- Kondisi topografi lahan relatif datar, bukan Hutan Lindung, dan bukan LP2B, serta bukan daerah rawan bencana alam.
- Melintas rencana jaringan air minum yang bersumber dari air baku Sungai Malillin.

### c) Kota Baru Satelit Rantetayo

Kota baru satelit Perkotaan Rantetayo di Kecamatan Rantetayo dalam tipologinya merupakan kota baru penunjang (supporting new town) yaitu kota satelit yang merupakan penunjang pertumbuhan Kota Makale sebagai kota induk, sehingga secara fungsional dan identitasnya sebagian besar tergantung kepada kota induknya, umumnya merupakan suatu kota tempat tinggal seperti kota satelit di pinggiran. Kota baru satelit perkotaan sebagian merupakan kota baru satelit yang dikembangkan di lokasi ex bandar udara Pongtiku. Arah pemanfaatan ruang lebih difokuskan pada pengembangan sosial budaya yang akan mendukung kepariwisataan di Kabupaten Tana Toraja.

Secara geografi, Kota Baru Satelit Rantetayo berada di antara Kota Makale dengan Kabupaten Toraja Utara. Pembangunan kota baru satelit



Perkotaan Rantetayo dimaksudkan untuk menyangga perkotaan di Kecamatan Kurra.

Adapun profil kota baru satelit perkotaan di Rantetayo, antara lain :

- Merupakan ibukota Kecamatan Rantetayo sehingga penggunaan lahannya sudah mencirikan kegiatan perkotaan.
- Terdapat jaringan jalan provinsi kolektor primer 3 yang menghubungkan Perkotaan Makale – Perkotaan Rantetayo-Perkotaan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, Perkotaan Rantetayo dan mendukung kegiatan perkotaan di Kecamatan Kurra di sebelah utara barat daya Perkotaan Rantetayo.
- Jaraknya dari Kota Makale kurang lebih 8 kilometer, dan secara geografi berada di antara Perkotaan Makale dengan Perkotaan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
- Terdapat aglomerasi fasilitas, ex Bandara Pongtiku, kesehatan (puskesmas), Pasar Tradisional, SD, SMP, SMA, dan SMK.
- Kota Satelit Rantetayo merupakan kota yang direncanakan dibangun dan dikembangkan pada saat suatu kota telah ada sebelumnya dan terintegrasi dengan Desa Wisata Tonglo.
- Kota Satelit Rantetayo merupakan kota kecil di Kabupaten Tana Toraja akan dibangun dan dikembangkan menjadi suatu kota yang lengkap dan ditingkatkan kemampuannya berhubung peningkatan fungsinya menjadi suatu kota fungsional tertentu.
- Terdapat sumber air Baku berasal dari IKK Rantetayo.
- Terdapat limitasi daerah rawan bencana alam longsor di sebelah utara dan sebelah barat.

#### **d) Kota Baru Satelit Perkotaan Bittuang**

Kota baru satelit Perkotaan Bittuang di Kecamatan Bitung dalam tipologinya merupakan kota baru penunjang (supporting new town) yaitu kota satelit yang merupakan penunjang pertumbuhan Kota Makale sebagai kota induk, sehingga secara fungsional dan identitasnya sebagian besar tergantung kepada kota induknya, umumnya



merupakan suatu kota tempat tinggal seperti kota satelit di pinggiran. Kota baru satelit Perkotaan Bittuang merupakan kota baru satelit yang dikembangkan di antara Kota Makale dengan Kota Mamasa Kabupaten Sulawesi Barat. Pembangunan kota baru satelit Perkotaan Bittuang dimaksudkan sebagai alternatif upaya memecahkan dan mengatasi masalah pertumbuhan permukiman tersebar yang tak terkendali serta menjadi penyangga perkembangan Kota Makale dari arah barat.

Adapun profil kota baru satelit Perkotaan Bittuang, antara lain :

- Merupakan ibukota Kecamatan Bittuang sehingga penggunaan lahannya sudah mencirikan kegiatan perkotaan.
- Merupakan pelintasan jalan Nasional dari Makale – Mamasa Sulbar dan rencana jalan lingkaran Pariwisata Toraja.
- Jaraknya dari Kota Makale kurang lebih 33 kilometer, dan secara geografi berada di antara Kota Makale dan Kota Mamasa Provinsi Sulbar.
- Terdapat aglomerasi fasilitas kesehatan (puskesmas), SMP SMA, Pasar Tradisional.
- Kota Satelit Bittuang merupakan kota yang direncanakan dibangun dan dikembangkan pada saat suatu kota telah ada sebelumnya dan terintegrasi dengan Desa Wisata Kole Palian, Balla, dan Patongloang.
- Kota Satelit Bittuang merupakan kota kecil di Kabupaten Tana Toraja akan dibangun dan dikembangkan menjadi suatu kota yang lengkap dan ditingkatkan kemampuannya berhubung peningkatan fungsinya menjadi suatu kota fungsional tertentu.
- Terdapat sumber air Baku berasal dari mata Air Balla.
- Terdapat limitasi daerah rawan bencana alam longsor di sebelah timur.

#### **e) Kota Baru Satelit Bandara Toraja Dan Sekitarnya**

Kota Baru Satelit Bandara Toraja Dan Sekitarnya di Kecamatan Mangkendek merupakan kota baru satelit penunjang yang akan



dikembangkan untuk mendukung keberadaan Bandar Udara Toraja (Toraja Airport).

Kota Baru Satelit Bandara Toraja Dan Sekitarnya merupakan kota baru satelit yang dikembangkan dengan konsep Aerotropolis yaitu kota yang berkembang didukung terminal dan bandara sebagai pusat pertumbuhan dan konektivitas ekonomi masyarakat. Konsep Aerotropolis merupakan sub wilayah perkotaan yang infrastruktur, tata guna lahan, dan ekonominya semua berpusat di bandara. Tujuan aerotropolis adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang meletakkan bandara sebagai pusat pertumbuhan dan konektivitas dengan pasar global.

Ke depan, aerotropolis ini menjadi bentuk integrasi bandara dengan kota di sekitarnya, yang kemudian mendorong pengembangan bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota metropolis tersebut.

**f) Kota Baru Satelit Bonggakaradeng**

Kota baru satelit Perkotaan Bonggakaradeng di Kecamatan Bonggakaradeng dalam tipologinya merupakan kota baru penunjang (supporting new town) yaitu kota satelit yang merupakan penunjang pertumbuhan Kota Makale sebagai kota induk, sehingga secara fungsional dan identitasnya sebagian besar tergantung kepada kota induknya, umumnya merupakan suatu kota tempat tinggal seperti kota satelit di pinggiran. Kota baru satelit Perkotaan Bonggakaradeng merupakan kota baru satelit yang dikembangkan di antara Kota Makale dengan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat. Pembangunan kota baru satelit Perkotaan Bonggakaradeng dimaksudkan untuk menyangga kota kecamatan yang ada di sekitarnya seperti Perkotaan Mappak, Perkotaan Simbuang, dan Perkotaan Rano. Selain itu, Kota Baru Satelit Bonggakaradeng merupakan upaya penyangga perkembangan Kota Makale dari arah barat.



Adapun profil kota baru satelit perkotaan Bonggakaradeng, antara lain :

- Merupakan ibukota Kecamatan Bonggakaradeng sehingga penggunaan lahannya sudah mencirikan kegiatan perkotaan.
- Terdapat jalan kolektor primer 4 yang merupakan bagian dari rencana jalan lingkaran pariwisata menghubungkan Perkotaan Bonggakaradeng dengan Kecamatan Rano sampai ke jalan provinsi di Kecamatan Gandangbatu Sillanan sebelah timur Perkotaan Bonggakaradeng. Selain itu, Perkotaan Bonggakaradeng akan terhubung dengan Kecamatan Simbuang, dan Kecamatan Mappak di sebelah barat sampai ke Kabupaten Pinrang.
- Jaraknya dari Kota Makale kurang lebih 26 kilometer, dan secara geografi berada di antara Kota Makale dengan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulbar.
- Terdapat aglomerasi fasilitas kesehatan (puskesmas), Koramil, SD, SMP, Pasar Tradisional.
- Kota Satelit Bonggakaradeng merupakan kota yang direncanakan dibangun dan dikembangkan pada saat suatu kota telah ada sebelumnya dan terintegrasi dengan Desa Wisata Ollon.
- Kota Satelit Bonggakaradeng merupakan kota kecil di Kabupaten Tana Toraja akan dibangun dan dikembangkan menjadi suatu kota yang lengkap dan ditingkatkan kemampuannya berhubung peningkatan fungsinya menjadi suatu kota fungsional tertentu.
- Terdapat sumber air Baku berasal dari mata Air Randanan.
- Terdapat limitasi daerah rawan bencana alam longsor di sekitarnya.

**Pa'ssura** (atau "tulisan") merupakan ukiran kayu perwujudan budaya Toraja. Setiap ukiran memiliki nama dan makna khusus. Motifnya biasanya adalah hewan dan tanaman yang melambangkan kebajikan, contohnya tanaman air seperti gulma air dan hewan seperti kepiting dan kecebong yang melambangkan kesuburan. Bentuk ukiran yang teratur dan geometris merupakan ciri umum dalam ukiran Toraja. Alam sering digunakan sebagai dasar dari ornamen Toraja, karena alam penuh dengan abstraksi dan geometri yang teratur.





**Rambu Tuka'** adalah upacara adat yang berhubungan dengan acara syukuran, misalnya acara pernikahan, syukuran panen dan peresmian rumah adat/tongkonan yang baru, atau yang selesai direnovasi; menghadirkan semua rumpun keluarga, dari acara ini membuat ikatan kekeluargaan di Tana Toraja sangat kuat. Semua Upacara tersebut dikenal dengan nama *Ma'Bua'*, *Meroek*, atau *Mangrara Banua Sura'*.





## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen tinggi seluruh pelaku pembangunan dan memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

#### 1. Konsistensi Perencanaan

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan perlu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah. RPJPD menjadi pedoman perumusan visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD ke RPJMD. Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan tujuan dan sasaran pada RPJMD, dan selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD.



Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/Master Plan/Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.

RJPPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan calon anggota DPRD Kabupaten.

## 2. Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah. Olehnya itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

## 3. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko. Pengendalian dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan efektif. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja serta mengoordinasikan pengendalian, baik internal perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJPD ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan dan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

#### 4. Mekanisme Perubahan RPJPD

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi dan bencana serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka panjang daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD atau melalui perubahan RPJPD sesuai peraturan yang berlaku.

#### 5. Komunikasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang



disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

#### 6. Transisi Periode RPJPD

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, sebelum berakhirnya periode RPJPD 2025-2045 ini pemerintah Kabupaten Tana Toraja berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya dengan waktu dan format penyusunan sesuai yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan.

  
**BUPATI TANA TORAJA,**  
  
**THEOFILUS ALLORERUNG**





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPELITBANGDA)  
KABUPATEN TANA TORAJA**



**Jl. Pongtiku  
No. 120  
Telp. (0423) 22092  
Fax. (0423) 26076  
Email:**

**[bappedatanatoraja@yahoo.com](mailto:bappedatanatoraja@yahoo.com)**



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

**(RPJPD)**

KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN 2025-2045



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 - 2045



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

**(RPJPD)**

KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN 2025-2045

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 - 2045

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA TAHUN 2024 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN TORAJA TAHUN 2025 - 2045**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA TAHUN 2024 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD)  
KABUPATEN TORAJA TAHUN 2025 - 2045

